2013

PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(B A P P E N A S)

KATA PENGANTAR

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2009. Yang, mencakup enam pokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisik wilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup

Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Uraian dari setiap pembahasan dalam laporan ini tentunya belum menggambarkan perkembangan dari keseluruhan aspek pembangunan, karena keterbatasan ketersediaan data yang tersedia. Namun, dalam penyusunan laporan mendatang diharapkan dapat terus disempurnakan dengan berbagai indikator yang lebih relevan, cakupan informasi yang lebih luas dan mutakhir sejalan dengan kemudahan dalam perolehan data dari berbagai instansi terkait.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan Laporan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2013

Deputi Bidang Pengembangan Regional
dan Otonomi Daerah

Max H. Pohan

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PENANGGUNG JAWAB :

Ir. Arifin Rudiyanto M.Sc, Ph.D

Direktur Pengembangan Wilayah

TIM PENYUSUN :

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, Awan Setiawan, SE, MM, ME
Yudianto, ST. MT, MPP, Rudi Alfian, SE ,
Supriyadi, S.Si, MTP, Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, Fidelia Silvana, SP. MIEF,
M. Agung Widodo, SP, MIDEC, Ika Retna Wulandary, ST. MSc, Bimo Fahrizal Arvianto, S.Si

TIM AHLI:

Bambang Waluyanto; Nana Mulyana; Aziz Faizal Fachrudin;
Setya Rusdianto; Tri Supriyana; Iskandar Zulkarnaen

TIM PENDUKUNG:

Anna Astuti, SE, Eni Arni, Sapto Mulyono,
Donny Yanuar, Cecep Supriyadi, Ika Nurlaila Soffa, Slamet Supriyanto.

Komentar, saran dan kritik dapat disampaikan ke:

Direktorat Pengembangan Wilayah
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310
Telp/Fax. (021) 3193 4195
e-mail: dit.pw@bappenas.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**

Tim Penyusun **ii**

Daftar Isi **iii**

Daftar Tabel **v**

Daftar Gambar **xxi**

BAB 1. PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA **1-1**
1.1. ADMINISTRASI WILAYAH 1-2
1.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 1-2
1.3. PEREKONOMIAN DAERAH 1-13
1.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 1-23
1.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1-28

BAB 2. PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA BALI **2-1**
2.1. ADMINISTRASI WILAYAH 2-1
2.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 2-2
2.3. PEREKONOMIAN DAERAH 2-13
2.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 2-24
2.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 2-29

BAB 3. PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA **3-1**
3.1. ADMINISTRASI WILAYAH 3-1
3.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 3-1
3.3. PEREKONOMIAN DAERAH 3-9
3.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 3-18
3.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 3-21

BAB 4. PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN **4-1**
4.1. ADMINISTRASI WILAYAH 4-1
4.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 4-1
4.3. PEREKONOMIAN DAERAH 4-11
4.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 4-20
4.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 4-25

BAB 5. PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI **5-1**
5.1. ADMINISTRASI WILAYAH 5-1
5.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 5-2
5.3. PEREKONOMIAN DAERAH 5-12
5.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 5-22
5.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 5-26

DAFTAR ISI

BAB 6. PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU **6-1**
6.1. ADMINISTRASI WILAYAH 6-1
6.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 6-1
6.3. PEREKONOMIAN DAERAH 6-9
6.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 6-18
6.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 6-23

BAB 7. PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA **7-1**
7.1. ADMINISTRASI WILAYAH 7-1
7.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 7-1
7.3. PEREKONOMIAN DAERAH 7-9
7.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 7-18
7.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 7-22

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1.	Administrasi Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010	1-1
Tabel 1-2.	Luas Administrasi Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009	1-1
Tabel 1-3.	Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sumatera Menurut Provinsi	1-2
Tabel 1-4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sumatera Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010	1-3
Tabel 1-5.	Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2011	1-4
Tabel 1-6.	Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2011	1-5
Tabel 1-7.	Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011. (dalam persen)	1-5
Tabel 1-8.	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 (Agustus)	1-6
Tabel 1-9.	Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2008 (Agustus) dan 2013 (Februari)	1-6
Tabel 1-10.	Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2012	1-7
Tabel 1-11.	Komposisi Persentase Pengganguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Antarprovinsi, Agustus 2012	1-7
Tabel 1-12.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010	1-8
Tabel 1-13.	Persentase Penolong Kelahiran Balita Terakhir, Tahun 2011	1-9
Tabel 1-14.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012	1-10
Tabel 1-15.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012	1-10
Tabel 1-16.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2008-2013	1-11
Tabel 1-17.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 dan 2013	1-11
Tabel 1-18.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012	1-11
Tabel 1-19.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011	1-12
Tabel 1-20.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000, 2008-2012. (dalam Persen)	1-13
Tabel 1-21.	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011 (dalam Persen)	1-13
Tabel 1-22.	Perkembangan Nilai PDRB berdasarkan ADHB dengan Migas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012. (Rp. Juta)	1-14
Tabel 1-23.	Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Sumatera dan PDRB ADHB Nasional (33 Provinsi) Tahun 2012.	1-14
Tabel 1-24.	Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2012. (dalam persen)	1-15
Tabel 1-25.	Perkembangan PDRB Per Kapita dengan Migas Menurut ADHK Tahun 2000 per Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah)	1-15
Tabel 1-26.	Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku	1-16
Tabel 1-27.	Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011 (dalam persen)	1-16

DAFTAR TABEL

Tabel 1-28. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 1-17
Tabel 1-29. Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012 1-17
Tabel 1-30. Realisasi Investasi PMA (juta US$) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012 1-18
Tabel 1-31. Perkembangan Produksi Padi Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2008 dan 2013 (000 ton) 1-18
Tabel 1-32. Perkembangan Produktivitas Padi Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2013 (kw/ha) 1-19
Tabel 1-33. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2013 (ton) 1-19
Tabel 1-34. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2013 (kw/ha) 1-19
Tabel 1-35 Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013 (ton) 1-20
Tabel 1-36. Produktivitas Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013 (kw/ha) 1-20
Tabel 1-37. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2011 1-21
Tabel 1-38. Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2011 1-21
Tabel 1-39. Perkembangan Ternak Besar di Wilayah Sumatera Tahun 2010-2013 1-22
Tabel 1-40. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013 1-22
Tabel 1-41. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010-2013 1-22
Tabel 1-42. Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013 1-22
Tabel 1-43. Perkembangan Produksdi Perikanan Tangkap di Wilayah Sumatera Tahun 2005-2011 (ton) 1-23
Tabel 1-44. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Wilayah Sumatera Tahun 2005 dan 2010 (ton) 1-23
Tabel 1-45. Perkembangan Panjang Jalan menurut Status Kewenangan di Wilayah Sumatera Tahun 2008 dan 2010 1-24
Tabel 1-46. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi, Tahun 2010 1-25
Tabel 1-47. Kapasitas Terpasang Menurut Jeis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sumatera Tahun 2011 1-26
Tabel 1-48. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 1-26
Tabel 1-49. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaaan Sinyal Telepon Selular 1-27
Tabel 1-50. Sumber Air Bersih untuk kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2010 1-28
Tabel 1-51. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Sumatera 1-29
Tabel 1-52. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005-2011 1-30
Tabel 1-53. Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi oleh Satelit NOAA, Tahun 2008-2011 1-31

Tabel 1-54. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sumatera menurut Provinsi Tahun 2010, (dalam hektar) 1-31
Tabel 1-55. Jumlah DAS berdasarkan Tingkat Prioritas penanganan di Sumatera 1-31

Tabel 2-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010 2-1
Tabel 2-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009 2-1
Tabel 2-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Jawa-Bali Menurut Provinsi 2-2
Tabel 2-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Jawa-Bali Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010 2-2
Tabel 2-5. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2010 2-3
Tabel 2-6. Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2013 2-4
Tabel 2-7. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2013 2-4
Tabel 2-8. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011. (dalam persen) 2-5
Tabel 2-9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 (Agustus) 2-6
Tabel 2-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2008 (Agustus) dan 2013 (Februari) 2-6
Tabel 2-11. Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2012 2-7
Tabel 2-12. Komposisi Persentase Pengganguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Antarprovinsi, Agustus 2012 2-7
Tabel 2-13. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010 2-8
Tabel 2-14. Persentase Penolong Kelahiran Balita Terakhir, Tahun 2011 2-9
Tabel 2-15. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012 2-10
Tabel 2-16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012 2-10
Tabel 2-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2008-2013 2-11
Tabel 2-18. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 dan 2013 2-11
Tabel 2-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Jawa-Bali Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012 2-12
Tabel 2-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2011 2-12
Tabel 2-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000, 2008-2012. (dalam Persen) 2-13
Tabel 2-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011 (dalam Persen) 2-13
Tabel 2-23. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011. (dalam persen) 2-14
Tabel 2-24. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Jawa-Bali dan PDRB ADHB Nasional (33 Provinsi) Tahun 2012. 2-14
Tabel 2-25. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah) 2-15

Tabel 2-26. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2-15
Tabel 2-27. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2011 (dalam persen) 2-16
Tabel 2-28. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 2-16
Tabel 2-29. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2008-2012 2-16
Tabel 2-30. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2008-2012 2-17
Tabel 2-31. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2006-2010, (dalam juta US$) 2-17
Tabel 2-32. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2006-2010, (dalam juta US$) 2-18
Tabel 2-33. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2006-2010, (dalam juta US$) 2-18
Tabel 2-34. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2006-2012 2-18
Tabel 2-35. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 2-19
Tabel 2-36. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2008-2013 (ton) 2-19
Tabel 2-37. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2008-2013 (kw/ha) 2-19
Tabel 2-38 Perbandingan Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013 (ton) 2-20
Tabel 2-39. Perbandingan Produktivitas Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013 (kw/ha) 2-20
Tabel 2-40. Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2005-2011 2-21
Tabel 2-41. Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2005-2011 2-21
Tabel 2-42. Produksi Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 2-21
Tabel 2-43. Luas Areal Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011, (dalam ha) 2-22
Tabel 2-44. Perkembangan Ternak Besar menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010-2013 2-22
Tabel 2-45. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013 2-22
Tabel 2-46. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010-2013 2-23
Tabel 2-47. Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013 2-23
Tabel 2-48. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2005-2011 (ton) 2-23
Tabel 2-49. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 2-24
Tabel 2-50. Perkembangan Panjang Jalan menurut Status Kewenangan di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2008 dan 2010 2-24
Tabel 2-51. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi, Tahun 2010 2-25
Tabel 2-52. Kapasitas Terpasang Menurut Jeis Pembangkit (Mw) di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 2-26

Tabel 2-53. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 2-27
Tabel 2-54. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaaan Sinyal Telepon Selular 2-28
Tabel 2-55. Sumber Air Bersih untuk kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2010 2-28
Tabel 2-56. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Jawa-Bali 2-29
Tabel 2-57. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005-2011 2-30
Tabel 2-58. Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi oleh Satelit NOAA, Tahun 2008-2011 2-31
Tabel 2-59. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Jawa-Bali menurut Provinsi Tahun 2010, (dalam hektar) 2-31
Tabel 2-60. Jumlah DAS berdasarkan Tingkat Prioritas penanganan di Jawa-Bali 2-31

Tabel 3-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010 3-1
Tabel 3-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009 3-1
Tabel 3-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Nusa Tenggara Menurut Provinsi 3-2
Tabel 3-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010 3-2
Tabel 3-5. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010 3-3
Tabel 3-6. Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2010 3-3
Tabel 3-7. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010 3-4
Tabel 3-8. Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011 3-4
Tabel 3-9. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012 3-5
Tabel 3-10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012 3-5
Tabel 3-11. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2013 3-5
Tabel 3-12. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2008 dan 2013 3-6
Tabel 3-13. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2011 3-6
Tabel 3-14. Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2013 3-7
Tabel 3-15. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara, (Februari 2012) 3-7
Tabel 3-16. Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-8
Tabel 3-17. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-8
Tabel 3-18. Perkembangan Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008 dan 2013 (Februari) 3-8

Tabel 3-19. Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-8
Tabel 3-20. Distribusi Persentase Pengganguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-9
Tabel 3-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000, 2008-2012. (dalam Persen) 3-9
Tabel 3-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011 (dalam Persen) 3-10
Tabel 3-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2012 (persen) 3-10
Tabel 3-24. Perkembangan Nilai PDRB dengan Migas ADHB menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008 dan 2011 (Rp. Juta) 3-10
Tabel 3-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Nusa Tenggara dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 3-11
Tabel 3-26. Struktur Ekonomi menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012, (persen) 3-11
Tabel 3-27. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah) 3-11
Tabel 3-28. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 3-12
Tabel 3-29. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2011 (dalam persen) 3-12
Tabel 3-30. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 3-12
Tabel 3-31. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2012 3-13
Tabel 3-32. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2012 3-13
Tabel 3-33. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2010, (dalam persen) 3-14
Tabel 3-34. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2010, (dalam persen) 3-14
Tabel 3-35. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2008-2013 3-15
Tabel 3-36. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2013 3-15
Tabel 3-37. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2013 (ton) 3-15
Tabel 3-38. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2013 (kw/ha) 3-15
Tabel 3-39 Perkembangan Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi Tahun 2013 3-16
Tabel 3-40. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija Menurut Provinsi Tahun 2013 3-16
Tabel 3-41. Perkembangan Produksi (ton) dan Luas Areal (ha) Tanaman Perkebunan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2011 3-16
Tabel 3-42. Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 3-16
Tabel 3-43. Perkembangan Ternak Besar menurut Jenis Ternak di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010-2013 3-17

Tabel 3-44. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2013 3-17
Tabel 3-45. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010-2013 3-17
Tabel 3-46. Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2013 3-17
Tabel 3-47. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2005-2011 (ton) 3-18
Tabel 3-48. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011, (dalam ton) 3-18
Tabel 3-49. Perkembangan Panjang Jalan menurut Status Kewenangan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008 dan 2010 3-18
Tabel 3-50. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi, Tahun 2010 3-19
Tabel 3-51. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 3-20
Tabel 3-52. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 3-20
Tabel 3-53. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaaan Sinyal Telepon Selular 3-21
Tabel 3-54. Sumber Air Bersih untuk kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010 3-22
Tabel 3-55. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Nusa Tenggara 3-23
Tabel 3-56. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008, dan 2011 3-24
Tabel 3-57. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Jawa-Bali menurut Provinsi Tahun 2010, (dalam hektar) 3-24
Tabel 3-58. Jumlah DAS berdasarkan Tingkat Prioritas penanganan di Nusa Tenggara 3-24

Tabel 4-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2010 4-1
Tabel 4-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2009 4-1
Tabel 4-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Kalimantan Menurut Provinsi. 4-2
Tabel 4-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Kalimantan Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010 4-2
Tabel 4-5. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2010. 4-3
Tabel 4-6. Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2008 dan 2013 (Februari) 4-4
Tabel 4-7. Perkembangan Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2008 dan 2013 (Februari) 4-4
Tabel 4-8. Diatribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012). (dalam persen) 4-4
Tabel 4-9. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja menurut Provinsi Lapangan Usaha di Wilayah Kalimantan (Februari 2012), (dalam persen) 4-5
Tabel 4-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008 dan 2013 (Februari) 4-6
Tabel 4-11. Distribusi Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Kalimantan (Februarai 2012) 4-6

Tabel 4-12. Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012), (dalam persen) 4-7
Tabel 4-13. Prevalansi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010 4-8
Tabel 4-14. Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011 4-8
Tabel 4-15. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012 4-9
Tabel 4-16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008 dan 2013 4-9
Tabel 4-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Kalimantan, Tahun 2008-2013 4-10
Tabel 4-18. Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Miskin Tahun 2008-2013 4-10
Tabel 4-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012 4-11
Tabel 4-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011 4-11
Tabel 4-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan ADHK Tahun 2000, Tahun 2008-2012 (Persen) 4-12
Tabel 4-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011 (Persen) 4-12
Tabel 4-23. Perkembangan Nilai PDRB berdasarkan ADHB dengan Migas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008-2012 (Rp. Juta) 4-12
Tabel 4-24. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Kalimantan dan Total 33 Provinsi Tahun 2012 4-13
Tabel 4-25. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 (persen) 4-13
Tabel 4-26. PDRB Per Kapita dengan Migas ADHK Tahun 2000 per Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah) 4-14
Tabel 4-27. Distribusi Persentase PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 4-14
Tabel 4-28. Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011, (persen) 4-14
Tabel 4-29. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 4-15
Tabel 4-30. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008-2012 4-15
Tabel 4-31. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011 4-15
Tabel 4-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2006-2010. (dalam persen) 4-16
Tabel 4-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2006-2010. (dalam persen) 4-16
Tabel 4-34. Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Kalimantan dari tahun 2006-2010 4-16
Tabel 4-35. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2013 4-17
Tabel 4-36. Perkembangan Produksi (ribu ton) Tanaman Padi menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008 dan 2013 4-17

Tabel 4-37. Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008 dan 2013 (ku/ha) 4-17
Tabel 4-38. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2013 4-18
Tabel 4-39. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2013 4-18
Tabel 4-40. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2013, (ton) 4-18
Tabel 4-41. Perkembangan Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Wilayah Kalimantan Tahun 2005-2011, (ton) 4-19
Tabel 4-42. Perkembangan Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 4-19
Tabel 4-43. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Kalimantan Tahun 2010-2013 4-20
Tabel 4-44. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2013 4-20
Tabel 4-45. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Kalimantan Tahun 2010-2013 4-20
Tabel 4-46. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2013 4-20
Tabel 4-47. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Kalimantan Tahun 2005 dan 2011 4-21
Tabel 4-48. Produksi Perikanan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 4-21
Tabel 4-49. Perkembangan Panjang Jalan menurut Status Kewenangan di Wilayah Kalimantan, Tahun 2008-2010 4-22
Tabel 4-50. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi, Tahun 2010 4-23
Tabel 4-51. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 4-24
Tabel 4-52. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 4-24
Tabel 4-53. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Selular 4-25
Tabel 4-54. Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2010 4-26
Tabel 4-55. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Kalimantan 4-27
Tabel 4-56. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan, 2005, 2008, dan 2011 4-28
Tabel 4-57. Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi oleh Satelit NOAA, 2008-2011 4-28
Tabel 4-58. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Kalimantan Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar) 4-28
Tabel 4-59. Perkembangan Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di Kalimantan 4-29

Tabel 5-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010 5-1
Tabel 5-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2009 5-1
Tabel 5-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sulawesi Menurut Provinsi. 5-2
Tabel 5-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sulawesi Menurut Kelompok

	Usia, Tahun 2010	5-3
Tabel 5-5.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2010	5-3
Tabel 5-6.	Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2008 dan 2013 (Februari)	5-4
Tabel 5-7.	Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2008 dan 2013 (Februari)	5-5
Tabel 5-8.	Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012)	5-5
Tabel 5-9.	Distribusi Persentase Penduduk Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha di Wilayah Sulawesi (Februari 2012)	5-5
Tabel 5-10.	Perkembangan Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008 dan 2013 (Februari)	5-6
Tabel 5-11.	Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012)	5-6
Tabel 5-12.	Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Wilayah Sulawesi (Februari 2012)	5-6
Tabel 5-13.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010	5-7
Tabel 5-14.	Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011	5-8
Tabel 5-15.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012	5-9
Tabel 5-16.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008 dan 2012	5-9
Tabel 5-17.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2008-2013	5-10
Tabel 5-18.	Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	5-10
Tabel 5-19.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012	5-11
Tabel 5-20.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010	5-11
Tabel 5-21.	Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas ADHK Tahun 2000, di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012 (Persen)	5-12
Tabel 5-22.	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010 (Persen)	5-12
Tabel 5-23.	Perkembangan Nilai PDRB menurut ADHB per Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012 (dalam juta rupiah)	5-13
Tabel 5-24.	Kontribusi Provinsi Terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Sulawesi dan PDRB ADHB Nasional (33 Provinsi) Tahun 2012	5-13
Tabel 5-25.	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sulawesi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011, (dalam persen)	5-14
Tabel 5-26.	PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah)	5-14
Tabel 5-27.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (dalam persen)	5-15
Tabel 5-28.	Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (dalam persen)	5-15
Tabel 5-29.	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran per Provinsi Tahun 2011, (dalam persen)	5-15

Tabel 5-30. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012 5-16
Tabel 5-31. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010 5-16
Tabel 5-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010. (dalam persen) 5-17
Tabel 5-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010. (dalam persen) 5-17
Tabel 5-34. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2013 5-17
Tabel 5-35. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Sulawesi Tahun 2013 5-18
Tabel 5-36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2013 5-18
Tabel 5-37. Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2013, (ku/ha) 5-18
Tabel 5-38. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2013, (ton) 5-18
Tabel 5-39. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Sulawesi Tahun 2013, (ku/ha) 5-19
Tabel 5-40. Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2011 5-19
Tabel 5-41. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (ton) 5-19
Tabel 5-42. Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (Ha) 5-19
Tabel 5-43. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Sulawesi Tahun 2010-2013 (ekor) 5-20
Tabel 5-44. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2009 5-20
Tabel 5-45. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2013 5-20
Tabel 5-46. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010-2013 (ekor) 5-21
Tabel 5-47. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Sulawesi Tahun 2005 dan 2011, (dalam ton) 5-21
Tabel 5-48. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (dalam ton) 5-21
Tabel 5-49. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Sulawesi 5-22
Tabel 5-50. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi, Tahun 2010 5-23
Tabel 5-51. Kapasitas Terpasang menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 5-24
Tabel 5-52. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2009 dan 2011 5-24
Tabel 5-53. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Selular 5-25
Tabel 5-54. Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010 5-26
Tabel 5-55. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Sulawesi. 5-27

Tabel 5-56.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008, dan 2011	5-28
Tabel 5-57.	Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sulawesi menurut Provinsi Tahun 2010, (dalam hektar)	5-28
Tabel 5-58.	Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penanganannya di Sulawesi	5-28
Tabel 6-1.	Administrasi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2010	6-1
Tabel 6-2.	Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2009	6-1
Tabel 6-3.	Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Maluku Menurut Provinsi	6-2
Tabel 6-4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Maluku Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010	6-2
Tabel 6-5.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2010	6-2
Tabel 6-6.	Perkembangan Angkatan Kerja menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2008 dan 2013 (Februari)	6-3
Tabel 6-7.	Perkembangan Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2008 dan 2013 (Februari)	6-4
Tabel 6-8.	Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Maluku (Februari 2012)	6-4
Tabel 6-9.	Distribusi Persentase Penduduk Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha di Wilayah Maluku, (Februari 2012)	6-4
Tabel 6-10.	Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008 dan 2013 (Februari)	6-4
Tabel 6-11.	Distribusi Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Maluku (Februari 2012)	6-5
Tabel 6-12.	Distribusi Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Maluku (Februari 2012)	6-5
Tabel 6-13.	Prevalansi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010	6-6
Tabel 6.14.	Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011	6-7
Tabel 6-15.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012	6-7
Tabel 6-16.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012	6-7
Tabel 6-17.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2008-2013	6-8
Tabel 6-18.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008 dan 2013	6-8
Tabel 6-19	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012	6-9
Tabel 6-20.	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2007-2011	6-9
Tabel 6-21.	Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas ADHK 2000 per Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012 (Persen)	6-10
Tabel 6-22.	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011 (Persen)	6-10
Tabel 6-23.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2011 (Persen)	6-10

Tabel 6-24. Perkembangan Nilai PDRB berdasarkan ADHB menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012, (Rp. Juta) 6-11
Tabel 6-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Maluku dan Nasional Tahun 2012, (dalam persen) 6-11

Tabel 6-26. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2012, (dalam persen) 6-11
Tabel 6-27. PDRB Per Kapita dengan Migas ADHK Tahun 2000 per Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah) 6-12
Tabel 6-28. Distribusi Persentase PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Maluku Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 6-12
Tabel 6-29. Pertumbuhan PDRB menurut Panggunaan Wilayah Maluku Tahun 2007-2011, (persen) 6-12
Tabel 6-30. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Maluku Tahun 2011, (dalam persen) 6-13
Tabel 6-31. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012 6-13
Tabel 6-32. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012 6-13
Tabel 6-33. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2006-2010. (dalam persen) 6-14
Tabel 6-34. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2006-2010. (dalam persen) 6-14
Tabel 6-35. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2013 6-15
Tabel 6-36. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Maluku Tahun 2013 6-15
Tabel 6-37. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Maluku Tahun 2008-2013, (dalam ton) 6-15
Tabel 6-38. Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan di Wilayah Maluku Tahun 2008-2013 (kw/ha) 6-15
Tabel 6-39. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013, (dalam ton) 6-16
Tabel 6-40. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013, (dalam kw/ha) 6-16
Tabel 6-41. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Wilayah Maluku Tahun 2007-2011, (ton) 6-16
Tabel 6-42. Perkembangan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Wilayah Maluku Tahun 2007-2011, (ha) 6-16
Tabel 6-43. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2010-2013 6-17
Tabel 6-44. Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2013 6-17
Tabel 6-45. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2010-2013 6-17
Tabel 6-46. Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013 6-17
Tabel 6-47. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Maluku Tahun 2005 dan 2011, (dalam ton) 6-18
Tabel 6-48. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011, (dalam ton) 6-18

Tabel 6-49. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Maluku 6-19
Tabel 6-50. Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 6-20
Tabel 6-51. Kapasitas Terpasang menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Maluku Tahun 2011 6-20
Tabel 6-52. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 6-20
Tabel 6-53. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Selular 6-21
Tabel 6-54. Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2010 6-22
Tabel 6-55. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Maluku 6-23
Tabel 6-56. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan, 2005, 2008, dan 2011 6-23
Tabel 6-57. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Maluku Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar) 6-24
Tabel 6-58. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penangannya di Maluku 6-24

Tabel 7-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010 7-1
Tabel 7-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2009 7-1
Tabel 7-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilaya Papua Menurut Provinsi 7-2
Tabel 7-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Papua Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010 7-2
Tabel 7-5. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2010 7-2
Tabel 7-6. Perkembangan Angkatan Kerja menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2008 dan 2013 (Februari) 7-3
Tabel 7-7. Perkembangan Penduduk Bekerja menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2008 dan 2013 (Februari) 7-3
Tabel 7-8. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012. (dalam persen) 7-4
Tabel 7-9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 7-4
Tabel 7-10. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2013 (Februari) 7-5
Tabel 7-11. Distribusi Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2013 7-5
Tabel 7-12. Komposisi Persentase Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Antarprovinsi, Februari 2012 7-5
Tabel 7-13. Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2010 7-5
Tabel 7-14. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010 7-6
Tabel 7-15. Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011 7-6
Tabel 7-16. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012 7-7
Tabel 7-17. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012 7-7

Tabel 7-18. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Papua, Tahun 2008-2013 7-8
Tabel 7-19. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008-2013 7-8
Tabel 7-20. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012 7-8
Tabel 7-21. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2011 7-9
Tabel 7-22. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2012 (Persen) 7-9
Tabel 7-23. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011 (Persen) 7-10
Tabel 7-24. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2011 (Persen) 7-10
Tabel 7-25. Perkembangan Nilai PDRB dengan Migas ADHB per Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012, (juta rupiah) 7-10
Tabel 7-26. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayh Papua dan Nasional Tahun 2012, (dalam persen) 7-11
Tabel 7-27. Struktur Ekonomi PDRB ADHB dengan Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2012, (persen) 7-11
Tabel 7-28. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah) 7-11
Tabel 7-29. Distribusi Persentase PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 7-12
Tabel 7-30. Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan Wilayah Papua Tahun 2007-2011, (persen) 7-12
Tabel 7-31. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 7-12
Tabel 7-32. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012 7-13
Tabel 7-33. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012 7-13
Tabel 7-34. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010. 7-13
Tabel 7-35. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010 7-14
Tabel 7-36. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010 7-14
Tabel 7-37. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Papua Tahun 2008-2013 7-14
Tabel 7-38. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013 7-14
Tabel 7-39. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Papua Tahun 2008-2013 (ton) 7-15
Tabel 7-40. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013 (ton) 7-15
Tabel 7-41. Perkembangan Produksi Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013 (ton) 7-15
Tabel 7-42. Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013, (ku/ha) 7-15

Tabel 7-43.	Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011	7-16
Tabel 7-44.	Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Papua Tahun 2010-2013	7-16
Tabel 7-45.	Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010-2013	7-16
Tabel 7-46.	Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Papua Tahun 2010-2013	7-17
Tabel 7-47.	Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013	7-17
Tabel 7-48.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Papua Tahun 2005 dan 2011, (dalam ton)	7-17
Tabel 7-49.	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011, (dalam ton)	7-18
Tabel 7-50.	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Papua	7-18
Tabel 7-51.	Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010	7-19
Tabel 7-52.	Kapasitas Terpasang menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Papua Tahun 2011	7-20
Tabel 7-53.	Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita	7-20
Tabel 7-54.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Selular	7-21
Tabel 7-55.	Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010	7-21
Tabel 7-56.	Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Papua.	7-22
Tabel 7-57.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan, 2005, 2008, dan 2011	7-23
Tabel 7-58.	Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Papua Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)	7-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1: Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2010 1-3
Gambar 1-2: Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2010 1-3
Gambar 1-3: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sumatera Periode 2005-2011 1-4
Gambar 1-4: Distribusi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Di Wilayah Sumatera, Tahun 2011 1-5
Gambar 1-5: Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi (Februari 2010) 1-6
Gambar 1-6: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha, Tahun2011 1-7
Gambar 1-7: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Sumatera Periode 2005-2011 1-8
Gambar 1-8: Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Sumatera, Tahun 2011 1-10
Gambar 1-9: Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Antarprovinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2007 (per 1.000 kelahiran hidup) 1-11
Gambar 1-10: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah SumateraTahun 2007-2010 1-12
Gambar 1-11: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 1-13
Gambar 1-12: Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 (dalam persen) 1-14
Gambar 1-13: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sumatera Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 (persen) 1-18
Gambar 1-14: Komposisi Persentase daerah irigasi menurut kewenangan 1-29
Gambar 1-15: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Sumatera 1-30
Gambar 1-16: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Roas Density) Antar Proviinsi Di Wilayah Sumatera 1-31
Gambar 1-17: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Sumatera (Ribu Km) 1-32
Gambar 1-18: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 1-33

Gambar 2-1: Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010 2-3
Gambar 2-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Jawa Bali Periode 2005-2011 2-4
Gambar 2-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Jawa Bali Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 2-6
Gambar 2-4: Perkembangan Pengangguran Terbuka di Wilayah Jawa Bali Periode 2005-2011 2-7
Gambar 2-5: Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Antarprovinsi Di Wilayah Jawa Bali Tahun 2007 (per 1.000 kelahiran hidup) 2-9
Gambar 2-6: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2010 2-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-7: Persentase Status Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 2-10
Gambar 2-8: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Nasional Tahun 2005-2010 2-11
Gambar 2-9: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 2-12
Gambar 2-10: Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 (dalam persen) 2-12
Gambar 2-11: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Jawa Bali, periode 2006-2011 2-14
Gambar 2-12: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 (persen) 2-17
Gambar 2-13: Komposisi Persentase daerah irigasi menurut kewenangan 2-28
Gambar 2-14: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Jawa Bali 2-29
Gambar 2-15: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Roas Density*) Antar Proviinsi Di Wilayah Jawa Bali 2-30
Gambar 2-16: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Jawa Bali 2-31
Gambar 2-17: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Jawa-Bali Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 2-32

Gambar 3.1: Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010 3-2
Gambar 3.2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2005-2011 3-3
Gambar 3-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 3-5
Gambar 3-4: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2005-2011 3-6
Gambar 3-5: Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Antarprovinsi Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007 (per 1.000 kelahiran hidup) 3-8
Gambar 3-6: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2010 3-8
Gambar 3-7: Persentase Status Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 3-9
Gambar 3-8: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Nasional Tahun 2005-2010 3-10
Gambar 3-9: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 3-10
Gambar 3-10: Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 (dalam persen) 3-11
Gambar 3.11: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Nusa Tenggara, periode 2006-2011 3-12
Gambar 3-12: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Nusa Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 (persen) 3-15
Gambar 3-13: Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2006-2010 (juta US$) 3-18
Gambar 3-14: Komposisi Persentase Daerah Irigasi menurut kewenangan 3-24

Gambar 3-15: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Nusa Tenggara (Km) 3-24
Gambar 3-16: Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Roas Density*) AntarProviinsi Di Wilayah Nusa Tenggara 3-25
Gambar 3-17: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Nusa Tenggara 3-26
Gambar 3-18: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Nusa Tenggara Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 3-27

Gambar 4-1: Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2010 4-2
Gambar 4-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Kalimantan Periode 2005-2011 4-3
Gambar 4-3: Distribusi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Di Wilayah Kalimantan, Tahun 2011 4-4
Gambar 4-4: Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi (Februari 2011) 4-5
Gambar 4-5: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Kalimantan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 4-6
Gambar 4-6: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Kalimantan Periode 2005-2011 4-7
Gambar 4-7: Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan, Tahun 2011 4-8
Gambar 4-8: Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Antarprovinsi Di Wilayah Kalimantan Tahun 2007 (per 1.000 kelahiran hidup) 4-10
Gambar 4-9: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2010 4-10
Gambar 4-10: Persentase Status Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 4-11
Gambar 4-11: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Nasional Tahun 2005-2010 4-12
Gambar 4-12: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 4-13
Gambar 4-13: Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 (dalam persen) 4-13
Gambar 4-14: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan, periode 2006-2011 4-15
Gambar 4-15: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Kalimantan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 (persen) 4-18
Gambar 4-16: Komposisi Persentase Daerah Irigasi menurut kewenangan 4-29
Gambar 4-17: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Kalimantan 4-30
Gambar 4-18: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Roas Density*) AntarProvinsi Di Wilayah Kalimantan 4-31
Gambar 4-19: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Kalimantan (Km) 4-32
Gambar 4-21: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Kalimantan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 4-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5-1: Perkembangan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2000 dan 2010 5-3
Gambar 5-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sulawesi Periode 2005-2011 5-4
Gambar 5-3: Distribusi Angkatan Kerja Menurut Provinsi Di Wilayah Sulawesi, Tahun 2011 5-5
Gambar 5-4: Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi Tahun 2011 5-6
Gambar 5-5: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Sulawesi Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 5-7
Gambar 5-6: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Sulawesi Periode 2005-2011 5-8
Gambar 5-7: Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Sulawesi, Tahun 2011 5-9
Gambar 5-8: Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Antarprovinsi Di Wilayah Sulawesi Tahun 2007 5-10
Gambar 5-9: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2010 5-11
Gambar 5-10: Persentase Status Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 5-11
Gambar 5-11: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Nasional Tahun 2005-2010 5-12
Gambar 5-12: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 5-13
Gambar 5-13: Perbandingan Angka MelekHuruf (AMH) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 (dalam persen) 5-13
Gambar 5-14: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi, periode 2006-2011 5-14
Gambar 5-15: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sulawesi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 (persen) 5-18
Gambar 5-16: Komposisi Persentase Daerah Irigasi menurut kewenangan 5-28
Gambar 5-17: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Sulawesi (Km) 5-29
Gambar 5-18: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Roas Density*) AntarProviinsi Di Wilayah Sulawesi 5-30
Gambar 5-19: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Sulawesi 5-31
Gambar 5-20: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 5-32

Gambar 6-1: Perkembangan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2000 dan 2010 6-3
Gambar 6-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Maluku Periode 2005-2011 6-4
Gambar 6-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Maluku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 6-6
Gambar 6-4: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Maluku Periode 2005-2011 6-7
Gambar 6-5: Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Antarprovinsi Di Wilayah Maluku Tahun 2007 (per 1.000 kelahiran hidup) 6-8
Gambar 6-6: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2007-2010 6-9

Gambar 6-7: Persentase Status Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 6-9
Gambar 6-8: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Nasional Tahun 2005-2010 6-10
Gambar 6-9: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Tahun 2006dan 2010 6-11
Gambar 6-10: Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 (dalampersen) 6-11
Gambar 6-11: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku, periode 2006-2011 6-12
Gambar 6-12: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Maluku Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 (persen) 6-15
Gambar 6-13: Komposisi Persentase daerah irigasi menurut kewenangan 6-25
Gambar 6-14: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Maluku (Km) 6-25
Gambar 6-15: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) Antar Provinsi Di Wilayah Maluku 6-26
Gambar 6-16: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Maluku 6-27
Gambar 6-17: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Maluku Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 6-28

Gambar 7-1: Perkembangan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Papua, Tahun 2000 dan 2010 7-3
Gambar 7-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Papua Periode 2005-2011 7-4
Gambar 7-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Papua Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 7-6
Gambar 7-4: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Papua Periode 2005-2011 7-7
Gambar 7-5: Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) Antarprovinsi Di Wilayah Papua Tahun 2007 (per 1.000 kelahiran hidup) 7-8
Gambar 7-6: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2010 7-9
Gambar 7-7: Persentase Status Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 7-9
Gambar 7-8: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Nasional Tahun 2005-2010 7-10
Gambar 7-9: Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi Tahun 2006 dan 2010 7-11
Gambar 7-10: Perbandingan Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Provinsi Tahun 2006dan 2010 (dalam persen) 7-11
Gambar 7-11: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua, periode 2006-2011 7-12
Gambar 7-12: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Papua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 (persen) 7-16
Gambar 7-13: Komposisi Persentase daerah irigasi menurut kewenangan 7-26
Gambar 7-14: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Papua 7-26
Gambar 7-15: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Road Density*) Antar Proviinsi Di Wilayah Papua 7-27

Gambar 7-16: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Papua 7-28
Gambar 7-17: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Papua Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 7-29

1.1. ADMINISTRASI WILAYAH

- Wilayah Sumatera secara administrasi terdiri dari 10 provinsi, 34 kota, 117 kabupaten, 1.774 kecamatan dan 20.944 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan sekitar 480.802 Km^2.
- Wilayah Sumatera memiliki jumlah pulau sekitar 5.277 yang terdiri dari 2.654 pulau yang sudah bernama dan 2.623 pulau yang belum bernama.
- Penyebaran pulau terbanyak terdapat di Provinsi Kep. Riau sebanyak 2.408 pulau yang terdiri dari 1.436 pulau sudah bernama dan 972 pulau belum bernama, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 950 pulau terdiri dari 311 pulau sudah bernama dan 639 pulau belum bernama.

Tabel 1-1:

Administrasi Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010

PROVINSI	LUAS WILAYAH (KM^2)	KOTA	KAB.	KEC.	KEL.	DESA	LUAS WILAYAH (KM^2)
Aceh	57.965	5	18	275	112	6.308	57.965
Sumatera Utara	72.981	8	25	408	661	4.988	72.981
Sumatera Barat	42.013	7	12	169	286	678	42.013
R i a u	87.024	2	10	153	196	1.304	87.024
J a m b i	50.058	2	9	128	151	1.168	50.058
Sumatera Selatan	91.592	4	11	217	350	2.519	91.592
Bengkulu	19.919	1	9	116	148	1.294	19.919
Lampung	34.624	2	12	206	174	2.184	34.624
Kep. Bangka Belitung	16.424	1	6	43	61	300	16.424
Kep. Riau	8.202	2	5	59	130	201	8.202
SUMATERA	**480.802**	**34**	**117**	**1.774**	**2.269**	**20.944**	**480.802**

Sumber: Ditjen Pum Kemendagri (Mei 2010)

Tabel 1-2:

Luas Administrasi Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

PROVINSI	PULAU BERNAMA	PULAU BELUM BERNAMA	JUMLAH
Aceh	205	458	663
Sumatera Utara	250	169	419
Sumatera Barat	210	181	391
Riau	73	66	139
Kep. Riau	1.436	972	2.408
Jambi	16	3	19
Sumatera Selatan	43	10	53
Kep. Bangka Belitung	311	639	950
Bengkulu	23	24	47
Lampung	87	101	188
SUMATERA	**2.654**	**2.623**	**5.277**
INDONESIA	**8.651**	**8.853**	**17.504**

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

1.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan. Kondisi umum kependudukan di Wilayah Sumatera digambarakan berdasarkan angka jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, penduduk menurut jenis kelamin *(sex ratio),* angka ketergantungan *(dependency ratio),* dan komposisi penduduk menurut usia.

- Penduduk wilayah Sumatera tahun 2010 berjumlah 50,63 juta orang atau 21,3 persen dari penduduk Indonesia dan tertinggi kedua setelah Wilayah Jawa Bali.
- Tingkat kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 105 jiwa per km^2,dengan kepadatan tertinggi di Provinsi Kep. Riau mencapai 205 jiwa per km^2, dan terrendah Provinsi Jambi sebesar 62 jiwa per km^2.
- Laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sumatera dalam periode 2000-2010 mencapai 1,8 persen/tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional 1,5 persen/tahun, dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kep. Riau sebesar 4,95 persen/tahun dan terrendah Sumatera Utara dan Lampung.
- Hampir 65 persen penduduk tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun), dan memiliki rasio ketergantungan *(dependency ratio)* sebesar 55 persen lebih tinggi dari nasional (51,3 persen).
- Penduduk laki-laki dan perempuan (s*ex ratio)* sebagian besar provinsi di Wilayah Sumatera memiliki jumlah laki-laki yang lebih banyak dari perempuan. Di Kepulauan Kep. Bangka Belitung, untuk setiap 100 perempuan terdapat 108 laki-laki. Sebaliknya di Sumatera Barat hanya terdapat 98 laki-laki untuk 100 orang perempuan.

Tabel 1-3:
Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sumatera Menurut Provinsi**.**

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		KEPADATAN PENDUDUK PER KM^2		LAJU PERTUMBUHAN (%)	
	2000	2010	2000	2010	90-00	00-10
Aceh	3.929,2	4.494,4	68	78	1,46	2,36
Sumatera utara	11.642,5	12.982,2	160	178	1,32	1,10
Sumatera Barat	4.248,5	4.846,9	101	115	0,62	1,34
Riau	3.907,8	5.538,4	45	64	4,27	3,58
Jambi	2.407,2	3.092,3	48	62	1,83	2,56
Sumatera Selatan	6.210,8	7.450,4	68	81	1,24	1,85
Bengkulu	1.455,5	1.715,5	73	86	2,2	1,67
Lampung	6.730,7	7.608,4	194	220	1,17	1,24
Kep. Bangka Belitung	900,0	1.223,3	55	74		3,14
Kep. Riau	1.040,2	1.679,2	127	205		4,95
P. SUMATERA	**42.472,4**	**50.631,0**	**88,0**	**105,0**	**1,6**	**1,8**
NASIONAL	**205.132,5**	**237.641,3**	**107,0**	**124,0**	**1,4**	**1,5**

Sumber Data : BPS, Sensus Penduduk

Tabel1-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sumatera Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA	JUMLAH	%
Usia Muda (< 14 tahun)	15.950.793	31,50
Usia Produktif (15-64 tahun)	32.651.956	64,49
Usia Tua (>65 tahun)	2.028.182	4,01
TOTAL PENDUDUK	**50.630.931**	**100,00**
DEPENDENCY RATIO		**55**

Sumber: Sensus Penduduk 2010,BPS

Gambar 1-1:

Angka Ketergantungan *(Dependency Ratio)* Antarprovinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2010.

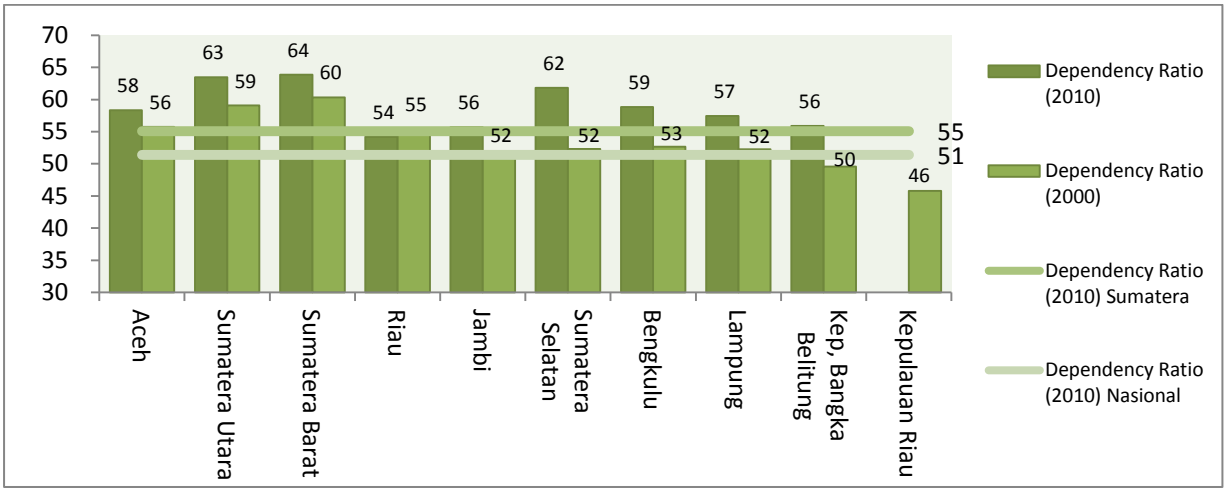

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS

Gambar1-2:

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Antar Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2010.

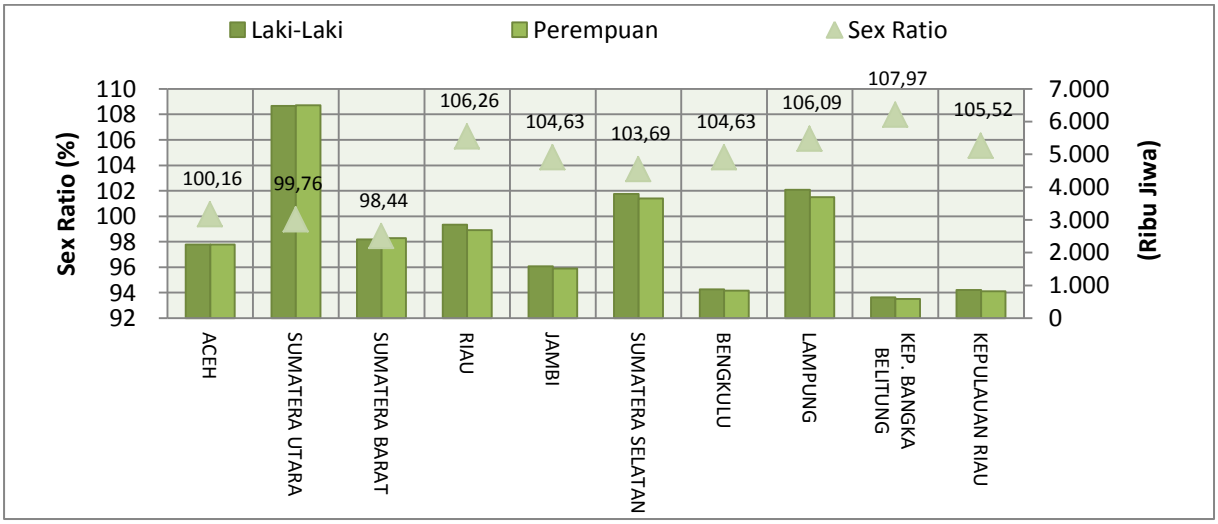

Sumber: Sensus Penduduk 2010,BPS

Ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Sumatera secara umum ditunjukan dengan perkembangan indicator utama, yaitu: jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur angkatan kerja menurut lapangan usaha dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2013 mencapai 5,42 persen, lebih rendah dibanding dengan TPT nasional sebesar 5,92 persen, dengan TPT tertinggi di Provinsi Aceh dan terrendah di Bengkulu.
- Perkembangan TPT provinsi di Wilayah Sumatera selama periode 2008-2013 rata-rata menurun, Pengurangan TPT terbesar di Provinsi Riau sebesar 4,07 persen.
- Rata-rata pendidikan TPT sebagian besar tamatan SD, SMTP dan SMTA Umum/Kejuruan sekitar 75 persen.
- Dalam periode 2008-2013 jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 11.468 orang, dengan jumlah penduduk bekerja pada Februari 2013 sebebanyak 114.021 orang. Penduduk bekerja terbesar terdapat di Sumatera Utara dan terrendah di Kep. Bangka Belitung.
- Pendidikan penduduk bekerja sekitar 65 persen merupakan tamatan SD dan SMTP, sementara tamatan SMTA dan Sarjana (Diploma dan S1) sekitar 35 persen.
- Rata-rata penduduk bekerja di Wilayah Sumatera bekerja pada sektor pertanian sebesar 45,88 persen, dan sektor perdagangan sebesar 18,44 persen.

Gambar 1-3:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sumatera Periode 2008-2013

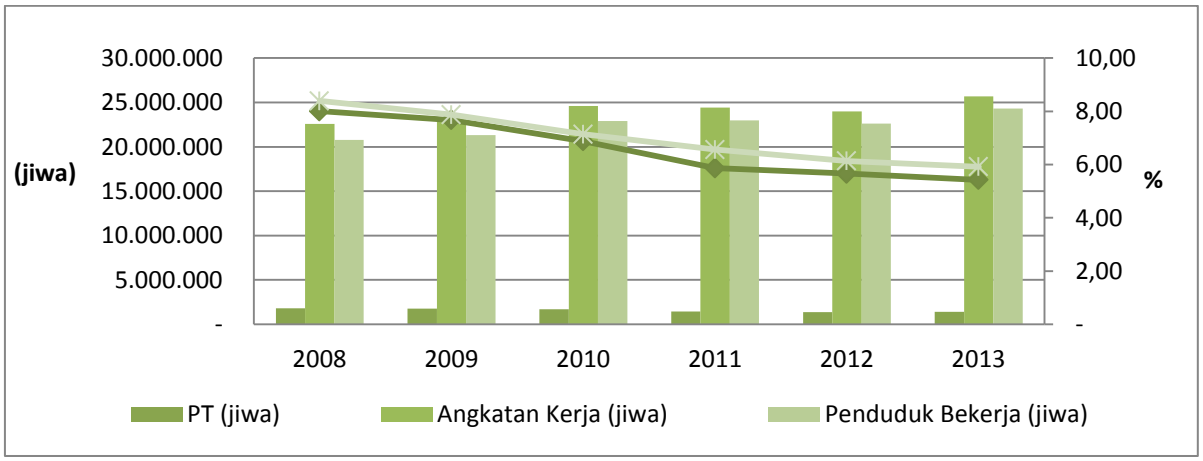

Sumber: Sakernas, Februari 2012, BPS 2013

Tabel 1-5:

Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2013.

PROVINSI	2008	2013	Δ 2008-2013	Share Pulau	Share Nasional
	Agust	(Feb)			
Aceh	1.793,41	2.121,52	328,11	8,26	1,80
Sumatera Utara	6.094,80	6.451,98	357,18	25,12	5,47
Sumatera Barat	2.127,51	2.390,62	263,11	9,31	2,03
R i a u	2.239,39	2.815,86	576,48	10,96	2,39
J a m b i	1.290,85	949,09	(341,77)	3,70	0,80
Sumatera Selatan	3.472,01	1.582,18	(1.889,83)	6,16	1,34
Bengkulu	810,36	3.904,98	3.094,62	15,20	3,31
Lampung	3.568,77	663,14	(2.905,63)	2,58	0,56
Kep. Bangka Belitung	524,37	920,20	395,83	3,58	0,78
Kep. Riau	666,00	3.885,65	3.219,65	15,13	3,29
P. SUMATERA	**22.587,48**	**25.685,22**	**3.097,74**	**100,00**	**21,76**
INDONESIA	**111.947,27**	**121.191,71**	**9.244,45**		

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 1-6:

Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2008 dan 2013.

PROVINSI	2008	2013	Δ 2008-2013	Share Pulau	Share Nasional
	Agustus	(Feb)			
Aceh	1.622	1.944	321,69	8,00	1,70
Sumatera Utara	5.540	6.064	523,85	24,96	5,32
Sumatera Barat	1.956	2.239	282,99	9,22	1,96
R i a u	2.056	2.699	643,59	11,11	2,37
J a m b i	1.224	1.536	311,75	6,32	1,35
Sumatera Selatan	3.191	3.691	499,25	15,19	3,24
Bengkulu	771	901	130,01	3,71	0,79
Lampung	3.314	3.688	374,40	15,18	3,23
Kep. Bangka Belitung	493	641	148,34	2,64	0,56
Kep. Riau	613	888	275,75	3,66	0,78
P. SUMATERA	**20.780**	**24.292**	**3.512**	**100,00**	**21,30**
INDONESIA	**102.553**	**114.021**	**11.468,44**		**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 1-7:

Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012 (Agustus). (dalam persen)

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/ Akademi	Universitas	
Aceh	35,98	26,64	25,42	3,50	3,42	5,04	100,00
Sumatera Utara	35,89	27,27	20,97	9,30	2,15	4,42	100,00
Sumatera Barat	40,99	23,76	18,75	8,40	2,71	5,40	100,00
Riau	39,80	24,52	20,84	7,61	2,64	4,60	100,00
Jambi	47,21	22,97	16,98	5,50	2,62	4,72	100,00
Sumatera Selatan	47,88	22,10	17,65	5,49	2,23	4,65	100,00
Bengkulu	41,53	24,40	19,55	6,79	2,10	5,63	100,00
Lampung	47,10	25,68	15,03	6,63	2,00	3,56	100,00
Kep. Bangka Belitung	51,85	18,22	14,78	9,40	2,68	3,07	100,00
Kep. Riau	28,52	22,05	25,02	15,50	3,78	5,12	100,00
P. SUMATERA	**41,35**	**24,77**	**19,43**	**7,44**	**2,46**	**4,54**	**100,00**
NASIONAL	**47,21**	**22,18**	**15,90**	**7,78**	**2,23**	**4,70**	**100,00**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker.

Tabel 1-8:
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 (Agustus).

PROVINSI	Lapangan Usaha *)									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Aceh	46,86	0,79	4,11	0,18	7,27	15,70	4,05	1,38	19,67	100,00
Sumatera Utara	43,40	0,71	7,68	0,32	6,33	19,42	4,80	1,79	15,56	100,00
Sumatera Barat	40,60	1,57	7,81	0,24	5,56	21,19	4,98	2,05	16,00	100,00
Riau	44,73	1,86	6,10	0,34	5,11	20,54	4,05	2,95	14,33	100,00
Jambi	55,04	1,96	3,32	0,20	4,37	16,15	3,15	1,59	14,23	100,00
Sumatera Selatan	56,37	1,38	5,58	0,19	4,01	14,39	3,43	2,03	12,63	100,00
Bengkulu	52,62	0,90	4,08	0,20	4,91	17,19	2,89	1,46	15,75	100,00
Lampung	48,31	0,81	9,55	0,15	5,51	18,13	3,57	0,98	13,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	28,57	22,15	6,17	0,32	5,36	19,87	2,36	1,83	13,37	100,00
Kep. Riau	11,93	2,12	23,55	0,39	7,52	27,42	7,21	3,45	16,42	100,00
P. SUMATERA	**45,88**	**1,73**	**7,33**	**0,25**	**5,56**	**18,44**	**4,13**	**1,85**	**14,84**	**100,00**
NASIONAL	**35,09**	**1,44**	**13,87**	**0,22**	**6,13**	**20,90**	**4,51**	**2,40**	**15,43**	**100,00**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker

Keterangan:

1. Pertanian,
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Tabel 1-9:
Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2008 (Agustus) dan 2013 (Februari).

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	PT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
Aceh	9,56	8,38	1,18	171.412	177.800	(6.388)
Sumatera Utara	9,10	6,01	3,09	554.539	387.900	166.639
Sumatera Barat	8,04	6,33	1,71	171.134	151.300	19.834
Riau	8,20	4,13	4,07	183.522	116.400	67.122
Jambi	5,14	2,90	2,24	66.371	45.900	20.471
Sumatera Selatan	8,08	5,49	2,59	280.657	214.400	66.257
Bengkulu	4,90	2,12	2,78	39.719	19.500	20.219
Lampung	7,15	5,09	2,06	255.217	197.700	57.517
Kep. Bangka Belitung	5,99	3,30	2,69	31.421	21.900	9.521
Kep. Riau	8,01	6,39	1,62	53.333	60.700	(7.367)
P. SUMATERA	**8,00**	**5,42**	**2,58**	**809.333**	**395.513**	**413.820**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Februari 2013 diolah Pusdatinaker

Tabel 1-10:

Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2012.

PROVINSI	Perkotaan		Pedesaan		Jumlah	Share terhadap Pulau (%)
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%		
Aceh	51.267	28,49	128.677	71,51	179.944	13,25
Sumatera Utara	259.240	68,22	120.742	31,78	379.982	27,98
Sumatera Barat	66.660	46,88	75.524	53,12	142.184	10,47
Riau	56.898	52,79	50.876	47,21	107.774	7,94
Jambi	19.471	41,17	27.825	58,83	47.296	3,48
Sumatera Selatan	115.124	53,94	98.317	46,06	213.441	15,72
Bengkulu	16.038	51,52	15.090	48,48	31.128	2,29
Lampung	103.668	54,97	84.922	45,03	188.590	13,89
Kep. Bangka Belitung	11.808	56,07	9.253	43,93	21.061	1,55
Kep. Riau	41.975	89,69	4.823	10,31	46.798	3,45
P. SUMATERA	**742.149**	**54,64**	**616.049**	**45,36**	**1.358.198**	**100,00**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker

Tabel 1-11:

Komposisi Persentase Pengangguran TerbukaMenurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Antarprovinsi, Agustus 2012.

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/ Akademi	Uni-versitas	
Aceh	17,82	21,99	44,79	6,20	3,20	6,00	100,00
Sumatera Utara	19,48	25,03	35,55	10,83	4,52	4,61	100,00
Sumatera Barat	24,60	19,04	30,43	13,95	2,73	9,25	100,00
Riau	22,32	22,02	33,32	11,85	3,15	7,34	100,00
Jambi	22,84	14,92	37,08	11,90	2,02	11,24	100,00
Sumatera Selatan	27,36	17,71	32,52	10,06	4,21	8,14	100,00
Bengkulu	14,79	21,43	36,98	15,89	1,71	9,20	100,00
Lampung	24,72	21,98	33,86	12,07	2,52	4,86	100,00
Kep. Bangka Belitung	37,21	11,27	22,85	17,28	7,91	3,49	100,00
Kep. Riau	11,05	17,68	39,06	25,27	2,40	4,53	100,00
P. SUMATERA	**21,98**	**21,29**	**35,36**	**11,42**	**3,55**	**6,40**	**100,00**
NASIONAL	**28,09**	**23,48**	**25,29**	**14,37**	**2,72**	**6,05**	**100,00**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker

Kesehatan. Perkembangan dari kinerja kesehatan di Wilayah Sumatera dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama kesehatan, antara lain adalah: Umur Harapan Hidup (UHH), perkembangan Gizi Balita, persentase proses persalinan ditolong tenaga medis, dan persentase balita dengan status tinggi badan pendek (stunting).

- Estimasi Umur Harapan Hidup(UHH) antarprovinsi di wilayah Sumatera selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan. Sebanyak 6 provinsi di Wilayah Sumatera memiliki estimasi UHH di atas UHH nasional, dengan UHH tertinggi berada di Kep. Riau sebesar 72,6 tahun, dan terrendah di Provinsi Aceh sebesar 69,3 tahun.
- Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di wilayah Sumatera antara tahun 2007 dan 2010, sebanyak 4 provinsi berada di atas prevalensi nasional, dengan kinerja penurunan terbesar terdapat di Provinsi Riau sebesar 5,2 persen.

- Perkembangan Balita dengan Status Tinggi Badan Pendek *(Stunting)*[1], empat dari sepuluh provinsi di Wilayah Sumatera memiliki persentase balita dengan tinggi badan kurang yang lebih tinggi dari persentase nasional. Sebagian besar provinsi menunjukkan perbaikan dalam indikator ini kecuali Kepulauan Riau yang justru mengalami peningkatan meskipun kecil.
- Proses kelahiran Balita terakhir di Sumatera rata-rata >80 persen ditolong oleh tenaga medis, denganpPersentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 95,5 persen.

Gambar 1-4:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah SumateraTahun 2007-2010.

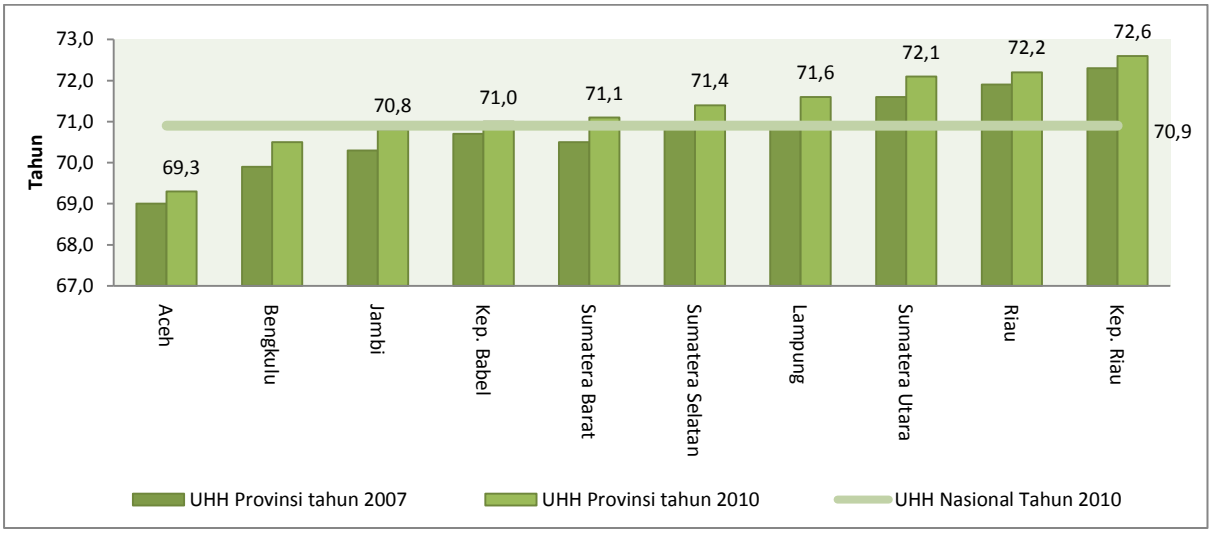

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS, 2011

Tabel 1-12:
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan 2010.

PROVINSI	2007			2010			Δ (2007-2010)
	Gizi Buruk (%)	Gizi Kurang (%)	Gizi Buruk/ Kurang	Gizi Buruk (%)	Gizi Kurang (%)	Gizi Buruk/ Kurang (%)	
Aceh	10,7	15,8	26,5	7,1	16,6	23,7	2,8
Sumatera Utara	8,4	14,3	22,7	7,8	13,5	21,3	1,4
Sumatera Barat	5,9	14,3	20,2	2,8	14,4	17,2	3,0
Riau	7,5	13,9	21,4	4,8	11,4	16,2	5,2
Jambi	6,3	12,6	18,9	5,4	14,3	19,7	-0,8
Sumatera Selatan	6,5	11,7	18,2	5,5	14,4	19,9	-1,7
Bengkulu	4,8	11,9	16,7	4,3	11,0	15,3	1,4
Lampung	5,7	11,8	17,5	3,5	10,0	13,5	4,0
Kep. Bangka Belitung	4,6	13,7	18,3	3,2	11,7	14,9	3,4
Kep. Riau	3,0	9,4	12,4	4,3	9,8	14,1	-1,7
INDONESIA	**5,4**	**13,0**	**18,4**	**4,9**	**13,0**	**17,9**	**0,5**

Sumber: Riskesdas 2007,2010

[1] Tinggi badan kurang (*stunting*) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena *hygiene* dan sanitasi yang kurang baik

Gambar 1-5:
Persentase Balita dengan Status Tinggi Badan Pendek (Stunting) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Pada Tahun 2007 dan 2010.

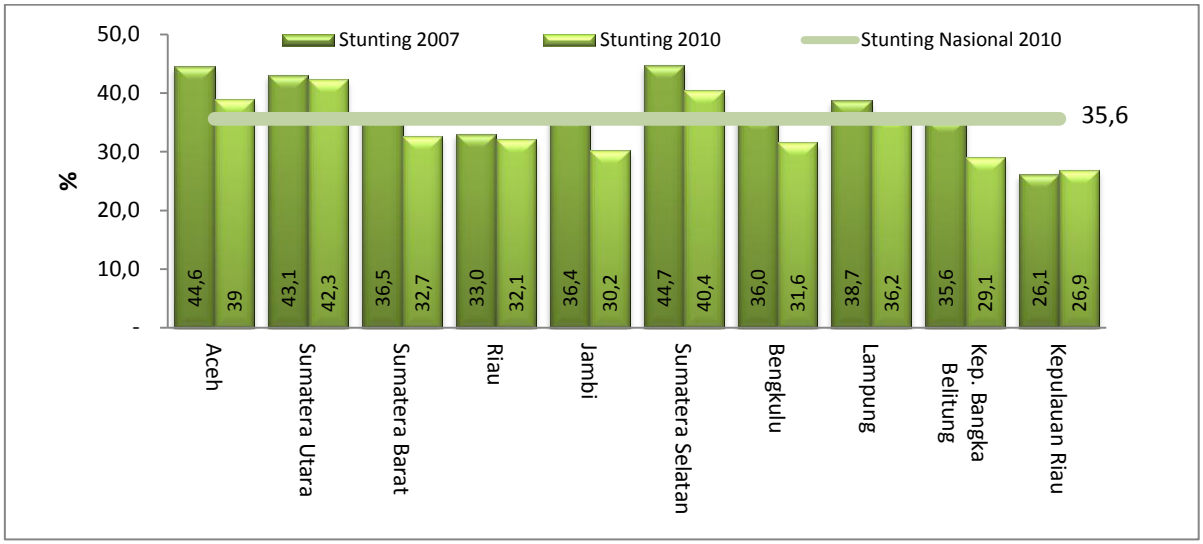

Sumber: Riskesdas 2007, 2010

Tabel 1-13:
Persentase Penolong Kelahiran Balita Terakhir ditolong Tenaga Medis, Tahun 2011.

PROVINSI	Tenaga Medis				Tenaga non Medis		
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lainnya	Total	Dukun	Famili	Total
Aceh	10,5	78,7	0,4	89,7	10,0	0,3	10,3
Sumatera Utara	13,8	75,0	0,9	89,7	8,0	1,8	9,8
Sumatera Barat	19,9	71,4	0,5	91,8	7,4	0,6	8,0
Riau	16,9	65,3	0,8	83,0	16,7	0,2	16,9
Kep. Riau	35,6	59,6	0,3	95,5	4,3	0,2	4,5
Jambi	11,9	61,3	0,9	74,1	25,6	0,2	25,8
Sumatera Selatan	13,0	68,9	0,5	82,4	17,1	0,5	17,6
Kep. Bangka Belitung	17,0	67,1	0,9	85,0	14,5	0,3	14,8
Bengkulu	15,2	70,4	0,6	86,3	13,1	0,6	13,7
Lampung	11,3	68,6	1,0	80,9	18,6	0,3	18,9
INDONESIA	**16,9**	**63,7**	**0,7**	**81,3**	**17,3**	**1,2**	**18,6**

Sumber: SUSENAS, BPS 2012

Pendidikan. Perkembangan dari kinerja pendidikan di Wilayah Sumatera dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama pendidikan, antara lain adalah: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

- Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) provinsi di wilayah Sumatera selama periode 2009-2012 menunjukkan peningkatan (Tabel 1-14), kecuali di Provinsi Bengkulu dan Kep. Riau terjadi penurunan. Sebanyak 7 provinsi memiliki RLS di atas RLS nasional (8,1 tahun) dan 3 provinsi lainnya masih berada di bawah RLS nasional (Provinsi Lampung, Bengkulu,

dan Kep. Riau), dengan RLS tertinggi 2012terdapat di Provinsi Jambi sebesar 9,8 tahun, dan terrendah Provinsi Lampung sebesar (7,7 tahun).

- Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 2009-2012 rata-rata meningkat (Tabel 1-14), sebanyak 6 provinsi menunjukkan perubahan positif. Pada tahun 2012 seluruh provinsi memiliki AMH di atas rata-rata nasional (93,25 persen), dengan AMH tertinggi di Provinsi Kep. Riau sebesar 97,8 persen.
- Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Sumatera tahun 2008 dan 2012, untuk kelompok Usia 16-18 tahun rata-rata meningkat (Tabel 1-15), dengan APS tertinggi di Aceh (74,61persen). Untuk perkembangan kelompok 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Sumatera Utara dan Riau perkembangannya lambat (negatif).

Tabel 1-14:
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012.

PROVINSI	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)			Angka Melek Huruf (%)		
	2009	2012	Δ ('12-'09)	2009	2012	Δ ('12-'09)
Aceh	8.6	8.9	0.3	96.39	96.11	-0.28
Sumatera Utara	8.6	9.1	0.5	97.15	97.35	0.2
Sumatera Barat	8.5	8.6	0.1	96.81	96.67	-0.14
Riau	8.6	8.6	0	98.11	97.79	-0.32
Jambi	7.7	9.8	2.1	95.51	95.97	0.46
Sumatera Selatan	7.7	8.2	0.5	97.21	96.9	-0.31
Bengkulu	8.2	8	-0.2	94.9	95.69	0.79
Lampung	7.7	7.7	0	94.37	95.13	0.76
Kep. Bangka Belitung	7.4	8.5	1.1	95.41	95.88	0.47
Kep. Riau	8.1	7.8	-0.3	96.08	97.8	1.72
NASIONAL	**7.7**	**8,1**	**0.2**	**92.58**	**93.25**	**0.67**

Sumber: SUSENAS, BPS 2012

Tabel1-15:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012.

PROVINSI	2008			2012			Δ 2008-2012		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
Aceh	99,03	94,15	72,73	99,35	94,45	74,61	0,32	0,30	1,88
Sumatera Utara	98,66	91,10	65,87	98,60	90,93	69,87	-0,06	-0,17	4,00
Sumatera Barat	98,07	88,70	65,73	98,37	90,66	71,56	0,30	1,96	5,83
Riau	98,36	91,83	64,11	98,16	87,93	66,20	-0,20	-3,90	2,09
Jambi	97,59	84,78	55,72	98,69	90,93	59,65	1,10	6,15	3,93
Sumatera Selatan	97,88	84,55	54,27	98,10	88,75	58,54	0,22	4,20	4,27
Bengkulu	98,38	87,42	58,64	98,98	92,87	67,27	0,60	5,45	8,63
Lampung	98,26	85,10	50,69	98,60	90,14	60,17	0,34	5,04	9,48
Kep. Bangka Belitung	96,76	79,71	47,31	97,78	83,87	51,64	1,02	4,16	4,33
Kep. Riau	98,31	91,10	64,62	98,30	95,06	70,19	-0,01	3,96	5,57
INDONESIA	**97,88**	**84,89**	**55,50**	**97,99**	**89,76**	**61,42**	**0,11**	**4,87**	**5,92**

Sumber: SUSENAS, BPS 2012

Kemiskinan. Kondisi umum kemiskinan di Wilayah Sumatera ditunjukan dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan pola distribusi atau sebaran kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan.

- Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi di wilayah Sumatera selama periode 2008-2013 rata-rata menurun (Tabel 1-16), namun dalam tiga tahun terakhir tingkat kemiskinan wilayah Sumatera diatas kemiskinan nasional. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 mencapai 6.119 ribu jiwa berkurang sebanyak 1.174 ribu jiwa dari tahun 2008, dengan penduduk miskin terbesar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.
- Persentase penduduk miskin tahun 2013 sekitar 11,51 persen atau menurun sebesar 3,57 persen dari tahun 2008 (Tabel (1-17), penurunan tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Aceh.
- Penyebaran kemiskinan tahun 2012 sebagian besar terdapat di perdesaan (Tabel 1-18), yakni mencapai 67,06 persen, persentase kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Aceh sekitar 21,97 persen.

Tabel 1-16:
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2008-2013

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh	23,53	21,80	20,98	19,57	18,58	17,6
Sumatera Utara	12,55	11,51	11,31	11,33	10,41	10,06
Sumatera Barat	10,67	9,54	9,50	9,04	8,00	8,14
Riau	10,63	9,48	8,65	8,47	8,05	7,72
Jambi	9,32	8,77	8,34	8,65	8,28	8,07
Sumatera Selatan	17,73	16,28	15,47	14,24	13,48	14,24
Bengkulu	20,64	18,59	18,30	17,50	17,51	18,34
Lampung	20,98	20,22	18,94	16,93	15,65	14,86
Kep. Bangka Belitung	8,58	7,46	6,51	5,75	5,37	5,21
Kep. Riau	9,18	8,27	8,05	7,40	6,83	6,46
P. SUMATERA	**15,08**	**13,92**	**13,30**	**12,57**	**11,75**	**11,51**
NASIONAL	**15,42**	**14,15**	**13,33**	**12,49**	**11,67**	**11,37**

Sumber: Susenas (Maret), BPS 2013

Tabel1-17:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 dan 2013

PROVINSI	(000 jiwa)			(%)		
	2008	2013	Δ 2008-2013	2008	2013	Δ 2008-2013
Aceh	959,70	840,71	118,99	23,53	17,6	5,93
Sumatera Utara	1.613,80	1.339,16	274,64	12,55	10,06	2,49
Sumatera Barat	477,20	407,47	69,73	10,67	8,14	2,53
Riau	566,70	469,28	97,42	10,63	7,72	2,91
Jambi	260,30	266,15	(5,85)	9,32	8,07	1,25
Sumatera Selatan	1.249,60	1.110,37	139,23	17,73	14,24	3,49
Bengkulu	352,00	327,35	24,65	20,64	18,34	2,30
Lampung	1.591,60	1.163,06	428,54	20,98	14,86	6,12
Kep. Bangka Belitung	86,70	69,22	17,48	8,58	5,21	3,37
Kep. Riau	136,40	126,66	9,74	9,18	6,46	2,72
P. SUMATERA	**7.294,00**	**6.119,43**	**1.174,57**	**15,08**	**11,51**	**3,57**
NASIONAL	**34.963,10**	**28.066,56**	**6.896,54**	**15,42**	**11,37**	**4,05**

Sumber: Susenas (Maret), BPS 2013

Tabel 1-18:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012 .

PROVINSI	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
Aceh	171,80	737,24	909,04	13,07	21,97	19,46
Sumatera Utara	669,25	738,00	1.407,25	10,32	11,01	10,67
Sumatera Barat	127,81	276,93	404,74	6,67	9,14	8,19
Riau	148,17	334,90	483,07	6,43	9,36	8,22
Jambi	103,48	168,19	271,67	10,44	7,52	8,42
Sumatera Selatan	388,65	668,38	1.057,03	14,16	13,57	13,78
Bengkulu	93,67	218,00	311,66	17,18	17,94	17,70
Lampung	239,07	1.014,77	1.253,83	12,00	17,63	16,18
Kep. Bangka Belitung	25,13	46,23	71,36	3,95	7,06	5,53
Kep. Riau	108,53	22,70	131,22	7,15	6,94	7,11
P. SUMATERA	**2.075,56**	**4.225,34**	**6.300,87**	**10,15**	**13,29**	**12,07**
NASIONAL	**10.647,25**	**18.485,20**	**29.132,43**	**8,78**	**15,12**	**11,96**

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia di Wilaya Sumatera diukur berdasarkan indek pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan perbandingan peringkat masing-masing provinsi terhadap nasional.

- Perkembangan IPM provinsi dari tahun 2007-2011 (Tabel 1-19), memperlihatkan adanya peningkatan dan sebagian besar berada diatas rata-rata IPM nasional.
- IPM tahun 2011 di wilayah Sumatera berkisar antara IPM terrendah sebesar 71,94 di Provinsi Lampung (ranking ke 20 secara nasional) dan tertinggi sebesar 76,53 di Provinsi Riau (ranking ke 3 secara nasional). Provinsi yang berada dibawah IPM nasional adalah provinsi Aceh dan Lampung.

Tabel 1-19:

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011.

PROVINSI	IPM					Peringkat IPM (PROVINSI)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	70,35	70,76	71,31	71,70	72,16	17	17	17	17	18
Sumatera Utara	72,78	73,29	73,80	74,19	74,65	8	8	8	8	8
Sumatera Barat	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28	9	9	9	9	9
Riau	74,63	75,09	75,60	76,07	76,53	3	3	3	3	3
Jambi	71,46	71,99	72,45	72,74	73,30	12	13	13	13	13
Sumatera Selatan	71,40	72,05	72,61	72,95	73,42	13	12	10	10	10
Bengkulu	71,57	72,14	72,55	72,92	73,40	11	11	12	11	11
Lampung	69,78	70,30	70,93	71,42	71,94	20	20	21	21	20
Kep. Bangka Belitung	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37	10	10	11	12	12
Kep. Riau	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78	6	6	6	6	6
INDONESIA	**70,59**	**71,17**	**71,76**	**72,27**	**72,77**					

Sumber: BPS, 2011

1.3. PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Daerah. Tingkat perkembangan perekonomian daerah Wilayah Sumatera ditunjukan dengan beberapa indikator utama ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Struktur ekonomi menurut lapangan usaha dan penggunaan, perkembangan investasi PMA dan PMDN, dan perkembangan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

PDRB Menurut Lapangan Usaha:

- Perkembangan perekonomian wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2008-2012 rata meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,35 persen per tahun (*Tabel 1-20*), dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,53 persen,
- Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi tumbuh positif (*Tabel 1-20*). Namun beberapa provinsi mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, dan Bengkulu.
- Seluruh sektor tumbuh positif, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera adalah sektor bangunan, sektor keuangan dan jasa perusahaan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan di atas 9 persen (*Tabel 1-21*).
- Share PDRB Atas Dasar Harga Berlaku wilayah Sumatera terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2012 sebesar 23,77 persen (*Tabel 1-23*), terbesar kedua setelah wilayah Jawa-Bali, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Riau sebesar 6,97 persen dan Sumatera Utara sebesar 5,22 persen.
- Peran sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi dalam perkembangan perekonomian Wilayah Sumatera. Peran sektor pertambangan dan penggalian terbesar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung. Peran sektor industri pengolahan terbesar di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Riau, dan Kep. Bangka Belitung (*Tabel 1-24*).
- Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Sumatera rata-rata meningkat (*Tabel 1-25*). Namun, sebagian besar provinsi masih berada dibawah rata-rata PDB perkapita nasional kecuali Sumatera Utara, Riau, dan Kep. Riau. Namun dilihat perbandingan antarprovinsi, menunjukan adanya gap (ketimpangan) yang cukup tinggi antara PDRB perkapita provinsi terrendah dan PDRB perkapita tertinggi.

Tabel 1-20:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000, 2008-2012. (dalam persen)

PROVINSI	Tanpa Migas						Dengan Migas					
	2008	2009	2010	2011	2012	08-12	2008	2009	2010	2011	2012	08-12
Aceh	1,92	3,97	5,43	5,98	6,06	4,67	-5,24	-5,51	2,74	5,09	5,20	0,46
Sumatera Utara	6,40	5,14	6,43	6,63	6,28	6,18	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22	6,15
Sumatera Barat	6,88	4,28	5,94	6,25	6,35	5,94	6,88	4,28	5,94	6,25	6,35	5,94
Riau	8,06	6,56	7,17	7,76	7,82	7,47	5,65	2,97	4,21	5,04	3,55	4,28
Jambi	7,37	6,99	6,84	6,93	8,69	7,36	7,16	6,39	7,35	8,54	7,44	7,38
Sumatera Selatan	6,31	5,06	6,99	8,09	7,93	6,88	5,07	4,11	5,63	6,50	6,01	5,46
Bengkulu	5,75	5,62	6,10	6,45	6,61	6,11	5,75	5,62	6,10	6,45	6,61	6,11
Lampung	5,42	5,52	6,02	6,44	6,54	5,99	5,35	5,26	5,88	6,43	6,48	5,88
Kep. Bangka Belitung	4,93	3,98	6,08	6,53	5,82	5,47	4,60	3,74	5,99	6,46	5,72	5,30
Kep. Riau	7,19	3,66	7,51	6,92	8,26	6,71	6,63	3,52	7,19	6,66	8,21	6,44
P. SUMATERA	**4,20**	**5,53**	**5,56**	**6,08**	**5,77**	**5,43**	**6,80**	**7,09**	**6,25**	**5,07**	**6,53**	**6,35**
INDONESIA (PDB)	**6,47**	**5,00**	**6,60**	**6,98**	**6,81**	**6,37**	**6,01**	**4,63**	**6,22**	**6,49**	**6,23**	**5,92**

Sumber :BPS, 2012
*Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat sementara*

Tabel 1-21:
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011. (dalam persen)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	4,49	3,82	4,07	4,89
2. Pertambangan & Penggalian	0,39	-2,96	1,84	3,25
3. Industri Pengolahan	3,72	2,60	4,78	4,53
4. Listrik, Gas & Air Bersih	5,43	5,59	7,19	7,99
5. Bangunan	8,66	6,93	7,99	9,82
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,71	5,29	7,02	7,84
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,96	7,85	9,75	9,58
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	10,96	7,73	11,50	9,98
9. Jasa-Jasa	7,56	6,54	7,05	7,43

Sumber :BPS, 2011

Tabel 1-22:
Perkembangan Nilai PDRB berdasarkan ADHB dengan Migas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012. (Rp. Juta).

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	73.547.551	71.986.954	79.145.279	87.994.957	96.161.088
Sumatera Utara	213.931.697	236.353.616	275.056.507	314.372.437	351.118.156
Sumatera Barat	70.954.515	76.752.938	87.226.617	98.957.270	110.103.930
Riau	276.400.130	297.173.028	345.773.814	413.706.123	469.073.023
Jambi	41.056.484	44.127.006	53.857.689	63.355.314	72.654.165
Sumatera Selatan	133.664.987	137.331.848	157.735.042	182.390.492	206.330.887
Bengkulu	14.915.887	16.385.364	18.600.117	21.269.198	24.173.272
Lampung	73.719.259	88.934.861	108.404.270	127.908.260	144.561.358
Kep. Bangka Belitung	21.421.340	22.997.899	26.712.971	30.415.637	34.325.420
Kep. Riau	58.574.996	63.892.937	71.614.514	80.237.794	91.716.673
P. SUMATERA	**978.186.845**	**1.055.936.450**	**1.224.126.819**	**1.420.607.481**	**1.600.217.972**

Sumber: BPS, tahun 2012

Tabel 1-23:
Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Sumatera dan PDRB ADHB Nasional (33 Provinsi), Tahun 2012.

PROVINSI	PDRB (Rp. Juta)	Share Terhadap Pulau (%)	Share Terhadap Nasional (%)
Aceh	96.161.088	6,01	1,43
Sumatera Utara	351.118.156	21,94	5,22
Sumatera Barat	110.103.930	6,88	1,64
Riau	469.073.023	29,31	6,97
Jambi	72.654.165	4,54	1,08
Sumatera Selatan	206.330.887	12,89	3,07
Bengkulu	24.173.272	1,51	0,36
Lampung	144.561.358	9,03	2,15
Kep. Bangka Belitung	34.325.420	2,15	0,51
Kep. Riau	91.716.673	5,73	1,36
P. SUMATERA	**1.600.217.972**	**100,00**	**23,77**
PDB NASIONAL (33 PROVINSI)	**6.731.534.512,85**		**100,00**

Sumber :BPS, 2012

Tabel 1-24:

Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2012. (dalam persen).

PROVINSI	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	PDRB
Aceh	27,03	11,13	8,69	0,47	11,18	16,83	11,19	2,85	10,63	100,00
Sumatera Utara	21,88	1,32	22,07	0,91	6,72	19,09	9,36	7,53	11,12	100,00
Sumatera Barat	23,01	2,90	11,15	0,95	6,68	18,45	15,89	4,52	16,45	100,00
Riau	18,19	35,57	19,21	0,18	7,08	10,95	2,00	2,81	4,01	100,00
Jambi	29,83	17,38	10,91	0,91	4,81	15,77	6,36	5,17	8,86	100,00
Sumatera Selatan	16,58	21,32	20,12	0,48	8,06	13,63	4,98	3,70	11,13	100,00
Bengkulu	38,93	4,20	4,44	0,54	3,78	18,88	8,15	4,93	16,15	100,00
Lampung	35,92	1,96	15,55	0,55	3,36	15,86	11,54	6,15	9,11	100,00
Kep. Bangka Belitung	18,65	15,77	19,23	0,71	8,36	19,11	3,45	2,78	11,94	100,00
Kep. Riau	4,41	7,39	47,88	0,59	7,90	19,82	4,45	4,90	2,66	100,00
P. SUMATERA	**21,32**	**16,13**	**19,48**	**0,56**	**6,93**	**15,42**	**6,83**	**4,64**	**8,70**	**100,00**

Sumber : BPS, 2013

Tabel 1-25:

PerkembanganPDRB Per Kapita dengan Migas Menurut ADHK Tahun 2000 Per Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah).

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	7.906	7.311	7.331	7.567	7.797
Sumatera Utara	8.317	8.662	9.111	9.661	10.175
Sumatera Barat	7.414	7.645	7.987	8.419	8.857
Riau	17.558	17.471	17.546	17.891	17.930
Jambi	5.176	5.378	5.622	5.983	6.283
Sumatera Selatan	8.042	8.236	8.534	8.972	9.361
Bengkulu	4.461	4.643	4.841	5.096	5.357
Lampung	4.616	4.810	5.026	5.313	5.601
Kep. Bangka Belitung	8.566	8.626	8.850	9.184	9.437
Kep. Riau	24.187	23.854	24.296	24.825	25.659
RATA-RATA P. SUMATERA	**9.624**	**9.663**	**9.914**	**10.291**	**10.646**
INDONESIA (PDB)	**8.990**	**9.281**	**9.703**	**10.225**	**10.721**

Sumber :BPS, 2012

PDRB Menurut Penggunaan:

- Dari sisi penggunaan, komponen konsumsi mendominasi dalam pembentukan PDRB wilayah Sumatera, yaitu mencapai 61,58 persen, meningkat dibandingkan nilai konsumsi tahun 2010 (Gambar 1-6).
- Komponen konsumsi sebagian besar 50,20 persen untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 10,79 persen pengeluaran konsumsi pemerintah. Sementara untuk komponen PMTB sebesar 24,74 persen, dan komponen untuk ekspor sebesar 47,12 persen.
- Komponen impor barang dan jasa memiliki laju pertumbuhan tertinggi (15,04 persen) dibandingkan komponen lainnya, sementara untuk komponen peggeluaran PMTB tumbuh sebesar 9,38 persen, dan komponen Ekspor tumbuh sebesar 10,42 persen.

Gambar 1-6:
Distrubusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Wilayah Sumatera Tahun 2011.
(dalam persen)

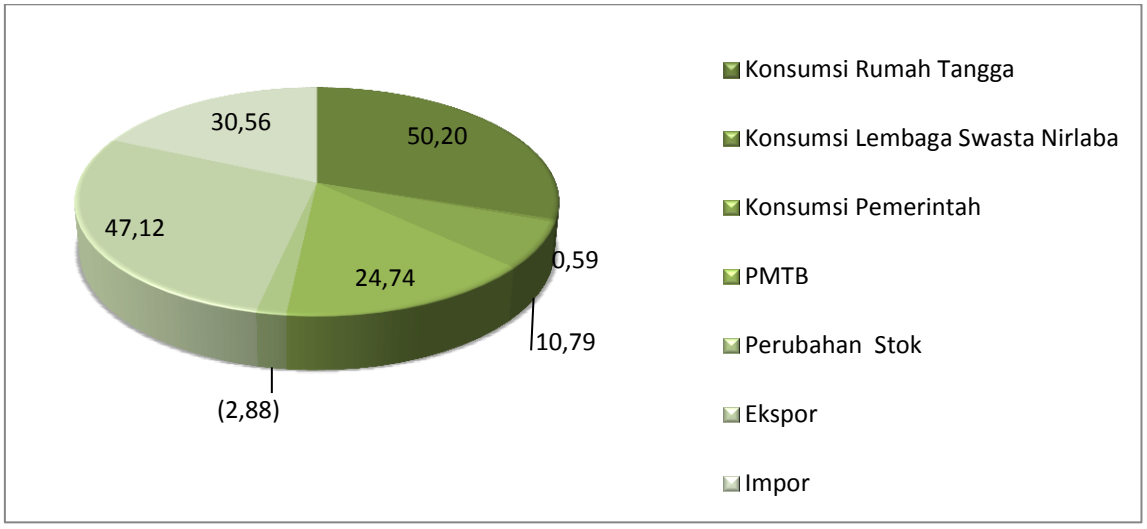

Sumber: BPS, 2011

Tabel 1-26:
Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku.

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN STOK	EKSPOR	IMPOR
Aceh	41,27	-	23,65	17,76	1,52	23,80	8,00
Sumatera Utara	59,22	0,36	10,33	20,56	0,25	43,52	34,23
Sumatera Barat	53,59	0,89	15,21	20,26	-3,56	28,95	15,34
Riau	31,00	0,28	6,41	24,55	2,56	49,47	14,26
Jambi	59,89	0,63	18,27	18,81	2,52	55,79	55,91
Sumatera Selatan	63,53	1,17	10,62	24,74	-0,10	40,97	40,93
Bengkulu	60,43	0,94	16,00	10,84	-9,84	33,92	12,29
Lampung	51,11	0,96	10,81	17,23	0,41	42,49	23,01
Kep. Bangka Belitung	51,56	1,00	16,08	25,64	4,04	61,16	59,48
Kep. Riau	76,71	1,14	7,04	75,05	-63,61	109,17	105,50

Sumber: BPS,2012

Tabel 1-27:
Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011, (dalam persen)

Jenis Penggunaan	Tahun					Rata-rata 2007-2011
	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	
Konsumsi Rumah Tangga	7,54	8,27	6,76	7,45	5,98	7,20
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10,57	7,64	20,47	(1,70)	3,78	8,15
Konsumsi Pemerintah	8,59	4,25	11,61	7,54	7,29	7,86
PMTB	10,54	10,25	6,98	8,38	9,38	9,11
Perubahan Stock	(490,35)	160,03	(71,31)	201,59	(10,57)	(42,12)
Ekspor Barang & Jasa	8,18	9,22	(4,36)	7,79	10,42	6,25
Impor Barang & Jasa	16,33	16,36	5,09	10,53	15,04	12,67

Sumber :BPS, 2011
*Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat Sementara*

Tabel 1-28:

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.

PROVINSI	KONSUM-SI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBA-HAN STOK	EKSPOR	IMPOR
Aceh	5,66	-	7,81	3,98	2212,79	-1,16	8,12
Sumatera Utara	6,26	2,23	6,17	7,80	13,77	15,19	16,71
Sumatera Barat	4,51	3,35	18,09	10,82	80,91	10,76	15,11
Riau	6,68	6,43	1,89	8,36	4,45	3,08	5,78
Jambi	4,75	7,55	7,31	12,40	10,43	22,06	17,34
Sumatera Selatan	6,28	1,51	8,94	11,58	-86,92	14,83	23,48
Bengkulu	5,74	7,33	8,55	10,04	17,96	11,99	14,94
Lampung	5,75	5,43	2,05	9,30	-107,10	26,24	40,21
Kep. Bangka Belitung	5,70	4,73	7,86	9,14	100,62	0,75	3,93
Kep. Riau	5,92	5,32	7,06	12,85	8,22	4,87	5,78

Sumber: BPS, 2012

Investasi PMA dan PMDN:

- Perkembangan investasi PMDN dan PMA Wilayah Sumatera dalam tiga tahun terakhir meningkat. Sebagian besar nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN di Sumatera terbesar di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

Tabel 1-29:

Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% Pulau 2012
Aceh	-	79,7	40,9	259,4	60,2	0,4
Sumatera Utara	382,7	2.060,8	662,7	1.230,2	2.550,3	17,9
Sumatera Barat	-	459,0	73,8	1.026,2	885,3	6,2
Riau	1.966,8	3.386,6	1.037,1	7.462,6	5.450,4	38,2
Jambi	1.300,6	213,8	223,3	2.134,9	1.445,7	10,1
Sumatera Selatan	378,5	580,3	1.738,4	1.068,9	2.930,6	20,6
Bengkulu	-	-	8,5	-	52,6	0,4
Lampung	735,2	549,9	272,3	824,4	304,2	2,1
Kep. Bangka Belitung	2,0	249,3	0,4	514,4	533,5	3,7
Kep. Riau	74,4	240,0	166,9	1.370,4	43,5	0,3
P. SUMATERA	**4.840,2**	**7.819,4**	**4.224,3**	**15.891,5**	**14.256,2**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**23,77**	**20,69**	**6,79**	**6,79**	**6,79**	

Sumber : BKPM, 2012

Tabel 1-30:

Realisasi Investasi PMA (juta US$) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% Pulau 2012
Aceh		0,4	4,6	22,5	172,3	4,6
Sumatera Utara	127,3	139,7	181,1	753,7	645,3	17,3
Sumatera Barat	28,1	0,2	7,9	22,9	75,0	2,0
Riau	460,9	251,6	86,6	212,3	1.152,9	30,9
Jambi	36,1	40,5	37,2	19,5	156,3	4,2
Sumatera Selatan	114,6	56,8	186,3	557,3	786,4	21,1
Bengkulu	13,0	1,1	25,1	43,1	30,4	0,8
Lampung	67,0	32,7	30,7	79,5	114,3	3,1
Kep. Bangka Belitung	1,7	22,4	22	146,0	59,2	1,6
Kep. Riau	161,2	230,7	165,7	219,7	537,1	14,4
P. SUMATERA	**1.009,9**	**776,1**	**747,2**	**2.076,6**	**3.729,3**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**6,79**	**7,18**	**4,61**	**6,79**	**6,79**	

Sumber : BKPM, 2012

Komoditas Unggulan. Perkembangan komoditas unggulan di Wilayah Sumatera ditunjukan perkembangan jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman perkebunan, jenis aktivitas peternakan, dan perikanan dan kelautan.

Tanaman Pangan Padi:

- Wilayah Sumatera merupakan produsen padi kedua terbesar secara nasional setelah Wilayah Jawa-Bali, produksi padi Wilayah Sumatera Tahun 20113 mencapai sebesar 16.210 ribu ton atau sekitar 23,40 persen dari produksi padi nasional. Sentra produksi padi Wilayah Sumatera di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung (Tabel 1-31).
- Dari sisi produktivitas (Tabel 1-32), tingkat produktivitas padi Sumatera (42 kw/ha) masih berada dibawah rata-rata produktivitas nasional (51 kw/ha).

Tabel 1-31:

Perkembangan Produksi Padi Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2008 dan 2013 (000 ton).

PROVINSI	Tahun		Δ 2008-2013	Share_ Pulau	Share_ Nasional
	2008	2013			
Aceh	1,402.29	1,847.73	445.44	11.40	2.67
Sumatera Utara	3,340.79	3,596.46	255.66	22.19	5.19
Sumatera barat	1,965.63	2,445.95	480.32	15.09	3.53
Riau	494.26	465.82	(28.44)	2.87	0.67
Jambi	581.70	664.33	82.63	4.10	0.96
Sumatera Selatan	2,971.29	3,417.84	446.55	21.08	4.93
Bengkulu	484.90	594.52	109.62	3.67	0.86
Lampung	2,341.08	3,149.98	808.91	19.43	4.55
Kep. Bangka Belitung	15.08	26.58	11.50	0.16	0.04
Kep. Riau	0.40	1.37	0.97	0.01	0.00
P. SUMATERA	**13,597.42**	**16,210.58**	**2,613.15**	**100.00**	**23.40**
NASIONAL	**60,325.93**	**69,271.05**	**8,945.13**		**100.00**

Sumber: BPS, 2013

Tabel 1-32:

Perkembangan Produktivitas Padi Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2013, (kw/ha).

PROVINSI	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh	42.61	43.32	44.89	44.92	46.12	46.47
Sumatera Utara	44.63	45.91	47.47	47.74	48.56	48.33
Sumatera barat	46.59	47.91	48.02	49.16	49.71	50.6
Riau	33.44	35.57	36.83	36.91	35.56	36.96
Jambi	40.67	41.4	40.86	41.16	41.85	43.05
Sumatera Selatan	41.34	41.87	42.53	44.63	42.81	43.8
Bengkulu	38.03	38.37	38.68	38.82	40.29	39.2
Lampung	46.22	46.88	47.54	47.75	48.19	49.8
Kep. Bangka Belitung	24.06	24.64	27.22	26.07	28.52	27.96
Kep. Riau	30.15	29.86	31.46	31.6	34.63	36.17
P. SUMATERA	**38.77**	**39.57**	**40.55**	**40.88**	**41.62**	**42.23**
NASIONAL	**48.94**	**49.99**	**50.14**	**50.76**	**51.36**	**51.50**

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Palawija:

- Produksi tanaman palawija terbesar di Wilayah Sumatera meliputi jagung dan ubi kayu, perkembangan produksi kedua komoditas tersebut dari 2008-2013 terus meningkat, dengan produksi tahun 2013 masing-masing sebesar 4.278.347 ton dan 11.111.163 ton (Tabel 1-32).
- Sentra produksi jagung dan ubi kayu terbesar di Provinsi Sumatera Utara dan Lampung (Tabel 1-35).
- Dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas untuk tanaman palawija di Wilayah Sumatera rata-rata masih lebih rendah dari produktivitas tanaman palawija nasional (Tabel 1-36).

Tabel 1-33:

Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2013, (ton).

Tahun	Produksi (ton)					
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	3.671.750	66.193	20.328	83.958	326.967	8.962.732
2009	4.080.928	57.620	16.796	130.530	356.288	9.085.907
2010	4.092.892	67.932	15.530	97.459	426.986	10.127.727
2011	4.092.892	66.071	15.684	106.845	436.513	10.025.564
2012	4.026.767	52.809	14.812	88.149	521.599	9.907.922
2013	4.278.347	53.056	12.109	62.973	501.357	11.111.163

Sumber :BPS, 2013

Tabel 1-34:

Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2013, (kw/ha).

Tahun	Produktivitas (kw/ha)					
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	35,48	11,23	8,69	11,65	95,70	151,69
2009	36,76	11,35	8,66	12,31	99,69	167,43
2010	38,52	11,32	8,72	12,38	105,45	186,56
2011	38,52	11,44	8,77	12,43	106,42	187,88
2012	41,30	11,67	8,80	12,24	129,82	202,59
2013	42,26	11,99	8,84	11,10	131,61	207,69

Sumber :BPS, 2013

Tabel 1-35:

Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013, (ton).

PROVINSI	Produksi (ton)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Aceh	185.459	1.036	5.248	34.372	17.304	36.491
Sumatera Utara	1.336.296	2.975	15.118	3.652	166.443	1.322.301
Sumatera barat	534.694	829	9.852	1.532	145.789	240.751
Riau	31.194	642	1.567	3.604	9.152	100.256
Jambi	27.457	272	1.532	3.525	71.544	36.017
Sumatera Selatan	130.485	1.939	3.928	7.547	15.000	152.519
Bengkulu	85.612	1.584	5.532	2.233	28.233	49.205
Lampung	1.944.957	2.832	9.754	6.489	41.970	9.148.597
Kep. Bangka Belitung	1.348	-	353	-	3.962	17.097
Kep. Riau	845	-	172	19	1.960	7.929
P. SUMATERA	**4.278.347**	**12.109**	**53.056**	**62.973**	**501.357**	**11.111.163**
NASIONAL	**18.838.529**	**257.129**	**786.868**	**847.157**	**2.594.081**	**23.627.955**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**22,711**	**4,709**	**6,743**	**7,433**	**19,327**	**47,025**

Sumber :BPS, 2013

Tabel 1-36:

Produktivitas Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013, (kw/ha).

PROVINSI	Produktivitas (kw/ha)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Aceh	40,69	10,53	12,52	14,67	106,88	127,55
Sumatera Utara	55,40	10,97	11,85	10,05	123,58	308,12
Sumatera barat	67,94	12,37	16,98	13,26	310,39	414,37
Riau	23,64	10,65	9,38	11,34	82,45	256,80
Jambi	38,90	11,57	13,09	12,89	258,75	142,81
Sumatera Selatan	43,27	13,48	12,90	15,49	70,00	161,12
Bengkulu	48,37	9,87	10,36	10,45	96,69	129,32
Lampung	48,92	9,00	12,92	12,26	97,58	259,87
Kep. Bangka Belitung	32,25	-	9,97	-	90,46	162,36
Kep. Riau	23,21	-	9,89	10,56	79,35	114,58
P. SUMATERA	**42,26**	**8,84**	**11,99**	**11,10**	**131,61**	**207,69**
NASIONAL	**48,42**	**11,62**	**14,54**	**14,82**	**151,97**	**216,38**

Sumber :BPS, 2013

Tanaman Perkebunan:

- Wilayah Sumatera merupakan salah satu sentra penghasil komoditasi perkebunan terbesar, dengan komoditas unggulan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, dan kopi (Tabel 1-37).
- Pada tahun 2011 tercatat produksi kelapa sawit Wilayah Sumatera mencapai 16.843.601 ton atau 74,83 persen dari produksi kelapa sawit nasional, dengan sentra produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sentra produksi karet di Provinsi Sumatera, Sumatera Utara, dan Riau, dan sentra kopi di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung, dan tanaman tebu di provinsi Lampung (Tabel 1-38).

Tabel 1-37:

Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008-2011.

Tahun	Produksi Perkebunan (ton)						
	Kelapa Sawit	Kakao	Karet	Kopi	Teh	Tebu	Tembakau
2008	15.139.598	156.656	2.007.433	499.651	33.474	953.057	2.824
2009	16.159.600	167.930	1.767.541	485.083	34.558	880.643	4.681
2010	16.596.320	157.813	1.985.726	488.683	34.278	854.123	5.766
2011	16.843.601	-	2.329.745	450.412	27.075	-	2.822

Sumber : Deptan, 2011

Tabel 1-38:

Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2011.

Provinsi	Kelapa Sawit	Kakao)	Karet	Kopi	Teh	Tebu	Tembakau	Kelapa
Aceh	676.907	25.642	107.258	47.024	-		701	59.000
Sumatera Utara	3.179.952	61.633	489.818	54.920	12.248	31.025	458	98.189
Sumatera Barat	987.251	32.973	112.474	29.051	7.222	-	1.231	89.309
Riau	6.518.290	4.088	427.749	1.250	-	-	-	497.403
Kep. Riau	13.743	1	26.433	3	-	-	-	11.884
Jambi	1.545.240	459	363.752	11.215	4.692	-	53	114.695
Sumatera Selatan	2.283.971	1.760	640.541	129.696	934	53.653	75	59.105
Kep. Bangka Belitung	526.081	82	23.587	2	-	-	-	6.099
Bengkulu	705.638	5.044	60.569	49.216	1.979	-	-	6.679
Lampung	406.528	26.131	77.564	128.035	-	769.445	304	105.983
SUMATERA	**16.843.601**	**157.813**	**2.329.745**	**450.412**	**27.075**	**854.123**	**2.822**	**1.048.346**
NASIONAL	**22.508.011**	**776.619**	**3.121.166**	**648.985**	**151.665**	**2.278.127**	**150.075**	**3.330.111**
% TERHADAP NASIONAL	**74,83**	**20,32**	**74,64**	**69,40**	**17,85**	**37,49**	**1,88**	**31,48**

Sumber : Deptan, 2011

Peternakan:

- Jenis ternak besar yang banyak diusahakan di Sumatera sapi potong, kambing, dan babi. Perkembangan populasi dari ketiga jenis ternak tersebut rata-rata meningkat dalam tiga tahun terakhir (Tabel 1-39).
- Sentra populasi ternak tahun 2013, sapi potong terdapat di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan; populasi babi terbesar di Kep. Bangka Belitung dan Kep. Riau; dan kambing di Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu (Tabel 1-40).
- Perkembangan ternak unggas di Wilayah Sumatera dalam empat tahun terakhir rata-rata meningkat, dengan populasi ternak unggas terbesar jenis ayam ras pedaging dan ayam buras (Tabel 1-41).
- Penyebaran ternak ayam buras pedaging terbesar di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, sementara untuk ayam buras di Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung (Tabel 1-42).

Tabel 1-39:

Perkembangan Ternak Besar di Wilayah Sumatera Tahun 2010-2013

Tahun	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
2010	1.232.152	679.911	4.090.636	977802	12539	4718	2.944.609
2011	815.362	686.498	4.102.652	512902	11568	2383	2.707.030
2012	870.401	537.828	1.363.450	295777	5383	1085	1.115.122
2013	1.973.699	794.894	3.932.248	502449	6359	2260	2.755.327

Sumber :BPS, 2011

Tabel 1-40:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013

PROVINSI	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
Aceh	4.341	168.466	615.220	169.945	2.331	34	530.999
Sumatera Utara	947.414	409.375	805.065	139.701	3.138	1.075	625.817
Sumatera Barat	49.822	6.241	267.650	117.905	2.234	672	373,603
Riau	61.593	4.769	214.707	42.383		272	197.340
Jambi	71.625	77.746	501.656	57.634	215	69	151.543
Sumatera Selatan	29.924	35.986	370.510	36.191	377	133	277.032
Bengkulu	11.228	5.169	303.117	22.325	29	315	111.756
Lampung	67.920	93.256	1.089.176	33.987	243	223	834.154
Kep. Bangka Belitung	497.498	127	9.228	273	26	139	9.246
Kep. Riau	282.156		23.569	10			17.440
P. SUMATERA	**1.973.699**	**794.894**	**3.932.248**	**502.449**	**6.359**	**2.260**	**2.755.327**

Sumber :BPS, 2011

Tabel 1-41:

Perkembangan Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010-2013

Tahun	Populasi (ekor)			
	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
2010	179654,65	60919,23	27661,49	9188,53
2011	173883,76	61608,91	28919,24	9100,13
2012	186813,33	61914,81	35610,74	9873,06
2013	197266,31	67644,83	37957,43	10555,42

Sumber BPS, 2010

Tabel 1-42:

Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2013

PROVINSI	Populasi Unggas (ekor			
	Ayam Buras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
Aceh	3.185	6.376	289,44	2.400,57
Sumatera Utara	44.790	12.447	12.455,59	2.848,32
Sumatera barat	18.137	5.067	8.455,80	1.249,31
Riau	39.883	4.390	141,03	357,14
Jambi	12.369	11.603	803,26	1.324,46
Sumatera Selatan	23.038	7.266	6.336,87	1.442,85
Bengkulu	6.797	5.263	75,97	137,46
Lampung	27.963	11.052	8.724,28	642,76
Kep. Bangka Belitung	13.745	3.276	77,62	34,57
Kep. Riau	7.357	903	597,57	117,98
P. SUMATERA	**197.266**	**67.645**	**37.957**	**10.555,42**
NASIONAL	**1.355.288**	**290.455,06**	**147.279,35**	**46.312,53**

Sumber :BPS, 2010

Perikanan dan Kelautan:

- Tingkat perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2011 di Wilayah Sumatera rata-rata meningkat , kecuali untuk budidaya laut menurun (*Tabel 1-43*).
- Produksi perikanan tangkap terbesar di wilayah Sumatera, yaitu jenis perikanan tangkap laut dan produksi untuk perikanan budidaya terbesar kolam, tambak, dan jaring apung (*Tabel 1-43*).
- Produksi perikanan tangkap laut tahun 2011 terbesar terdapat Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kep. Bangka Belitung; perikanan budidaya kolam di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, dan budidaya tambak di Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara (*Tabel 1-44*).

Tabel 1-43:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Sumatera Tahun 2005-2011 (ton).

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
	Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
2005	1.162.586	102.979	6.401	179.793	120.776	32.594	11.728	22.521
2006	1.216.691	93.217	2.743	225.453	144.773	27.652	15.960	21.667
2007	1.343.789	100.945	7.574	250.773	168.293	27.168	24.805	30.143
2008	1.420.489	299.070	7.533	266.066	191.362	34.041	95.051	31.529
2009	1.435.778	102.325	11.403	216.451	212.817	43.348	80.023	33.000
2010	1.367.293	114.505	29.017	188.101	296.191	46.331	107.718	30.873
2011	1.526.720	130.997	24.023	186.928	413.296	51.260	124.431	45.524

Sumber :BPS, 2011

Tabel 1-44:
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Wilayah Sumatera Tahun 2005 dan 2010 (ton).

PROVINSI	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya					
	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
Aceh	143.681	2.290	164	23.405	9.224	298	271	1.089
Sumatera Utara	463.201	39.623	3.566	32.830	41.181	252	42.962	4.816
Sumatera Barat	196.511	8.945	79	12	85.934	2.371	36.664	6.494
Riau	90.503	13.542	3	2.120	37.973	4.367	16.875	-
Jambi	44.700	7.140	-	1.852	20.212	356	11.930	19
Sumatera Selatan	43.800	51.036	-	70.370	140.731	42.911	12.683	24.681
Bengkulu	39.860	45	248	1.125	23.673	197	296	8.266
Lampung	154.484	7.524	10.696	54.666	50.453	508	2.747	159
Kep. Bangka Belitung	192.474	-	4.585	535	1.352	-	3	-
Kep. Riau	157.506	-	4.682	13	2.563	-	-	-
P. SUMATERA	**1.526.720**	**130.997**	**24.023**	**186.928**	**413.296**	**51.260**	**124.431**	**45.524**

Sumber: DKP, 2011

1.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH.

Infrastruktur Jalan. Perkembangan kondisi jalan di Wilayah Sumatera ditunjukan dengan panjang jalan berdasarkan status pembinaannya, rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), dan kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU), dengan kriteria tidak mantap dan mantap.

- Perkembangan total panjang jalan dalam periode 2008-2010 meningkat 11.421 Km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari jalan kabupaten 9.944 Km, sementara jalan terpanjang antar provinsi di wilayah Sumatera berada di Sumatera Utara sebesar 22 persen.
- Berdasarkan status pembinaannya pada Tahun 2010 di wilayah Sumatera, meliputi jalan Nasional sepanjang 11.568 km, Jalan Provinsi sepanjang 15.247 km, dan Jalan Kabupaten/kota sepanjang 134.511 km (Tabel1-45).
- Tingkat kerapatan jalan (*Road Density*) di Wilayah Sumatera sebesar 0,34 Km/Km^2 lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,25 Km/Km^2), dengan kerapatan jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Kep. Riau dan terrendah Sumatera Selatan (Gambar 1-7).
- Kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI *(International Roughness Index*, Departemen PU), kualitas jalan Nasional Tidak Mantap di wilayah Sumatera cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Tabel 1-46), dengan kondisi jalan Tidak Mantap sebesar 53,09 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 46,91 persen Rusak Berat.
- Kualitas jalan Nasional antarprovinsi (Tabel 1-46), jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara yaitu meliputi panjang 556 Km (25,02 persen dari total panjang jalan).

Tabel 1-45:
Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Sumatera Tahun 2008 dan 2010.

PROVINSI	Panjang Jalan (Km)							
	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten/ Kota		Total	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
Aceh	1.783	1.803	1.702	1.702	15.417	17.290	18.902	20.795
Sumatera Utara	2.098	2.250	2.752	2.752	32.672	30.446	37.522	35.448
Sumatera Barat	1.200	1.213	1.131	1.154	15.887	18.396	18.218	20.763
Riau	1.126	1.134	1.796	1.872	21.549	20.444	24.471	23.450
Jambi	820	936	1.525	1.025	8.132	8.411	10.477	10.372
Sumatera Selatan	1.290	1.444	1.621	1.748	12.141	13.443	15.052	16.635
Bengkulu	736	784	1.357	1.563	3.829	5.464	5.922	7.811
Lampung	1.004	1.160	2.355	2.368	11.544	13.475	14.903	17.003
Kep. Babel	531	510	511	551	3.396	3.465	4.438	4.526
Kep. Riau		334		512		3.677		4.523
P. SUMATERA	**10.588**	**11.568**	**14.750**	**15.247**	**124.567**	**134.511**	**149.905**	**161.326**

Sumber Data: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 1-7:
Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Road Density*) Antar Provinsi Di Wilayah Sumatera.

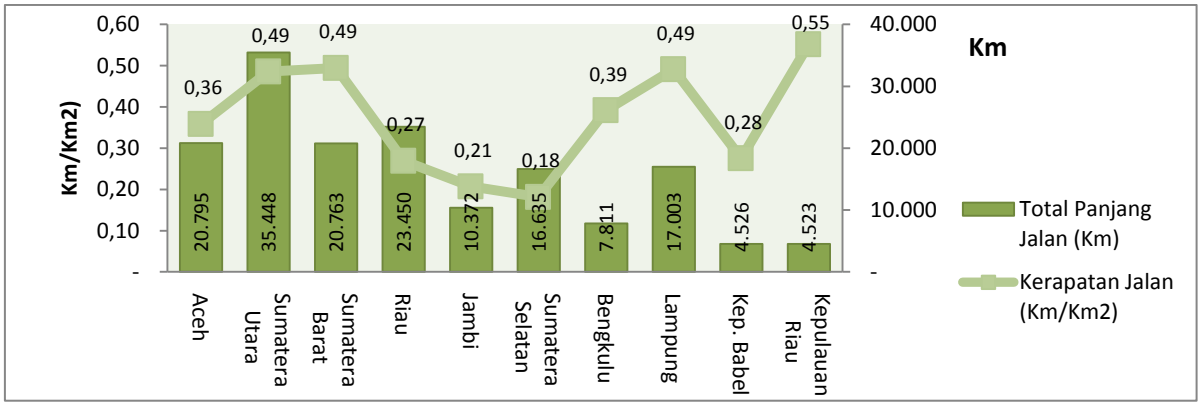

Sumber Data: DitjenBinaMarga, Kementerian PU

Tabel 1-46:
Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi, Tahun 2010

PROVINSI	Panjang Jalan Nasional (Km)	KUALITAS JALAN NASIONAL					
		Panjang Jalan Mantap		Panjang Jalan Tidak Mantap		Komposisi Jalan Tidak Mantap	
		(Km)	%	(Km)	%	% Rusak Ringan	% Rusak Berat
Aceh	1.803,36	1.667,56	92,47	135,80	7,53	33,63	66,37
Sumatera Utara	2.224,51	1.667,91	74,98	556,60	25,02	46,72	53,28
Sumatera Barat	1.212,88	1.103,21	90,96	109,67	9,04	76,46	23,55
Riau	1.082,12	954,77	88,23	127,35	11,77	62,39	37,61
Kep. Riau	333,99	264,77	79,27	69,22	20,73	15,88	84,12
Jambi	936,48	824,23	88,01	112,25	11,99	68,73	31,27
Bengkulu	782,87	728,67	93,08	54,20	6,92	55,61	44,39
Sumatera Selatan	1.418,38	1.400,49	98,74	17,89	1,26	85,69	14,31
Kep. Bangka Belitung	509,59	508,31	99,75	1,28	0,25	85,94	14,06
Lampung	1.159,57	1.017,22	87,72	142,35	12,28	70,64	29,36
P. SUMATERA	**11 .463,75**	**10.137,14**	**88,43**	**1.326,61**	**11,57**	**53,09**	**46,91**
INDONESIA	**38.189,43**	**31.522,09**	**82,54**	**6.667,34**	**17,46**	**48,28**	**51,72**

Sumber: Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010. Direktorat Jenderal Bina Marga (Status 18 Agustus 2010)

Energi Listrik. Perkembangan kondisi listrik di Wilayah Sumatera ditunjukan dengan jumlah kapasitas terpasang, jumlah pelanngan listrik, rasio elektrifikasi, dan konsumsi listrik perkapita.

- Kapasitas terpasang energy listrik PLN padatahun 2011 diwilayah Sumatera mencapai 4.301,14 MW. Sebagian besar energy listrik di wilayah Sumatera bersumber dari Pembangkit Sumbagut sebanyak 45 persen dan Sumbagsel sebanyak 41 persen (*Tabel 1-47*).
- Jenis Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) masih berkontribusi sebesar 18,97 persen, dan umumnya menjadi sumber energi utama pembangkit disetiap wilayah PLN selain Sumbaut dan Sumbasel.
- Penggunaan energi terbesar untuk rumah tangga, kisaran tertinggi sebesar 58 persen (wilayah Kep. Bangka Belitung), dan terrendah sebesar 10 persen (wilayah Sumatera Utara dan PT. PLN Batam), (*Tabel 1-48*).
- Perkembangan rasio ekektrifikasi dalam periode 2009-2011 (*Tabel 1-48*), peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Kep. Riau sebesar 24,47 persen, dan terrendah di PT. PLN Batam sebesar -9,62 persen.
- Sebagian besar Rasio Elektrifikasi provinsi di wilayah Sumatera (8 provinsi) memiliki Rasio Elektrifikasi rendah atau masih dibawah rata-rata elektrifikasi nasional (*Tabel 1-48*), dengan rasio elektrifikasi tertinggi di Provinsi Aceh (87,76 persen) dan terrendah di wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu sebesar 56,68 persen, sementara terrendah menurut provinsi adalah di Provinsi Jambu sebesar 32,74 persen.
- Konsumsi listrik perkapita tahun 2011, tertinggi di PT.PLN Batam sebesar 1.534,30 kWh/kapita, dan terrendah di Provinsi Bengkulu sebesar 283,41 kWh/kapita.
- Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011 (*Tabel 1-48*), tertinggi di Provinsi Jambi sebesar 122,65 kWh/kapita dan terrendah di PT.PLN Batam yang berkurang sebesar 124,91 kWh/kapita.

Tabel 1-47:
Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sumatera Tahun 2011.

Satuan PLN/Provinsi	Kapasitas Terpasang menurut Jenis Pembangkit (MW)						
	PLTA	PLTU	PLTG	PLTGU	PLTD	Jumlah	%
Wilayah Aceh	1,75				142,51	144,26	3,35
Wilayah Sumatera Utara					16,58	16,58	0,39
Wilayah Sumatera Barat	0,66				32,79	33,45	0,78
Wilayah Riau					162,87	162,87	3,79
Riau					81,23	81,23	1,89
Kep. Riau					81,64	81,64	1,90
Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu	1,6				40,34	41,94	0,98
Sumatera Selatan					5,88	5,88	0,14
Jambi					12,82	12,82	0,30
Bengkulu	1,6				21,64	23,24	0,54
Wilayah Kep. Bangka Belitung					91,78	91,78	2,13
Wilayah Lampung					4,3	4,3	0,10
PT PLN Batam					100,33	100,33	2,33
Kit Sumbagut	253,5	490	288,09	817,88	90,82	1.940,29	45,11
Kit Sumbagsel	605,94	685	300,67	40	133,73	1.765,34	41,04
SUMATERA (MW)	**863,45**	**1175**	**588,76**	**857,88**	**816,05**	**4.301,14**	**100,00**
%	**20,07**	**27,32**	**13,69**	**19,95**	**18,97**	**100,00**	

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Tabel 1-48:
Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita.

Satuan PLN/Provinsi	Pelanggan RumahTangga (RT)			Rasio Elektrifikasi (%)			kWh jual/kapita		
	2009	2011	Laju (%)	2009	2011	Δ (11-09)	2009	2011	Δ (11-09)
Wil. Aceh	853.659	951.165	11	87,76	87,21	-0,55	292,53	343,54	51,01
Wil. Sumatera Utara	2.290.474	2.511.003	10	76,81	80,11	3,3	460,2	548,84	88,64
Wil. Sumatera Barat	775.637	860.130	11	67,21	76,21	9	415,6	489,82	74,22
Wil. Riau	575.003	778.161	35	40,59	57,39	16,8	361,47	436,38	74,91
- Riau	479.841	655.068	37	38,88	54,8	15,92	336,58	411,42	74,84
- Kep. Riau	95.162	123.093	29	52,17	76,64	24,47	541,41	620,1	78,69
Wil. Sumsel, Jambi, dan Bengkulu	1.369.350	1.726.583	26	49,13	56,68	7,55	310,23	360,67	50,44
- Sumatera Selatan	947.325	1.197.649	26	56,11	65,18	9,07	367,57	390,19	22,62
- Jambi	206.414	258.184	25	29,9	32,74	2,84	209,9	332,55	122,65
- Bengkulu	215.611	270.750	26	52,74	64,48	11,74	232,39	283,41	51,02
Wil. Kep. Bangka Belitung	127.830	202.340	58	45,56	66,18	20,62	350,36	424,33	73,97
Wil. Lampung	877.400	1.182.013	35	47,75	61,88	14,13	270,16	315,38	45,22
PT PLN Batam	178.888	196.294	10	78,76	69,14	-9,62	1.659,21	1.534,30	-124,91

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Telekomunikasi. Perkembangan kondisi telekomunikasi di Wilayah Sumatera digambarkan dengan persentase jumlah desa yang memperoleh pelayanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon seluler**.**

- Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi untuk kemudahan akses komunikasi di Wilayah Sumatera belum merata dan masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan Telpon Kabel, atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler.
- Untuk mendukung jangkauan sinyal telepon seluler tersebut, pada dasarnya dapat diindikasikan oleh adanya *Base Transceiver Station* (BTS) atau Manara Telepon Seluler di sekitar wilayah tersebut, penyebaran BTS di desa/kelurahan (PODES 2011) di wilayah Sumatera (*Gambar 1-8*), terbanyak di Provinsi Sumatera Utara (1.617 desa) dan terrendah di Kep. Riau (170 desa).
- Berdasarkan ketersediaan layanan telpon kabel dan kemampuan menerima sinyal telpon Seluler antar provinsi di wilayah Sumatera (*Tabel 1-49*), terbesar di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.026 desa (17,7 persen),
- Berdasarkan desa/kelurahan di wilayah Sumatera yang menerima sinyal telpon seluler dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat sudah mencapai di atas 90 persen.

Gambar 1-8:
Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di Wilayah Sumatera.

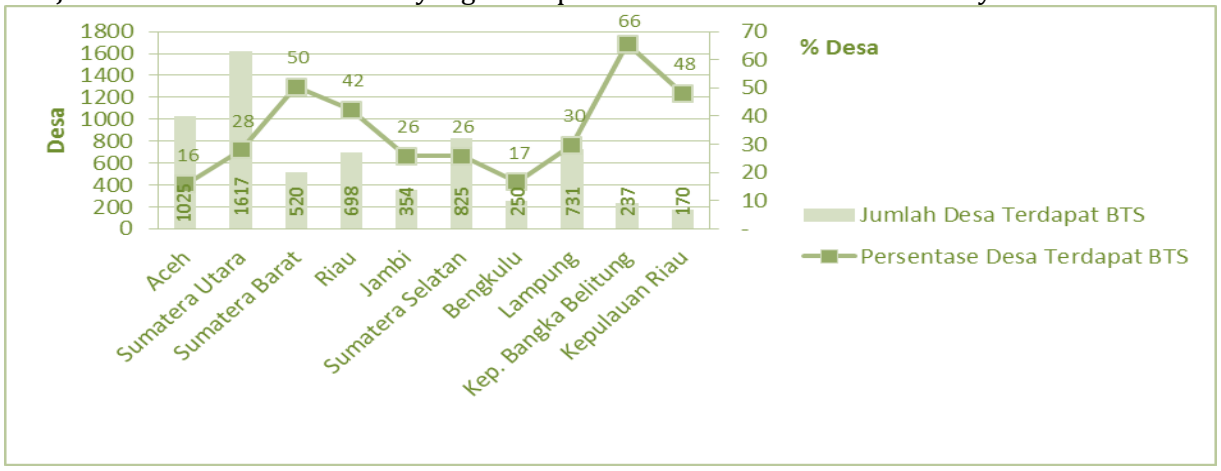

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Tabel 1-49:
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Seluler.

PROVINSI	Ada Pelanggan Telpon Kabel		PenerimaanSinyal HP						Jumlah Desa/kel
			Sinyal Lemah		Sinyal Kuat		Lemah - Kuat		
	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	
Aceh	714	11,0	1486	22,9	4803	74,1	6289	97,0	6483
Sumatera Utara	1026	17,7	1520	26,2	3891	67,1	5411	93,3	5797
Sumatera Barat	391	37,9	236	22,8	751	72,7	1014	98,2	1033
Riau	210	12,7	430	26,0	1172	70,8	1602	96,8	1655
Jambi	180	13,1	397	28,9	918	66,9	1315	95,8	1372
Sumatera Selatan	480	15,1	994	31,2	2119	66,5	3113	97,7	3186
Bengkulu	215	14,2	376	24,9	1097	72,7	1473	97,6	1509
Lampung	469	19,0	645	26,2	1762	71,5	2407	97,7	2464
Kep. Bangka Belitung	99	27,4	41	11,4	318	88,1	359	99,4	361
Kep. Riau	100	28,3	72	20,4	260	73,7	332	94,1	353
P. SUMATERA	**3.884**	**16,0**	**6.197**	**25,6**	**17.091**	**70,6**	**23.315**	**96,3**	**24.213**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Air Bersih. Kondisi perkembangan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Wilayah Sumatera ditunjukan dengan persentase jumlah desa/kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari PDAM/PAM, air sumur, sungai/danau, air hujan, dan air kemasan.

- Ketersediaan infrastruktur dan pelayanan air bersih di Wilayah Sumatera masih sangat terbatas. Berdasarkan data PODES 2011 (*Tabel 1-50*), di wilayah Sumatera hanya baru menjangkau 10 persen dari total desa/kelurahan.
- Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sebagian besar bersumber dari sumur dan air hujan. Sementara Air dari PDAM ketersediaannya masih terbatas.

Tabel 1-50:
Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2010.

PROVINSI	PAM/ PDAM		PompaListriK /Tangan/ Sumur		Mata Air		Sungai/ Danau/ Kolam		Air hujan		Air Kemasan / Lainnya		TOTAL	
	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%
Aceh	573	9	4489	69	736	11	306	5	60	1	319	5	6.483	100
Sumatera Utara	677	12	2778	48	1530	26	492	8	214	4	106	2	5.797	100
Sumatera Barat	312	30	430	42	194	19	46	4	15	1	36	3	1.033	100
Riau	22	1	985	60	20	1	65	4	452	27	111	7	1.655	100
Jambi	260	19	741	54	54	4	165	12	117	9	35	3	1.372	100
Sumatera Selatan	284	9	2058	65	176	6	361	11	245	8	62	2	3.186	100
Bengkulu	165	11	1098	73	152	10	77	5	4	0	13	1	1.509	100
Lampung	95	4	2051	83	181	7	52	2	52	2	33	1	2.464	100
Kep. Babel	4	1	304	84	8	2	3	1	0	-	42	-	361	100
Kep. Riau	39	11	170	48	105	30	2	1	6	2	31	9	353	100
P. SUMATERA	**2.431**	**10**	**15.104**	**62**	**3.156**	**13**	**1.569**	**6**	**1165**	**5**	**788**	**3**	**24.213**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

1.5. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumberdaya Alam:

- Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Sumatera berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan seluas 27.870.355 hektar atau 20,39 persen dari total nasional (*Gambar 1-9* dan *Tabel 1-51*), dengan proporsi terbesar penggunaan hutan produksi mencapai sekitar7.402.221 hektar (26,56 persen) dan hutan lindung seluas 5.970.823 hektar (21,42 persen).
- Penyebaran luas kawasan hutan dan perairan terbesar di Wilayah Sumatera terdapat di Provinsi Riau dengan luas lahan hutan 9.456.160 hektar, Sumatera Selatan (3,759.327 hektar), Sumatera Utara (3,742.120 hektar), dan Aceh (3.549.813 hektar).
- Sementara untuk luas kawasan konservasi terbesar terdapat di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, untuk hutan produksi terbatas terbesar di Provinsi Riau dan Sumatera Utara (*Tabel 1-51*).
- Sumberdaya alam pertambangan di Wilayah Sumatera meliputi pertambangan dan energy, diantaranya batu bara, gas bumi dan minyak bumi yang cukup berlimpah. Cadangan batu bara Sumatera sebanyak 52.483,2 juta ton atau sebesar 49,89 persen dari total cadangan batubara nasional,
- Potensi gas bumi, wilayah Sumatera memiliki potensi cukup besar yaitu 31,65 TSCF *(Trillion Square Cubic Feet)* atau sebesar 31,05 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional, dengan penyebaran gas bumi terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dan Aceh, dan sebagian di Wilayah Bagian tengah Sumatera sebesar 9,01 TSCF.
- Minyak bumi, cadangan minyak bumi di Wilayah Sumatera sebesar 66,71 persen dari cadangan minyak bumi nasional, dengan penyebaran terbesar di Sumatera Selatan dan Sumatera bagian Tengah .

Gambar 1-9:
Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009.

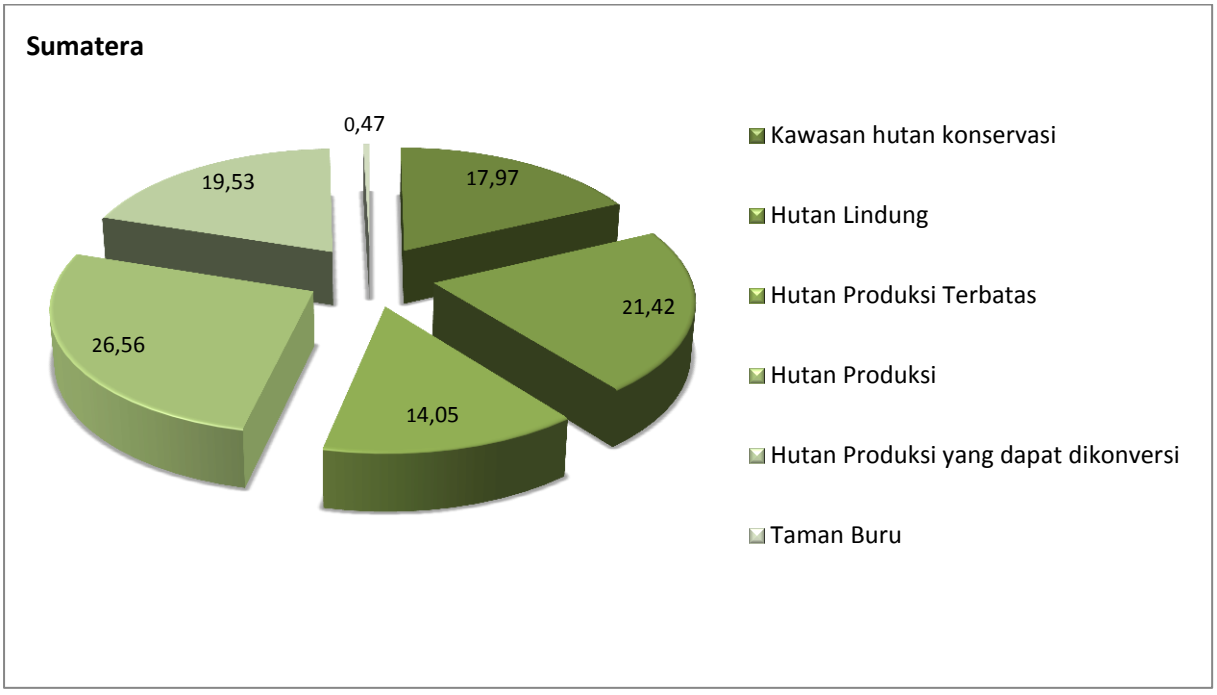

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009

Tabel 1-51:

Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Sumatera.

PROVINSI	Kawasan Suaka Alam + Kawasan Pelestarian Alam (ha)			Hutan Lindung (ha)	Hutan Produksi Terbatas (ha)	Hutan Produksi (ha)	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha)	Taman Buru (ha)	Jumlah Kawasan Hutan (ha)	Jumlah Kawasan Hutan dan Perairan (ha)
	Perairan	Kws. Hutan	Jumlah							
Aceh	214.100	772.633	986.733	1.844.500	37.300	601.280	-	80.000	3.335.713	3.549.813
Sumatera Utara	-	468.720	468.720	1.297.330	879.270	1.035.690	52.760	8.350	3.742.120	3.742.120
Sumatera Barat	-	846.175	846.175	910.533	246.383	407.849	189.346	-	2.600.286	2.600.286
Riau	-	435.240	435.240	397.150	1.971.553	1.866.132	4.770.085	16.000	9.456.160	9.456.160
Jambi	-	676.120	676.120	191.130	340.700	971.490	-	-	2.179.440	2.179.440
Bengkulu	-	419.582	419.582	252.042	189.075	34.965	-	25.300	920.964	920.964
Sumatera Selatan	17.000	662.726	679.726	603.793	217.370	1.826.993	431.445	-	3.742.327	3.759.327
Kep. Bangka Belitung	-	34.690	34.690	156.730	-	466.090	-	-	657.510	657.510
Lampung	-	462.030	462.030	317.615	33.358	191.732	-	-	1.004.735	1.004.735
SUMATERA (HA)	**231.100**	**4.77.,916**	**5.009.016**	**5.970.823**	**3.915.009**	**7.402.221**	**5.443.636**	**129.650**	**27.639.255**	**27.870.355**
SUMATERA[1)] (%)	**8,24**	**24,32**	**21,30**	**18,92**	**17,46**	**20,14**	**24,00**	**77,34**	**20,65**	**20,40**

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan, 2009

Keterangan:

- *1)*= Persen terhadap nasional; *2)* =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya
- Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kep. Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup digambarkan dari beberapa indikator, antara lain yaitu gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan.

- Perkembangan pencemaran air, udara, dan tanah di Wilayah Sumatera dari tahun 2005 hingga 2011 menurun (*Tabel 1-52*), namun tingkat pencemaran masih berada diatas rata-rata nasional. Persentase desa/kelurahan dengan gangguan pencemaran masih tinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Kep. Bangka Belitung, Riau, dan Jambi.
- Intensitas kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Sumatera terjadi hampir setiap tahun (*Tabel 1-53*), dengan jumlah sebaran titik panas di Wilayah Sumatera tergolong paling tinggi. Jumlah sebaran titik panas di Sumatera pada tahun 2011 sebanyak 11.691 titik, dengan penyebaran paling banyak di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.
- Luas lahan kritis di wilayah Sumatera tahun 2010 mencapai 24.771.466,84 hektar atau sekitar 30,14 persen dari luas lahan kritis nasional. Penyebaran lahan kritis paling luas terdapat di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan (*Tabel 1-54*).
- Perkembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sumatera dengan kondisi rusak pada dari tahun 1998/1999 hingga 2007 terjadi penurunan dari 214 DAS menjadi 107 DAS, dengan sebaran paling banyak terdapat di Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Jumlah DAS dengan kategori super prioritas tahun 2007 sebanyak 16 DAS, dan DAS prioritas tahun 2007 sebanyak 57 DAS (*Tabel 1-55*).
- Sumatera tahun 2008 sebanyak 1.353 desa yang terkena bencana longsor meningkat (*Gambar 1-10*) dibandingkan tahun 2005 (1.260 desa). Provinsi Sumatera Utara dan Aceh merupakan dua provinsi yang paling banyak mengalami bencana longsor. Bencana longsor yang terjadi di SumateraUtara berlangsung di 470 desa dan Aceh 392 desa pada tahun 2008

Tabel 1-52:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005 - 2011.

PROVINSI	Air			Tanah			Udara		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
Aceh	9,62	6,3	4,49	2,73	1,01	0,49	3,35	2,58	2,24
Sumatera Utara	6,59	4,13	3,92	1,3	0,52	0,48	6,94	3,19	2,64
Sumatera Barat	7,1	5,74	7,55	1,89	1,73	0,87	4,44	3,14	4,94
Riau	10,39	7,79	7,79	1,27	0,44	0,54	18,76	4,61	5,5
Jambi	11,01	5,22	8,16	1,46	0,69	0,22	3,64	2,99	2,19
Sumatera Selatan	7,56	4,51	4,39	0,9	0,78	0,53	3,17	1,66	2,35
Bengkulu	4,08	4,15	5,63	0,41	0,3	1,52	2,7	2,74	3,78
Lampung	6,94	5,64	4,22	0,55	0,3	0,49	6,16	5,34	5,52
Kep. Bangka Belitung	39,25	21,22	21,61	17,13	5,81	7,76	3,74	2,62	1,94
Kep Riau	-	4,29	3,68	-	0,92	0,85	-	4,29	1,42
P. SUMATERA	**11,39**	**7,19**	**7,53**	**3,07**	**1,29**	**1,43**	**5,88**	**3,21**	**3,46**
INDONESIA	**8,3**	**5,57**	**5,4**	**1,47**	**0,77**	**0,83**	**6,24**	**3,95**	**3,78**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistk Potensi Desa Tahun 2005, 2008, dan2011
Keterangan: 1) nilai rata-rata provinsi

Tabel 1-53:

Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi oleh Satelit NOAA, 2008 - 2011.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011"
Aceh	924	654	287	482
Sumatera Utara	871	1172	530	769
Sumatera Barat	770	495	171	501
Riau	3943	7756	1707	3079
Jambi	1970	1733	603	1423
Sumatera Selatan	3055	3891	143	4243
Bengkulu	204	192	1481	261
Lampung	218	395	123	556
Kep. Bangka Belitung	523	1058	84	307
Kep. Riau	53	99	55	70
P. SUMATERA	**12531**	**17445**	**5184**	**11691**

Sumber :BPS, 2011

Tabel 1-54:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sumatera Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

PROVINSI	Tingkat Kekritisan Lahan (Ha)			JUMLAH
	Agak Kritis(ha)	Kritis(ha)	Sangat Kritis(ha)	
Aceh	1,640,576.60	623,664.60	121,289.80	2,385,531.00
Sumatera Utara	1,618,255.90	854,609.90	280,730.90	2,753,596.70
Sumatera Barat	659,717.40	346,230.00	62,956.40	1,068,903.80
R i a u	5,810,779.30	739,434.70	98,972.50	6,649,186.50
Jambi	1,512,778.20	720,654.30	13,361.40	2,246,793.90
Sumatera Selatan	1,974,305.40	3,648,123.80	216,409.10	5,838,838.30
Bengkulu	638,513.50	522,678.40	239,992.90	1,401,184.80
Lampung	834,911.60	512.148.8	77,171.60	1,424,231.94
Kep. Bangka Belitung	361,495.30	88,211.70	26,623.50	476,330.50
Kep. Riau	272,120.30	24,519.20	230,229.90	526,869.40
P. SUMATERA	**15,323,453.50**	**7,568,126.60**	**1,367,738.00**	**24,771,466.84**
NASIONAL	**52,259,832.90**	**23,955,162.70**	**5,449,299.30**	**82,176,443.64**
% TERHADAP NASIONAL	**29.32**	**31.59**	**25.10**	**30.14**
PROPORSI LAHAN KRITIS (%)	**61.86**	**30.55**	**5.52**	**100.00**

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial 2010

Tabel 1-55:

Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penanganannya di Sumatera

PROVINSI	JUMLAH DAS BERDASARKAN				TINGKAT KEPRIORITASANNYA			
	TAHUN 1994/95 - 1998/99				TAHUN 1999/2000 - 2007			
	SUPER PRIO-RITAS	PRIO-RITAS	PRIO-RITAS RENDAH	JUMLAH	SUPER PRIO-RITAS	PRIO-RITAS	PRIO-RITAS RENDAH	JUMLAH
Aceh	2	14	33	49	2	3	10	15
Sumatera Utara	1	13	28	42	4	20	2	26
Sumatera Barat	-	5	22	27	2	3	3	8
Riau		6	22	28	3	2	23	28
Jambi	1	1	4	6	1	0	5	6
Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	-	7	24	31	1	5	2	8
Sumatera Selatan	1	4	4	9	1	1	6	8
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
Lampung	-	9	13	22	2	3	3	8
P. SUMATERA	**5**	**59**	**150**	**214**	**16**	**37**	**54**	**107**

Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen Kehutanan RI

Gambar 1-10:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2005 dan 2008.

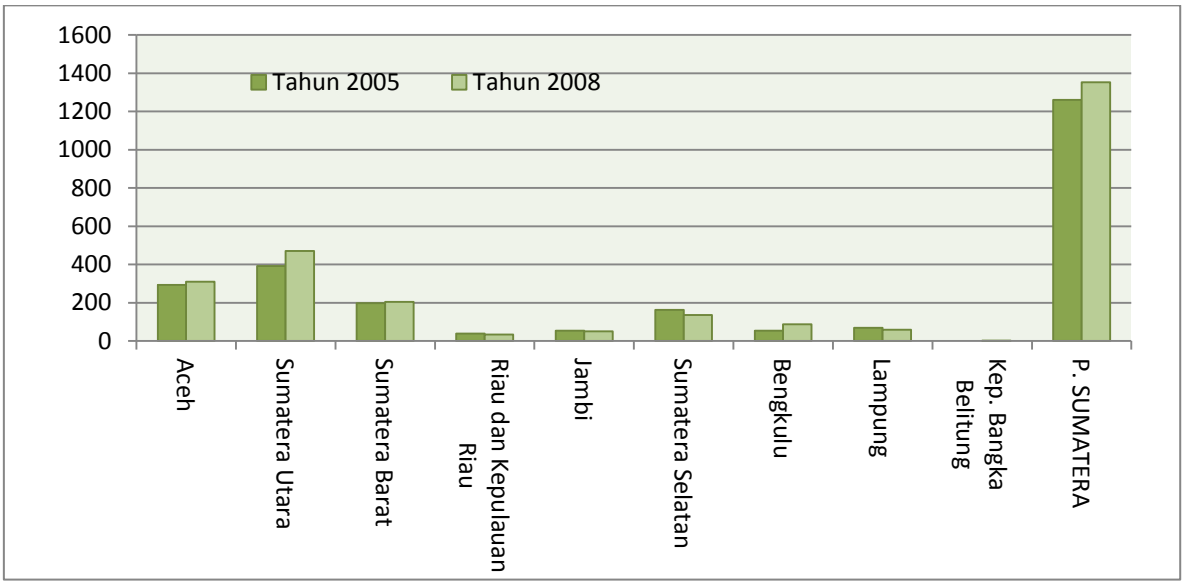

Sumber :BPS, 2008

2.1. ADMINISTRASI WILAYAH

- Wilayah Jawa-Bali secara administrasi terdiri dari 7 provinsi, 35 kota, 92 kabupaten, 2.193 kecamatan dan 25.839 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan sekitar 135.219 Km².
- Wilayah Jawa-Bali memiliki jumlah pulau sekitar 1.171 yang terdiri dari 538 pulau yang sudah bernama dan 633 pulau yang belum bernama.
- Penyebaran pulau terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 296 pulau yang terdiri dari 74 pulau sudah bernama dan 222 pulau belum bernama, Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau terdiri dari 236 pulau sudah bernama dan 51 pulau belum bernama.

Tabel 2-1:
Administrasi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010.

NO.	PROVINSI	KOTA	KAB	KEC	DESA-KEL	LUAS(KM²)	PENDUDUK (JIWA)
1.	DKI Jakarta	5	1	44	267	664	8.489.909
2.	Jawa Barat	9	17	625	5.827	35.378	41.609.110
3.	Jawa Tengah	6	29	573	8.577	32.801	35.885.955
4.	DI Yogyakarta	1	4	78	438	3.133	35.566.132
5.	Jawa Timur	9	29	662	8.502	47.800	39.560.771
6.	Banten	4	4	154	1.530	9,663	9.263.642
7.	B a l i	1	8	57	698	5.780	3.586.687
JUMLAH		**35**	**92**	**2.193**	**25.839**	**135.219**	**173.962.206**

Sumber: Ditjen PUM Kemendagri (Mei 2010)

Tabel 2-2:
Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2009.

NO.	PROVINSI	LUAS DARATAN (KM²)	PULAU BERNAMA	PULAUBELUM BERNAMA	JUMLAH
1.	DKI Jakarta	664,01	111	107	218
2.	Jawa Barat	35.377,76	22	109	131
3.	Banten	9.662,92	48	83	131
4.	Jawa Tengah	32.800,69	74	222	296
5.	DI Yogyakarta	3.133,15	22	1	23
6.	Jawa Timur	47.799,75	236	51	287
7.	Bali	5.780,06	25	60	85
P. JAWA+BALI		**135.218,34**	**538**	**633**	**1.171**

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

2.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan. Kondisi umum kependudukan di Wilayah Jawa+Bali digambarakan berdasarkan angka jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, penduduk menurut jenis kelamin *(sex ratio),* angka ketergantungan *(dependency ratio),* dan komposisi penduduk menurut usia

- Penduduk wilayah Jawa Bali tahun 2010 berjumlah 140,5 juta orang atau 60,67 persen dari penduduk Indonesia dan merupakan konsentrasi penduduk tertinggi di Indonesia.
- Tingkat kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 1.039,1 jiwa per km^2, dengan kepadatan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta mencapai 14.469 jiwa per km^2, dan terrendah Provinsi Bali sebesar 673 jiwa per km^2.
- Laju pertumbuhan penduduk Wilayah Jawa Bali dalam periode 2000-2010 mencapai 1,4 persen/tahun, sama dengan laju pertumbuhan penduduk nasional, dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Banten sebesar 2,78 persen/tahun dan Bali sebesar 2,15 persen, dan terrendah di Provinsi Jawa Tengah.
- Hampir 67,4 persen penduduk tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun), dan memiliki rasio ketergantungan *(dependency ratio)* sebesar 48 persen lebih rendah dari nasional (51,3 persen).
- Penduduk laki-laki dan perempuan (s*ex ratio)* sebagian besar provinsi di Wilayah Jawa-Bali memiliki jumlah laki-laki yang lebih banyak dari perempuan. Di Provinsi Banten, untuk setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki. Sebaliknya di Jawa Timur dan DI Yogyakarta hanya terdapat 98 laki-laki untuk 100 orang perempuan.

Tabel 2-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Jawa Bali Menurut Provinsi.

NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		KEPADATAN PENDUDUK PER KM2		LAJU PERTUMBUHAN	
		2000	2010	2000	2010	90-00	00-10
1.	DKI Jakarta	8.361,1	9.607,8	12.592	14.469	0,13	1,41
2.	Jawa Barat	35.724,1	43.053,7	1.010	1.217	2,24	1,9
3.	Jawa Tengah	31.223,3	32.382,6	952	987	0,94	0,37
4.	Dl Yogyakarta	3.121,0	3.457,5	996	1.104	0,72	1,04
5.	Jawa Timur	34.766,0	37.476,8	727	784	0,7	0,76
6.	Banten	8.098,3	10.632,2	838	1.100		2,78
7.	Bali	3.150,1	3.890,8	545	673	1,31	2,15
P. JAWA+ BALI		**124.443,9**	**140.501,4**	**920,3**	**1.039,1**	**1,01**	**1,49**
NASIONAL		**205.132,5**	**237.641,3**	**107,0**	**124,0**	**1,40**	**1,49**

Sumber Data : BPS, Sensus Penduduk

Tabel 2-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Jawa Bali Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA :	JUMLAH	%
• Usia Muda (< 14 tahun)	37.568	26,74
• Usia Produktif (15-64 tahun)	94.742	67,43
• Usia Tua (>65 tahun)	8.191	5,83
TOTAL PENDUDUK	**140.501**	**100,00**
DEPENDENCY RATIO		**48**

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS

Gambar 2-1:

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Antarprovinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010

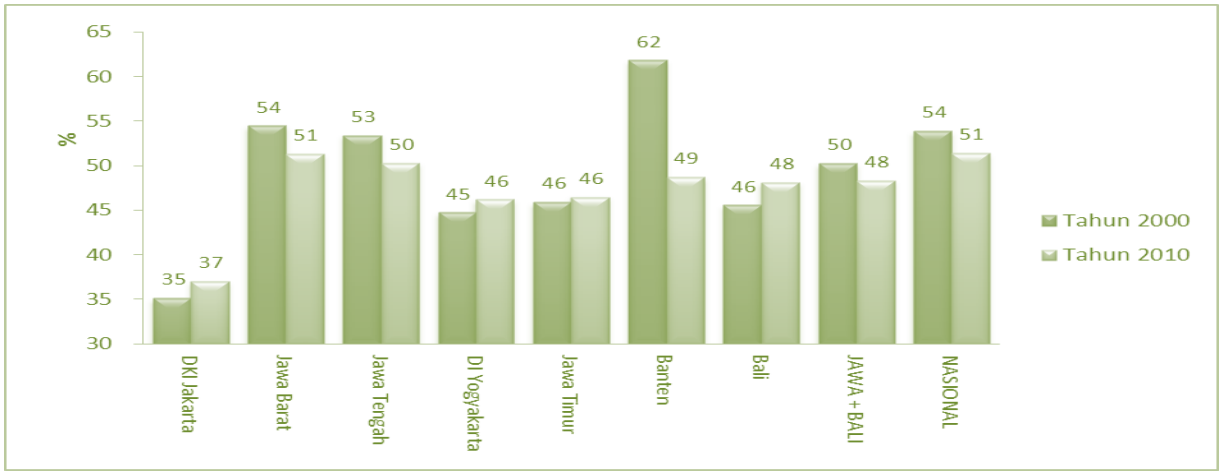

Sumber : Hasil Olahan data Sensus 2010, BPS

Tabel 2-5:

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Antarprovinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010.

NO.	PROVINSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	SEX RATIO
1.	DKI Jakarta	4.870.938	4.736.849	9.607.787	102,83
2.	Jawa Barat	21.907.040	21.146.692	43.053.732	103,60
3.	Jawa Tengah	16.091.112	16.291.545	32.382.657	98,77
4.	Dl Yogyakarta	1.708.910	1.748.581	3.457.491	97,73
5.	Jawa Timur	18.503.516	18.973.241	37.476.757	97,52
6.	Banten	5.439.148	5.193.018	10.632.166	104,74
7.	Bali	1.961.348	1.929.409	3.890.757	101,66

Sumber : BPS, 2010

Ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Jawa+Bali secara umum ditunjukan dengan perkembangan indicator utama, yaitu: jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur angkatan kerja menurut lapangan usaha dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februsari 2013 mencapai 6,56 persen, lebih tinggi dibanding dengan TPT nasional sebesar 5,92 persen, dengan TPT tertinggi di Provinsi Banten dan terrendah di Bali.
- Perkembangan TPT provinsi di Wilayah Jawa-Bali selama periode 2008-2013 rata-rata menurun, Pengurangan TPT terbesar di Provinsi Banten sebesar 5,08 persen.
- Rata-rata pendidikan TPT sebagian besar tamatan SD, SMTP dan SMTA Umum/Kejuruan sekitar 90 persen
- Dalam periode 2008-2013 jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 4.985 orang, dengan jumlah penduduk bekerja pada Februari 2013 sebebanyak 67.594 orang. Penduduk bekerja terbesar terdapat di Jawa Timur dan terrendah di Bali.
- Pendidikan penduduk bekerja sekitar 65 persen merupakan tamatan tamatan SD dan SMTP, sementara tamatan SMTA dan Sarjana (Diploma dan S1) sekitar 35 persen.
- Rata-rata penduduk bekerja di Wilayah Jawa-Bali bekerja pada sektor pertanian (27,13%) dan sektor perdagangan (23,37%)

Gambar 2-2:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Jawa Bali Periode 2008-2013

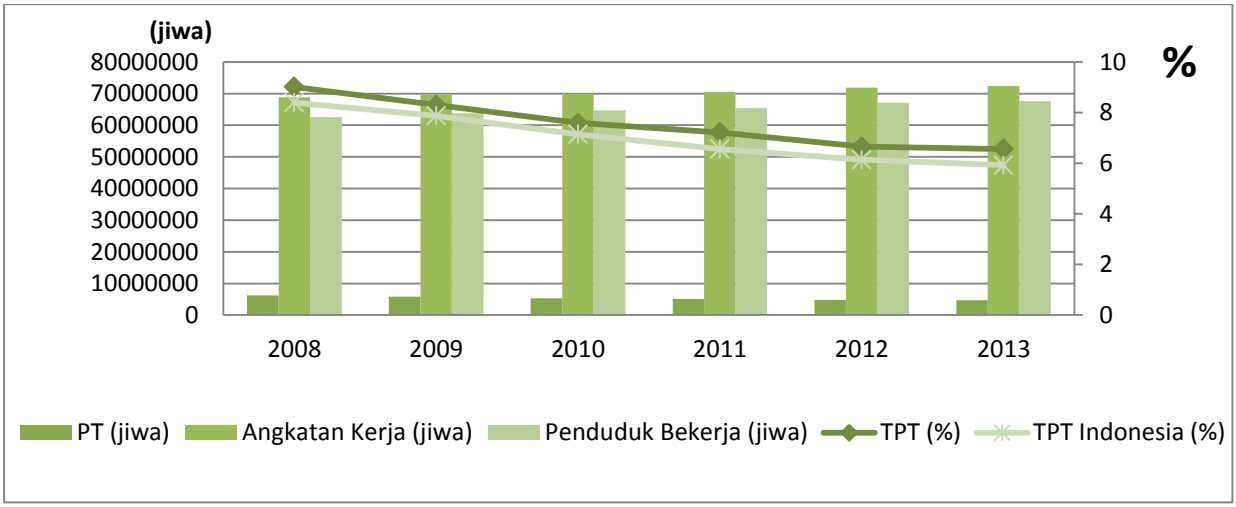

Sumber: Sakernas, Februari 2013, BPS 2012

Tabel 2-6:

Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2013.

PROVINSI	2008	2013	Δ 2008-2013	Share Pulau	Share Nasional
	Agust	(Feb)			
DKI Jakarta	4.772,48	5.163,95	391,47	7,14	4,37
Jawa Barat	18.743,98	20.388,64	1.644,66	28,18	17,27
Jawa Tengah	16.690,97	16.909,53	218,56	23,38	14,32
D.I. Yogyakarta	1.999,73	1.909,17	(90,56)	2,64	1,62
Jawa Timur	20.178,59	20.095,75	(82,84)	27,78	17,02
Banten	4.325,46	5.475,88	1.150,42	7,57	4,64
B a l i	2.099,28	2.396,37	297,09	3,31	2,03
P. JAWA+BALI	**68.810,48**	**72.339,29**	**3.528,81**	**100,00**	**61,28**
INDONESIA	**111.947,27**	**121.191,71**	**9.244,45**		

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 2-7:

Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2013

PROVINSI	2008	2013	Δ 2008-2013	Share Pulau	Share Nasional
	Agustus	(Feb)			
DKI Jakarta	4.192	4.651	458,81	6,88	4,08
Jawa Barat	16.480	18.573	.092,98	27,48	16,29
Jawa Tengah	15.464	15.968	504,43	23,62	14,00
D.I. Yogyakarta	1.892	1.837	(55,53)	2,72	1,61
Jawa Timur	18.882	19.291	409,10	28,54	16,92
Banten	3.669	4.923	1.254,09	7,28	4,32
B a l i	2.030	2.351	321,26	3,48	2,06
P. JAWA+BALI	**62.609**	**67.594**	**4.985**	**100,00**	**59,28**
INDONESIA	**102.553**	**114.021**	**11.468,44**		**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 2-8:
Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012 (Agustus). (dalam persen)

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
DKI Jakarta	20,75	22,11	25,30	16,53	4,95	10,36	100,00
Jawa Barat	50,53	22,15	14,02	7,29	2,03	3,97	100,00
Jawa Tengah	54,21	22,52	10,82	7,16	1,84	3,44	100,00
D.I. Yogyakarta	33,55	22,01	18,11	15,10	3,30	7,92	100,00
Jawa Timur	52,85	21,17	12,92	7,54	1,43	4,09	100,00
Banten	41,57	22,80	17,26	10,66	2,87	4,84	100,00
Bali	39,52	18,73	19,48	11,07	4,01	7,19	100,00
NASIONAL	47,21	22,18	15,90	7,78	2,23	4,70	100,00

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker.

Gambar 2-3:
Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Jawa Bali Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 (Agustus).

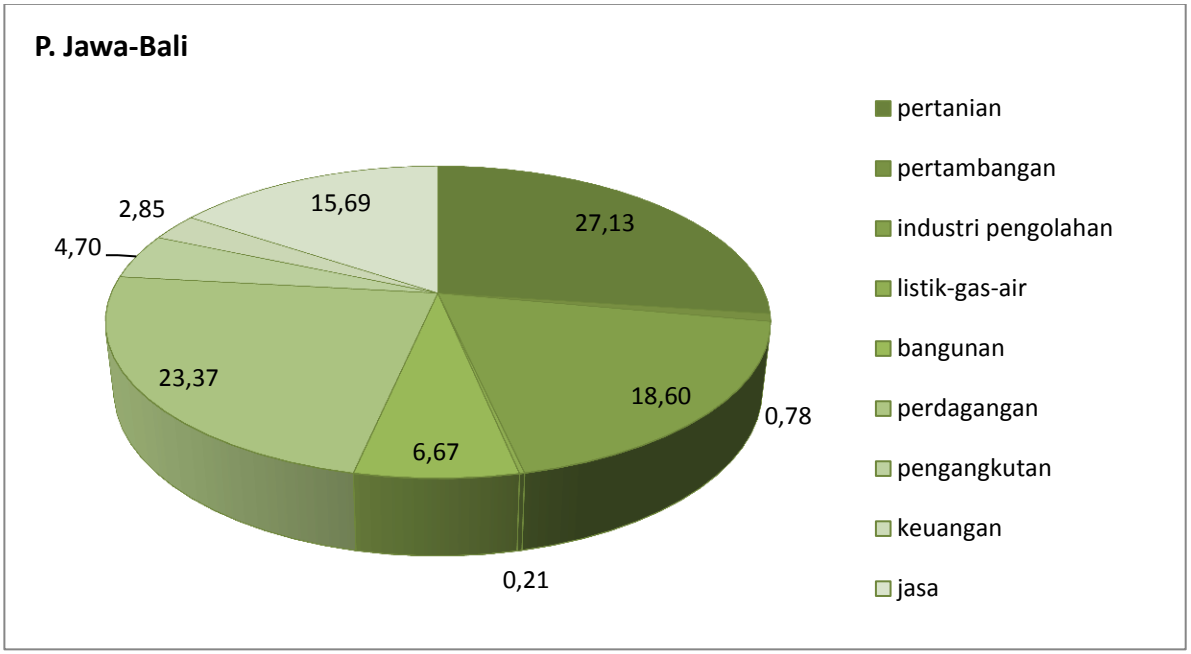

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker

Tabel 2-9:

Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 (Agustus).

PROVINSI	Lapangan Usaha *)									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DKI Jakarta	0,53	0,31	14,61	0,13	3,64	32,98	9,06	8,99	29,77	100,00
Jawa Barat	21,65	1,04	21,09	0,27	7,03	25,08	5,75	2,70	15,38	100,00
Jawa Tengah	31,39	0,57	20,44	0,16	7,48	21,37	3,40	1,75	13,44	100,00
D.I. Yogyakarta	26,91	0,73	15,13	0,15	7,11	24,87	3,28	3,06	18,76	100,00
Jawa Timur	39,16	0,75	14,86	0,16	6,56	20,09	3,53	1,82	13,06	100,00
Banten	13,09	1,39	25,84	0,34	5,17	24,36	6,34	4,58	18,88	100,00
Bali	25,24	0,34	13,72	0,28	8,19	27,56	3,78	3,70	17,20	100,00
P. JAWA+BALI	**27,13**	**0,78**	**18,60**	**0,21**	**6,67**	**23,37**	**4,70**	**2,85**	**15,69**	**100,00**
NASIONAL	**35,09**	**1,44**	**13,87**	**0,22**	**6,13**	**20,90**	**4,51**	**2,40**	**15,43**	**100,00**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker

Keterangan:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan hotel dan restoran
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan,, persewaan bangunan, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Tabel 2-10:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2008 (Agustus) dan 2013 (Februari).

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	PT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
DKI Jakarta	12,16	9,94	2,22	580.511	513.200	67.311
Jawa Barat	12,08	8,90	3,18	2.263.584	1.815.300	448.284
Jawa Tengah	7,35	5,57	1,78	1.227.308	941.400	285.908
D.I. Yogyakarta	5,38	3,80	1,58	107.529	72.500	35.029
Jawa Timur	6,42	4,00	2,42	1.296.313	804.400	491.913
Banten	15,18	10,10	5,08	656.560	552.900	103.660
Bali	3,31	1,89	1,42	69.548	45.400	24.148
P. JAWA+BALI	**9,01**	**6,56**	**2,45**	**6.201.353**	**4.745.100**	**1.456.253**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Februari 2013 diolah Pusdatinaker

Tabel 2-11:

Distribusi Pengangguran terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2012

Propinsi	Perkotaan		Pedesaan		Jumlah	Share terhadap Pulau (%)
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%		
DKI Jakarta	529.976	100,00	0	0,00	529.976	11,08
Jawa Barat	1.205.766	65,93	623.220	34,07	1.828.986	38,23
Jawa Tengah	486.878	50,60	475.263	49,40	962.141	20,11
D.I. Yogyakarta	55.935	72,50	21.215	27,50	77.150	1,61
Jawa Timur	415.615	50,71	403.948	49,29	819.563	17,13
Banten	352.973	67,98	166.237	32,02	519.210	10,85
Bali	27.645	58,42	19.680	41,58	47.325	0,99
P. Jawa+Bali	**3.074.788**	**64,27**	**1.709.563**	**35,73**	**4.784.351**	**100,00**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker

Gambar 2-4:

Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Jawa+Bali, Agustus 2012.

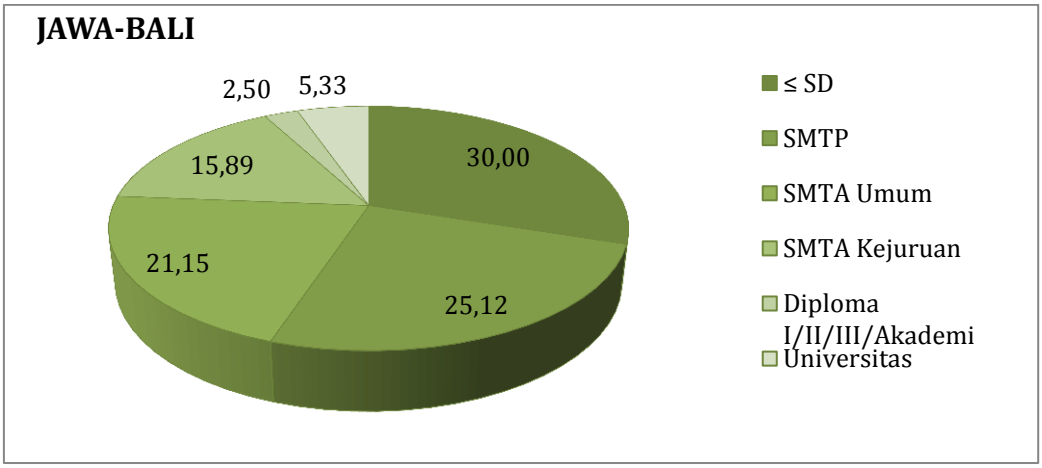

Sumber: Sakernas Agustus 2012, BPS

Tabel 2-12:

Komposisi Persentase Pengangguran TerbukaMenurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Antarprovinsi, Agustus 2012.

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
DKI Jakarta	15,24	19,55	28,30	17,35	4,66	14,89	100,00
Jawa Barat	34,32	27,85	19,33	13,90	1,91	2,70	100,00
Jawa Tengah	33,08	27,54	19,23	13,91	2,01	4,23	100,00
D.I. Yogyakarta	9,65	18,74	20,93	31,34	6,09	13,24	100,00
Jawa Timur	28,16	21,68	22,73	20,22	2,22	5,00	100,00
Banten	31,07	24,10	20,92	15,37	2,76	5,78	100,00
Bali	19,66	13,64	26,08	22,29	7,78	10,54	100,00
P. JAWA+BALI	**30,00**	**25,12**	**21,15**	**15,89**	**2,50**	**5,33**	**100,00**
NASIONAL	**28,09**	**23,48**	**25,29**	**14,37**	**2,72**	**6,05**	**100,00**

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012 diolah Pusdatinaker

Kesehatan. Perkembangan dari kinerja kesehatan di Wilayah Jawa+Bali dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama kesehatan, antara lain adalah: Umur Harapan Hidup (UHH), perkembangan Gizi Balita, persentase proses persalinan ditolong tenaga medis, dan persentase balita dengan status tinggi badan pendek (stunting).

- Estimasi Umur Harapan Hidup(UHH) antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan (*Gambar 2-5*). Sebanyak 5 provinsi di Wilayah Jawa-Bali memiliki estimasi UHH di atas UHH nasional, dengan UHH tertinggi berada di DKI Jakarta sebesar 76,2 tahun dan DI Yogyakarta sebesar 76,0 tahun, dan terrendah di Provinsi Banten sebesar 69,7 tahun.
- Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali antara tahun 2007 dan 2010, sebanyak 1 provinsi berada di atas prevalensi nasional yaitu Banten, dengan kinerja penurunan terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,0 persen (*Tabel 2-13*).
- Perkembangan status tinggi badan secara nasional pada tahun 2010 masih serius yaitu sebesar 35,6%. Pada lingkup antarprovinsi di wilayah Jawa Bali, hanya di Provinsi Jawa Timur yang masih berada di atas angka nasional. Masalah pendek tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur dan terrendah di Provinsi DI. Yogyakarta. Perkembangan masalah pendek menunjukkan peningkatan di Provinsi Jawa Timur, sementara provinsi lainnya menunjukkan penurunan (*Gambar 2-6*).
- Proses kelahiran Balita terakhir di Jawa-Bali rata-rata di atas 80 persen ditolong oleh tenaga medis, denganp persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis tertinggi di DI Yogyakarta sebesar 99,3 persen (*Tabel 2-14*).

Gambar 2-5:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Provinsi di Wilayah Jawa+Bali
Tahun 2007-2010.

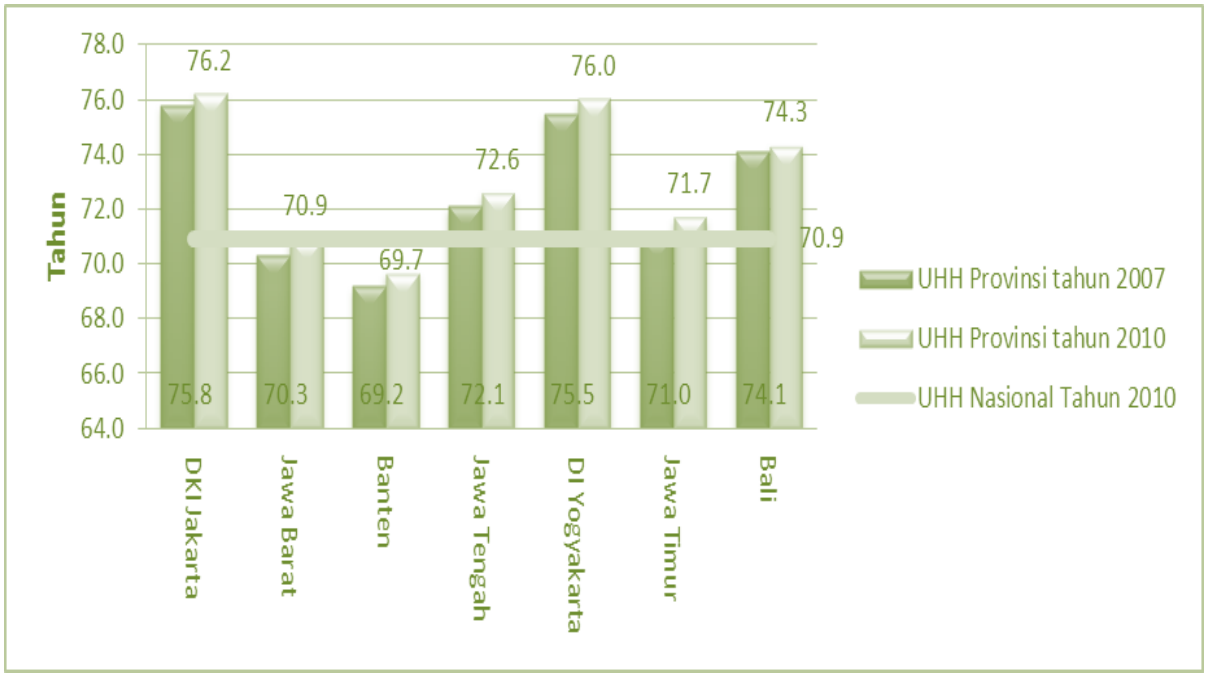

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Tabel 2-13:

Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010.

NO.	PROVINSI	2007			2010			Δ (2007-2010)
		GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG	
1.	DKI Jakarta	2,9	10	12,9	2,6	8,7	11,3	1,6
2.	Jawa Barat	3,7	11,3	15	3,1	9,9	13	2,0
3.	Jawa Tengah	4	12	16	3,3	12,4	15,7	0,3
4.	DI Yogyakarta	2,4	8,5	10,9	1,4	9,9	11,3	-0,4
5.	Jawa Timur	4,8	12,6	17,4	4,8	12,3	17,1	0,3
6.	Banten	4,4	12,2	16,6	4,8	13,7	18,5	-1,9
7.	Bali	3,2	8,2	11,4	1,7	9,2	10,9	0,5
INDONESIA		**5,4**	**13**	**18,4**	**4,9**	**13**	**17,9**	**0,5**

Sumber: Riskesdas, tahun 2007 dan 2010.

Gambar 2-6:

Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali Pada Tahun 2007 dan 2010.

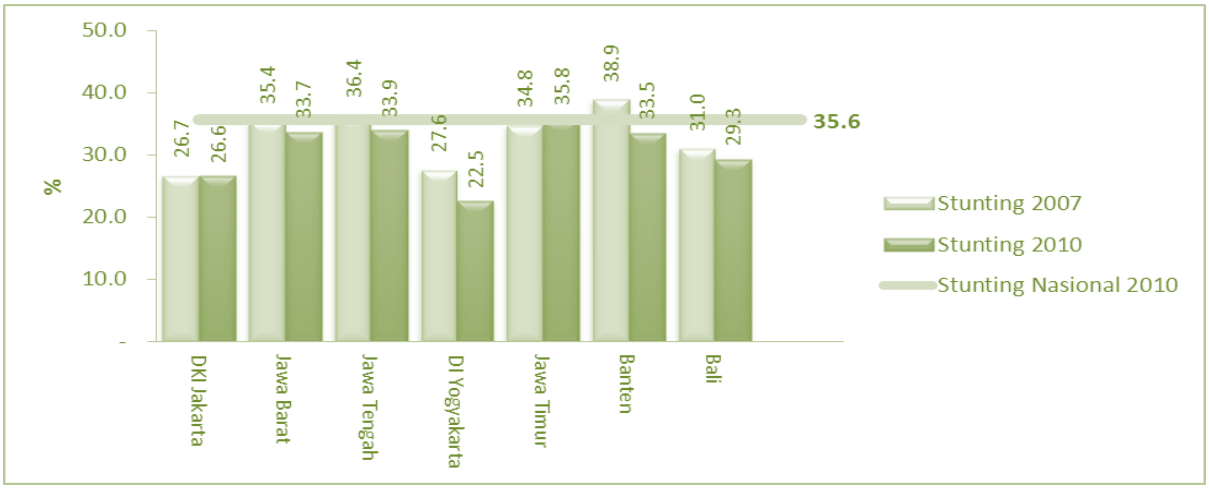

Sumber: Riskesdas, tahun 2007 dan 2010.

Tabel 2-14:

Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

PROVINSI	TENAGA MEDIS				TENAGA NON MEDIS		
	DOKTER	BIDAN	TENAGA MEDIS LAINNYA	TOTAL	DUKUN	FAMILI	TOTAL
DKI Jakarta	40,9	57,0	0,3	98,1	1,7	0,0	1,7
Jawa Barat	13,9	60,6	0,5	75,0	24,8	0,1	24,9
Banten	16,3	55,5	0,6	72,3	27,6	0,0	27,6
Jawa Tengah	17,8	71,6	0,4	89,8	10,1	0,1	10,2
DI Yogyakarta	40,6	58,5	0,2	99,3	0,7	0,0	0,7
Jawa Timur	19,0	71,4	0,3	90,7	9,1	0,1	9,3
Bali	41,5	54,1	0,9	96,5	2,2	1,2	3,4
INDONESIA	**16,9**	**63,7**	**0,7**	**81,3**	**17,3**	**1,2**	**18,6**

Sumber: SUSENAS, BPS, 2011.

Pendidikan. Perkembangan dari kinerja pendidikan di Wilayah Jawa+Bali dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama pendidikan, antara lain adalah: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

- Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) provinsi di wilayah Jawa-Bali selama periode 2009-2012 menunjukkan peningkatan (*Tabel 2-15*), kecuali di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terjadi penurunan. Sebanyak 5 provinsi telah berada di atas RLS nasional dan 2 provinsi lainnya masih berada di bawah RLS nasional yaitu di Provinsi Jawa tengah dan Jawa Timur .
- Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 2009-2012 di wilayah Jawa Bali, sebagian besar provinsi menunjukkan perubahan negatif, kecuali di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2012 sebanyak 4 provinsi memiliki AMH di atas rata-rata nasional, dan 3 provinsi di bawah AMH nasional, dengan AMH tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dan terrendah di Provinsi Jawa Timur (*Tabel 2-15*).
- Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Jawa-Bali tahun 2008 dan 2012, untuk kelompok usia 7-12, 13-15, 16-18 tahun rata-rata meningkat (*Tabel 2-16*), kecuali untuk DKI Jakarta yang perkembangannya negatif pada kelompok usia 16-18 tahun.

Tabel 2-15:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012.

PROVINSI	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)			Angka Melek Huruf (%)		
	2009	2012	Δ ('12-'09)	2009	2012	Δ ('11-'09)
DKI Jakarta	8.6	10.6	2	96.39	99.07	2.68
Jawa Barat	8.6	8.1	-0.5	97.15	96.18	-0.97
Jawa Tengah	8.5	7.4	-1.1	96.81	90.45	-6.36
Dl Yogyakarta	8.6	9.2	0.6	98.11	92.02	-6.09
Jawa Timur	7.7	7.5	-0.2	95.51	89.28	-6.23
Banten	7.7	8.6	0.9	97.21	96.51	-0.7
Bali	8.2	8.6	0.4	94.9	90.17	-4.73
Nasional	**7,7**	**7,9**	**0,2**	**92,58**	**92,81**	**0,23**

Sumber: SUSENAS, BPS, 2011

Tabel 2-16:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012.

PROVINSI	2008**			2012**			Δ 2008-2012**		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
Dki Jakarta	98,82	90,53	61,86	98,97	93,98	61,59	0,15	3,45	-0,27
Jawa Barat	98,24	81,00	47,58	98,36	88,71	56,20	0,12	7,71	8,62
Jawa Tengah	98,83	84,27	53,36	98,88	89,65	58,71	0,05	5,38	5,35
DI Yogyakarta	99,62	92,91	72,46	99,76	98,34	80,32	0,14	5,43	7,86
Jawa Timur	98,63	86,54	58,14	98,65	91,69	61,91	0,02	5,15	3,77
Banten	97,75	81,28	50,35	98,31	91,01	59,56	0,56	9,73	9,21
Bali	98,45	88,07	63,36	99,20	95,26	71,38	0,75	7,19	8,02
INDONESIA	**97,88**	**84,89**	**55,50**	**97,99**	**89,76**	**61,42**	**0,11**	**4,87**	**5,92**

Sumber: SUSENAS, BPS 2012

Kemiskinan. Kondisi umum kemiskinan di Wilayah Jawa+Bali ditunjukan dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan pola distribusi atau sebaran kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan.

- Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi di wilayah Jawa-Bali selama periode 2008-2013 rata-rata menurun (*Gambar2-7*), jumlah penduduk miskin tahun 2013 mencapai 15.170,22 ribu jiwa berkurang sebanyak 4.641,78 ribu jiwa dari tahun 2008, dengan penduduk miskin terbesar di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
- Persentase penduduk miskin tahun 2013 sekitar 10,72 persen atau menurun sebesar 4,26 persen dari tahun 2008, penurunan tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Jawa Timur (*Tabel 2-17 dan 2-18*).
- Penyebaran kemiskinan sebagian besar di perdesaan (tahun 2012), yakni mencapai 55,14 persen (*Tabel 2-19*), persentase kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (21,76 persen).

Gambar 2-7:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2008-2013

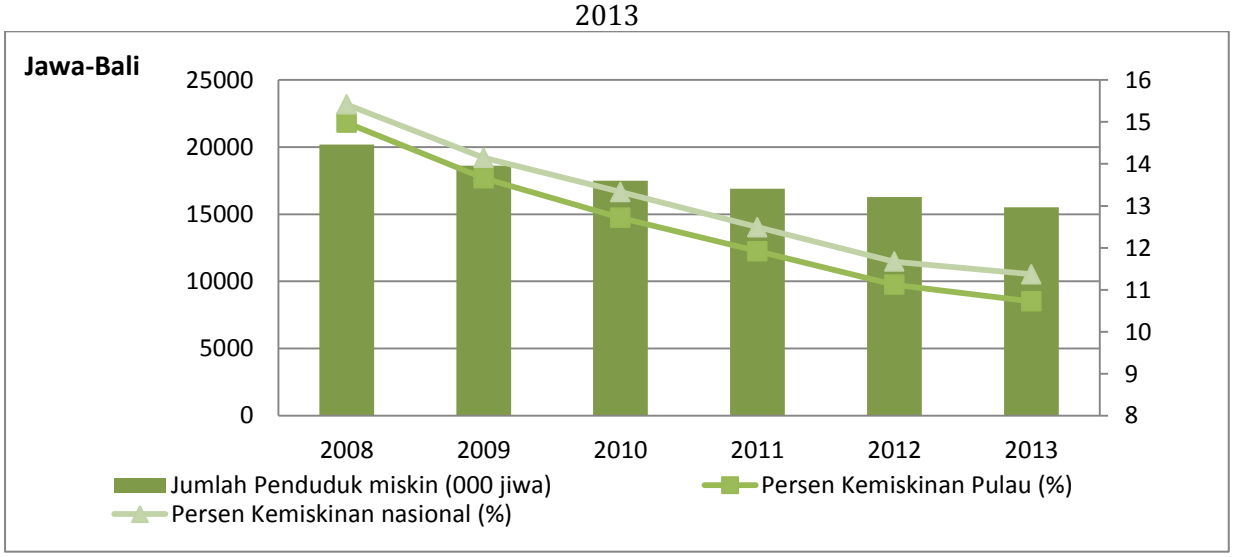

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

Tabel 2-17:
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2008-2013.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DKI Jakarta	4,29	3,62	3,48	3,75	3,70	3,55
Jawa Barat	13,01	11,96	11,27	10,65	9,89	9,52
Jawa Tengah	19,23	17,72	16,56	15,76	14,98	14,56
DI Yogyakarta	18,32	17,23	16,83	16,08	15,88	15,43
Jawa Timur	18,51	16,68	15,26	14,23	13,08	12,55
Banten	8,15	7,64	7,16	6,32	5,71	5,74
Bali	6,17	5,13	4,88	4,20	3,95	3,95
P. JAWA+BALI	**14,98**	**13,66**	**12,72**	**11,92**	**11,12**	**10,72**
NASIONAL	**15,42**	**14,15**	**13,33**	**12,49**	**11,67**	**11,37**

Sumber: Susenas (Maret), BPS 2013

Tabel 2-18:
Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 dan 2013.

PROVINSI	Jumlah (000 jiwa)			(%)		
	2008	2013	Δ 2008-2013	2008	2013	Δ 2008-2013
Jawa Barat	5.322,40	4.297,04	1.025,36	13,01	9,52	3,49
Jawa Tengah	6.189,60	4.732,95	1.456,65	19,23	14,56	4,67
DI Yogyakarta	616,30	550,20	66,10	18,32	15,43	2,89
Jawa Timur	6.651,30	4.771,26	1.880,04	18,51	12,55	5,96
Banten	816,70	656,25	160,45	8,15	5,74	2,41
Bali	215,70	162,52	53,18	6,17	3,95	2,22
P. JAWA+BALI	**19.812,00**	**15.170,22**	**4.641,78**	**14,98**	**10,72**	**4,26**
NASIONAL	**34.963,10**	**28.066,56**	**6.896,54**	**15,42**	**11,37**	**4,05**

Sumber: Susenas (Maret), BPS 2013

Tabel 2-19:
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Jawa Bali Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012.

PROVINSI	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persertase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
DKI Jakarta	363,20		363,20	3,69		3,69
Jawa Barat	2.576,10	1.901,43	4.477,53	8,84	12,48	10,09
Jawa Tengah	2.001,12	2.976,25	4.977,36	13,49	16,89	15,34
Dl Yogyakarta	305,89	259,44	565,32	13,13	21,76	16,05
Jawa Timur	1.630,63	3.440,35	5.070,98	9,06	17,35	13,40
Banten	333,00	319,80	652,80	4,46	8,65	5,85
Bali	91,43	77,34	168,78	3,77	4,79	4,18
P. JAWA+ BALI	**7.301,37**	**8.974,61**	**16.275,97**	**8,69**	**15,16**	**11,36**
NASIONAL	**10.647,25**	**18.485,20**	**29.132,43**	**8,78**	**15,12**	**11,96**

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia di Wilaya Jawa+Bali diukur berdasarkan indek pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan perbandingan peringkat masing-masing provinsi terhadap nasional.

- Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia wilayah Jawa-Bali, perkembangan IPM provinsi dari tahun 2007-2011 memperlihatkan adanya peningkatan dan sebagian besar berada diatas rata-rata IPM nasional.
- IPM tahun 2011 di wilayah Jawa-Bali berkisar antara IPM terrendah sebesar 70,95 di Provinsi Banten (ranking ke 23 secara nasional) dan tertinggi sebesar 77,97 di Provinsi DKI Jakarta (ranking ke 1 secara nasional). Provinsi yang berada dibawah IPM nasional adalah provinsi Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat (*Tabel 1-20*).

Tabel 2-20:
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2011.

PROVINSI	IPM					Peringkat IPM (PROVINSI)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
DKI Jakarta	76,59	77,03	77,36	77,60	77,97	1	1	1	1	1
Jawa Barat	70,71	71,12	71,64	72,29	72,73	15	15	15	15	16
Jawa Tengah	70,92	71,60	72,10	72,49	72,94	14	14	14	14	14
D I Yogyakarta	74,15	74,88	75,23	75,77	76,32	4	4	4	4	4
Jawa Timur	69,78	70,38	71,06	71,62	72,18	19	18	18	18	17
Banten	69,29	69,70	70,06	70,48	70,95	23	23	23	23	23
Bali	70,53	70,98	71,52	72,28	72,84	16	16	16	16	15
INDONESIA	**70,59**	**71,17**	**71,76**	**72,27**	**72,77**					

Sumber: BPS, 2011

2.1. PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Daerah. Tingkat perkembangan perekonomian daerah Wilayah Jawa+Bali ditunjukan dengan beberapa indikator utama ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Struktur ekonomi menurut lapangan usaha dan penggunaan, perkembangan investasi PMA dan PMDN, dan perkembangan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

PDRB Menurut Lapangan Usaha:

- Perkembangan perekonomian wilayah Jawa-Bali dalam kurun waktu 2008-2012 rata-rata meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,08 persen per tahun (*Tabel 2-21*), dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,58 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi mengalami penurunan. Namun beberapa provinsi mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Seluruh sektor tumbuh positif, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan laju pertumbuhan 12,52 persen (*Tabel 2-22*).
- Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Jawa-Bali rata-rata meningkat (*Tabel 2-25*). Namun, sebagian besar provinsi masih berada dibawah rata-rata PDB perkapita nasional kecuali DKI Jakarta dan Jawa Timur. Adanya gap (ketimpangan) yang cukup tinggi antara PDRB perkipa provinsi terrendah dan PDRB perkapita tertinggi.
- Peran sektor industri pengolahan, s13ector perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mendominasi dalam perkembangan perekonomian Wilayah Jawa-Bali (*Tabel 2-23*).
- Peran sektor industri pengolahan terbesar di Provinsi Banten, Jawa barat, dan Jawa Tengah. Peran sektor perdagangan, hotel dan restoran terbesar di Provinsi Bali dan Jawa Timur. Peran sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan terbesar di Provinsi DKI Jakarta (*Tabel 2-23*).
- Share PDRB Atas Dasar Harga Berlaku wilayah Jawa-Bali terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2012 sebesar 58,87 persen (*Tabel 2-24*), terbesar yang merupakan terbesar pertama di seluruh wilayah di Indonesia, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi DKI Jakarta (16,40 persen), Jawa Timur (14,88 persen), dan Jawa Barat (14,07 persen).

Tabel 2-21:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa Bali Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000, 2007-2012. (dalam persen).

PROVINSI	Tanpa Migas						Dengan Migas					
	2008	2009	2010	2011	2012	08-12	2008	2009	2010	2011	2012	08-12
DKI Jakarta	6,25	5,03	6,51	6,73	6,55	6,22	6,23	5,02	6,50	6,73	6,53	6,20
Jawa Barat	6,36	4,10	6,41	6,79	6,53	6,04	6,21	4,19	6,20	6,48	6,21	5,86
Jawa Tengah	5,49	5,66	6,02	6,28	6,73	6,04	5,61	5,14	5,84	6,03	6,34	5,79
DI Yogyakarta	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32	4,97	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32	4,97
Jawa Timur	5,90	4,95	6,60	7,20	7,32	6,39	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27	6,42
Banten	5,77	4,71	6,11	6,39	6,15	5,83	5,77	4,71	6,11	6,39	6,15	5,83
Bali	5,97	5,33	5,83	6,49	6,65	6,06	5,97	5,33	5,83	6,49	6,65	6,06
P. JAWA-BALI	**6,03**	**4,85**	**6,38**	**6,75**	**6,72**	6,15	**6,02**	**4,82**	**6,32**	**6,65**	**6,58**	**6,08**
NASIONAL (PDB)	**6,47**	**5,00**	**6,60**	**6,98**	**6,81**	6,37	**6,01**	**4,63**	**6,22**	**6,49**	**6,23**	**5,92**

Sumber :BPS, 2011

Tabel 2-22:

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa Bali Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011. (dalam persen).

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	3,44	6,33	2,14	1,37
2. Pertambangan & Penggalian	5,23	6,92	4,96	1,71
3. Industri Pengolahan	5,84	0,86	4,13	5,49
4. Listrik, Gas & Air Bersih	4,80	7,51	7,66	3,78
5. Bangunan	6,96	5,93	8,06	8,76
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,84	6,33	9,15	8,44
7. Pengangkutan & Komunikasi	9,38	12,15	12,39	12,52
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	5,07	4,62	5,09	6,16
9. Jasa-Jasa	6,04	5,53	6,49	6,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**6,02**	**4,82**	**6,32**	**6,64**

Sumber :BPS, 2011

Tabel 2-23:

Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2011. (dalam persen).

PROVINSI	Lapangan Usaha								
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
DKI Jakarta	0,09	0,52	15,62	0,98	11,47	20,80	10,30	27,58	12,63
Jawa Barat	11,98	2,02	37,16	2,55	3,99	22,58	7,70	2,84	9,17
Jawa Tengah	19,07	0,95	33,31	1,00	5,97	19,71	5,85	3,55	10,60
DI Yogyakarta	14,23	0,70	14,36	1,31	10,78	19,79	8,83	9,96	20,05
Jawa Timur	15,39	2,24	27,13	1,44	4,67	30,00	5,66	4,93	8,55
Banten	7,95	0,10	47,69	3,55	3,56	18,51	9,23	3,80	5,60
Bali	17,34	0,73	8,95	1,95	4,68	30,62	14,46	6,73	14,53
P. JAWA-BALI	**10,46**	**1,36**	**27,80**	**1,64**	**6,60**	**23,44**	**7,89**	**10,56**	**10,25**

sumber: BPS, 2011

Keterangan:

1=Pertanian
2= Pertambangan & Penggalian
3= Industri Pengolahan
4= Listrik, Gas & Air
5= Konstruksi
6= Perdagangan, Hotel & Restoran
7= Pengangkutan & Komunikasi
8= Keuangan & Jasa Perusahaan
9= Jasa-Jasa

Tabel 2-24:

Kontribusi Provinsi Terhadap Pembentukan PDRB Wilayah Jawa Bali dan PDRB Total 33 Provinsi Tahun 2012, (dalam persen).

PROVINSI	PDRB (Rp. Juta)	Share Terhadap Pulau (%)	Share Terhadap Nasional (%)
DKI Jakarta	1.103.737.591,68	27,85	16,40
Jawa Barat	946.860.770,81	23,89	14,07
Jawa Tengah	556.479.872,13	14,04	8,27
DI Yogyakarta	57.034.383,25	1,44	0,85
Jawa Timur	1.001.720.879,47	25,28	14,88
Banten	212.856.629,72	5,37	3,16
Bali	83.939.294,21	2,12	1,25
P. JAWA-BALI	**3962629421,27**	**100,00**	**58,87**
PDB NASIONAL (33 PROVINSI)	**6.731.534.512,85**		**100,00**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 2-25:

PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah).

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012
DKI Jakarta	37.665	39.084	41.014	43.397	45.703
Jawa Barat	6.986	7.156	7.452	7.829	8.180
Jawa Tengah	5.203	5.462	5.774	6.114	6.494
DI Yogyakarta	5.644	5.846	6.064	6.346	6.632
Jawa Timur	8.236	8.603	9.102	9.738	10.393
Banten	7.878	8.037	8.286	8.623	8.928
Bali	6.912	7.140	7.389	7.745	8.107
RATA-RATA JAWA-BALI	**11.212**	**11.467**	**11.910**	**12.468**	**13.043**
INDONESIA (PDB)	**8.990**	**9.281**	**9.703**	**10.225**	**10.721**

Sumber :BPS, 2012

PDRB Menurut Penggunaan:

- Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Jawa-Bali pada tahun 2011 didominasi oleh komponen konsumsi, yaitu mencapai sekitar 70 persen dari total PDB. Sementara untuk komponen PMTB sebesar 24,86 persen dan komponen untuk ekspor sebesar 49,94 persen (*Tabel 2-26*).
- Distribusi PDRB penggunaan disetiap provinsi, secara keseluruhan didominasi oleh komponen pengeluaran untuk konsumsi, terutama untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, selain itu komponen ekspor dan impor juga memiliki peran yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB provinsi di Jawa-Bali.
- Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan, komponen impor barang dan jasa tahun 2011 mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu 11,42 persen dan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, disusul oleh pertumbuhan komponen pegeluaran ekspor 10,08 persen dan komponen PMTB 7,48 persen (*Tabel 2-27*).
- Perkembangan ekonomi dari sisi permintaan untuk setiap provinsi, secara keseluruhan tumbuh positif, dengan pertumbuhan ekspor tertinggi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur, sedangkan untuk pertumbuhan Impor hampir di seluruh provinsi kecuali di Jawa Timur dan DI. Yoyakarta (*Tabel 2-28*).

Tabel 2-26:
Distribusi Persentase PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
DKI Jakarta	55.18	1.83	9.89	36.68	1.51	55.05	60.14
Jawa Barat	59.28	0.41	8.89	18.16	7.26	35.40	29.40
Jawa Tengah	64.26	1.39	11.28	18.47	3.14	44.59	43.14
DI Yogyakarta	50.83	3.33	25.21	31.79	3.59	38.90	53.65
Jawa Timur	67.57	0.62	7.33	19.36	1.14	50.30	46.32
Banten	44.55	0.59	4.76	32.20	0.51	83.57	66.18
Bali	60.42	0.83	13.03	30.76	(2.15)	103.78	106.67
P. JAWA + BALI	**60.01**	**1.06**	**9.22**	**24.86**	**2.94**	**49.94**	**48.03**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 2-27:
Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-2011, (dalam persen)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					RATA-RATA 2007-2011
	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	
Konsumsi Rumah Tangga	6,47	5,81	6,48	5,48	6,43	6,13
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8,27	8,67	21,18	(2,85)	6,59	8,37
Konsumsi Pemerintah	7,95	3,94	11,37	4,11	4,81	6,43
PMTB	5,85	7,76	15,03	8,12	7,84	8,92
Perubahan Stock	(6,40)	(463,32)	(56,52)	(24,11)	(4,08)	(110,89)
Ekspor Barang & Jasa	4,10	2,39	(0,94)	9,98	10,08	5,12
Impor Barang & Jasa	4,83	11,08	(3,10)	8,82	11,42	6,61

Sumber: BPS, 2012

Tabel 2-28:

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

NO.	PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
1.	DKI Jakarta	6.20	7.81	3.74	9.96	(28.80)	12.16	12.80
2.	Jawa Barat	5.80	4.45	5.94	9.77	(626.49)	6.51	13.59
3.	Jawa Tengah	6.59	2.93	7.75	7.60	(153.30)	7.19	10.72
4.	DI Yogyakarta	6.95	13.89	5.28	4.57	(43.15)	6.71	4.23
5.	Jawa Timur	7.16	7.79	0.84	11.48	(70.55)	11.11	7.55
6.	Banten	5.17	9.31	9.04	8.23	7.88	11.59	14.84
7.	Bali	7.35	7.57	13.79	11.83	20.95	7.81	10.97
P. JAWA + BALI		**6.43**	**6.59**	**4.81**	**9.83**	**(4.08)**	**10.08**	**11.42**

Sumber: BPS, 2012

Investasi PMA dan PMDN:

- Perkembangan investasi PMDN dan PMA Wilayah Jawa-Bali dalam tiga tahun terakhir meningkat. Sebagian besar nilai realisasi Investasi PMDN dan PMA di Jawa-Bali terbesar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Tabel 2-29:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% PULAU
DKI Jakarta	1.837,3	9.693,8	4.598,5	9.256,4	8.540,1	15,3
Jawa Barat	4.289,5	4.724,8	15.799,8	11.194,3	11.384,0	20,4
Jawa Tengah	1.336,3	2.642,6	795,4	2.737,8	5.797,1	10,4
DI Yogyakarta	-	32,9	10,0	1,6	334,0	0,6
Jawa Timur	2.778,3	4.290,7	8.084,1	9.687,5	21.520,3	38,6
Banten	1.989,1	4.381,7	5.852,5	4.298,6	5.117,5	9,2
Bali	29,0	50,8	313,4	313,4	3.108,0	5,6
P. JAWA+BALI	**12.259,5**	**25.817,3**	**35.453,7**	**37.489,6**	**55.800,9**	**100,0**
% TERHADAP NASIONAL	**60,2**	**68,3**	**91,8**	**91,8**	**91,8**	

Sumber : BKPM, 2012

Tabel 2-30:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% PULAU
DKI Jakarta	9.927,8	5.510,8	6429,3	4.824,1	4.107,7	29,0
Jawa Barat	2.552,1	1.934,4	1692	3.839,4	4.210,7	29,8
Jawa Tengah	135,3	83,1	59,1	175,0	241,5	1,7
DI Yogyakarta	16,6	8,1	4,9	2,4	84,9	0,6
Jawa Timur	457,3	422,1	1769,2	1.312,0	2.298,8	16,3
Banten	477,8	1.412,0	1544,2	2.171,7	2.716,3	19,2
Bali	80,8	227,2	278,3	482,1	482,0	3,4
P. JAWA+BALI	**13.647,7**	**9.597,7**	**11.777,0**	**12.806,6**	**14.142,0**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**91,8**	**88,7**	**72,6**	**91,8**	**91,8**	

Sumber : BKPM, 2011

Perdagangan Ekspor dan Impor:

- Perkembangan perdagangan ekspor nonmigas Wilayah Jawa-Bali dari tahun 2006-2010 kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Peranan wilayah Jawa-Bali terhadap nilai ekspor non migas nasional yakni 45,11, dengan Nilai ekspor non migas terbesar di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, sementara yang terendah di provinsi Bali (*Tabel 2-31*).
- Perkembangan perdagangan impor non migas provinsi di Wilayah Jawa-Bali dari tahun 2006-2010 meningkat setiap tahunnya, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 31,35 persen. Peranan wilayah Jawa-Bali terhadap nilai impor non migas nasional yakni 83,07, nilai impor terbesar di DKI Jakarta dan Jawa Timur (*Tabel 2-32*).
- Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Jawa-Bali dari tahun 2006-2010 mengalami penurunan bahkan pada tahun 2008-2010 menunjukan angka negatif, dengan penurunan terbesar pada tahun 2010 yaitu Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Neraca perdagangan untuk Provinsi Jawa Barat, DI Yoyakarta, Jawa Timur dan Bali tahun 2010 memiliki surplus perdagangan dan lebih tinggi terhadap surplus perdagangan tahun sebelumnya (*Tabel 2-33*).

Tabel 2-31:

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2006-2010. (dalam juta US$)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN. (%)	PERAN (%)
						2010	2010
DKI Jakarta	29.034,4	31.208,9	35.214,5	31.949,6	39.546,2	67,57	30,48
Jawa Barat	240,7	324	412,5	346,6	534,9	0,91	0,41
Jawa Tengah	2.899,3	3.122.5	2287,3	2.885,3	3.674	6,28	2,83
D.I. Yogyakarta	4,4	2.5	2,7	3,7	12,9	0,02	0,01
Jawa Timur	8.740,7	11.429,3	8.892	10.382	13.805,5	23,59	10,64
Banten	807,3	577,3	660,3	523,3	577,5	0,99	0,45
Bali	298,6	287,7	183,1	253,6	372,1	0,64	0,29
P. JAWA+BALI	**42.025,4**	**46.952,2**	**47.652,4**	**46.344,1**	**58.523,1**	**100,00**	**45,11**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan. 2010

Tabel 2-32:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2006-2010. (dalam juta US$)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN. (%)	PERAN. (%)
						2010	2010
DKI Jakarta	25.422,9	33.019	59.976,7	46.109,7	67.651,2	75,24	62,49
Jawa Barat	68,8	156,9	188,1	114,7	171,4	0,19	0,16
Jawa Tengah	1.033	1.504,8	2.453,6	2.469,2	4.071,6	4,53	3,76
D.I. Yogyakarta	1,4	0,1	0,5	1	1,4	0,00	0,00
Jawa Timur	5.499,3	7.264,7	11.623,7	9.035,2	12.373	13,76	11,43
Banten	3.238,3	3.887,1	5.090,3	4.087,6	5.401,1	6,01	4,99
Bali	27,8	44,3	103,3	249,8	248,8	0,28	0,23
JAWA-BALI	**35.291,5**	**45.876,9**	**79.436,2**	**62.067,2**	**89.918,5**	**100,00**	**83,07**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan. 2010

Tabel 2-33:
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2006-2010. (dalam juta US$).

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010
DKI Jakarta	3.611,5	-1.810,1	-24.762,2	-14.160,1	-2.8105
Jawa Barat	171,9	167,1	224,4	231,9	363,5
Jawa Tengah	1.866,3	1.617,7	-166,3	416,1	-397,6
D.I. Yogyakarta	3	2,4	2,2	2,7	11,5
Jawa Timur	3.241,4	4.164,6	-2.731,7	1.346,8	1.432,5
Banten	-2431	-3.309,8	-4,430	-3.564,3	-4.823,6
Bali	270,8	243,4	79,8	3,8	123,3
JAWA-BALI	**6.733,9**	**1.075,3**	**-31.783,8**	**-15.723,1**	**-31.395,4**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan. 2010

Komoditas Unggulan. Perkembangan komoditas unggulan di Wilayah Jawa+Bali ditunjukan perkembangan jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman perkebunan, jenis aktivitas peternakan, dan perikanan dan kelautan Tanaman Pangan Padi:

- Wilayah Jawa-Bali merupakan produsen padi terbesar secara nasional, produksi padi Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013 mencapai sebesar 37.409.203 ton atau sekitar 54,00 persen dari produksi padi nasional (*Tabel 2-34*). Sentra produksi padi Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah (*Tabel 2-35*).
- Dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas padi Jawa-Bali (58,11 kw,ha) berada di atas rata-rata produktivitas nasional (51 Kw/ha).

Tabel 2-34:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2006-2012

Tahun	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2008	13.597.423	4,32
2009	14.399.610	4,36
2010	15.200.446	4,50
2011	5.407.591	4,57
2012	16.299.293	4,61
2013	37.409.203	5,81

Sumber: BPS, 2013

Tabel 2-35:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011.

PROVINSI	Produksi	% Terhadap Pulau	% Terhadap Nasional	Produktivitas
DKI Jakarta	12.451	0,03	0,02	60,97
Jawa Barat	11.892.500	31,79	17,17	60,44
Jawa Tengah	10.146.860	27,12	14,65	57,09
DI Yogyakarta	881.546	2,36	1,27	58,21
Jawa Timur	11.690.178	31,25	16,88	59,51
Banten	1.923.042	5,14	2,78	52,06
Bali	862.626	2,31	1,25	58,50
P. JAWA - BALI	**37.409.203**	100,00	54,00	**58,11**
NASIONAL	**69.271.053**		100,00	**51,50**

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Palawija:

- Produksi terbesar tanaman palawija Wilayah Jawa-Bali adalah jagung dan ubi kayu, perkembangan produksi kedua komoditas tersebut dari 2008-2013 terus meningkat (*Tabel 2-36*), dengan produksi tahun 2013 masing-masing sebesar 10.238.832 ton dan 9.964.990 ton. Dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas untuk tanaman palawija di Wilayah Jawa-Bali rata-rata masih lebih rendah dari produktivitas tanaman palawija nasional (*Tabel 2-37*).
- Sentra produksi jagung dan ubi kayu terbesar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah (*Tabel 2-37*).

Tabel 2-36:
Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2008-2013, (ton).

Tahun	Produksi (ton)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	8.756.042	178.110	548.410	528.320	759.855	10.072.438
2009	9.547.250	207.694	569.625	660.360	899.555	10.310.699
2010	9.576.732	175.028	558.957	638.766	827.176	10.953.712
2011	9.576.732	180.147	547.074	642.599	837.099	10.044.611
2012	10.773.890	191.144	520.262	611.850	1.115.667	11.322.014
2013	10.238.832	170.291	575.126	610.070	1.361.193	9.964.990

Sumber :BPS, 2013

Tabel 2-37:
Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2008-2013. (kw/ha)

Tahun	Produktivitas (kw/ha)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	36,68	8,31	12,25	11,43	107,97	152,25
2009	38,24	8,39	12,64	11,99	109,77	159,47
2010	39,25	8,43	12,44	11,76	108,73	168,99
2011	39,25	8,47	12,27	11,88	108,50	161,65
2012	43,18	8,43	12,20	11,79	145,07	173,55
2013	40,09	8,40	11,92	12,18	144,47	159,95

Sumber :BPS, 2013

Tabel 2-38:
Perbandingan Produksi Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013, (ton).

Provinsi	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1.091.572	10.664	87.372	55.944	490.836	2.172.924
Jawa Tengah	2.992.843	97.588	159.381	135.785	194.440	3.398.454
DI Yogyakarta	273.044	349	67.126	30.904	5.175	942.880
Jawa Timur	5.807.959	60.037	238.667	374.311	582.432	3.209.028
Banten	12.554	642	11.944	5.854	23.908	88.405
Bali	60.860	1.011	10.636	7.272	64.402	153.299
P. JAWA-BALI	**10.238.832**	**170.291**	**575.126**	**610.070**	**1.361.193**	**9.964.990**
NASIONAL	**18.838.529**	**257.129**	**786.868**	**847.157**	**2.594.081**	**23.627.955**
% TERHADAP NASIONAL	**54,35**	**66,23**	**73,09**	**72,01**	**52,47**	**42,17**

Sumber :BPS, 2013

Tabel 2-39:
Perbandingan Produktivitas Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013. (kw/ha).

Provinsi	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	71,18	11,23	16,34	15,29	174,30	217,42
Jawa Tengah	55,19	11,89	16,28	16,13	196,46	216,86
DI Yogyakarta	39,39	6,16	9,79	12,64	115,00	154,00
Jawa Timur	48,91	11,50	15,54	16,25	279,77	219,09
Banten	33,89	8,11	12,64	12,28	127,31	147,51
Bali	32,09	9,92	12,86	12,65	118,45	164,75
P. JAWA-BALI	**40,09**	**8,40**	**11,92**	**12,18**	**144,47**	**159,95**
NASIONAL	**48,42**	**11,62**	**14,54**	**14,82**	**151,97**	**216,38**

Sumber :BPS, 2013

Tanaman Perkebunan:

- Wilayah Jawa-Bali merupakan salah satu sentra penghasil komoditasi perkebunan, dengan komoditas unggulan perkebunan kelapa, karet, tembakau, teh dan kopi.
- Pada tahun 2011, sentra produksi kelapa, tembakau dan kopi terbesar terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta (*Tabel 2-41*). Sentra produksi teh terdapat di Jawa Barat, sentra produksi karet terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI. Yogyakarta, dan sentra produksi untuk kelapa sawit terdapat di Jawa Barat dan Banten (*Tabel 2-42*).

Tabel 2-40:
Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2005-2011

LUAS AREAL (HA)								
TAHUN	**KAKAO**	**KARET**	**KELAPA**	**KELAPA SAWIT**	**KOPI**	**TEH**	**TEMBAKAU**	**TEBU**
2005	79.095	79.095	1.175.177	22.820	194.636	118.601	165609	239.313
2006	78.917	78.917	1.176.815	23.908	194.504	116.714	140470	247.592
2007	79.306	79.306	1.173.959	25.444	200.702	112.915	160422	278.038
2008	79.522	79.522	1.145.618	26.425	208.149	111.687	157023	277.442
2010	105.887	133.596	945.068	27.671	170.565	108.703	152.737	277.654
2011	-	133.946	924.375	28.909	184.497	107.788	128.122	-

Sumber: Departemen Pertanian, 2011

Tabel 2-41:
Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2005-2011

PRODUKSI (TON)								
TAHUN	**KAKAO**	**KARET**	**KELAPA**	**KELAPA SAWIT**	**KOPI**	**TEH**	**TEMBAKAU**	**TEBU**
2005	24.074	97.068	756.968	35.834	85.546	134.089	112.742	1.387.025
2006	34.999	126.229	689.243	52.345	89.333	116.773	109.242	1.454.908
2007	33.011	129.908	726.105	51.856	88.286	124.724	117.475	1.733.527
2008	35.010	130.055	751.222	44.385	93.742	129.219	113.042	1.697.044
2010	40.954	117.613	775.012	50.819	101.421	124.238	91.948	1.482.657
2011	-	134.446	761.683	50.998	96.344	113.754	104.913	-

Sumber: Departemen Pertanian, 2011

Tabel 2-42:

Produksi Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011. (dalam ton)

PROVINSI	KELAPA SAWIT	KARET	KELAPA	KOPI	TEMBAKAU	TEH
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	24.423	59.921	142.209	12.131	2.218	99.203
Jawa Tengah	-	32.737	180.080	15.346	23.748	10.779
D.I Yogyakarta	-	32.737	180.080	15.346	23.748	10.779
Jawa Timur	-	25.554	260.146	53.384	78.210	3.714
Banten	26.575	16.134	55.613	1.957	-	-
Bali	-	100	70.033	13.174	198	-
P. JAWA+BALI	**50.998**	**167.183**	**888.161**	**111.338**	**128.122**	**124.475**

Sumber: Departemen Pertanian, 2011

Tabel 2-43:

Luas Areal Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011. (dalam ha).

PROVINSI	KELAPA SAWIT	KARET	KELAPA	KOPI	TEMBAKAU	TEH
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	12.613	53.231	183.907	32.638	7.543	95.915
Jawa Tengah	-	30.993	235.415	40.420	43.840	9.288
D.I Yogyakarta	-	-	39.693	1.517	3.199	130
Jawa Timur	-	25.694	294.187	99.544	129.313	2.455
Banten	16.296	23.933	100.247	10.378	-	-
Bali	-	95	70.926	-	1.128	-
P. JAWA+BALI	**28.909**	**133.946**	**924.375**	**184.497**	**185.023**	**107.788**

Sumber: Departemen Pertanian, 2011

Peternakan:

- Jenis ternak besar yang banyak diusahakan di Jawa-Bali adalah domba, kambing dan sapi potong. Perkembangan populasi dari ketiga jenis ternak tersebut rata-rata meningkat dalam tiga tahun terakhir (*Tabel 2-44*).
- Sentra populasi ternak tahun 2013, domba dan kambing terdapat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan jawa Timur; populasi sapi potong terbesar di Jawa Timur dan Jawa Tengah (*Tabel 2-45*).
- Perkembangan ternak unggas di Wilayah Jawa-Bali dalam empat tahun terakhir rata-rata meningkat, dengan populasi ternak unggas terbesar jenis ayam ras pedaging dan ayam buras (*Tabel 2-46*).
- Peyebaran ternak ayam buras pedaging terbesar di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, sementara untuk ayam buras di Jawa Tengah, Jawa Timur dan jawa Barat (*Tabel 2-47*).

Tabel 2-44:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010-2013

Tahun	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
2010	1120409	10094693	9544120	466413	43178	488582	6832648
2011	1125,72	10550989	9946170	365184	41019	592574	8149790
2012	1122186	12533391	10268919	362265	46104	606179	8504763
2013	1137793	13616061	10534887	368060	46577	627225	8738209

Sumber: BPS 2011

Tabel 2-45:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013

PROVINSI	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
DKI Jakarta	1.450		133	212	2.781	1.214	
Jawa Barat	6.871	9.214.234	2.324.828	124.212	14.599	143.382	444.155
Jawa Tengah	166.718	2.495.427	3.996.544	81.827	18.231	155.324	2.092.436
DI Yogyakarta	14.773	159.455	381.341	822	1.656	4.511	424.839
Jawa Timur	37.312	1.104.931	2.951.463	33.498	11.632	323.814	5.058.853
Banten	10.007	642.006	807.561,00	125.746	213	49	56.942
Bali	900.662	8	73.150	1.955	246	145	660.984
P. JAWA+BALI	**1.137.793**	**13.616.061**	**10.534.887**	**368.060**	**46.577,00**	**627.225,00**	**8.738.209**

Sumber: BPS, Tahun 2011

Tabel 2-46:

Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010-2013

Tahun	Populasi (ekor)			
	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
2010	671259,95	106600,53	62739,03	21980,8
2011	863441,86	113445,29	80252,54	22170,18
2012	909276,09	117967,75	85088,23	21235,17
2013	992215,67	121858,12	87990,1	21799,58

Sumber: BPS, 2013

Tabel 2-47:

Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2013, (ribu ekor)

PROVINSI	Populasi Unggas (ekor)			
	Ayam Buras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
DKI Jakarta	147			23,24
Jawa Barat	680.453	29.112	13.073,67	8.943,18
Jawa Tengah	80.083	41.829	20.394,37	5.847,95
DI Yogyakarta	6.114	4.116	3.414,54	566,33
Jawa Timur	159.845	32.626	41.275,34	4.001,67
Banten	59.932	9.991	5.455,07	1.760,13
Bali	5.643	4.184	4.377,11	657,08
P. JAWA+ BALI	**992.216**	**121.858**	**87.990,10**	**21.799,58**
NASIONAL	**1.355.288**	**290.455,06**	**147.279,35**	**46.312,53**

Sumber: BPS, 2013

Perikanan dan Kelautan:

- Tingkat perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2011 di Wilayah Jawa-Bali rata-rata meningkat, kecuali untuk perikanan budidaya di sawah (*Tabel 2-48*).
- Produksi perikanan tangkap terbesar di wilayah Jawa-Bali yaitu jenis perikanan tangkap laut dan produksi untuk perikanan budidaya terbesar yaitu budidaya laut, kolam, dan tambak.
- Produksi perikanan tangkap laut tahun 2011 terbesar terdapat di Provinsi Jawa timur dan Jawa Tengah, perikanan budidaya di laut di Jawa Timur dan Bali, budidaya kolam di Jawa barat dan Jawa Timur, dan budidaya tambak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa tengah.

Tabel 2-48:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Jawa Bali
Tahun 2005-2011

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
	Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
2005	862.728	36.516	48.378	251.154	186.942	3.827	87.852	93.835
2006	914.710	42.495	31.301	215.511	206.703	2.859	124.558	78.679
2007	915.155	36.369	32.902	282.300	210.921	2.776	152.014	50.039
2008	948.057	38.531	99.984	278.192	254.264	2.324	156.495	75.556
2009	971.359	38.954	357.900	308.934	283.925	1.887	148.907	48.994
2010	965.873	46.557	459.251	471.096	445.246	3.296	176.617	54.455
2011	1.042.028	47.470	469.903	535.092	567.643	4.044	218.543	29.033

Sumber: DKP, tahun 2008; Keterangan : Data Potensi dan Realisasi adalah 2008

Tabel 2-49:

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali
Tahun 2011

PROVINSI	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya					
	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
DKI Jakarta	180.198	-	26.726	1.800	5.617	-	-	-
Jawa Barat	185.825	11.168	7.934	179.980	295.715	491	185.428	25.556
Jawa Tengah	251.536	19.083	5.737	115.786	94.566	2.697	21.823	2.255
D.I Yogyakarta	3.954	1.048	-	499	43.795	85	22	142
Jawa Timur	362.624	13.203	412.798	177.682	115.086	676	9.281	341
Banten	57.891	2.968	16.708	59.345	12.864	95	1.989	739
Bali	100.503	871	106.667	2.232	6.602	-	3.533	338
P. JAWA+BALI	**1.142.531**	**48.341**	**576.570**	**537.324**	**574.245**	**4.044**	**222.076**	**29.371**

Sumber: BPS 2011

1.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH

Infrastruktur Jalan. Perkembangan kondisi jalan di Wilayah Jawa+Bali ditunjukan dengan panjang jalan berdasarkan status pembinaannya, rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), dan kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU), dengan kriteria tidak mantap dan mantap.

- Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di wilayah Jawa Bali, meliputi jalan Nasional 6.146 km, Jalan Provinsi 10.531 km, dan Jalan kabupaten/kota 103.125 km. Jalan terpanjang antar provinsi di wilayah Jawa Bali berada di Jawa Timur meliputi 33 persen. Perkembangan total panjang jalan dalam periode 2008-2010 meningkat sepanjang 3.967 Km, dengan peningkatan tertinggi dari jalan kabupaten 2.068 Km (*Tabel 2-50*).
- Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*) pada tahun 2010 di wilayah Jawa Bali sebesar 0,89 Km/Km^2, lebih tinggi dari nasional (0,25 Km/Km^2). Kerapatan jalan antarprovinsi tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,65 Km/Km^2, dan terrendah di provinsi Banten sebesar 0,67 Km/Km^2 (*Gambar2-8*).
- Kondisi kualitas jalan tidak mantap di wilayah Jawa Bali menurut kriteria IRI *(International Roughness Index)*, Departemen PU), cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 6.104,41 ribu Km sebanyak 419 Km

kondisinya tidak mantap. Jalan tidak mantap tersebut sebesar 78,90 persen termasuk kategori rusak ringan dan 21,10 persen rusak berat (*Gambar 2-9*).

- Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, persentase jalan tidak mantap tertinggi di Provinsi DI. Yogyakarta dan Banten, sementara kondisi jalan nasional tidak mantap terrendah terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,59 persen, dengan komposisi 87,39 persen rusak ringan dan 12,61 persen rusak berat (*Tabel 2-51*).

Tabel 2-50:
Perkembangan Panjang Jalan menurut Status Pembinaannya di Wilayah Sumatera Tahun 2008 dan 2010.

PROVINSI	PANJANG JALAN (KM)							
	JALAN NASIONAL		JALAN PROVINSI		JALAN KAB/KOTA		TOTAL	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
DKI Jakarta	122	143	1.125	1.329	4.938	4.937	6.185	6.409
Jawa Barat	1.141	1.351	2.141	2.199	22.575	22.253	25.857	25.803
Jawa Tengah	1.298	1.391	2.550	2.540	25.056	25.272	28.904	29.203
D.I. Yogyakarta	169	223	690	690	4.000	3.840	4.859	4.753
JawaTimur	1.899	2.027	1.439	2.001	34.476	35.826	37.814	39.854
Banten	490	476	372	889	3.994	5.109	4.856	6.474
Bali	502	535	840	883	6.018	5.888	7.360	7.306
P. JAWA +BALI	**5.621**	**6.146**	**9.157**	**10.531**	**101.057**	**103.125**	**115.835**	**119.802**

Sumber Data: Ditjen BinaMarga, Kementerian PU

Gambar 2-8:
Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Road Density*) AntarProvinsi Di Wilayah Jawa Bali.

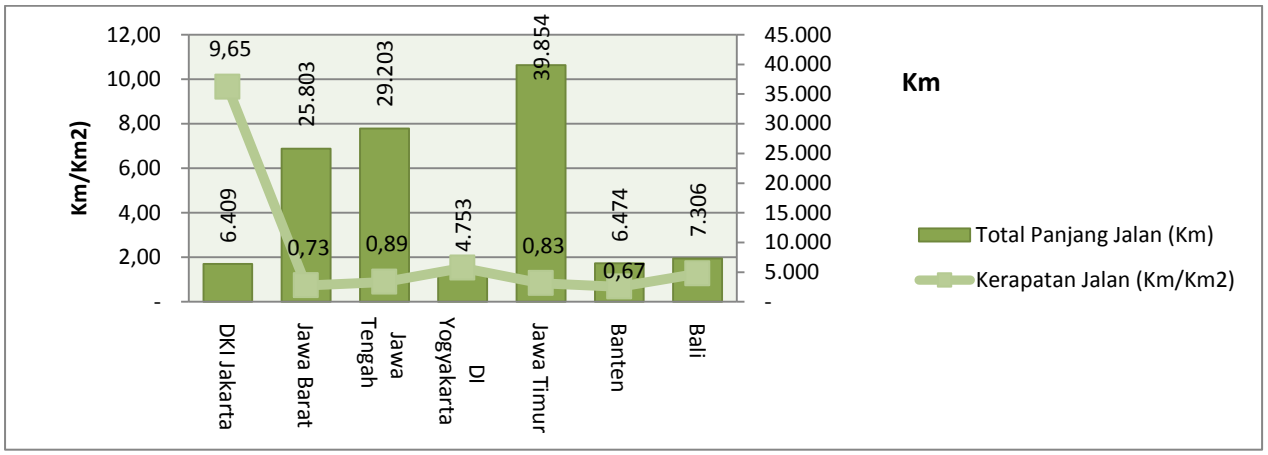

Sumber Data: Ditjen BinaMarga, Kementerian PU

Gambar 2-9:
Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Jawa Bali

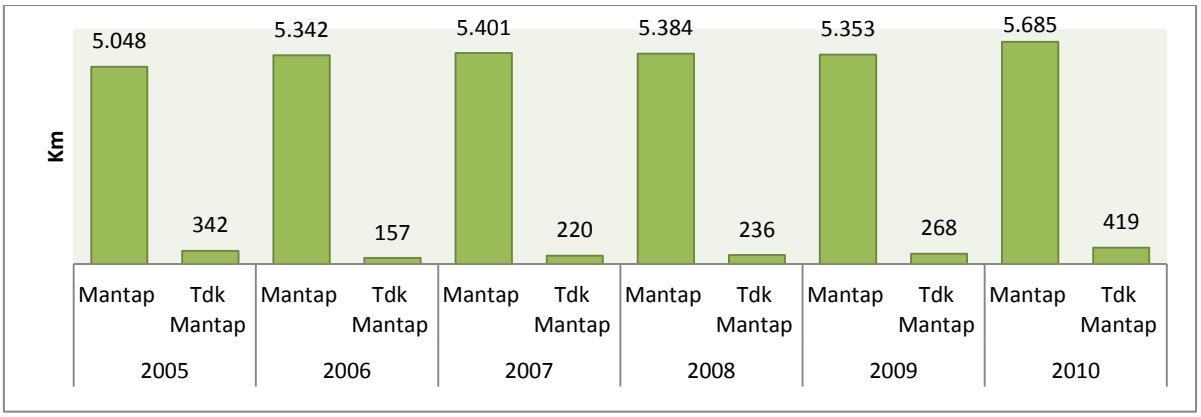

Sumber :BPS

Tabel 2-51:
Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010

PROVINSI	PANJANG JALAN NASIONAL (KM)	KUALITAS JALAN					
		PANJANG JALAN MANTAP		PANJANG JALAN TIDAK MANTAP		KOMPOSISI JALAN TIDAK MANTAP	
		(KM)	%	(KM)	%	% RUSAK RINGAN	% RUSAK BERAT
DKI Jakarta**)	142,65	138,44	97,05	4,21	2,95	97,62	2,38
Banten	476,49	354,16	74,33	122,33	25,67	60,61	39,39
Jawa Barat	1.341,05	1.226,60	91,47	114,45	8,53	85,59	14,41
Jawa Tengah	1.390,58	1.334,76	95,99	55,82	4,01	95,16	4,84
D.I. Yogyakarta	223,16	165,14	74,00	58,02	26,00	99,66	0,34
JawaTimur	1.995,30	1.963,58	98,41	31,72	1,59	87,39	12,61
Bali	535,18	502,49	93,89	32,69	6,11	48,73	51,27
P. JAWA +BALI	**6.104,41**	**5.685,17**	**93,13**	**419,24**	**6,87**	**78,90**	**21,10**
INDONESIA	**38.189,43**	**31.522,09**	**82,54**	**6.667,34**	**17,46**	**48,28**	**51,72**

Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness Tahun Anggaran 2010. Direktorat Jenderal Bina Marga (Status 18 Agustus 2010)

Energi Listrik. Perkembangan kondisi listrik di Wilayah Jawa+Bali ditunjukan dengan jumlah kapasitas terpasang, jumlah pelanngan listrik, rasio elektrifikasi, dan konsumsi listrik perkapita

- Kapasitas terpasang energy listrik PLN pada tahun 2011 di wilayah Jawa-Bali mencapai 22.517,45 Mw. Sebagian besar energy listrik tersebut bersumber dari PT. Indonesia Power sebanyak 39,95 persendan PT. PJB sebanyak 27,36 persen. Kedua pembangkit besar tersebut sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) (*Tabel 5-2*).
- Penggunaan energi untuk pelanggan rumah tangga di setiap satuan PLN/provinsi bertumbuh dengan kisaran tertinggi sebesar 16 persen (Provinsi Banten), sedangkan terrendah sebesar 7 persen (Provinsi DI. Yogyakarta). Rasio elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 adalah di wilayah Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebesar 103,52 persen, dan terrendah di Provinsi Banten sebesar 55,27 persen. Perkembangan rasio elektrifikasi dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di wilayah distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebesar 13,09 persen, dan terrendah di Provinsi Banten sebesar -13,89 persen (*Tabel 5-53*).
- Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di Dist. Jakarta Raya dan Tangerang sebesar 2.419,10 kWh/kapita, dan terrendah di Provinsi DI. Yogyakarta sebesar 535,52 kWh/kapita. Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi di Dist. Jakarta Raya dan Tangerang sebesar 316,81 kWh/kapita dan terrendah di Provinsi Banten yang berkurang sebesar 149,95 kWh/kapita (*Tabel 5-53*).

Tabel 2-52:

Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI	KAPASITAS TERPASANG MENURUT JENIS PEMBANGKIT (MW)								
	PLTA	PLTU	PLTG	PLTGU	PLTP	PLTD	PLT Bayu	Jumlah	%
Dist. JawaTimur	1,85					8,83		10,68	0,05
Dist. Jawa Tengah dan Yogyakarta	0,7							0,7	0,00
• Jawa Tengah	0,38							0,38	0,00
• D.I. Yogyakarta	0,32							0,32	0,00
Dist. Jawa Barat danBanten						0,2		0,2	0,00
• Jawa Barat									
• Banten						0,2		0,2	0,00
Dist. Jakarta Raya danTangerang									-
PT Indonesia Power	1.106,6	3.900,00	846,36	2.675,73	375	91,9		8.995,59	39,95
PT PJB	1.282,88	1.800,00	330,2	2.747,36				6.160,44	27,36
P3B Jawa Bali									-
Pembangkitan Muara Tawar			858					858	3,81
Pembangkitan PLTGU Cilegon		625		1.493,00				2.118,00	9,41
Pembangkitan TanjungJati B		2.840,00						2.840,00	12,61
Pembangkitan Lontar		600						600	2,66
Pembangkitan Indramayu		930						930	4,13
J A W A	2.392,03	10.695,00	2.034,56	6.916,09	375	100,93		22.513,61	99,98
DISTRIBUSI BALI						3,58	0,26	3,84	0,02
JAWA – BALI (MW)	**2.392,03**	**10.695,00**	**2.034,56**	**6.916,09**	**375,00**	**104,51**	**0,26**	**22.517,45**	**100,00**
%	**10,62**	**47,50**	**9,04**	**30,71**	**1,67**	**0,46**	**0,00**	**100,00**	

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Tabel 2-53:

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita.

SATUAN PLN/PROVINSI	PELANGGAN RUMAH TANGGA (RT)			RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			KWH JUAL/KAPITA		
	2009	2011	LAJU (%)	2009	2011	Δ (11-09)	2009	2011	Δ (11-09)
Dist. JawaTimur	6.546.970	7.303.144	12	64,73	73,66	8,93	564,77	637,28	72,51
Dist. Jawa Tengah dan Yogyakarta	6.740.884	7.481.640	11	69,92	78,75	8,83	414,78	478,44	63,66
- Jawa Tengah	6.002.195	6.692.664	12	69,85	78,91	9,06	407,59	472,29	64,7
- D.I. Yogyakarta	738.689	788.976	7	70,54	77,43	6,89	482,27	535,52	53,25
Dist. Jawa Barat dan Banten	7.944.135	9.035.919	14	66,85	68,73	1,88	755,42	826,26	70,84
- Jawa Barat	7.227.573	8.204.884	14	66,63	70,47	3,84	683,82	776,9	93,08
- Banten	716.562	831.035	16	69,16	55,27	-13,89	1.326,02	1.176,07	-149,95
Dist. Jakarta Raya dan Tangerang	3.245.987	3.516.485	8	90,43	103,52	13,09	2.102,29	2.419,10	316,81
J A W A	24.477.976	27.337.188	12	69,48	76,02	6,54	755,21	851,38	96,17
DISTRIBUSI BALI	656.299	729.153	11	72,77	68,63	-4,14	785,31	811,12	25,81

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Telekomunikasi. Perkembangan kondisi telekomunikasi di Wilayah Jawa+Bali digambarkan dengan akses desa terhadap pelayanan telepon kabel dan jumlah desa yang menerima sinyal telepon seluler**.**

- Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi diindikasikan oleh adanya *Base Transceiver Station* (BTS) atau Manara Telepon Seluler di sekitar wilayah tersebut. Penyebaran BTS di desa/kelurahan di wilayah Jawa Bali, terbanyak di Provinsi JawaTimur, dan menurut persentase desa/kelurahannya di Provinsi DKI Jakarta. Sementara untuk kategori jumlah terrendah adalah di DKI Jakarta, dan menurut persentasenya adalah Provinsi Jawa Tengah (*Gambar2-9*).
- Berdasarkan ketersediaan layanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telpon Seluler antarprovinsi di wilayah Jawa Bali, layanan telpon kabel terbanyak adalah di Provinsi Jawa Timur, sementara berdasarkan persentase tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan desa/kelurahan yang menerima sinyal telpon seluler dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat sudah mencapai hampir 100 persen di seluruh provinsi, namun diantaranya terdapat 13,2 persen yang masih menerima sinyal lemah (*Tabel 2-52*).

Gambar 2-9:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS menurut Provinsi Di Wilayah Jawa-Bali

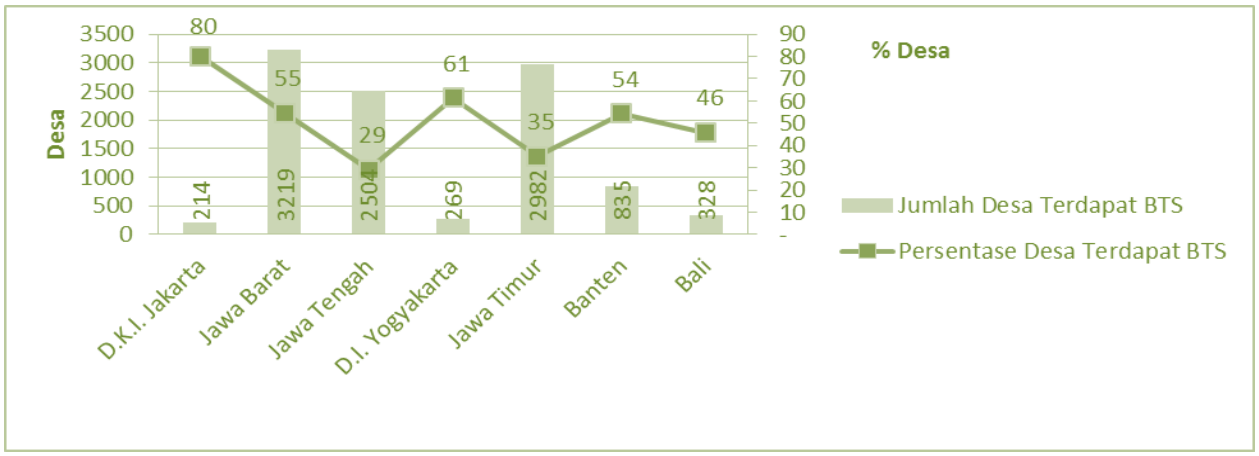

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Tabel 2-54:

Jumlahdan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telpon Seluler

PROVINSI	ADA PELANGGAN TELPON KABEL		PENERIMAAN SINYAL HP						JUMLAH DESA/KEL
			SINYAL LEMAH		SINYAL KUAT		LEMAH - KUAT		
	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	
DKI Jakarta	261	97,8		-	267	100,0	267	100,0	267
Jawa Barat	3434	58,2	579	9,8	5282	89,4	5861	99,3	5905
Jawa Tengah	3364	39,2	1193	13,9	7356	85,8	8549	99,7	8577
D.I. Yogyakarta	229	52,3	39	8,9	398	90,9	437	99,8	438
JawaTimur	5605	65,9	1406	16,5	7041	82,8	8447	99,4	8502
Banten	577	37,6	244	15,9	1285	83,7	1529	99,6	1535
Bali	431	60,2	51	7,1	662	92,5	713	99,6	716
P. JAWA+BALI	**13.901**	**53,6**	**3.512**	**13,5**	**22.291**	**85,9**	**25.803**	**99,5**	**25.940**

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)

***Air Bersih*.** Kondisi perkembangan pelayanan air bersih di Wilayah Jawa+Balia ditunjukan dengan persentase jumlah desa sungai/danau, air hujan, dan air kemasan

- Ketersediaan infrastruktur air bersih (PDAM) di wilayah Jawa-Bali hanya baru menjangkau 13 persen dari total desa/kelurahan. Pelayanan PAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta dan Bali, yaitu 45 persen dari total desa/kelurahan, sementara pelayanan terrendah berada di Provinsi Banten yaitu hanya 7 persen. Untuk memperoleh air bersih sebagian besar masyarakat (63%) di wilayah Jawa Bali menggunakan pompa listrik/pompa tangan atau sumur. Kondisi yang paling memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantung terhadap air hujan, dan banyak dihadapi oleh masyarakat di Jawa Timur mencapai 116 Desa, dan menurut persentase desa/kelurahan di provinsi, tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 8 persen.

Tabel 2-55:
Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010.

PROVINSI	PAM/PDAM		POMPALISTRIK / TANGAN/ SUMUR		MATA AIR		SUNGAI/ DANAU/ KOLAM		AIR HUJAN		AIR KEMASAN / LAINNYA		TOTAL	
	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%
DKI Jakarta	120	45	124	46	0	-	0	-	5	2	18	7	267	100
Jawa Barat	570	10	3826	65	1222	21	35	1	30	1	222	4	5.905	100
Jawa Tengah	1152	13	5370	63	1900	22	36	0	71	1	48	1	8.577	100
D.I. Yogyakarta	49	11	323	74	31	7	1	0	34	8	0	-	438	100
JawaTimur	1107	13	5583	66	1408	17	83	1	116	1	205	2	8.502	100
Banten	112	7	1050	68	177	12	46	3	6	0	144	9	1.535	100
Bali	322	45	91	13	229	32	17	2	42	6	15	2	716	100
JAWA-BALI	**3.432**	**13**	**16367**	**63**	**4967**	**19**	**218**	**1**	**304**	**1**	**652**	**3**	**25.940**	**100**

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)

2.5. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumberdaya Alam:

- Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Jawa-Bali berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan tahun 2009, luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Jawa-Bali sekitar 3.440.293,98 hektar atau 2,5 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan di wilayah Jawa-Bali paling luas adalah Hutan Produksi dan Hutan lindung.
- Penyebaran luas kawasan hutan lindung terbesar terdapat di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, dan Hutan produksi terbesar di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Gambar 2-10:
Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Jawa-Bali Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2009.

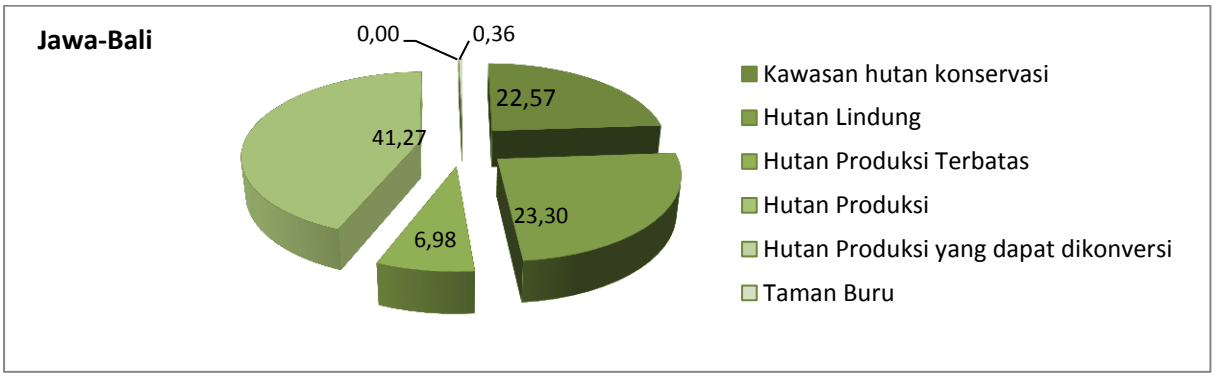

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009

Tabel 2-56:
Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009)

PROVINSI	KAWASAN SUAKA ALAM + KAWASAN PELESTARIAN ALAM (HA)			HUTAN LINDUNG (HA)	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HA)	HUTAN PRODUKSI (HA)	TAMAN BURU (HA)	JUMLAH KAWASAN HUTAN (HA)	JUMLAH KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN (HA)
	PERAIRAN	KWS. HUTAN	JUMLAH						
DKI Jakarta	108.000	272,34	108.272,3	44,76	-	158,35	-	475	108.475
Jawa Barat	-	119.759	119.759	291.306		202.965	12.421	816.603	816.603
Banten	51.467	112.991	164.458	12.359	49.439	26.998	-	201.787	253.254
Jawa Tengah	110.117	16.413	126.530	84.430	183.930	362.360	-	647.133	757.250
DI Yogyakarta	-	910,34	910,34	2.057,9	-	13.851,28	-	16.820	16.820
Jawa Timur	-	230,248	230.248,3	315.505,3	-	811.452,7	-	1.357.206	1.357.206
Bali	3.415	22,878,6	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1907,1	-	127.271	130.686
JAWA BALI	**272.999**	**503,473**	**776.471,6**	**801.469**	**240.088,3**	**1.419.692**	**12.421**	**3.167.295**	**3.440.294**

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan, 2009

Keterangan:
- *Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006*
- *Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK*

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup digambarkan dari beberapa indikator, antara lain yaitu gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan.

- Persentase jumlah desa/kelurahan yang mengalami gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air terbesar di wilayah Jawa-Bali terdapat di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Bali. Persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran udara terdapat di DI Yogyakarta dan Jawa Barat. Sementara persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran tanah terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Banten (*Tabel 2-57).*
- Sementara hasil pemantauan terakhir tahun 2009, tercatat jumlah titik panas meningkat mencapai 2122 titik yang sebagian besar terdapat di Jawa Timur dan Jawa Barat (*Tabel 2-58*).

- Luas lahan kritis di wilayah Jawa-Bali tahun 2010 mencapai 4.316.997 hektar atau sekitar 5,25 persen dari luas lahan kritis nasional, dengan kategori sangat kritis dan kritis sebagian besar terdapat di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, dan lahan kritis yang termasuk kategori agak kritis dengan sebaran paling luas di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (*Tabel 2-59*).
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Jawa-Bali yang mengalami kerusakan pada tahun 1998/1999 sebanyak 158 DAS, namun dalam perkembangannya hingga tahun 2007 berkurang menjadi 121 DAS. Berdasarkan kondisi DAS berdasarkan tingkat keprioritasannya, maka jumlah DAS yang tergolong super prioritas dan prioritas pada tahun 2007 berkurang dibanding tahun 1998/1999. Untuk DAS prioritas rendah tahun 1998/1999 sebanyak 1 DAS yaitu di provinsi Jawa Tengah, namun perkembangannya jumlah DAS priotitas rendah meningkat menjadi 30 DAS (*Tabel 2-60*).
- Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor di Wilayah Jawa-Bali tahun 2008 sebanyak 3.854 desa meningkat dibandingkan tahun 2005 (3.205 desa), dan yang terbesar di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah (*Gambar 2-11*).

Tabel 2-57:
Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008, dan 2011.

PROVINSI	Air			Tanah			Udara		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
DKI Jakarta	23,22	5,99	6,37	6,74	0,37	-	14,23	1,87	1,5
Jawa Barat	11	9,95	9,69	1,53	1,31	1,19	9,62	8,09	6,32
Jawa Tengah	6,18	5,04	4,84	1,17	0,43	0,85	7,6	4,53	5,25
DI Yogyakarta	8,9	5,71	5,94	1,83	0,68	1,37	19,86	9,59	8,9
Jawa Timur	5,6	4,81	3,82	0,59	0,46	0,76	8,47	7,33	7,45
Banten	10,53	8,98	8,99	1,69	1,53	1,63	13,36	7,85	10,49
Bali	10,13	8,01	5,17	2	0,56	0,56	3,42	3,65	3,07
P. JAWA-BALI	**10,79**	**6,93**	**6,40**	**2,22**	**0,76**	**1,06**	**10,94**	**6,13**	**6,14**
INDONESIA	**8,3**	**5,57**	**5,4**	**1,47**	**0,77**	**0,83**	**6,24**	**3,95**	**3,78**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistk Potensi Desa Tahun 2005 , 2008, dan 2011
Keterangan: 1) nilai rata-rata provinsi

Tabel 2-58:
Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi oleh Satelit NOAA, 2008 - 2011.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011*
DKI Jakarta	15	14	4	8
Jawa Barat	869	253	114	607
Jawa Tengah	1082	147	10	419
DI Yogyakarta	34	13	64	14
Jawa Timur	2643	691	259	838
Banten	52	76	33	192
Bali	154	7	14	44
JAWA-BALI	**4849**	**1201**	**498**	**2122**

**) Data sampai dengan Oktober 2011 / Up to Oktober 2011*
Sumber : Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2011, Kementerian Kehutanan

Tabel 2-59:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Jawa-Bali menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

PROVINSI	TINGKAT KEKRITISAN LAHAN			JUMLAH
	AGAK KRITIS(HA)	KRITIS(HA)	SANGAT KRITIS(HA)	
DKI Jakarta	1,520.30	0.3	-	1,520.60
Jawa Barat	896,278.10	415,805.60	68,138.60	1,380,222.30
Jawa Tengah	571,872.80	149,975.50	9,877.40	731,725.70
Dl Yogyakarta	74,836.20	33,088.30	470.6	108,395.10
Jawa Timur	1,064,475.60	506,335.60	102,576.90	1,673,388.10
Banten	195,459.20	56,753.30	10,749.60	262,962.10
Bali	110,731.50	45,111.60	2,940.00	158,783.10
P. JAWA+BALI	**2,915,173.70**	**1,207,070.20**	**194,753.10**	**4,316,997.00**
NASIONAL	**52,259,832.90**	**23,955,162.70**	**5,449,299.30**	**82,176,443.64**
% TERHADAP NASIONAL	**5.58**	**5.04**	**3.57**	**5.25**
PROPORSI LAHAN KRITIS (%)	**67.53**	**27.96**	**4.51**	**100.00**

Sumber: BPS 2010

Tabel 2-60:

Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penanganannya di Jawa-Bali Tahun 2007.

PROVINSI	JUMLAH DAS BERDASARKAN				TINGKAT KEPRIORITASANNYA			
	TAHUN 1994/95 - 1998/99				TAHUN 1999/2000 – 2007			
	SUPER PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH	SUPER PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH
DKIJakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	7	38		45	5	28	17	50
Jawa Tengah	15	20	1	36	3	10	5	18
Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
DlYogyakarta	3	1	-	4	1	3	0	4
Jawa Timur	8	19	-	27	1	34	2	37
Bali	5	41	-	46	1	5	6	12
P. JAWA-BALI	**38**	**119**	**1**	**158**	**11**	**80**	**30**	**121**

Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen Kehutanan RI

Gambar 2-11:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2005 dan 2008

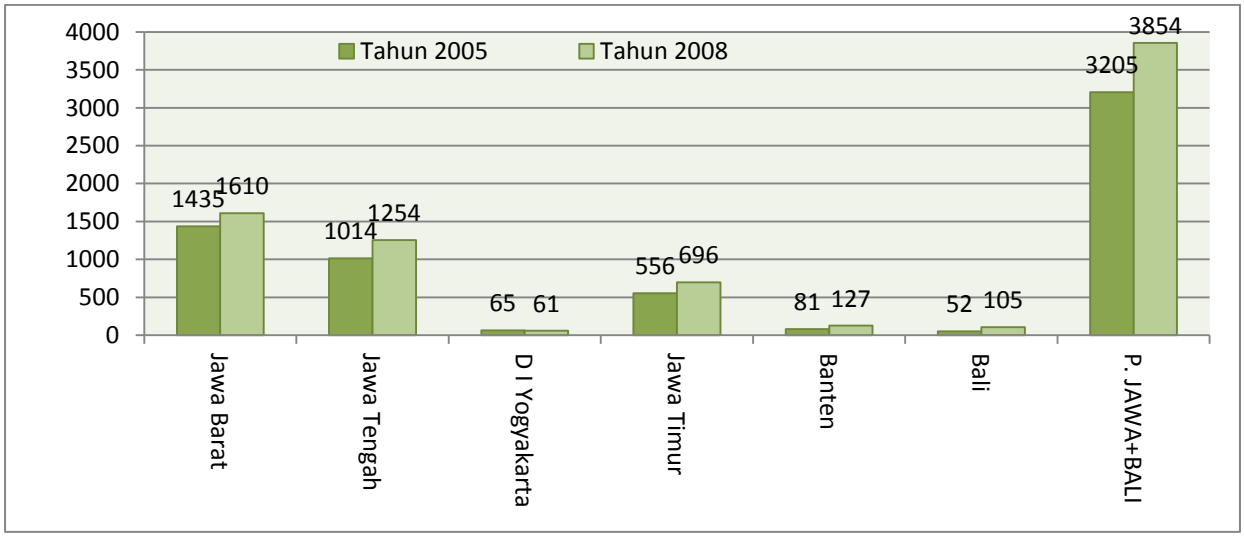

Sumber: BPS 2011

3.1. ADMINISTRASI WILAYAH

- Wilayah Nusa Tenggara secara administrasi terdiri dari 2 provinsi, 3 kota, 28 kabupaten, 402 kecamatan dan 3.688 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan sekitar 68.871,25 Km^2. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terletak antara 8° – 12° Lintang Selatan dan 115° – 125° Bujur Timur dan merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.472 pulau, yang terdiri dari74 pulau berpenghuni dan 1.398 pulau yang belum berpenghuni.

Tabel 3-1:
Administrasi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010.

PROVINSI	KOTA	KAB	KEC	DESA-KEL	LUAS (KM2)	PENDUDUK (JIWA)
Nusa Tenggara Barat	2	8	116	913	18.572	4.339.847
Nusa Tenggara Timur	1	20	286	2.775	48.718	4.474.954
P. NUSA TENGGARA	**3**	**28**	**402**	**3.688**	**67.290**	**8.814.801**

Sumber: Ditjen PUM Kemendagri (Mei 2010)

Tabel 3-2:
Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2009

PROVINSI	LUAS DARATAN(KM2)	PULAU BERNAMA	PULAU BELUM BERNAMA	JUMLAH
Nusa Tenggara Barat	18.572,32	461	403	864
Nusa Tenggara Timur	48.718,10	481	711	1.192
P. NUSA TENGGARA	**73.070,48**	**942**	**1.114**	**2.056**

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

3.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan. Kondisi umum kependudukan di Wilayah Nusa Tenggara digambarakan berdasarkan angka jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, penduduk menurut jenis kelamin *(sex ratio),* angka ketergantungan *(dependency ratio),* dan komposisi penduduk menurut usia.

- Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk wilayah Nusa Tenggara adalah sebesar 9.184 ribu jiwa atau meliputi 3,82 persen dari penduduk Indonesia, meningkat sebanyak 1.352,30 ribu jiwa dari tahun 2000 dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode (2000-2010) sebesar 1,62 persen lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk Indonesia (*Tabel 3-3*).
- Tingkat kepadatan penduduk wilayah Nusa Tenggara sebesar 136,5 jiwa per km^2 lebih tinggi dibanding kepadatan penduduk Indonesia, dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 242 jiwa per Km^2 (*Tabel 3-3*).
- Struktur penduduk menurut kelompok usia, lebih dari separuh (60,94 persen) penduduk Nusa Tenggara tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun), dan 34,29 persen merupakan penduduk usia 0-14 tahun (*Tabel 3-4*).
- Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di wilayah Nusa Tenggara adalah sebesar 64 persen lebih tinggi dari nilai *dependency ratio* nasional sebesar 51,3 persen (*Gambar 3-1*).
- Sementara itu dari sisi *Sex ratio,* di wilayah Nusa Tenggara adalah sebesar 96,5, artinya jumlah penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Menurut perbandingan antarprovinsi, *Sex Ratio* di Provinsi NTT lebih tinggi dibanding *sex ratio* di NTB (*Tabel 3-5*)

Tabel 3-3:
Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Nusa Tenggara Menurut Provinsi.

PROVINSI	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)		Kepadatan Penduduk per km²		Laju Pertumbuhan	
	2000	2010	2000	2010	90-00	00-10
Nusa Tenggara Barat	4.008,6	4.500,2	216	242	1,81	1,17
Nusa Tenggara Timur	3.823,1	4.683,8	78	96	1,63	2,07
P. NUSA TENGGARA	**7.831,7**	**9.184,0**	**116,4**	**136,5**	**1,72**	**1,62**
NASIONAL	**205.132,5**	**237.641,3**	**107,0**	**124,0**	**1,40**	**1,49**

Sumber Data : BPS, Sensus Penduduk

Tabel 3-4:
Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Nusa Tenggara Menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA	JUMLAH	%
Usia Muda (< 14 tahun)	3.149,46	34,29
Usia Produktif (15-64 tahun)	5.596,81	60,94
Usia Tua (>65 tahun)	437,77	4,77
Total Penduduk	**9.184,04**	**100,00**
Dependency Ratio		**64**

Sumber Data: Sensus 2010, BPS

Gambar 3-1:
Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010

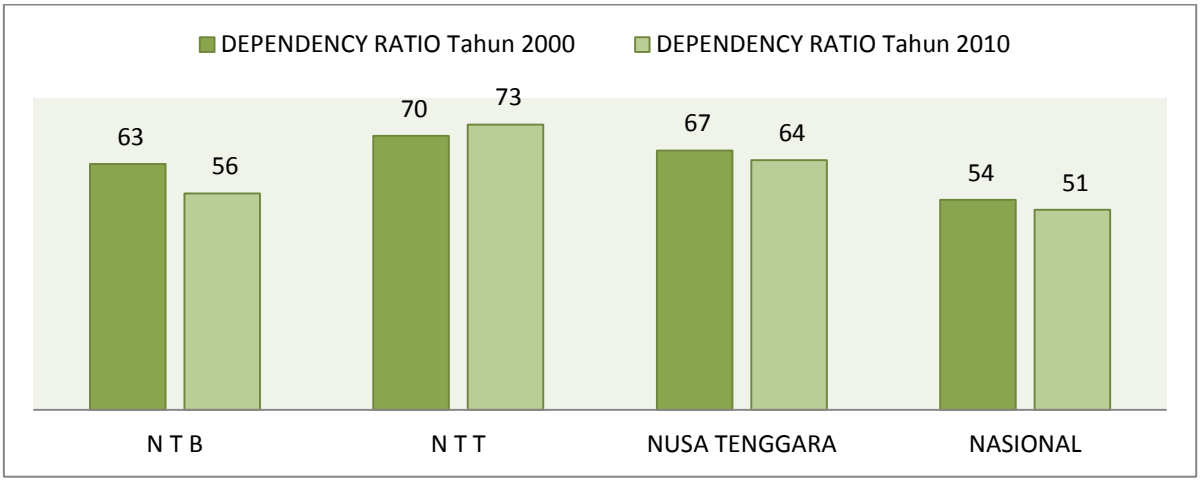

Sumber: BPS, 2010

Tabel 3-5:
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Antar Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010.

PROVINSI	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan	SEX RATIO
Nusa Tenggara Barat	2.183.646	2.316.566	4.500.212	94,26
Nusa Tenggara Timur	2.326.487	2.357.340	4.683.827	98,69
P. NUSA TENGGARA	**4.510.133**	**4.673.906**	**9.184.039**	**96,50**
NASIONAL	**119.630.913**	**118.010.413**	**237.641.326**	**101,37**

Sumber: BPS, 2010.

Ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Nusa Tenggara secara umum ditunjukan dengan perkembangan indicator utama, yaitu: jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur angkatan kerja menurut lapangan usaha dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

- Total angkatan kerja di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2013 (Februari) mencapai 4.543 ribu jiwa atau sekitar 3,75 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, dengan penyebaran Angkatan Kerja di wilayah Nusa Tenggara sebanyak 50,95 persen di Provinsi NTT dan 49,05 persen di Provinsi NTB (*Gambar 3-3*).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Nusa Tenggara menurun relatif cepat dibandingkan nasional selama periode 2008-2013 atau berkurang sebesar 1,23 persen. TPT Wilayah Nusa Tenggara tahun 2013 (Februari) mencapai 5,42 persen, lebih rendah dari TPT nasional 5,92 persen. Kondisi TPT pendidikan tahun 2012 masih didominasi oleh kelompok berpendidikan ≤SD dan berpendidikan SMTA Umum/Kejuruan (*Tabel 3-12*).
- Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2013 (Februari) mencapai 24.292 ribu jiwa, dengan pola persebaran penduduk bekerja sebagian besar berada di perdesaan (*Tabel 3-7*). Tingkat pendidikan penduduk bekerja masih tergolong rendah, sebagian besar merupakan tamatan SD dan SLTP (> 50 persen), semntara tamatan universitas dan akademi tidak sampai 10 persen (*Tabel 3-8*).
- Sementara dari sisi lapangan pekerjaan, penduduk bekerja masih dominan di sektor pertanian dan beberapa sektor lainnya yang sudah berkembang adalah sektor perdagangan dan jasa (*Tabel 3-9*).

Gambar 3-3:
Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Nusa Tenggara Periode 2008-2013 (Februari).

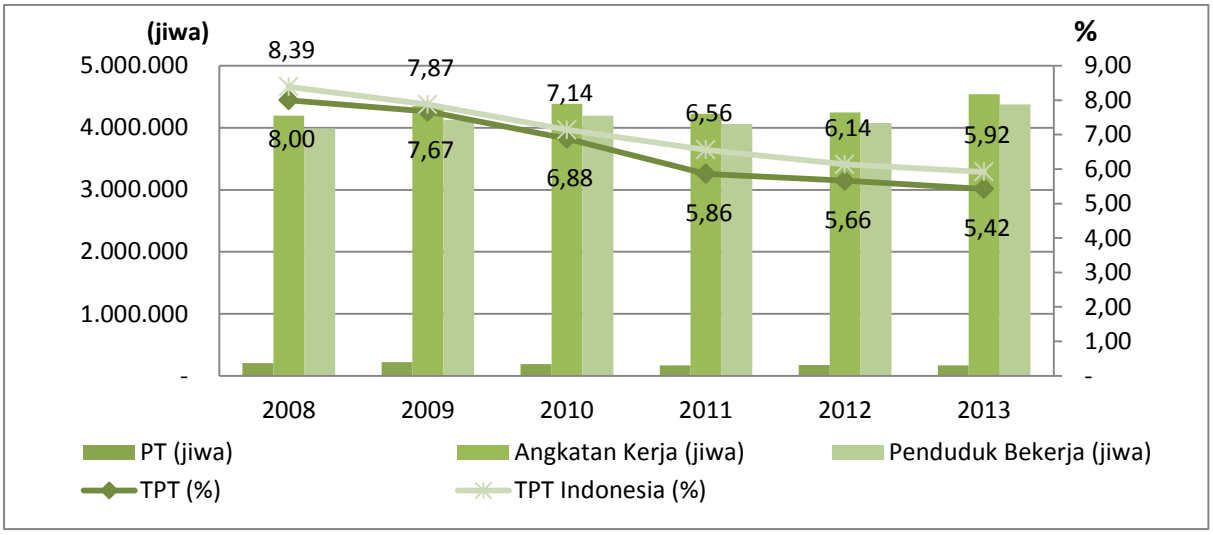

Sumber: Sakernas, Februari 2013, BPS 2013

Tabel 3-6:
Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012).

PROVINSI	PERKOTAAN (K)		PEDESAAN (D)		TOTAL (K+D)		%WIL
	JUMLAH (JIWA)	%	JUMLAH (JIWA)	%	JUMLAH (JIWA)	%	
Nusa Tenggara Barat	867.977	39,79	1.313.465	60,21	2.181.442	100,00	49,05
Nusa Tenggara Timur	370.076	16,33	1.895.929	83,67	2.266.005	100,00	50,95
P. NUSA TENGGARA	**1.238.053**	**27,84**	**3.209.394**	**72,16**	**4.447.447**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 3-7:
Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012)

PROVINSI	PERKOTAAN (K)		PEDESAAN (D)		TOTAL (K+D)		% WIL.
	JUMLAH (JIWA)	%	JUMLAH (JIWA)	%	JUMLAH (JIWA)	%	
Nusa Tenggara Barat	820.666	39,69	1.247.141	60,31	2.067.807	100	48,32
Nusa Tenggara Timur	343.516	15,53	1.868.353	84,47	2.211.869	100	51,68
P. NUSA TENGGARA	**1.164.182**	**27,20**	**3.115.494**	**72,80**	**4.279.676**	**100**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 3-8:
Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012)

PROVINSI	TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN						JUMLAH
	≤ SD	SMTP	SMTA UMUM	SMTA KEJURUAN	DIPLOMA I/II/III/ AKADEMI	UNI-VERSITAS	
Nusa Tenggara Barat	57,62	13,61	16,82	4,10	2,25	5,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,57	11,28	8,74	5,13	2,82	4,46	100,00
P. NUSA TENGGARA	**62,76**	**12,41**	**12,64**	**4,63**	**2,54**	**5,01**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 3-9:
Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha
Di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012)

PROVINSI	Lapangan Usaha *)									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nusa Tenggara Barat	45,3	1,7	6,6	0,2	4,9	21,2	4,4	1,2	14,6	100,0
Nusa Tenggara Timur	68,2	1,3	4,3	0,1	2,1	6,8	4,4	1,2	11,7	100,0
P. NUSA TENGGARA	**57,1**	**1,5**	**5,4**	**0,2**	**3,4**	**13,7**	**4,4**	**1,2**	**13,1**	**100,0**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Keterangan*):
1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Tabel 3-10:
Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	PT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
Nusa Tenggara Barat	6,13	5,37	0,76	107.795	120.000	(12.205)
Nusa Tengggara Timur	3,73	2,01	1,72	81.766	46.400	35.366
P. NUSA TENGGARA	**4,89**	**3,66**	**1,23**	**189.561**	**166.400**	**23.161**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012

Tabel 3-11:
Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012)

PROVINSI/WILAYAH	PERKOTAAN (K)		PEDESAAN (D)		TOTAL (K+D)		% WIL .
	JUMLAH (JIWA)	%	JUMLAH (JIWA)	%	JUMLAH (JIWA)	%	
Nusa Tenggara Barat	47.311	41,63	66.324	58,37	113.635	100	67,73
Nusa Tenggara Timur	26.560	49,06	27.576	50,94	54.136	100	32,27
P. NUSA TENGGARA	**73.871**	**44,03**	**93.900**	**55,97**	**167.771**	**100**	**2,20**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012

Tabel 3-12:
Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012)

PROVINSI	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN					JUMLAH
	≤ SD	SMTP	SMTA UMUM/ KEJURUAN	DIPLOMA I/II/III/ AKADEMI	UNIVERSITAS	
Nusa Tenggara Barat	56,54	10,84	25,32	0,81	6,49	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,06	17,01	36,96	9,18	13,79	100,00
P. NUSA TENGGARA	**45,74**	**12,83**	**29,08**	**3,51**	**8,85**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012

Kesehatan. Perkembangan dari kinerja kesehatan di Wilayah Nusa Tenggara dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama kesehatan, antara lain adalah: Umur Harapan Hidup (UHH), perkembangan Gizi Balita, persentase proses persalinan ditolong tenaga medis, dan persentase balita dengan status tinggi badan pendek (stunting).

- Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan. Hal ini dapat diindikasikan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), membaiknya status gizi balita, serta meningkatnya pelayanan tenaga medis bagi masyarakat. Namun, perbaikan kondisi kesehatan antarprovinsi tersebut masih belum merata, sehingga diperlukan upaya khusus dalam mengurangi kesenjangan kesehatan masyarakat.
- Berdasarkan estimasi UHH antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional. Estimasi UHH pada tahun 2010 di Provinsi NTB maupun NTT masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. UHH di NTB menunjukkan angka lebih rendah dibanding di NTT (*Tabel 3-13*).
- Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara tergolong masih tinggi dibandingkan nasional. Perkembangan prevalensi gizi buruk dan kurang di Provinsi NTT kinerjanya lebi baik dibandingkan NTT (*Tabel 3-14*).
- [1] Indikator Tinggi Badan/Umur (TB/U), perkembangan masalah pendek pada balita antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara, masih berada di atas angka nasional, bahkan menunjukkan angka tertinggi pada tingkat nasional. Masalah pendek tertinggi berada di Provinsi NTT (58,4 persen) dan terrendah di Provinsi NTB sebesar 48,3 persen (*Gambar 3-4*).
- Proses kelahiran Balita terakhir di Nusa Tenggara rata-rata masih dibawah nasional, persentase proses kelahiran ditolong tenaga medis di NTB masih lebih tinggi dibandingkan di NTT (*Tabel 3-15*).

[1] Indikator Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya digabung menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (*Stunting*), muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena *hygiene* dan sanitasi yang kurang baik.

Tabel 3-13:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2010.

PROVINSI/WILAYAH	2007	2010	Δ (2007-2010)
Nusa Tenggara Barat	66	67	1
Nusa Tenggara Timur	69,1	69,9	0,8
NASIONAL	**70,4**	**70,9**	**0,5**

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Tabel 3-14:
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010.

PROVINSI	2007			2010			Δ (2007-2010)
	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	
Nusa Tenggara Barat	8,1	16,7	24,8	10,6	19,9	30,5	-5,7
Nusa Tenggara Timur	9,4	24,2	33,6	9	20,4	29,4	4,2
INDONESIA	**5,4**	**13**	**18,4**	**4,9**	**13**	**17,9**	**0,5**

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Gambar 3-4:
Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara Pada Tahun 2007 dan 2010.

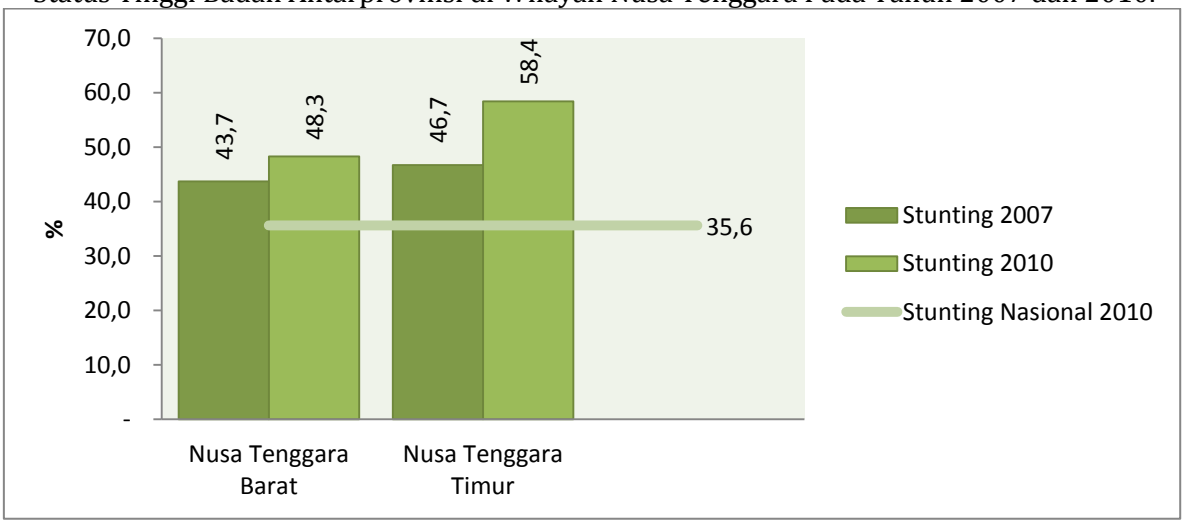

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Tabel 3-15:
Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

PROVINSI	TENAGA MEDIS				TENAGA NON MEDIS		
	DOKTER	BIDAN	TENAGA MEDIS LAINNYA	TOTAL	DUKUN	FAMILI	TOTAL
Nusa Tenggara Barat	9,6	69,9	0,2	79,8	19,7	0,5	20,2
Nusa Tenggara Timur	9,7	42,7	1,0	53,4	37,3	8,9	46,2
INDONESIA	**16,9**	**63,7**	**0,7**	**81,3**	**17,3**	**1,2**	**18,6**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Pendidikan. Perkembangan dari kinerja pendidikan di Wilayah Nusa Tenggara dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama pendidikan, antara lain adalah: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

- Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode 2009-2012 menunjukkan peningkatan, namun kondisi tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional (*Tabel 3-16*). Kondisi RLS Provinsi NTB sedikit lebih tingg dari NTT, sebaliknya untuk AMH Provinsi NTT lebih tinggi dari Provinsi NTB.
- Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2008-2012, seluruhnya menunjukkan perbaikan, namun pada tahun 2012 APS (16-180) di NTB dan APS (1-12) dan APS (13-15) di NTT lebih rendah dari APS nasional (*Tabel 3-17*).

Tabel 3-16:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012.

PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)			ANGKA MELEK HURUF (%)		
	2009	2012	Δ ('12-'09)	2009	2012	Δ ('12-'09)
Nusa Tenggara Barat	6.7	7.2	0.5	80.18	83.68	3.5
Nusa Tenggara Timur	6.6	7.1	0.5	87.96	88.73	0.77
NASIONAL	**7,7**	**7,9**	**0,2**	**92,58**	**92,81**	**0,23**

Sumber: SUSENAS 2012, BPS

Tabel 3-17:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008-2012

Provinsi	2008**			2012**			Δ 2008-2012**		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
Nusa Tenggara Barat	97,25	85,57	57,22	98,19	91,58	61,13	0,94	6,01	3,91
Nusa Tenggara Timur	93,72	77,76	49,67	96,13	88,73	62,22	2,41	10,97	12,55
INDONESIA	**97,88**	**84,89**	**55,50**	**97,99**	**89,76**	**61,42**	**0,11**	**4,87**	**5,92**

Sumber: SUSENAS 2012, BPS

Kemiskinan. Kondisi umum kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara ditunjukan dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan pola distribusi atau sebaran kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan.

- Perkembangan jumlah penduduk miskin di dari tahun 2008-2013 terjadi pengurangan sebanyak 354,49 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 1.824,41 ribu jiwa atau sekitar 6,5 persen dari total penduduk miskin nasional (*Tabel 3-18*).
- Pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara dari tahun 2008-2013 lebih cepat dibading penurunan kemiskinan nasional yaitu sebesar 5,67 persen, dengan persentase kemiskinan tertinggi di daerah perdesaan (*Tabel 3-19*).
- Tingkat kemiskinan antarprovinsi, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada diatas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Sementara untuk pengurangan tingkat kemiskinan Provinsi NTB lebih tinggi dibandikan NTT.

Tabel 3-18:
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2013.

PROVINSI	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nusa Tenggara Barat	1.080,60	1.050,90	1.009,40	894,77	852,64	830,85
Nusa Tenggara Timur	1.098,30	1.013,10	1.014,10	1.012,90	1.012,52	993,56
P. NUSA TENGGARA	**2.178,90**	**2.064,00**	**2.023,50**	**1.907,67**	**1.865,16**	**1.824,41**
INDONESIA	**34.963,10**	**32.530,00**	**31.023,60**	**30.018,93**	**29.132,43**	**28.066,56**

Sumber: BPS, 2013

Tabel 3-19:
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2008 dan 2013.

PROVINSI	2008			2013			Δ 2008-2013		
	% Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin (%)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Nusa Tenggara Barat	29,47	19,73	23,81	20,28	16,32	17,97	9,19	3,41	5,84
Nusa Tenggara Timur	15,50	27,88	25,65	11,54	22,13	20,03	3,96	5,75	5,62
P. NUSA TENGGARA	**25,44**	**24,39**	**24,70**	**17,33**	**19,78**	**19,04**	**8,12**	**4,60**	**5,67**
INDONESIA	**11,65**	**18,93**	**15,42**	**8,39**	**14,32**	**11,37**	**3,26**	**4,61**	**4,05**

Sumber: BPS, 2013

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia di Wilaya Nusa Tenggara diukur berdasarkan indek pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan perbandingan peringkat masing-masing provinsi terhadap nasional.

- Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia wilayah Sumatera, perkembangan IPM provinsi dari tahun 2007-2011 memperlihatkan adanya peningkatan dan sebagian besar berada diatas rata-rata IPM nasional (*Tabel 3-20*).
- Kondisi kualitas sumberdaya manusia di Nusa Tenggara masih tergolong rendah, berdasarkan IPM 200-2011 masih berkisar di 65-67 berada jauh dibawah IPM nasional dan menduduki ranking ke 31 dan 32 secara nasional (*Tabel 3-20*).

Tabel 3-20:
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Nusa TenggaraTahun 2007-2011

PROVINSI	IPM					PERINGKAT IPM (PROVINSI)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Nusa Tenggara Barat	63,71	64,12	64,66	65,20	66,23	32	32	32	32	32
Nusa Tenggara Timur	65,36	66,15	66,60	67,26	67,75	31	31	31	31	31
INDONESIA	**70,59**	**71,17**	**71,76**	**72,27**	**72,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: BPS, 2011

3.3. PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Daerah. Tingkat perkembangan perekonomian daerah Wilayah Nusa Tenggara ditunjukan dengan beberapa indikator utama ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Struktur ekonomi menurut lapangan usaha dan penggunaan, perkembangan investasi PMA dan PMDN, dan perkembangan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

PDRB Menurut Lapangan Usaha

- Perkembangan perekonomian wilayah Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2008-2012 rata meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,06 persen per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 1,54 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi antarprovinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 dan 2012 mengalami pertumbuhan melambat dibandingkan tahun sebelumnya(*Tabel 3-21*).
- Seluruh sektor pada tahun 2011 tumbuh positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian negatif. Sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dan sekaligus pemacu pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara adalah sektor listrik dan sektor keuangan dan jasa perusahaan (*Tabel 3-22*).
- Pertumbuhan sektor di Provinsi NTB beberapa sektor mengalami laju pertumbuhan negatif, sementara laju perekonomian tertiggi adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. Untuk pertumbuhan sektor tertinggi di Provinsi NTT adalah sektor kontruksi dan keuangan.
- Perekonomian wilayah Nusa Tengara masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor perdaggangan. Dimana ketiga sektor tersebut berkontribusi sebesar 65,31 persen terhadap perekonomian (*Tabel 3-23*).
- Perkembangan nilai PDRB ADHB dengan migas ADHB selama periode 2008-2012 terus meningkat, dengan nilai PDRB tahun 2012 mencapai 84.782.741,20 juta rupiah (*Tabel 3-24*). Kontribusi wilayah terhadap pembentukan PDRB nasional (33 provinsi) sebesar 1,2 persen dengan kontribusi terbesar beasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Tabel 3-25*).
- Perkembangan PDRB perkapita dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita ADHK tahun 2000 di Wilayah Nusa Tenggara meningkat, namun dibandingkan dengan rata-rata PDB perkapita nasional masih jauh dibawah PDB perkapita nasional (*Tabel 3-27*).

Tabel 3-21:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000 dengan Migas Tahun 2008-2012(Persen).

PROVINSI	Tanpa Migas						Dengan Migas					
	2008	2009	2010	2011	2012	08-12	2008	2009	2010	2011	2012	08-12
Nusa Tenggara Barat	2,82	12,14	6,35	-3,15	-1,12	3,41	2,82	12,14	6,35	-3,15	-1,12	3,41
Nusa Tenggara Timur	4,84	4,29	5,25	5,63	5,45	5,09	4,84	4,29	5,25	5,63	5,45	5,09
P. NUSA TENGGARA	**3,63**	**8,96**	**5,92**	**0,23**	**1,54**	**4,06**	**3,63**	**8,96**	**5,92**	**0,23**	**1,54**	**4,06**
NASIONAL (PDB)	**6,47**	**5,00**	**6,60**	**6,98**	**6,81**	**6,37**	**6,01**	**4,63**	**6,22**	**6,49**	**6,23**	**5,92**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 3-22:
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011, (Persen).

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	4,66	2,90	1,68	2,50
2. Pertambangan & Penggalian	-8,65	27,77	11,87	-25,65
3. Industri Pengolahan	7,14	7,91	3,52	3,17
4. Listrik, Gas & Air Bersih	7,03	8,97	8,77	9,76
5. Bangunan	6,56	11,93	3,56	5,53
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,06	6,90	7,40	7,77
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,07	5,98	6,77	7,20
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	8,81	7,56	6,21	9,76
9. Jasa-Jasa	7,50	7,14	7,21	7,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**3,63**	**8,96**	**5,91**	**0,21**

Sumber: BPS, 2011

Tabel 3-23:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2012 (Persen)

LAPANGAN USAHA	NTB	NTT
Pertanian	4,47	5,55
Pertambangan & Penggalian	-11,14	8,56
Industri *Pengolahan*	-22,82	10,89
Listrik, Gas & Air	26,29	1,14
Konstruksi	0,03	21,70
Perdagangan, Hotel & Restoran	2,21	6,77
Pengangkutan & Komunikasi	-8,92	-20,21
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	-1,42	16,91
Jasa-Jasa	15,01	5,96

Catatan) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3-24:
Perkembangan Nilai PDRB dengan Migas ADHB menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2008 dan 2011, (Rp. Juta).

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012
Nusa Tenggara Barat	35.314.731,04	44.014.619,43	49.631.649,27	48.824.930,86	49.529.381,03
Nusa Tenggara Timur	21.655.869,37	24.179.412,16	27.746.332,23	31.221.528,20	35.253.360,17
P. NUSA TENGGARA	**56.970.600,41**	**68.194.031,59**	**77.377.981,50**	**80.046.459,06**	**84.782.741,20**

Sumber: BPS, 2011

Tabel 3-25:
Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Nusa Tenggara dan Nasional
Tahun 2012, (dalam persen)

PROVINSI	PDRB (Rp. Juta)	Share Terhadap Pulau (%)	Share Terhadap Nasional (%)
Nusa Tenggara Barat	49.529.381,03	58,42	0,74
Nusa Tenggara Timur	35.253.360,17	41,58	0,52
P. NUSA TENGGARA	**84.782.741,20**	**100,00**	**1,26**
PDB NASIONAL (33 PROVINSI)	**6.731.534.512,85**		**100,00**

Sumber : BPS, 2012

Tabel 3-26:
Struktur Ekonomi menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012, (persen).

PROVINSI	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Nusa Tenggara Barat	25,69	18,64	3,91	0,51	8,26	16,76	7,69	5,80	12,74
Nusa Tenggara Timur	35,96	1,37	1,50	0,43	7,20	17,69	5,68	4,28	25,89
P. NUSA TENGGARA	**9,96**	**1,46**	**2,91**	**0,48**	**7,82**	**17,15**	**6,85**	**5,17**	**18,21**
NASIONAL	**0,46**	**8,89**	**23,34**	**1,16**	**6,68**	**20,11**	**7,42**	**8,19**	**0,01**

Sumber : BPS, 2012

Tabel 3-27:
PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2012, (Ribu Rupiah)

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012
Nusa Tenggara Barat	3.809	4.230	4.444	4.277	4.190
Nusa Tenggara Timur	2.529	2.589	2.667	2.775	2.874
RATA-RATA P. NUSA TENGGARA	**3.169**	**3.409**	**3.555**	**3.526**	**3.532**
INDONESIA (PDB)	**8.990**	**9.281**	**9.703**	**10.225**	**10.721**

Sumber: BPS, 2012

PDRB Menurut Penggunaan:

- Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2011 didominasi oleh komponen konsumsi, yaitu mencapai 78 persen dari total PDB. Total konsumsi sebagian besar 56,57 persen untuk pengeluarn konsumsi rumah tangga dan 19,66 persen pengeluaran konsumsi pemerintah. Selain konsumsi rumah tangga, komponen ekspor dan impor juga memiliki peran yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB di Wilayah Nusa Tenggara (*Tabel 3-28*).
- Perkembangan ekonomi dari sisi penggunaan, secara keseluruhan komponen permintaan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, komponen impor dan PMTB memiliki laju pertumbuhan terbesar dibandingan komponen permintaan lainnya, masing-masing tumbuh sebesar 9,21 persen dan 7,82 persen.
- Perkembangan ekonomi dari sisi penggunaan antarprovinsi, di Provinsi Nusa Tengga Barat, seluruh komponen tumbuh positif, kecuali perubahan stok dan ekspor tumb negatif, komponen impor dan konsumsi pemerintah, memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Sementara di Nusa Tenggara Timur, seluruh komponen permintaan tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah komponen perubahan stok dan PMTB (*Tabel 3-29*).

Tabel 3-28:
Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
Nusa Tenggara Barat	46.72	0.99	17.77	25.01	(0.87)	32.80	22.42
Nusa Tenggara Timur	71.95	3.85	22.60	17.59	7.54	18.77	42.30
P. NUSA TENGGARA	**56.57**	**2.11**	**19.66**	**22.11**	**2.41**	**27.32**	**30.18**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 3-29 :
Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2007-2011, (persen)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					RATA-RATA 2007-2011
	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	
Konsumsi Rumah Tangga	8,56	4,67	4,55	3,30	4,31	5,08
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	4,49	6,59	7,40	5,42	5,60	5,90
Konsumsi Pemerintah	7,89	6,45	4,16	0,54	5,50	6,91
PMTB	7,15	9,38	5,12	6,95	7,82	7,28
Perubahan Stock	(11,95)	19,99	(7,82)	21,51	(27,91)	(1,24)
Ekspor Barang & Jasa	4,03	(3,42)	10,16	6,49	(4,88)	2,48
Impor Barang & Jasa	7,64	5,03	2,24	3,26	9,21	5,47

Sumber: BPS, 2011
*Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat Sementara*

Tabel 3- 30:
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.

PROVINSI	PERTUMBUHAN (%)						
	KONSUMSI RUMAH TANGGA	LSM	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN STOCK	EKSPOR BARANG DAN JASA	IMPOR BARANG DAN JASA
Nusa Tenggara Barat	5,19	5,44	5,53	4,97	(108,97)	(11,62)	11,10
Nusa Tenggara Timur	3,43	5,77	5,48	10,71	53,16	1,85	7,32

Sumber: BPS, 2012

Investasi PMA dan PMDN:

- Perkembangan nilai investasi PMA dan PMDN di wilayah Nusa Tenggara rendah sekali dan sebagian besar nilai investasi terkonsentrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Perkembangan nilai realisasi Investasi PMA selama periode 2008-2012 kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Nilai investasi tahun 2012 tercatat sebesar 644,5 juta US$ atau hanya sekitar 0,1 persen dari total investasi PMA nasional, dengan persebaran terbesar di Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Tabel 3-31*).
- Sementara untuk nilai PMDN tahun 2012 mencapai sebesar 59,8 juta rupih sedikit menurun dibandingakn tahun sebelumnya dan sekitar 75,9 persen nilai PMDN terkonsentrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Tabel 3-32*).

Tabel 3-31:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi
di Wilayah Nusa Tnggara Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% PULAU 2012
Nusa Tenggara Barat	12,8	2,7	220,5	465,1	635,8	98,6
Nusa Tenggara Timur	1,9	4,0	3,8	5,5	8,7	1,4
P. NUSA TENGGARA	**14,7**	**6,7**	**224,3**	**470,6**	**644,5**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**0,10**	**0,06**	**1,38**	**0,10**	**0,10**	

Sumber : BKPM, 2012

Tabel 3-32:
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010-2012.

PROVINSI	2010	2011	2012	% PULAU
Nusa Tenggara Barat	1.805,8	42,3	45,4	75,9
Nusa Tenggara Timur	0,1	1,0	14,4	24,1
P. NUSA TENGGARA	**1.805,9**	**43,3**	**59,8**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**0,10**	**0,10**	**0,10**	

Sumber : BKPM, 2012

Perdaggangan Ekspor dan Impor. Perkembangan perdaggangan di Wilayah Nusa Tenggara ditunjukan dengan nilai ekspor dan nilai impor, dan neraca perdagangan antara nilai ekspor terhadap nilai impor**.**

- Perkembangan ekspor non migas provinsi di Wilayah Nusa Tenggara tahun 2006-2010 terlihat cukup fluktuatif dan kecenderungan meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 16 persen. Kontribusi nilai ekspor wilayah Nusa Tenggara terhadap nilai ekspor non migas nasional hanya sebesar 1,55 persen (*Tabel 3-33*)
- Sementara untuk perdagangan impor non migas pada tahun 2009 menurun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, nilai impor terbesar berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 86,46 persen dari total nilai impor di Wilayah Nusa Tenggara (*Tabel 3-34*).
- Neraca perdagangan di Wilayah Nusa Tenggara dalam waktu 2006-2010 menunjukan kecenderungan meningkat dari tahun 2008 hingga akhir 2010, dimana dari tahun 2008 terjadi peningkatan surplus dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan neraca perdagangan antarprovinsi, Provinsi Nusa Tenggra Timur lebih rendah dibandingkan Nusa Tenggara Barat, bahkan pada tahun 2006 dan 2007 neraca perdagangan Nusa Tenggara Timur negatif (*Gambar 3-5*).

Tabel 3-33:
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2010. (dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN.(%) 2010	PERAN.(%) 2010
Nusa Tenggara Barat	1.219,5	1.068	1.107,7	1.244,2	1.994,9	99,22	1,54
Nusa Tenggara Timur	3,8	3,3	9,6	24	15,6	0,78	0,01
P. NUSA TENGGARA	**1.223,3**	**1.071,3**	**1.117,3**	**1.268,2**	**2.010,5**	**100,00**	**1,55**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Tabel 3-34:
Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2010. (dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN.(%) 2010	PERAN.(%) 2010
Nusa Tenggara Barat	278,5	225,5	285,4	173,1	294,4	86,46	0,27
Nusa Tenggara Timur	12	20,1	1,5	5,6	46,1	13,54	0,04
NUSA TENGGARA	**290,5**	**245,6**	**286,9**	**178,7**	**340,5**	**100,00**	**0,31**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Gambar 3-5:
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara
Tahun 2006-2010, (dalam juta US$).

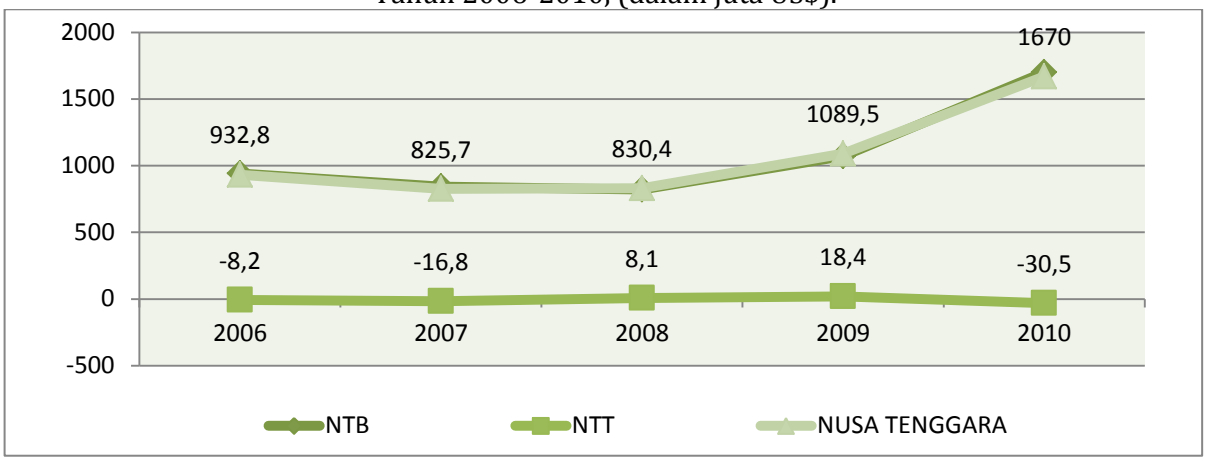

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Komoditas Unggulan. Perkembangan komoditas unggulan di Wilayah Nusa Tenggara ditunjukan perkembangan jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman perkebunan, jenis aktivitas peternakan, dan perikanan dan kelautan.

Tanaman Pangan Padi:

- Produksi padi di Nusa Tenggara tahun 2013 mencapai 2.715.902 ton atau sekitar 3,92 persen dari total produksi padi nasional. Dengan tingkat produktivitas sebesar sebesar 41 kw/h sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya (*Tabel 3-35*), dan masih jauh dibawah rata-rata produktivitas padi nasional (51 Kw/ha).
- Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan penghasil padi terbesar di Wilayah Nusa Tenggara dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingginya produksi padi di Nusa Tenggara Barat di dukung oleh tingkat produktivitas dan luas panen yang cukup tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3-35:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi
di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2013.

Tahun	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
2008	2.328.572	39,71
2009	2.478.134	40,63
2010	2.307.767	39,14
2011	2.553.347	40,47
2012	2.812.797	42,30
2013	2.715.902	41,42

Sumber: BPS, 2012

Tabel 3-36:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Menurut Provinsi
di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2013.

PROVINSI	PRODUKSI(TON)	PRODUKTIVITAS(KU/HA)
Nusa Tenggara Barat	2.061.624	50,04
Nusa Tenggara Timur	654.278	32,8

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Palawija:

- Produksi terbesar tanaman palawija Wilayah Nusa Tenggara adalah jagung dan ubi kayu, perkembangan produksi kedua komoditas tersebut dari 2008-2013 terus meningkat, dengan produksi tahun 2013 masing-masing sebesar 1.279.415 ton dan 928.754 ton (*Tabel 3-37*). Produksi jagung dan ubi kayu terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Tabel 3-39*).
- Dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas untuk tanaman palawija di Wilayah Nusa Tenggara rata-rata masih lebih rendah dari produktivitas tanaman palawija nasional (*Tabel 3-38*).

Tabel 3-37:
Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2013, (dalam ton)

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	869375	63148	58026	97401	118301	997360
2009	947762	54221	61080	97947	114911	998115
2010	1010724	63463	53735	94900	134525	1102895
2011	1010724	57241	57720	106946	95462	978657
2012	1272060	49252	60453	76937	165070	971017
2013	1279415	40812	70295	91932	124126	928754

Sumber: BPS, 2013

Tabel 3-38:
Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2008-2013, (dalam (kw/ha).

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	29,04	9,14	12,200	11,18	97,57	112,96
2009	31,69	9,10	12,820	10,68	98,35	116,50
2010	33,48	9,76	12,775	10,43	99,00	116,35
2011	33,48	9,83	12,825	11,12	99,63	116,13
2012	40,29	10,43	12,645	11,03	100,96	116,39
2013	41,24	10,58	14,490	10,34	102,85	115,97

Sumber: BPS, 2013

Tabel 3-39:
Perkembangan Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi Tahun 2013, (dalam ton).

PROVINSI	Produksi (2013)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Nusa Tenggara Barat	605.762	31.124	55.164	89.201	9.426	60.469
Nusa Tenggara Timur	673.653	9.688	15.131	2.731	114.700	868.285
P. NUSA TENGGARA	**1.279.415**	**40.812**	**70.295**	**91.932**	**124.126**	**928.754**

Sumber: BPS, 2013

Tabel 3-40:
Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija Menurut Provinsi Tahun 2013, (dalam kw/ha).

PROVINSI	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Nusa Tenggara Barat	55,78	12,52	17,41	11,43	123,86	131,8
Nusa Tenggara Timur	26,7	8,64	11,57	9,24	81,83	100,14
P. NUSA TENGGARA	**41,24**	**10,58**	**14,49**	**10,34**	**102,85**	**115,97**
NASIONAL	**48,42**	**11,62**	**14,54**	**14,82**	**151,97**	**216,38**

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Perkebunan:

- Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan di Wilayah Nusa Tenggara adalah Kelapa, Kopi dan Tembakau. Perkembangan produksi kelapa meningkat dari tahun 2006-2011, namun sebaliknya untuk produksi kopi dan tembakau terjadi penurunan (*Tabel 3-41*).
- Produksi kelapa dan kopi terbesar adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sementara untuk sebaran produksi tembakau di Nusa Tenggara Barat (*Tabel 3-42*).

Tabel 3-41:
Perkembangan Produksi (ton) dan Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2011.

TAHUN	KAKAO	KELAPA	KOPI	TEMBAKAU
2006	16.685	111.129	23.951	31.654
2007	13.548	116.295	21.663	42.831
2008	13.623	116.174	20.548	51.038
2010	14.137	118.595	25.808	22.691
2011	-	118.650	23.453	17.678

Sumber : BPS, 2011

Tabel 3-42:
Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011

PROVINSI	KELAPA	KOPI	TEBU	TEMBAKAU
Nusa Tenggara Barat	58.079	4.961	0	17.589
Nusa Tenggara Timur	60.571	18.492	0	89
P. NUSA TENGGARA	**118.650**	**23.453**	**0**	**17.678**

Sumber : BPS, 2011

Peternakan:

- Perkembangn populasi seluruh ternak besar dari 2010-2013 meningkat, dengan populasi paling banyak adalah sapi potong, babi dan kambing (*Tabel 3-43*). Sementara untuk populasi ternak unggas paling banyak adalah jenis ayam buras dan ayam ras pedaging (*Tabel 3-45*).
- Persebaran untuk populasi sapi potong dan kabing tersebsar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun untuk babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Tabel 3-44*). Sementara untuk populasi ternak ayam buras di Nusa Tenggara Tiomur dan ayam ra pedaging di Nusa Tenggara Barat (*Tabel 3-46*).

Tabel 3-43:
Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010-2013, (dalam ekor).

Tahun	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
2010	1688640	89069	1013779	317111	188195	0	1272038
2011	1837,81	94397	1098147	255406	192610	55	1464048
2012	1760020	100985	1206111	296681	186724	52	1731010
2013	1.793.485	102042	1220878	302284	189953	52	1.820.211

Sumber :BPS, 2013

Tabel 3-44:
Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2013, (dalam ekor).

PROVINSI	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
Nusa Tenggara Barat	63.829	38.857	643.658	149.644	80.641	18	1.002.503
Nusa Tenggara Timur	1.729.656	63.185	577.220	152.640	109.312	34	817.708
P. NUSATENGGARA	**1.793.485**	**102.042**	**1.220.878**	**302.284**	**189.953**	**52**	**1.820.211**

Sumber : BPS, 2013

Tabel 3-45:
Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010-2013, (dalam ekor).

Tahun	Populasi (ekor)			
	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
2010	3150,15	12475,37	296,03	763,00
2011	3858,05	14887,40	329,05	882,45
2012	4122,75	15479,01	353,18	957,90
2013	4188,46	15587,97	354,93	968,64

Sumber :BPS, 2013

Tabel 3-46:
Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2013, (dalam ekor).

PROVINSI	Populasi Unggas (ekor)			
	Ayam Buras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
Nusa Tenggara Barat	3.599	4.977	175,23	679,3
Nusa Tenggara Timur	589	10.611	179,7	289,34
P. NUSA TENGGARA	**4.188**	**15.588**	**354,93**	**968,64**

Sumber :BPS, 2013

Perikanan dan Kelautan:

- Produksi perikanan dan kelautan di wilayah Nusa Tenggara terbesar berasal dari perikanan tangkap laut dan budidaya laut. Selain perikanan tangkap laut dan budidaya laut produksi perikanan tambak dan kolam cukuo tinggi.
- Sebagian besar produksi perikanan tangkap laut berasal dari Nusa Tenggara Barat, namun untuk produksi bududaya lau terbesar di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3-47:
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2005-2011, (dalam ton).

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
	Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
2005	206.482	2.851	308.305	11.449	2.511	350	0	97
2006	192.188	1.936	541.814	13.409	6.626	375	0	1.053
2007	200.771	2.577	580.365	23.609	3.167	470	31	129
2008	196.223	2.766	782.901	36.239	3.465	916	0	171
2009	216.411	2.912	646.032	32.156	3.799	379	0	169
2010	202.071	3.278	511.115	41.571	4.736	306	6.781	167
2011	242.307	3.246	655.310	69.194	33.982	1.249	797	278

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan, DKP 2010

Tabel 3-48:
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011, (dalam ton).

PROVINSI	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya					
	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
Nusa Tenggara Barat	140.170	3.246	278.107	67.999	33.016	1.249	797	242
Nusa Tenggara Timur	102.137	-	377.203	1.195	966	-	-	36
P. NUSA TENGGARA	**242.307**	**3.246**	**655.310**	**69.194**	**33.982**	**1.249**	**797**	**278**

Sumber :BPS, 2013

3.5. INFRASTRUKTUR WILAYAH

Infrastruktur Jalan. Perkembangan kondisi jalan di Wilayah Nusa Tenggara ditunjukan dengan panjang jalan berdasarkan status pembinaannya, rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), dan kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU), dengan kriteria tidak mantap dan mantap.

- Perkembangan total panjang jalan dalam periode 2008-2010 berkurang sepanjang 674 Km, dengan penurunan panjang jalan berasal dari jalan provinsi dan jalan kabupaten (*Tabel 3-49*), dengan tingkat kerapatan jalan sebesar 0,40 Km/Km^2, lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 Km/Km^2 (*Gambar 3-6*).
- Kualitas jalan di Wilayah Nusa Tenggara jalan sebagian besar dengan kondisi mantap, sementara dengan kategori Tidak Mantap sebesar 12,41 km yang terdiri dari 63,12 persen dengan kondisi rusak ringan dan 36,88 persen tergolong Rusak Berat (*Gambar 3-7*).

Tabel 3-49:
Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Nusa Tenggara 2008 dan 2010

PROVINSI	Panjang Jalan (Km)							
	Jalan Nasional		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten/ Kota		Total	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
Nusa Tenggara Barat	602	632	1.416	1.843	5.333	4.959	7.351	7.434
Nusa Tenggara Timur	1.273	1.407	2.627	1.737	16.497	16.496	20.397	19.640
P. NUSA TENGGARA	**1.875**	**2.039**	**4.043**	**3.580**	**21.830**	**21.455**	**27.748**	**27.074**

Sumber Data: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 3-6:
Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Road Density*) Antar Proviinsi Di Wilayah Nusa Tenggara

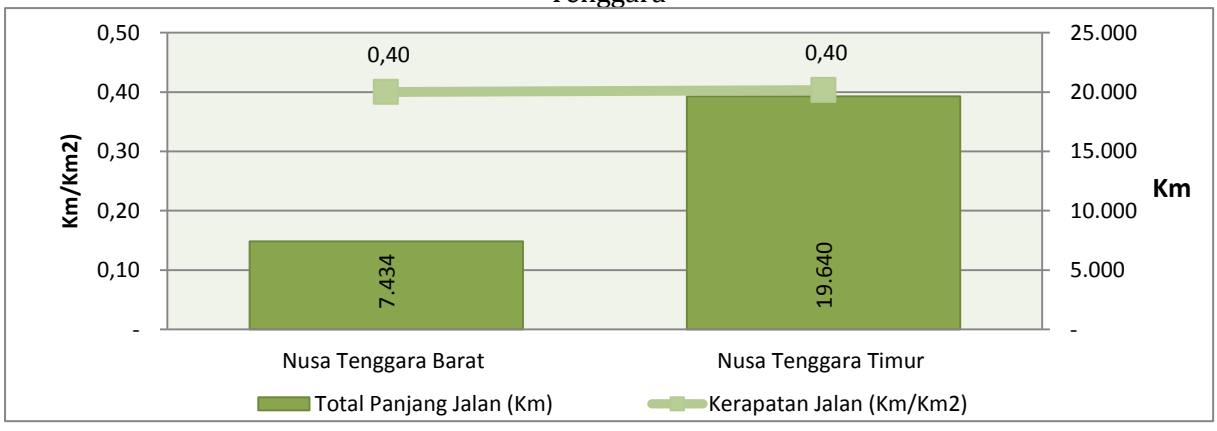

Sumber Data: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 3-7:
Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Nusa Tenggara

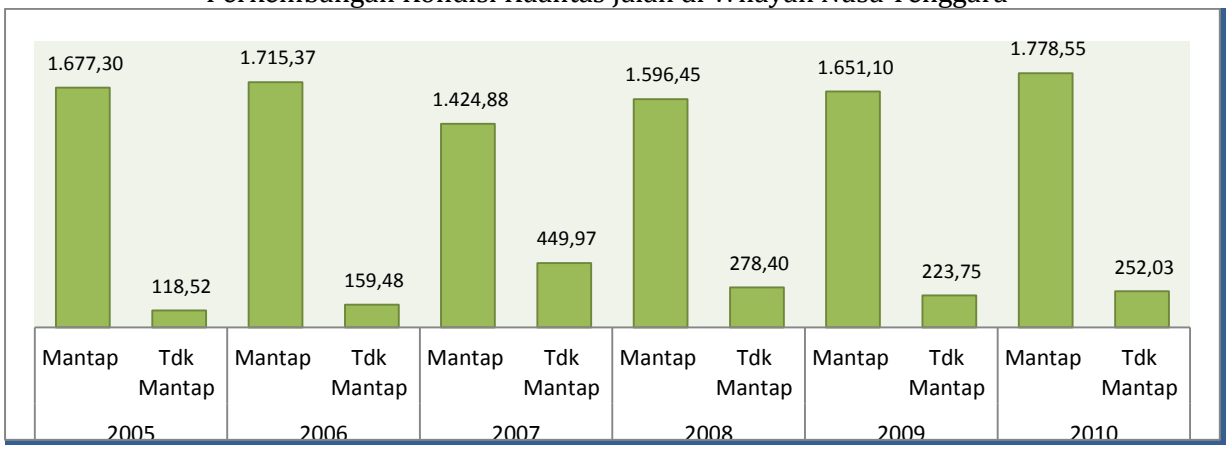

Sumber :Kementerian PU

Tabel 3-50:
Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010.

PROVINSI	Panjang Jalan Nasional (Km)	KUALITAS JALAN					
		Panjang Jalan Mantap		Panjang Jalan Tidak Mantap		Komposisi Jalan Tidak Mantap	
		(Km)	%	(Km)	%	% Rusak Ringan	% Rusak Berat
Nusa Tenggara Barat	623,90	522,44	83,74	101,46	16,26	38,31	61,69
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	1.256,11	89,30	150,57	10,70	79,83	20,17
P. NUSA TENGGARA	**2.030,58**	**1.778,55**	**87,59**	**252,03**	**12,41**	**63,12**	**36,88**
INDONESIA	**38.189,43**	**31.522,09**	**82,54**	**6.667,34**	**17,46**	**48,28**	**51,72**

Sumber: Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010. DirektoratJenderalBinaMarga (Status 18 Agustus 2010)

Energi Listrik. Perkembangan kondisi listrik di Wilayah Nusa Tenggara ditunjukan dengan jumlah kapasitas terpasang, jumlah pelanngan listrik, rasio elektrifikasi, dan konsumsi listrik perkapita.

- Kapasitas terpasang energy listrik PLN padatahun 2011 di wilayah Nusa Tenggara mencapai 284,95 Mw. Sumber energi listrik sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yakni mencapai 99,08 persen (*Tabel 3-51*).
- Rasio Elektrifikasi wilayah Nusa Tenggara masih tegolong rendah dibandingkan rasio elektrifikasi nasioanl. Perkembangan rasio elektrifikasi dalam periode 2009-2011, terjadi peningakan, di NTB meningkat sebesar 17,92 persen, dan NTT sekitar sebesar 11,71 persen (*Tabel 3-52*).
- Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011 untuk Provinsi NTB lebih tinggi dibanding Provinsi NTT (*Tabel 3-53*).

Tabel 3-51:
Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011.

SATUAN PLN/PROVINSI	kapasitasterpasangmenurutjenispembangkit (MW)				
	PLTA	PLTD	PLT Surya	Jumlah	%
Nusa Tenggara Barat	0,92	144,82	0,26	146	51,24
Nusa Tenggara Timur	1,08	137,5	0,37	138,95	48,76
P. NUSA TENGGARA	**2,00**	**282,32**	**0,63**	**284,95**	**100,00**
%	**0,70**	**99,08**	**0,22**	**100,00**	

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Tabel 3-52:
Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita.

SATUAN PLN/PROVINSI	PelangganRumahTangga (RT)			Rasio Elektrifikasi (%)			kWh jual/kapita		
	2009	2011	Laju (%)	2009	2011	Δ (11-09)	2009	2011	Δ (11-09)
Nusa Tenggara Barat	336.805	569.042	69	29,28	47,2	17,92	155,37	184,17	28,8
Nusa Tenggara Timur	224.869	343.144	53	22,81	34,52	11,71	82,84	101,63	18,79

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Telekomunikasi. Perkembangan kondisi telekomunikasi di Wilayah Nusa Tenggara digambarkan dengan persentase jumlah desa yang memperoleh pelayanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon seluler**.**

- Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting dalam mendukung interaksi social dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi tersebut masih belum merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum terlayani.
- Penyebaran BTS di desa/kelurahan (PODES 2011) di wilayah Nusa Tenggara, terbanyak di Provinsi NTB (545 desa) ataumencapai 50 persen dari total desa/kelurahannya (*Gambar 3-8*). Hingga saat jumlah desa yang telah terlayani sinyal telp seluler dengan sinyal lemah-kuat sebanyak 90 persen (*Tabel 3-53*).

Gambar 3-8:
JumlahdanPersentaseDesa yang Terdapat BTS MenurutProvinsi Di Wilayah Nusa Tenggara.

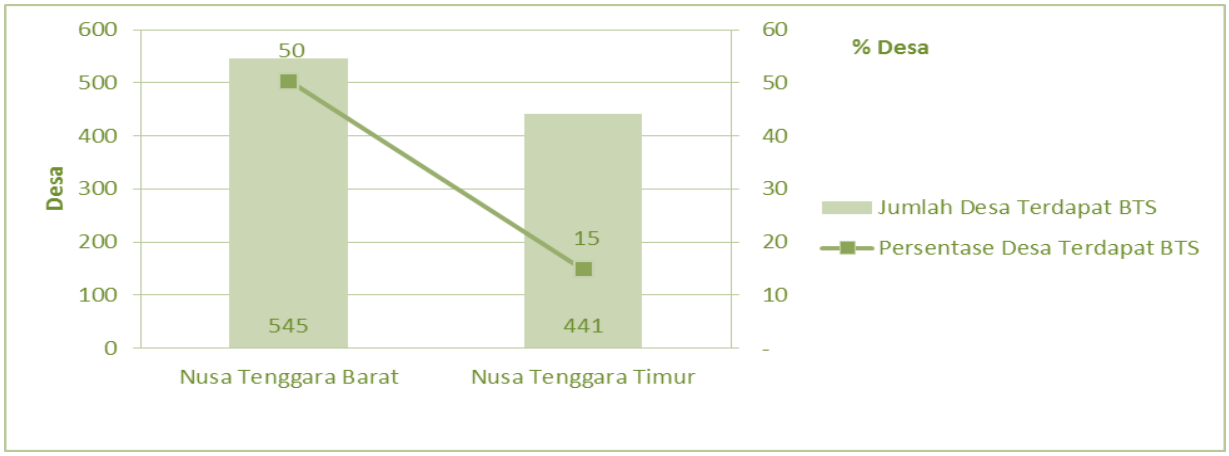

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Tabel 3-53:
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telpon Seluler Tahun 2011.

PROVINSI	Ada Pelanggan Telpon Kabel		PenerimaanSinyal HP						Jumlah Desa/kel
			Sinyal Lemah		Sinyal Kuat		Lemah - Kuat		
	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	
Nusa Tenggara Barat	283	26,1	115	10,6	926	85,4	1041	96,0	1084
Nusa Tenggara Timur	248	8,4	1225	41,3	1456	49,1	2681	90,4	2966
NUSA TENGGARA	**531**	**13,1**	**1.340**	**33,1**	**2.382**	**58,8**	**3.722**	**91,9**	**4.050**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Air Bersih. Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Kondisi perkembangan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara ditunjukan dengan persentase jumlah desa/kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari PDAM/PAM, air sumur, sungai/danau, air hujan, dan air kemasan.

- Berdasarkan data PODES 2011, penyediaan kebutuhan air bersih masyarakat sebagian besar bersumber dari mata air dan air sumur, sementara jangkauan PDAM /PAM baru mencapai 11 persen dari total desa/kelurahan (*Tabel 5-54*).
- Kondisi yang paling memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantung terhadap air hujan. Kondisi ini, paling banyak dihadapi oleh masyarakat di NTT yaitu mencapai 148 Desa atau mencapai 5 persen dari total desa/kelurahan (*Tabel 3-54*).

Tabel 3-54:
Sumber Air BersihUntukKebutuhanDomestikMasyarakatMenurutProvinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010.

PROVINSI	PAM/PDAM		Pompa ListriK/ Tangan/ Sumur		Mata Air		Sungai/ Danau/ Kolam		Air hujan		Air Kemasan / Lainnya		TOTAL	
	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%	∑ Desa	%
Nusa Tenggara Barat	174	16	666	61	204	19	18	2	4	0	18	2	1.084	100
Nusa Tenggara Timur	258	9	724	24	1679	57	139	5	144	5	22	1	2.966	100
P. NUSA TENGGARA	**432**	**11**	**1390**	**34**	**1883**	**46**	**157**	**4**	**148**	**4**	**40**	**1**	**4.050**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

3.6. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumberdaya Alam:

- Luas Kawasan Hutan dan perairan di Wilayah Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan 2009. Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Nusa Tenggara sekitar 2.855.949 hektar atau 2,09 persen dari total nasional, dengan proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan lindung seluas (40,68%) dan Hutan Produksi (20,27%).
- Penyebaran kawasan hutan lindung huta produksi terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sementara hutan produksi terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 3-8:
Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Nusa Tenggara Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009.

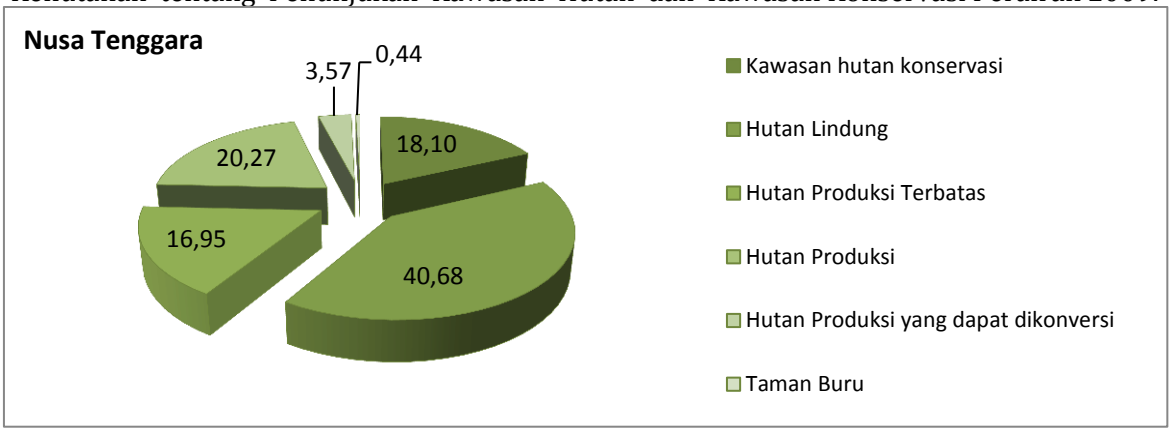

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009

Tabel 3-55:
Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. September 2009) di Wilayah Nusa Tenggara

URAIAN	NTB	NTT	NUSA TENGGARA (Ha)	NUSA TENGGARA [1] (%)
Kawasan Perairan	-	253.922	253.922	9,06
Kawasan Hutan	179.165	83.846	263.011	1,34
Kawasan Suaka Alam+Kawasan Pelestarian Alam (ha)	179.165	337.768	516.933	2,20
Hutan Lindung (ha)	430.485	731.220	1.161.705	3,68
Hutan Produksi Terbatas (ha)	286.700	197.250	483.950	2,16
Hutan Produksi (ha)	150.609	428.360	578.969	1,58
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha)	-	101.830	101.830	0,45
Taman Buru (ha)	-	12.562	12.562	7.49
Jumlah Kawasan Hutan (ha)	1.046.959	1.555.068	2.602.027	1,94
Jumlah Kawasan Hutan dan Perairan (ha)	1.046.959	1.808.990	2.855.949	2,09

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009

Keterangan:
- *[1]= Persen terhadap nasional; [2] =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya*
- *[3]= Belum ada SK Penunjukan dan data masih berdasarkan TGHK*
- *Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra orthorectified dan SRTM serta ground check*
- *Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006*
- *Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK*

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup digambarkan dari beberapa indikator, antara lain yaitu gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan.

- Tingkat gangguan lingkungan akibat pencemaran air, udara, dan tanah perkembangannya semakin menurun dari tahun 2005-2011 dan rata-rata lebih rendah dari nasional, dengan kondisi pencemaran lingkungan di Provinsi NTB lebih tinggi dibandingkan di Provinsi NTT(*Tabel 3-56*).
- Luas lahan kritis di wilayah Nusa Tenggara tahun 2010 mencapai 4.695.745,90 hektar atau sekitar 5,71 persen dari luas lahan kritis nasional, dengan luasan lahan kritis terbesar adalah kategori kritis seluas 2.228.395,30 hektar sebagian besar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Tabel 3-57*).
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Nusa Tenggara perkembangannya hingga tahun 2007 berkurang menjadi 37 DAS dari 39 DAS. Berdasarkan kategori prioritas penanganan, pada tahun 2007 DAS dengan kategori DAS super prioritas bertambah 6 DAS dan 26 DAS termasuk kategori DAS prioritas. Sebagian besar penyebaran DAS super prioritas sebanyak 5 DAS dan 22 DAS prioritas terdapat di Nusa Tenggara Timur (*Tabel 3-58*).
- Perkembangan jumlah desa/kelurahan megalami gangguan lingkungan akibat bencana alam longsor dalam periode tahun 2005-2008 meningkat, pada tahun 2008 tercatat sekitar 649 desa/keluran dan sebagian besar terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu mencapai 621 desa/kelurahan (*Gambar 3-9*).

Tabel 3-56:
Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008, dan 2011.

PROVINSI	Air			Tanah			Udara		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
Nusa Tenggara Barat	8,17	7,67	7,01	1,22	0,66	0,65	5,37	5,81	2,4
Nusa Tenggara Timur	3,43	1,75	1,31	0,8	0,07	0,27	2,78	0,86	0,98
P. NUSA TENGGARA	**5,80**	**4,71**	**4,16**	**1,01**	**0,37**	**0,46**	**4,08**	**3,34**	**1,69**
NASIONAL	**8,3**	**5,57**	**5,4**	**1,47**	**0,77**	**0,83**	**6,24**	**3,95**	**3,78**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistk Potensi Desa Tahun 2005 & 2008

Tabel 3-57:
Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Nusa Tenggara Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar).

PROVINSI	Tingkat Kekritisan Lahan			JUMLAH
	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
Nusa Tenggara Barat	377,790.50	68,610.90	23,247.90	469,649.30
Nusa Tenggara Timur	1,123,308.80	2,159,784.40	943,003.40	4,226,096.60
P. NUSA TENGGARA	**1,501,099.30**	**2,228,395.30**	**966,251.30**	**4,695,745.90**
NASIONAL	**52,259,832.90**	**23,955,162.70**	**5,449,299.30**	**82,176,443.64**
% TERHADAP NASIONAL	**2.87**	**9.30**	**17.73**	**5.71**
PROPORSI LAHAN KRITIS (%)	**31.97**	**47.46**	**20.58**	**100.00**

Sumber :BPS, 2010

Tabel 3-58:
Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penangannya di Nusa Tenggara

PROVINSI	Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Keprioritasannya							
	Tahun 1994/95 - 1998/99				Tahun 1999/2000 - 2007			
	Super Prioritas	Prioritas	Prioritas Rendah	Jumlah	Super Prioritas	Prioritas	Prioritas Rendah	Jumlah
NTB	-	14	-	14	1	4	4	9
NTT	-	25	-	25	5	**22**	1	28
P. NUSA TENGGARA	**-**	**39**	**-**	**39**	**6**	**26**	**5**	**37**

Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen Kehutanan RI

Gambar 3-9:
Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2005 dan 2008.

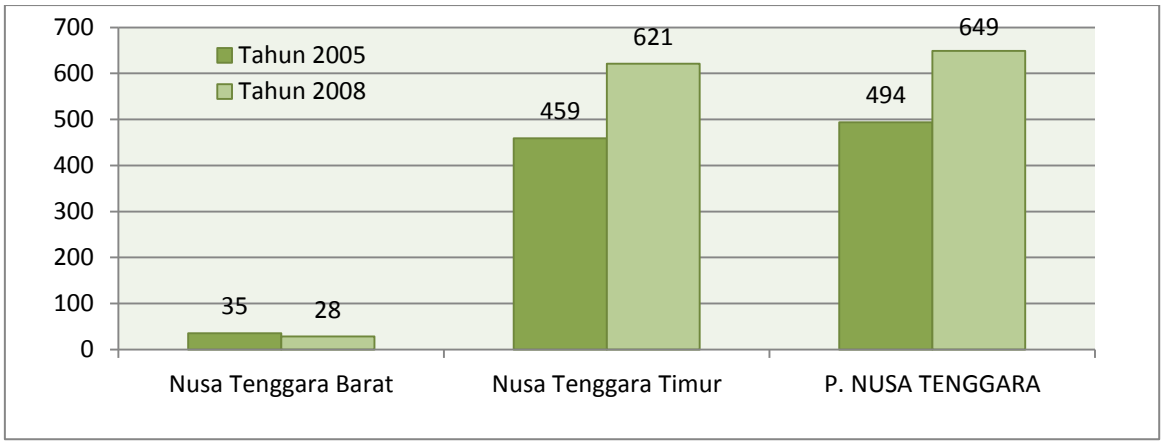

Sumber :BPS, 2011

4.1. ADMINISTRASI WILAYAH

- Wilayah Kalimantan secara administrasi terdiri dari 4 provinsi, 9 kota, 46 kabupaten, 582 kecamatan dan 6.593 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan Pulau Kalimantan sekitar 544.150 Km². Wilayah Kalimantan memiliki jumlah pulau sekitar 1.061 yang terdiri dari 680 pulau yang sudah bernama dan 381 pulau yang belum bernama.

- Penyebaran pulau terbanyak adalah di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 370 pulau yang terdiri dari 232 pulau sudah bernama dan 138 pulau belum bernama, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 339 pulau terdiri dari 257 pulau sudah bernama dan 82 pulau belum bernama.

Tabel 4-1:
Administrasi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2010

PROVINSI	KOTA	KAB	KEC	DESA-KEL	LUAS (KM²)	PENDUDUK (JIWA)
Kalimantan Barat	2	12	175	1.777	147.307	4.447.121
Kalimantan Tengah	1	13	120	1.439	153.565	2.138.717
Kalimantan Selatan	2	11	151	1.973	38.744	3.624.132
Kalimantan Timur	4	10	136	1.404	204.534	3.210.407
JUMLAH	**9**	**46**	**582**	**6.593**	**544.150**	**13.420.377**

Sumber: DITJEN PUM KEMENDAGRI (MEI 2010)

Tabel 4-2:
Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2009

PROVINSI	LUAS DARATAN (KM²)	PULAU BERNAMA	PULAU BELUM BERNAMA	JUMLAH
Kalimantan Barat	147.307,00	257	82	339
Kalimantan Tengah	153.564,50	27	5	32
Kalimantan Selatan	38.744,23	164	156	320
Kalimantan Timur	204.534,34	232	138	370
P. KALIMANTAN	**544.150.07**	**680**	**381**	**1.061**

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

4.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan. Kondisi umum kependudukan di Wilayah Kalimantan digambarakan berdasarkan angka jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, penduduk menurut jenis kelamin *(sex ratio)*, angka ketergantungan *(dependency ratio)*, dan komposisi penduduk menurut usia.

- Penduduk wilayah Kalimantan tahun 2010 berjumlah 13.787,7 ribu orang atau 5,51 persen dari penduduk Indonesia, dengan tingkat kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 25,3 jiwa per km^2, dengan kepadatan tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 93,6 jiwa per km^2, dan terrendah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 14,4 jiwa per km^2 (*Tabel 4-3*).
- Laju pertumbuhan penduduk Wilayah Kalimantan dalam periode 2000-2010 mencapai 2,02 persen/tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional 1,5 persen/tahun, dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,81 persen/tahun dan terrendah Kalimantan Barat (*Tabel 4-3*).
- Hampir 66,16 persen penduduk tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun) (*Tabel 4-4*), dan memiliki rasio ketergantungan *(dependency ratio)* sebesar 51 persen lebih rendah dari nasional (51,3 persen) (*Gambar 4-1*).
- Penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) rata-rata di provinsi di Wilayah Kalimantan memiliki jumlah laki-laki yang lebih banyak dari perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 106,43, yaitu untuk setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki (*Tabel 4-5*).

Tabel 4-3:
Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Kalimantan Menurut Provinsi.

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		KEPADATAN PENDUDUK PER KM2		LAJU PERTUMBUHAN	
	2000	2010	2000	2010	90-00	00-10
Kalimantan Barat	4.016,3	4.395,9	27,3	29,8	2,28	0,91
Kalimantan Tengah	1.855,5	2.212,1	12,1	14,4	2,98	1,79
Kalimantan Selatan	2.984,0	3.626,6	77,0	93,6	1,45	1,99
Kalimantan Timur	2.451,9	3.553,1	12,0	17,4	2,8	3,81
P. KALIMANTAN	**11.307,7**	**13.787,7**	**20,8**	**25,3**	**2,27**	**2,02**
NASIONAL	**205.132,5**	**237.641,3**	**107,3**	**124,4**	**1,40**	**1,49**

mSumber : BPS, Sensus Penduduk

Tabel 4-4:
Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Kalimantan menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA	KALIMANTAN	
	JUMLAH	%
Usia Muda (< 14 tahun)	4227,315	30,66
Usia Produktif (15-64 tahun)	9122	66,16
Usia Tua (>65 tahun)	438,516	3,18
TOTAL PENDUDUK	**13787,83**	**100,00**
DEPENDENCY RATIO		**51**

Sumber: Sensus 2010,BPS

Gambar 4-1:
Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2010

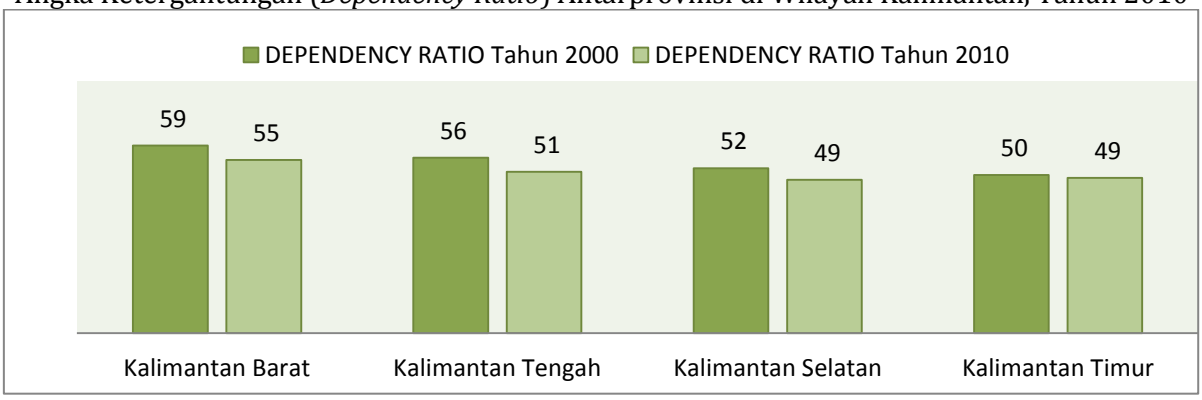

Sumber :Hasil Olahan Data Sensus 2010,BPS

Tabel 4-5:
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2010.

PROVINSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	SEX RATIO
Kalimantan Barat	2.246.903	2.149.080	4.395.983	104,55
Kalimantan Tengah	1.153.743	1.058.346	2.212.089	109,01
Kalimantan Selatan	1.836.210	1.790.406	3.626.616	102,56
Kalimantan Timur	1.871.690	1.681.453	3.553.143	111,31
P. KALIMANTAN	**7.108.546**	**6.679.285**	**13.787.831**	**106,43**
NASIONAL	**119.630.913**	**118.010.413**	**237.641.326**	**101,37**

Sumber :Hasil Olahan Data Sensus 2010,BPS

Ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Kalimantan secara umum ditunjukan dengan perkembangan indicator utama, yaitu: jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur angkatan kerja menurut lapangan usaha dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

- Perkembangan TPT provinsi di Wilayah Kalimantan selama periode 2008-2013 rata-rata menurun, Pengurangan TPT terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,77 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februsari 2013 mencapai 5,03 persen, lebih rendah dibandingkan dengan TPT nasional (5,92 persen), dengan TPT tertinggi di Kalimantan Timur (*Tabel 4-10*).
- Rata-rata pendidikan TPT sebagian besar tamatan SD, SMTP dan SMTA Umum/Kejuruan sekitar 95 persen (Gambar 4.4).
- Dalam periode 2008-2013 jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 922 orang, dengan jumlah penduduk bekerja pada Februari 2013 sebebanyak 6.875 orang. Penduduk bekerja terbesar terdapat di Kalimantan Barat dan terrendah di Kalimantan Tengah (*Tabel 4-8*).
- Pendidikan penduduk bekerja sekitar 65 persen merupakan tamatan tamatan SD dan SMTP, sementara tamatan SMTA dan Sarjana (Diploma dan S1) sekitar 35 persen (*Gambar 4-3*).
- Rata-rata penduduk bekerja di Wilayah Kalimantan bekerja pada sektor pertanian (46,24%) dan sektor perdagangan (17,48%)

Gambar 4-2:
Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Kalimantan Periode 2008-2013 (Februari)

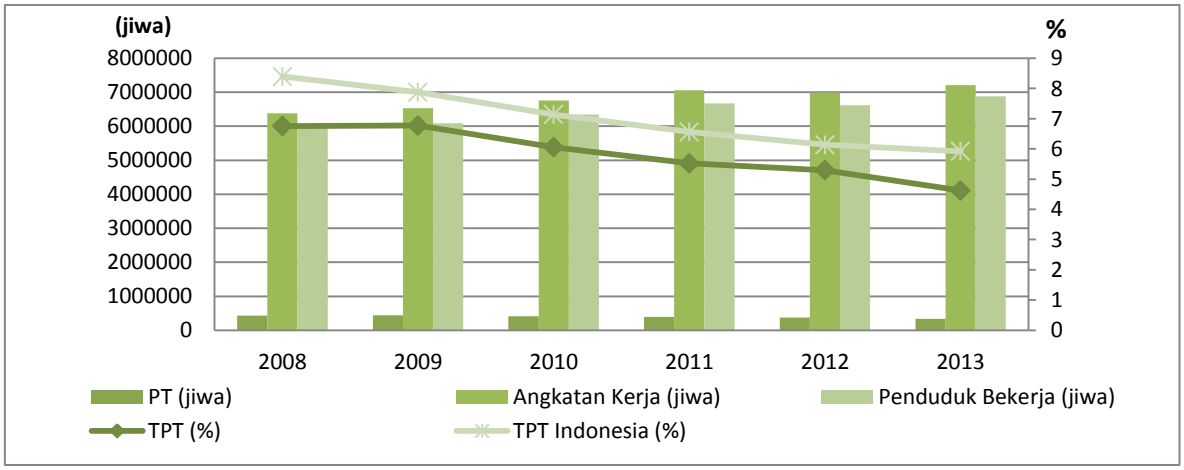

Sumber :BPS, 2013

Tabel 4-6:

Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	2008 Agust	2013 (Feb)	Δ 2008-2013	Share Pulau 2013 (%)	Share Nasional 2013 (%)
	Ribu jiwa				
Kalimantan Barat	2.157,55	2.224,15	66,60	0,86	1,88
Kalimantan Tengah	1.029,45	1.157,14	127,70	16,05	0,98
Kalimantan Selatan	1.780,22	1.937,49	157,27	26,88	1,64
Kalimantan Timur	1.416,96	1.889,43	472,47	26,21	1,60
P. KALIMANTAN	**6.384,18**	**7.208,21**	**824,03**	**100,00**	**6,11**
INDONESIA	**111.947,27**	**121.191,71**	**9.244,45**		**102,66**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 4-7:

Perkembangan Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	2008 Agustus	2013 (Feb)	Δ 2008-2013	Δ 2008-2013	Δ 2008-2013
	Ribu jiwa				
Kalimantan Barat	2.041	2.156	114,74	31,35	1,89
Kalimantan Tengah	982	1.136	153,87	16,52	1,00
Kalimantan Selatan	1.670	1.862	191,51	27,08	1,63
Kalimantan Timur	1.260	1.722	462,23	25,04	1,51
P. KALIMANTAN	**5.953**	**6.875**	**922**	**100,00**	**6,03**
INDONESIA	**102.553**	**114.021**	**11.468,44**		**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 4-8:

Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012). (dalam persen)

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/ Akademi	Universitas	
Kalimantan Barat	56,97	19,27	14,36	4,28	1,96	3,16	100,00
Kalimantan Tengah	49,52	23,31	16,15	4,53	1,95	4,54	100,00
Kalimantan Selatan	51,62	21,68	14,87	5,64	1,83	4,37	100,00
Kalimantan Timur	36,18	22,54	22,08	10,72	2,64	5,84	100,00

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2011.

Gambar 4-3.

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Kalimantan Menurut Lapangan Usaha (Februari 2012)

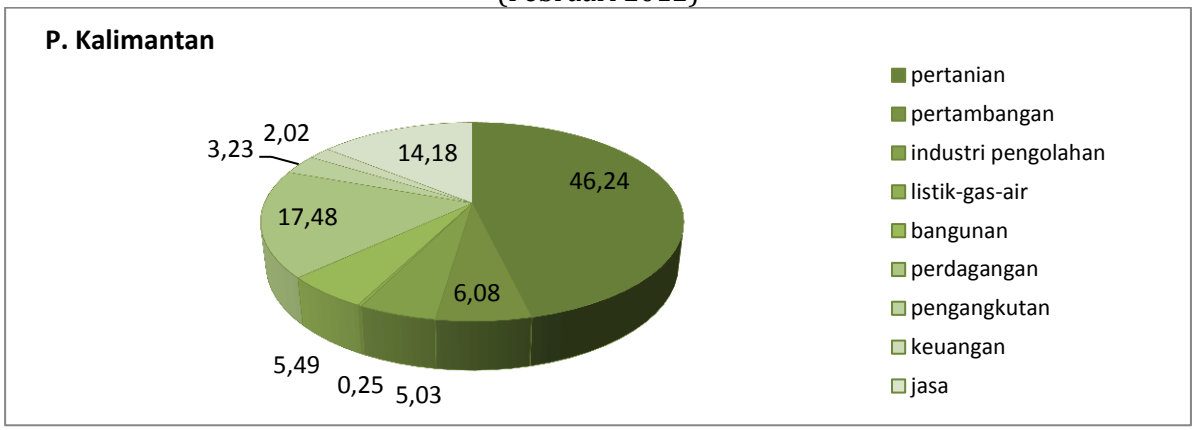

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 4-9:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Di Wilayah Kalimantan (Februari 2012), (dalam persen).

PROVINSI	Lapangan Usaha *)									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kalimantan Barat	59,50	3,98	3,70	0,20	5,23	13,09	2,04	1,22	11,04	100,00
Kalimantan Tengah	55,41	6,27	2,59	0,15	4,74	13,63	2,80	1,04	13,36	100,00
Kalimantan Selatan	41,43	4,91	7,14	0,25	5,34	21,27	3,69	2,33	13,63	100,00
Kalimantan Timur	28,35	10,00	5,98	0,38	6,48	21,48	4,55	3,36	19,42	100,00
P. KALIMANTAN	**46,24**	**6,08**	**5,03**	**0,25**	**5,49**	**17,48**	**3,23**	**2,02**	**14,18**	**100,00**
NASIONAL	**35,09**	**1,44**	**13,87**	**0,22**	**6,13**	**20,90**	**4,51**	**2,40**	**15,43**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Keterangan*):

1. Pertanian,
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Tabel 4-10

Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah Kalimantan Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	TPT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
Kalimantan Barat	5,41	3,09	2,32	116.782	68.600	48.182
Kalimantan Tengah	4,59	1,82	2,77	47.247	21.100	26.147
Kalimantan Selatan	6,18	3,91	2,27	110.081	75.800	34.281
Kalimantan Timur	11,11	8,87	2,24	157.376	167.600	(10.224)
P. KALIMANTAN	**6,76**	**4,62**	**2,14**	**431.486**	**333.100**	**98.386**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 4-11:

Distribusi Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012)

PROVINSI	Perkotaan		Pedesaan		Jumlah (jiwa)	Share terhadap Pulau (%)
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%		
Kalimantan Barat	30.751	40,46	45.259	59,54	76.010	20,53
Kalimantan Tengah	13.566	38,70	21.487	61,30	35.053	9,47
Kalimantan Selatan	55.030	54,58	45.794	45,42	100.824	27,24
Kalimantan Timur	110.499	69,82	47.764	30,18	158.263	42,76
KALIMANTAN	**209.846**	**56,69**	**160.304**	**43,31**	**370.150**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Gambar 4-4:

Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan, Agustus 2012.

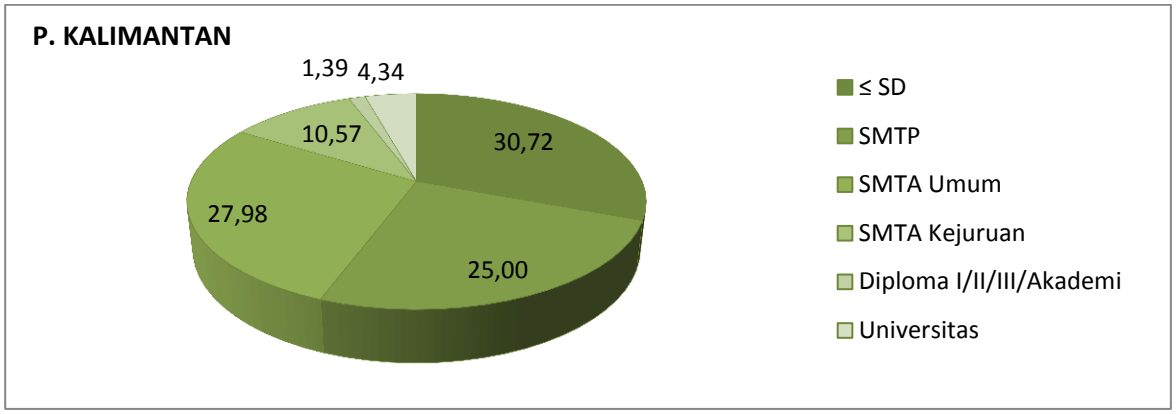

Sumber :BPS, 2012

Tabel 4-12:

Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012), (dalam persen).

PROVINSI	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN					JUMLAH
	≤ SD	SMTP	SMTA UMUM/ KEJURUAN	DIPLOMA I/II/III/ AKADEMI	UNIVERSITAS	
Kalimantan Barat	32,09	14,35	34,22	3,73	15,61	100,00
Kalimantan Tengah	42,19	10,09	38,61	1,95	7,16	100,00
Kalimantan Selatan	35,07	15,90	34,75	1,09	13,19	100,00
Kalimantan Timur	24,95	22,33	43,52	4,24	4,97	100,00
P. KALIMANTAN	**30,26**	**18,11**	**39,13**	**3,21**	**9,27**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Kesehatan. Perkembangan dari kinerja kesehatan di Wilayah Kalimantan dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama kesehatan, antara lain adalah: Umur Harapan Hidup (UHH), perkembangan Gizi Balita, persentase proses persalinan ditolong tenaga medis, dan persentase balita dengan status tinggi badan pendek (stunting).

- Berdasarkan estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Kalimantan selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional. Estimasi UHH di wilayah Kalimantan tahun 2010 sebanyak 2 provinsi telah berada di atas UHH nasional. Provinsi dengan UHH tertinggi berada di Kalimantan Timur, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Selatan (*Gambar 4-5*).
- Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang di wilayah Kalimantan tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan beragam, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan, sementara provinsi lainnya menunjukkan penurunan. Kinerja penurunan prevalensi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Barat. Prevalensi gizi buruk dan kurang tertinggi pada tahun 2010 berada di Provinsi Kalimantan Barat, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Timur (*Tabel 4-3*).
- Status tinggi badan pendek (stunting)[1]. Perkembangan satus tinggi badan pendek pada balita secara nasional pada tahun 2010 masih serius yaitu sebesar 35,6 persen, dan di wilayah Kalimantan yaitu di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih berada di atas

[1] Tinggi badan kurang (*stunting*) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena *hygiene* dan sanitasi yang kurang baik.

angka nasional. Perkembangan peningkatan masalah pendek terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, sementara provinsi lainnya menunjukkan penurunan (*Gambar 4-6*).

- Persentase kelahiran balita menurut penolong kelahiran terakhir, Tahun 2011 di wilayah Kalimantan, dapat ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang berada di atas angka nasional (81,3 persen). Persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur, sementara terrendah di Provinsi Kalimantan Barat (*Tabel 4-18*).

Gambar 4-5:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2010.

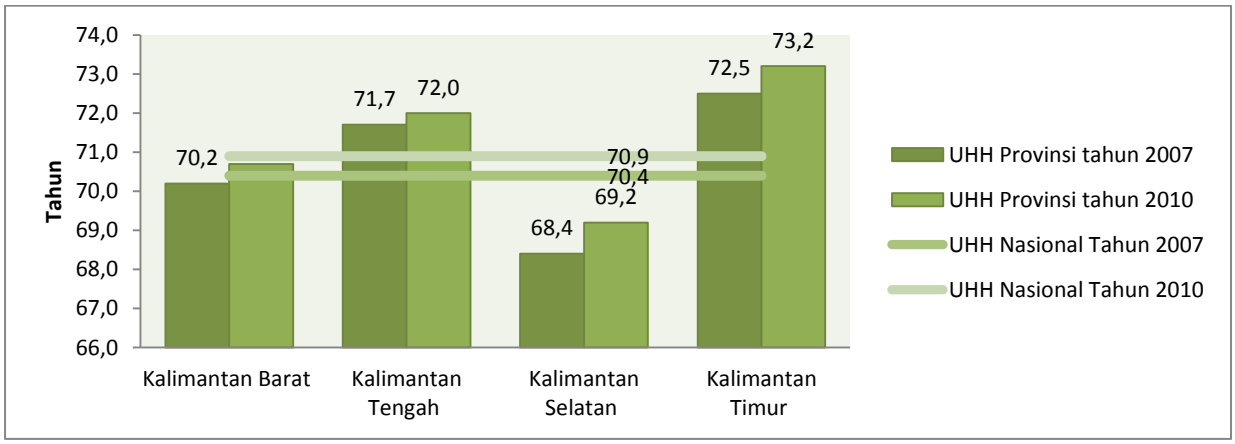

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Tabel 4-13:
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010.

PROVINSI	2007			2010			Δ (2007-2010)
	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG	
Kalimantan Barat	8,5	14	22,5	9,5	19,7	29,2	-6,7
Kalimantan Tengah	8,1	16,1	24,2	5,3	22,3	27,6	-3,4
Kalimantan Selatan	8,4	18,2	26,6	6	16,8	22,8	3,8
Kalimantan Timur	6,2	13,1	19,3	4,4	12,7	17,1	2,2
INDONESIA	**5,4**	**13**	**18,4**	**4,9**	**13**	**17,9**	**0,5**

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Gambar 4-6:
Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan Pada Tahun 2007 dan 2010.

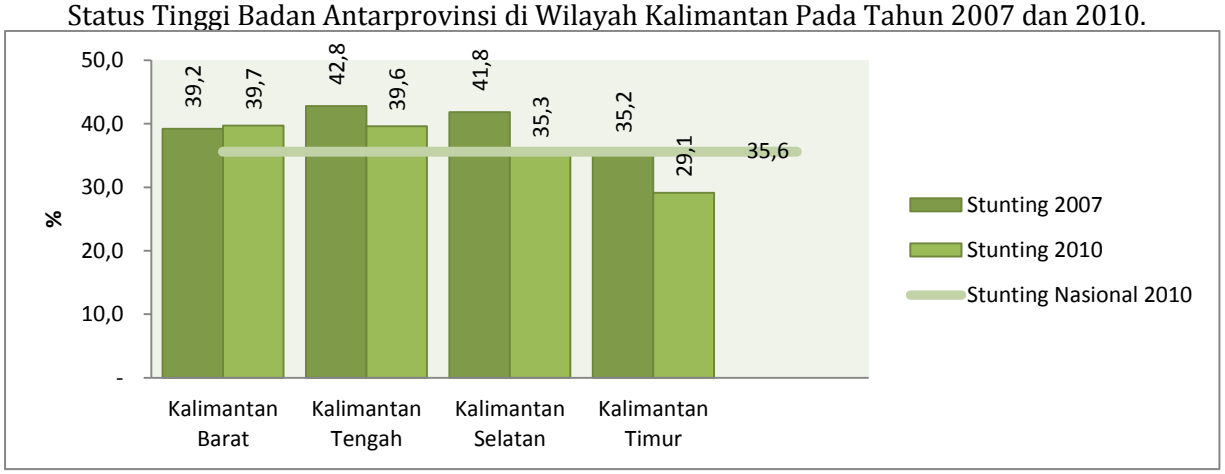

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Tabel 4-14:
Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

PROVINSI	TENAGA MEDIS				TENAGA NON MEDIS		
	DOKTER	BIDAN	TENAGA MEDIS LAINNYA	TOTAL	DUKUN	FAMILI	TOTAL
Kalimantan Barat	8,0	54,6	1,4	63,9	35,1	0,9	36,0
Kalimantan Tengah	8,0	60,0	1,7	69,8	29,9	0,3	30,2
Kalimantan Selatan	11,0	70,2	0,6	81,8	18,0	0,2	18,2
Kalimantan Timur	25,0	62,3	1,4	88,6	10,6	0,7	11,3
INDONESIA	**16,9**	**63,7**	**0,7**	**81,3**	**17,3**	**1,2**	**18,6**

Sumber: SUSENAS, 2011, BPS

Pendidikan. Perkembangan dari kinerja pendidikan di Wilayah Kalimantan dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama pendidikan, antara lain adalah: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

- Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah Kalimantan selama periode 2009-2012 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur telah berada di atas RLS nasional, dan Provinsi Kalimantan Selatan sama dengan angka nasional. Sementara RLS terrendah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (*Tabel 4-15*).
- Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 2008-2013 di wilayah Kalimantan menunjukkan perubahan negatif. Pada tahun 2012, AMH di wilayah Kalimantan berada di bawah rata-rata AMH nasional (92,81%), dengan AMH tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dan terrendah di Provinsi Kalimantan Tengah (*Tabel 4-15*).
- Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Kalimantan pada tahun 2008-2012, sebagian besar menunjukkan perkembangan positif pada semua kelompok usia, kecuali pada kelompok 7-12 tahun di Kalimantan Barat dan pada kelompok usia 13-15 tahun di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2012, Kalimantan Timur menunjukkan APS tertinggi diseluruh kelompok usia dan di atas rata-rata nasional, sementara terrendah pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pada kelompok usia 16-18 tahun di provinsi Kalimantan Tengah (*Tabel 4-16*).

Tabel 4-15:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012.

PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)			ANGKA MELEK HURUF (%)		
	2009	2012	Δ ('12-'09)	2009	2012	Δ ('12-'09)
Kalimantan Barat	6.8	7.1	0.3	89.7	14.18	-75.52
Kalimantan Tengah	8	8.2	0.2	97.39	13.65	-83.74
Kalimantan Selatan	7.5	7.9	0.4	95.41	16.68	-78.73
Kalimantan Timur	8.9	9.2	0.3	96.89	19.22	-77.67
NASIONAL	**7,7**	**7,9**	**0,2**	**92,58**	**92,81**	**0,23**

Sumber: SUSENAS, 2011, BPS

Tabel 4-16:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2013.

Provinsi	2008			2012			Δ 2008-2012		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
Kalimantan Barat	97,08	84,50	50,73	96,68	85,33	55,12	-0,40	0,83	4,39
Kalimantan Tengah	98,45	86,42	53,64	98,56	85,86	55,08	0,11	-0,56	1,44
Kalimantan Selatan	97,48	79,68	50,30	97,92	85,56	58,06	0,44	5,88	7,76
Kalimantan Timur	98,35	90,78	64,71	99,17	96,53	71,57	0,82	5,75	6,86
INDONESIA	**97,88**	**84,89**	**55,50**	**97,99**	**89,76**	**61,42**	**0,11**	**4,87**	**5,92**

Sumber: SUSENAS, 2011, BPS

Kemiskinan. Kondisi umum kemiskinan di Wilayah Kalimantan ditunjukan dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan pola distribusi atau sebaran kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan.

- Penduduk miskin di wilayah Kalimantan pada tahun 2012 mencapai 954,6 Ribu jiwa, meliputi 3,28 persen dari total penduduk miskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,69 persen berada di bawah tingkat kemiskinan nasional (11,96 persen). Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung menurun, sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional (*Gambar 4-7*).
- Perkembangan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah Kalimantan selama periode 2008-2013 rata-rata berkurang sebesar 288,44 ribu (2,77 persen). Sementara Persentase penduduk miskin tahun 2013 sekitar 6,37 persen atau menurun sebesar 2,77 persen dari tahun 2008, dengan penurunan tingkat kemiskinan terbesar berada di Kalimantan Barat (*Tabel 4-18*).
- Penyebaran kemiskinan di wilayah Kalimantan sebagian besar berada di perdesaan, yakni mencapai 72,12 persen dari total penduduk miskin , atau dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,37 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, sementara di perkotaan di Provinsi Kalimantan Barat (*Tabel 4-19*).

Gambar 4-7:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan, Tahun 2008-2013

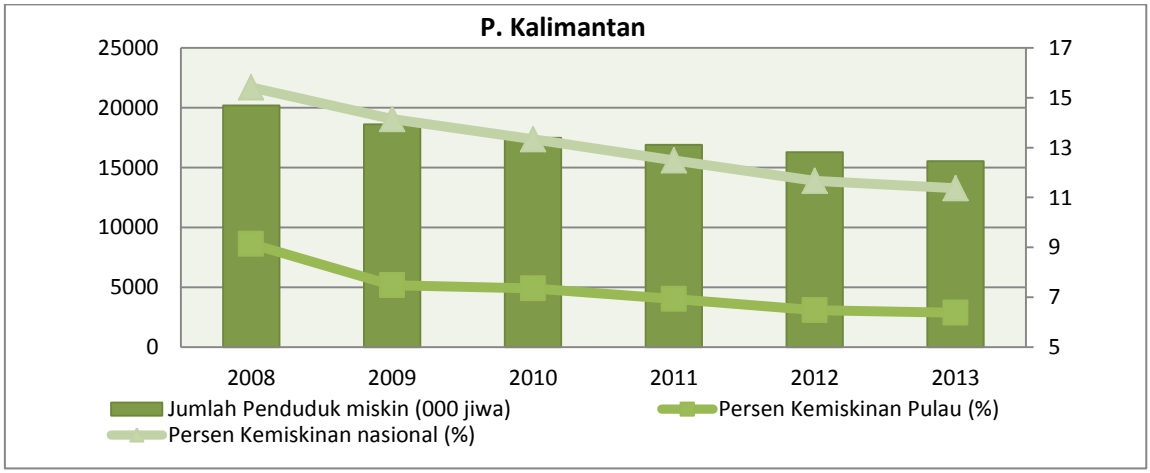

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

Tabel 4-17:
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2008-2013.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kalimantan Barat	11,07	9,30	9,02	8,60	7,96	8,24
Kalimantan Tengah	8,71	7,02	6,77	6,56	6,19	5,93
Kalimantan Selatan	6,48	5,12	5,21	5,29	5,01	4,77
Kalimantan Timur	9,51	7,73	7,66	6,77	6,38	6,06
P. KALIMANTAN	**9,14**	**7,49**	**7,35**	**6,93**	**6,49**	**6,37**
NASIONAL	**15,42**	**14,15**	**13,33**	**12,49**	**11,67**	**11,37**

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

Tabel 4-18:
Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 dan 2013.

PROVINSI	Jumlah (000 jiwa)			(%)		
	2008	2013	Δ 2008-2013	2008	2013	Δ 2008-2013
Kalimantan Barat	508,80	369,01	139,79	11,07	8,24	2,83
Kalimantan Tengah	200,00	136,95	63,05	8,71	5,93	2,78
Kalimantan Selatan	218,90	181,74	37,16	6,48	4,77	1,71
Kalimantan Timur	286,40	237,96	48,44	9,51	6,06	3,45
P. KALIMANTAN	**1.214,10**	**925,66**	**288,44**	**9,14**	**6,37**	**2,77**
NASIONAL	**34.963,10**	**28.066,56**	**6.896,54**	**15,42**	**11,37**	**4,05**

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

Tabel 4-19:
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)			PERSERTASE PENDUDUK MISKIN (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
Kalimantan Barat	80,39	282,92	363,31	5,98	9,11	8,17
Kalimantan Tengah	32,39	115,66	148,05	4,26	7,64	6,51
Kalimantan selatan	58,17	131,70	189,88	3,68	6,07	5,06
Kalimantan Timur	95,20	158,13	253,34	4,05	11,01	6,68
P. KALIMANTAN	**266,15**	**688,41**	**954,58**	**4,41**	**8,37**	**6,69**
NASIONAL	**10.647,25**	**18.485,20**	**29.132,43**	**8,78**	**15,12**	**11,96**

Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia di Wilayah Kalimantan diukur berdasarkan indek pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan perbandingan peringkat masing-masing provinsi terhadap nasional.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia, seluruh provinsi di Kalimantan memperlihatkan peningkatan di selama periode 2007-2011.
- Pada tahun 2011, IPM di wilayah Kalimantan yang berada di atas IPM nasional adalah Provinsi Kalimantan Timur (ranking 5) dan Kalimantan Tengah (ranking 7), sedangkan IPM terrendah di Provinsi Kalimantan Barat (ranking 29).

Tabel 4-20:

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011.

PROVINSI	IPM					Peringkat IPM (PROVINSI)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Kalimantan Barat	67,53	68,17	68,79	69,15	69,66	29	29	28	28	28
Kalimantan Tengah	73,49	73,88	74,36	74,64	75,06	7	7	7	7	7
Kalimantan Selatan	68,01	68,72	69,30	69,92	70,44	26	26	26	26	26
Kalimantan Timur	73,77	74,52	75,11	75,56	76,22	5	5	5	5	5
IPM NASIONAL	**70,59**	**71,17**	**71,76**	**72,27**	**72,77**					

Sumber: BPS 2012

4.3. PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Daerah. Tingkat perkembangan perekonomian daerah Wilayah Kalimantan ditunjukan dengan beberapa indikator utama ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Struktur ekonomi menurut lapangan usaha dan penggunaan, perkembangan investasi PMA dan PMDN, dan perkembangan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

PDRB Menurut Lapangan Usaha:

- Perkembangan perekonomian wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2008-2012 rata-rata tumbuh 4,80 persen per tahun (*Tabel 4-21*). Pertumbuhan 2012 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu tumbuh sebesar 4,83 persen (*Tabel 4-21*).
- Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, sementara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur lebih sedikit lebih cepat dari tahun sebelumnya (*Tabel 4-21*).
- Sebagian besar sektor tumbuh positif, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan adalah sektor keuangan dan jasa perusahaan, dan bangunan dengan rata-rata laju pertumbuhan di atas 9 persen (*Tabel 4-22*).
- Share PDRB Atas Dasar Harga Berlaku wilayah Kalimantan terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2012 sebesar 9,30 persen (Tabel 4-24), dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Kalimantan Timur (6,23 persen).
- Peran sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan pertanian masih mendominasi dalam perkembangan perekonomian Wilayah Kalimantan. Peran sektor pertambangan dan penggalian terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Peran sektor industri pengolahan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (*Tabel 4-25*).
- Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Kalimantan rata-rata meningkat. Namun, sebagian besar provinsi masih berada dibawah rata-rata PDB perkapita nasional kecuali Kalimantan Timur. Jika diperbandingkan antarprovinsi, menunjukan adanya gap (ketimpangan) yang cukup tinggi antara PDRB perkapita provinsi terrendah dan PDRB perkapita tertinggi (*Tabel 4-26*).

Tabel 4-21:

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan ADHK Tahun 2000, Tahun 2008-2012 (Persen).

PROVINSI	Tanpa Migas						Dengan Migas					
	2008	2009	2010	2011	2012	08-12	2008	2009	2010	2011	2012	08-12
Kalimantan Barat	5,45	4,80	5,47	5,97	5,83	5,51	5,45	4,80	5,47	5,97	5,83	5,51
Kalimantan Tengah	6,17	5,57	6,50	6,77	6,69	6,34	6,17	5,57	6,50	6,77	6,69	6,34
Kalimantan Selatan	6,54	5,38	5,69	6,27	5,87	5,95	6,45	5,29	5,59	6,12	5,73	5,83
Kalimantan Timur	6,34	7,05	11,68	12,03	11,31	9,68	4,90	2,28	5,10	4,08	3,98	4,07
P. KALIMANTAN	**6,17**	**6,01**	**8,41**	**8,91**	**8,53**	**7,61**	**5,35**	**3,47**	**5,38**	**4,97**	**4,83**	**4,80**
NASIONAL (PDB)	**6,47**	**5,00**	**6,60**	**6,98**	**6,81**	**6,37**	**6,01**	**4,63**	**6,22**	**6,49**	**6,23**	**5,92**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 4-22:

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011. (Persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	3,88	3,77	3,68	4,05
2. Pertambangan & Penggalian	6,05	4,84	8,55	6,76
3. Industri Pengolahan	3,08	-2,69	-1,77	-3,60
4. Listrik, Gas & Air Bersih	4,84	5,01	7,55	8,47
5. Bangunan	7,87	8,54	8,07	9,74
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,65	5,55	8,21	8,10
7. Pengangkutan & Komunikasi	9,42	7,45	8,46	8,90
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	7,79	8,27	9,15	10,14
9. Jasa-Jasa	7,03	5,69	6,77	8,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**5,35**	**3,47**	**5,32**	**4,88**

Sumber: BPS, 2011

Tabel 5-23:

Perkembangan Nilai PDRB berdasarkan ADHB dengan Migas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008-2012. (Rp. Juta)

PROVINSI	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012
Kalimantan Barat	49.132.965,97	54.281.172,42	60.541.582,28	66.913.478,82	75.027.252,84
Kalimantan Tengah	32.760.167,75	37.161.800,06	42.571.114,26	49.047.539,92	55.876.330,48
Kalimantan Selatan	45.843.793,53	51.460.175,70	59.823.065,94	68.186.882,70	75.923.132,54
Kalimantan Timur	314.813.520,84	285.590.821,55	321.764.430,15	391.408.491,73	419.101.618,93
P. KALIMANTAN	**442550448,09**	**428493969,73**	**484700192,64**	**575556393,16**	**625928334,80**

Sumber :BPS, 2012

Tabel 4-24:

Kontribusi Provinsi Terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Kalimantan dan PDRB Nasional (33 Provinsi), Tahun 2012.

PROVINSI	PDRB (Rp. Juta)	Share Terhadap Pulau (%)	Share Terhadap Nasional (%)
Kalimantan Barat	75.027.252,84	11,99	1,11
Kalimantan Tengah	55.876.330,48	8,93	0,83
Kalimantan Selatan	75.923.132,54	12,13	1,13
Kalimantan Timur	419.101.618,93	66,96	6,23
P. KALIMANTAN	**625928334,80**	**100,00**	**9,30**
PDB NASIONAL (33 PROVINSI)	**6.731.534.512,85**		**100,00**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 4-25:
Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011, (persen).

PROVINSI	Lapangan Usaha								
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Kalimantan Barat	25,05	2,03	17,98	0,49	9,96	22,57	7,40	4,81	9,71
Kalimantan Tengah	28,47	9,56	7,41	0,68	5,52	20,81	8,23	5,88	13,44
Kalimantan Selatan	20,10	24,42	9,19	0,57	5,85	15,36	8,78	5,04	10,69
Kalimantan Timur	5,71	50,29	23,36	0,26	2,64	7,85	3,59	2,38	3,92
P. KALIMANTAN	**11,61**	**38,13**	**19,69**	**0,36**	**4,12**	**11,56**	**5,05**	**3,28**	**6,21**

sumber: BPS, 2011
Keterangan:
1=Pertanian
2= Pertambangan & Penggalian
3= Industri Pengolahan
4= Listrik, Gas & Air
5= Konstruksi
6= Perdagangan, Hotel & Restoran
7= Pengangkutan & Komunikasi
8= Keuangan & Jasa Perusahaan
9= Jasa-Jasa

Tabel 4-26:
Perkembangan PDRB Per Kapita dengan Migas Menurut ADHK Tahun 2000 Per Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah).

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012
Kalimantan Barat	6.325	6.582	6.875	7.258	7.631
Kalimantan Tengah	7.793	8.098	8.465	8.927	9.380
Kalimantan Selatan	7.872	8.141	8.421	8.810	9.156
Kalimantan Timur	31.154	30.720	31.042	31.290	31.417
RATA-RATA KALIMANTAN	**13.286**	**13.385**	**13.701**	**14.071**	**14.396**
INDONESIA (PDB)	**8.990**	**9.281**	**9.703**	**10.225**	**10.721**

Sumber: BPS, 2012

PDRB Menurut Penggunaan:

- Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Kalimantan pada tahun 2011 didominasi oleh komponen Ekspor, yaitu mencapai 90 Persen dari total PDB. Sementara untuk distribusi komponen permintaan disetiap provinsi paling besar adalah komponen ekspor, impor, dan konsumsi rumah tangga (*Tabel 4-27*).
- Komponen impor barang dan jasa memiliki laju pertumbuhan tertinggi (8,64 persen) dibandingkan komponen lainnya, sementara untuk komponen peggeluaran PMTB tumbuh sebesar 7,82 persen, dan komponen konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 7,29 persen (*Tabel 4-28*).

Tabel 4-27:
Distribusi Persentase PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
Kalimantan Barat	52.95	0.90	15.54	7.82	0.35	26.68	24.23
Kalimantan Tengah	44.70	1.21	16.64	43.39	4.87	44.56	55.38
Kalimantan Selatan	46.56	0.46	15.02	20.51	(3.54)	71.69	50.71
Kalimantan Timur	12.67	0.23	5.13	13.18	0.76	11.19	43.15
P. KALIMANTAN	**24.11**	**0.42**	**8.49**	**18.33**	**0.55**	**90.99**	**42.89**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 4-28 :

Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011, (persen).

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					RATA-RATA 2007-2011
	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	
Konsumsi Rumah Tangga	4,22	5,65	5,42	5,84	5,80	5,39
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	5,00	5,59	9,24	6,21	6,72	6,55
Konsumsi Pemerintah	8,59	4,25	11,61	7,54	7,29	7,86
PMTB	7,15	9,38	5,12	6,95	7,82	7,28
Perubahan Stock	(490,35)	160,03	(71,31)	201,59	(10,57)	(42,12)
Ekspor Barang & Jasa	3,05	6,82	(3,71)	9,14	5,56	4,17
Impor Barang & Jasa	(1,29)	7,72	(4,89)	13,40	8,64	4,72

Sumber: BPS, 2012

Tabel 4-29:

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
Kalimantan Barat	6,00	6,84	2,03	7,52	(2,15)	13,80	14.32
Kalimantan Tengah	5,39	10,64	8,70	11,55	57,40	11,67	15.42
Kalimantan Selatan	5,43	6,49	7,62	8,47	(13,08)	8,31	13.86
Kalimantan Timur	6,12	4,72	6,50	6,30	4,03	4,06	5.80
P. KALIMANTAN	**5.80**	**6,72**	**6,16**	**7,82**	**(2.862,04)**	**5,56**	**8,64**

Sumber: BPS, 2012

Investasi PMA dan PMDN:

- Perkembangan investasi PMDN dan PMA Wilayah Kalimantan dalam dua tahun terakhir meningkat. Sebagian besar nilai realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4-30:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek menurut Provinsi
di Wilayah Kalimantan Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% PULAU 2012
Kalimantan Barat	39,8	27,8	170,4	500,7	397,5	12,4
Kalimantan Tengah	62,7	4,9	546,6	543,7	524,7	16,4
Kalimantan Selatan	0,2	171,8	202,2	272,1	272,3	8,5
Kalimantan Timur	12,5	79,9	1092,2	602,4	2.014,1	62,8
P. KALIMANTAN	**115,2**	**284,4**	**2.011,4**	**1.918,8**	**3.208,6**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**0,77**	**2,63**	**12,40**	**0,77**	**0,77**	

Sumber : BKPM, 2012

Tabel 4-31:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek menurut Provinsi
di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% PULAU 2012
Kalimantan Barat	248,1	517,1	1.171,7	1.404,0	2.811,0	16,8
Kalimantan Tengah	681,9	1.464,2	3.507,7	3.376,0	4.529,6	27,1
Kalimantan Selatan	592,7	870,9	2.015,0	2.118,3	3.509,8	21,0
Kalimantan Timur	298,7	82,2	7.881,3	6.569,1	5.889,3	35,2
KALIMANTAN	**1.821,4**	**2.934,4**	**14.575,7**	**13.467,4**	**16.739,7**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL		**7,76**	**0,77**	**0,77**	**0,77**	

Sumber : BKPM, 2012

Perdaggangan Ekspor dan Impor. Perkembangan perdaggangan di Wilayah Kalimantan ditunjukan dengan nilai ekspor dan nilai impor, dan neraca perdagangan antara nilai ekspor terhadap nilai impor**.**

- Perkembangan perdagangan ekspor non migas di Wilayah Kalimantan meningkat selama periode 2006-2010. Pada tahun 2010, peranan ekspor Kalimantan sebesar 15,81 persen terhadap nilai ekspor non migas nasional, dengan ekspor terbesar berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (*Tabel 4-32*).
- Perkembangan nilai impor non migas di Wilayah Kalimantan meningkat selama periode 2006-2010, kecuali pada tahun 2007. Pada Tahun 2010, peranan nilai impor non migas Wilayah Kalimantan tercatat sekitar 2,15 persen terhadap nilai impor non migas nasional, dengan nilai impor non migas terbesar Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (*Tabel 4-33*).
- Perkembangan neraca perdagangan luar negeri di Kalimantan dari tahun 2006-2010 meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2010, seluruh provinsi mengalami surplus perdagangan, terutama provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (*Tabel 3-34*).

Tabel 4-32:
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2006-2010. (dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN. (%)	PERAN. (%)
						2010	2010
Kalimantan Barat	620,7	728,8	593,1	536,5	922,1	4,49	0,71
Kalimantan Tengah	179,2	165	158,8	327,4	443,1	2,16	0,34
Kalimantan Selatan	2.361,2	2.749,5	3.754,6	5.608,2	6.373,3	31,07	4,91
Kalimantan Timur	4.657,3	4.856,8	5.792,9	8.745,3	12.775,8	62,28	9,85
P. KALIMANTAN	**7.818,4**	**8.500,1**	**10.299,4**	**15.217,4**	**20.514,3**	**100.00**	**15,81**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Tabel 4-33:
Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2006-2010. (dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN (%)	PERAN (%)
						2010	2010
Kalimantan Barat	72,5	81,6	89	53,8	106,8	4,59	0.10
Kalimantan Tengah	27,1	42,7	38,6	34,5	56,4	2,42	0.05
Kalimantan Selatan	812,9	227,2	246,8	448,2	416,6	17,91	0.38
Kalimantan Timur	1.195,2	835,4	1.755,5	1.622,3	1.746,7	75,08	1.61
P. KALIMANTAN	**2.107,7**	**1.186,9**	**2.129,9**	**2.158,8**	**2.326,5**	**100,00**	**2,15**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Tabel 4-34:
Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Kalimantan dari tahun 2006-2010.

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010
Kalimantan Barat	548,2	647,2	504,1	482,7	815,3
Kalimantan Tengah	152,1	122,3	120,2	292,9	386,7
Kalimantan Selatan	1.548,3	2.522,3	3.507,8	5.160	5.956,7
Kalimantan Timur	3.462,1	4.021,4	4.037,4	7.123	1.1029,1
P. KALIMANTAN	**5.710,7**	**7.313,2**	**8.169,5**	**13.058,6**	**18.187,8**

Sumber: BPS, 2010

Komoditas Unggulan. Perkembangan komoditas unggulan di Wilayah Kalimantan ditunjukan perkembangan jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman perkebunan, jenis aktivitas peternakan, dan perikanan dan kelautan.

Tanaman Pangan Padi:

- Perkembangan produksi padi di Wilayah Kalimantan dari tahun 2007-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya (*Tabel 4-35*). Pada tahun 2013 produksi padi Kalimantan mencapai sekitar 5.024.211 ton atau sekitar 7,25 persen dari produksi padi nasional (*Tabel 4-36*)
- Dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas padi Kalimantan (36,64 ku/ha) masih berada dibawah rata-rata produktivitas padi nasional (51 ku/ha) (*Tabel 4-35*). Produktivitas padi paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4-35:

Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi
Di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2013.

TAHUN	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIVITAS (TON/HA)
2007	4.309.101	1.290.827	3,34
2008	4.384.490	1.293.945	3,39
2009	4.392.112	1.269.655	3,46
2010	4.422.961	1.296.488	3,41
2011	4.520.406	1.289.305	3,51
2012	4.711.780	1.328.878	3,55
2013	5.024.211	1.376.965	3,66

Sumber: BPS, 2013

Tabel 4-36:

Perkembangan Produksi (ribu ton) Tanaman Padi Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2008 dan 2013.

Provinsi	Tahun		Δ 2008-2013	Share_Pulau 2013	Share_Nasional 2013
	2008	2013			
Kalimantan Barat	1.321,44	1.571,13	249,68	31,27	2,27
Kalimantan Tengah	522,73	774,36	251,62	15,41	1,12
Kalimantan Selatan	1.954,28	2.111,76	157,47	42,03	3,05
Kalimantan Timur	586,03	566,97	(19,06)	11,28	0,82
P. KALIMANTAN	**4.384,49**	**5.024,21**	**639,72**	**100,00**	**7,25**
NASIONAL	**60.325,93**	**69.271,05**	**8.945,13**		**100,00**

Sumber: BPS, 2013

Tabel 4-37:

Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun
2008 dan 2013, (ku/ha).

PROVINSI	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kalimantan Barat	31,2	31,05	31,37	31,78	30,39	31,84
Kalimantan Tengah	25,41	26,98	26,26	27,49	30,01	31,27
Kalimantan Selatan	38,52	39,93	39,1	39,85	42,05	42,45
Kalimantan Timur	37,25	38,01	39,26	39,16	39,34	40,99
P. KALIMANTAN	**33,10**	**33,99**	**34,00**	**34,57**	**35,45**	**36,64**
NASIONAL	**48,94**	**49,99**	**50,14**	**50,76**	**51,36**	**51,50**

Sumber :BPS, 2013

Tanaman Palawija:

- Perkembangan tanaman palawija di Wilayah Kalimantan dengan produksi dan luas panen paling besar adalah Jagung dan ubi kayu, namun perkembangan produksi dari kedua komoditas tersebut dari tahun 2007-2013 kecenderungan menurun (*Tabel 4-38*).
- Sentra produksi jagung dan ubi kayu terbesar di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan (*Tabel 4-40*).
- Dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas untuk tanaman palawija di Wilayah Sumatera rata-rata masih lebih rendah dari produktivitas tanaman palawija nasional (Tabel 4-39).

Tabel 4-38 :

Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2013

TAHUN	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2007	260.208	3.874	24.231	3.800	84.499	511.964
2008	295.248	3.333	22.370	9.818	80.299	502.451
2009	301.286	4.264	21.240	10.275	84.413	488.624
2010	306.021	3.743	20.055	11.985	74.730	440.650
2011	297.969	3.884	21.419	14.373	84.627	478.666
2012	296.653	3.450	16.480	9.443	62.950	385.770
2013	286.726	2.045	15.667	10.907	10.907	440.816

Sumber: BPS, 2013

Tabel 4-39 :

Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2013.

TAHUN	Produktivitas (ku/ha)					
	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	35,46	11,27	9,03	11,68	87,47	139,90
2009	35,71	11,21	9,07	11,61	88,67	143,46
2010	35,56	11,54	9,01	12,61	89,41	145,56
2011	35,56	11,61	9,21	12,89	89,04	146,31
2012	35,70	12,36	9,25	13,04	93,70	149,67
2013	35,57	12,08	9,37	13,38	92,58	154,24

Sumber :BPS, 2013

Tabel 4-40:

Perkembangan Produksi Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2013. (ton)

PROVINSI	Produksi (ton)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kalimantan Barat	171.016	617	1.359	2.159	15.918	206.413
Kalimantan Tengah	7.957	148	774	2.783	9.171	47.548
Kalimantan Selatan	100.224	812	11.929	4.302	21.886	104.992
Kalimantan Timur	7.529	468	1.605	1.663	16.180	81.863
P. KALIMANTAN	**286.726**	**2.045**	**15.667**	**10.907**	**10.907**	**440.816**
NASIONAL	**18.838.529**	**257.129**	**786.868**	**847.157**	**2.594.081**	**23.627.955**

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Perkebunan:

- Jenis perkebunan terbesar di Wilayah Kalimantan adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Perkembangan produksi dan luas areal dari kelapa sawit dan karet dari tahun 2005-2011 cenderung meningkat dan merupakan penghasil terbesar kedua setelah Wilayah Sumatera (*Tabel 4-41*).
- Pada tahun 2011 produksi kelapa sawit dan karet terbesar berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat (*Tabel 4-42*).

Tabel 4-41:

Perkembangan Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Wilayah Kalimantan Tahun 2005-2011, (Ton)

PERKEMBANGAN PRODUKSI (TON)					
TAHUN	**KAKAO**	**KARET**	**KELAPA**	**KELAPA SAWIT**	**KOPI**
2005	27.662	499.760	211.189	2.074.389	15.877
2006	29.549	574.804	221.267	3.069.278	14.545
2007	27.024	600.285	213.721	3.107.773	14.243
2008	26.743	599.063	210.145	3.114.243	13.422
2010	12.872	568.813	204.461	3.600.084	10.862
2011	-	609.667	207.140	4.987.782	8.184
PERKEMBANGAN LUAS AREAL (HA)					
TAHUN	**KAKAO**	**KARET**	**KELAPA**	**KELAPA SAWIT**	**KOPI**
2005	50.150	806.975	286.979	1.152.129	48.781
2006	53.454	822.746	298.306	1.545.202	47.240
2007	46.804	841.522	285.218	1.664.887	43.738
2008	47.826	844.820	279.312	2.070.167	42.801
2010	47.101	849.495	276.915	2.643.912	40.985
2011	-	852.092	269.208	2.606.373	37.941

Sumber :BPS, 2011

Tabel 4-42:

Perkembangan Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011.

PRODUKSI				
PROVINSI	**KELAPA SAWIT**	**KARET**	**KELAPA**	**KOPI**
Kalimantan Barat	1130998	269568	78769	3473
Kalimantan Tengah	2316020	200707	74994	1359
Kalimantan Selatan	718505	111250	31408	1310
Kalimantan Timur	822259	28142	21969	2042
P. KALIMANTAN	**4987782**	**609667**	**207140**	**8184**
LUAS AREAL				
PROVINSI	**KELAPA SAWIT**	**KARET**	**KELAPA**	**KOPI**
Kalimantan Barat	783732	389997	108120	14035
Kalimantan Tengah	974813	266028	82574	5871
Kalimantan Selatan	375859	135040	48642	5860
Kalimantan Timur	471969	61027	29872	12175
P. KALIMANTAN	**2606373**	**852092**	**269208**	**37941**

Sumber: BPS, 2011

Peternakan:

- Jenis ternak besar yang banyak diusahakan di Kalimantan adalah sapi potong, kambing, dan babi. Perkembangan populasi dari ketiga jenis ternak tersebut rata-rata meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sentra populasi ternak tahun 2013, sapi potong dan kambing terdapat Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan (*Tabel 4-43*), dan penyebaran Babi terbesar terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (*Tabel 4-44*).
- Populasi ternak unggas tahun 2013 di wilayah Kalimantan, populasi ternak unggas terbesar adalah ayam ras pedagging (*Tabel 4-45*). Sebaran populasi ayam ras pedaging dan ayam buras terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Tabel 4-43:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Kalimantan Tahun 2010-2013

Tahun	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
2010	110660	6820	407585	66848	495	175	591096
2011	104,98	4782	197960	31877	363	142	229439
2012	761227	6305	385684	44988	315	541	481106
2013	773369	6940	400008	47306	303	640	500851

Sumber: BPS, 2013

Tabel 4-44:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2013

PROVINSI	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
Kalimantan Barat	485.314	272	187.923	3.441	29	326	171.429
Kalimantan Tengah	192.585	2.349	45.922	6.904	32		71.922
Kalimantan Selatan	5.553	3.885	102.629	27.891	141	271	152.515
Kalimantan Timur	89.917	434	63.534	9.070	101	43	104.985
P. KALIMANTAN	**773.369**	**6.940**	**400.008**	**47.306**	**303**	**640**	**500.851**

Sumber: BPS 2013

Tabel 4-45:

Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Kalimantan Tahun 2010-2013.

Tahun	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
2010				
2011				
2012				
2013	89.791	27.814,88	8.512,87	6.002,55

Sumber: BPS, 2013

Tabel 4-46:

Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2013

PROVINSI	Populasi Unggas (ekor)			
	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
Kalimantan Barat	26.544	5.917,26	3.627,17	779,53
Kalimantan Tengah	4.470	3.078,57	39,92	266,74
Kalimantan Selatan	49.527	12.540,96	3.226,54	4.735,62
Kalimantan Timur	40.264	6.278,09	1.619,24	220,66
P. KALIMANTAN	**89.791**	**27.814,88**	**8.512,87**	**6.002,55**
NASIONAL	**1.355.288**	**290.455,06**	**147.279,35**	**46.312,53**

Sumber: BPS 2013

Perikanan dan Kelautan:

- Tingkat perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2011 di Wilayah Kalimantan, ditunjukkan dengan penurunan pada perikanan tangkap dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk perikanan budidaya rata-rata meningkat, kecuali sawah (*Tabel 4-47*).
- Produksi perikanan tangkap terbesar di wilayah Kalimantan yaitu jenis perikanan tangkap laut dan perairan umum, dan produksi untuk perikanan budidaya terbesar yaitu di laut dan tambak Produksi perikanan tangkap laut, perairan umum dan perikanan budidaya laut serta tambak tahun 2011 terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (*Tabel 4-48*). .

Tabel 4-47:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Kalimantan Tahun 2005 dan 2011.

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
	Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
2005	342.822	121.198	9.633	35.966	6.244	29.306	242	246
2006	326.883	120.365	4.376	28.577	9.193	22.668	424	778
2007	308.822	136.324	24.651	41.962	14.336	31.458	4.105	265
2008	322.820	131.533	9.905	50.530	14.925	37.784	827	263
2009	327.893	127.924	9.543	49.427	32.822	55.211	1.401	443
2010	369.534	156.399	57.994	85.815	46.604	66.542	5.452	492
2011	359.058	151.385	85.688	86.578	48.979	70.716	18.126	279

Sumber :BPS, 2011

Tabel 4-48:

Produksi Perikanan Budidaya menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011.

PROVINSI	Perikanan Budidaya						Perikanan Tangkap	
	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah	Laut	Perairan Umum
Kalimantan Barat	20	10.089	7.215	1.721	10.928	-	94.063	9.840
Kalimantan Tengah	149	5.224	12.505	13.634	258	2	46.400	35.174
Kalimantan Selatan	2.303	20.101	27.045	20.258	6.940	256	115.688	63.595
Kalimantan Timur	83.216	51.164	2.214	35.103	-	21	102.907	42.776
P. KALIMANTAN	**85.688**	**86.578**	**48.979**	**70.716**	**8.126**	**279**	**359.058**	**151.385**
NASIONAL	**4.605.827**	**1.602.748**	**1.127.127**	**131.383**	**375.430**	**86.448**	**5.345.729**	**368.542**
% TERHADAP NASIONAL	**1,86**	**5,40**	**4,35**	**53,82**	**4,83**	**0,32**	**6,72**	**41,08**

Sumber :BPS, 2011

4.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH

Infrastruktur Jalan. Perkembangan kondisi jalan di Wilayah Kalimantan ditunjukan dengan panjang jalan berdasarkan status pembinaannya, rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), dan kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU), dengan kriteria tidak mantap dan mantap.

- Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di wilayah Kalimantan (*Tabel 4-49*), meliputi jalan Nasional (6.364 km), Jalan Provinsi (5.730 km), dan Jalan Kabupaten/kota (40.699 km). Jalan terpanjang berada di Kalimantan Barat (28 persen). Perkembangan total panjang jalan dalam periode 2008-2010 meningkat 8.070 Km, dengan peningkatan tertinggi dari jalan kabupaten (5.422 Km).
- Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*) pada tahun 2010 (*Gambar 4-8*), kerapatan jalan di wilayah Kalimantan (0,10 Km/Km^2), lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,25 Km/Km^2). Kerapatan jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,28 Km/Km^2, dan terrendah di provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,06 Km/Km^2 .
- Kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU, Agustus 2010), kualitas jalan Nasional Tidak Mantap di wilayah Kalimantan cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 6.317,63 Km sebanyak 1.548 Km kondisinya Tidak Mantap. Jalan Tidak Mantap tersebut sebesar 47,41 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 52,59 persen Rusak Berat (*Gambar 4-9*).
- Kualitas jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat yakni 612,07 Km (36,73persen dari total panjang jalan), dengan komposisi 66,6 persen Rusak Ringan dan 33,4 persen Rusak Berat. Berikutnya Provinsi Kalimantan Tengah yakni 573,97 Km (34,43 persen), dengan komposisi sebesar 8,44persen Rusak Ringan dan 91,56 persen Rusak Berat. Sementara kondisi jalan Nasional Tidak Mantap terendah di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 25,56 Km (2,95 persen dari total panjang jalan), dengan komposisi 88,81 persen Rusak Ringan dan 11,19 persen Rusak Berat (*Tabel 4-50*).

Tabel 4-49:
Perkembangan Panjang Jalan menurut Status Kewenangan di Wilayah Kalimantan
Tahun 2008-2010.

PROVINSI	PANJANGJALAN (KM)							
	JALAN NASIONAL		JALAN PROVINSI		JALAN KABUPATEN/ KOTA		TOTAL	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
Kalimantan Barat	1.575	1.665	628	1.656	11.049	11.686	13.252	15.007
Kalimantan Tengah	1.715	1.715	772	1.708	9.367	10.921	11.854	14.344
Kalimantan Selatan	876	866	898	812	8.057	9.265	9.831	10.943
Kalimantan Timur	1.540	2.118	1.442	1.554	6.804	8.827	9.786	12.499
P. KALIMANTAN	**5.706**	**6.364**	**3.740**	**5.730**	**35.277**	**40.699**	**44.723**	**52.793**

Sumber: DitjenBinaMarga, Kementerian PU

Gambar 4-8:
Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Road Density*) AntarProviinsi Di Wilayah Kalimantan

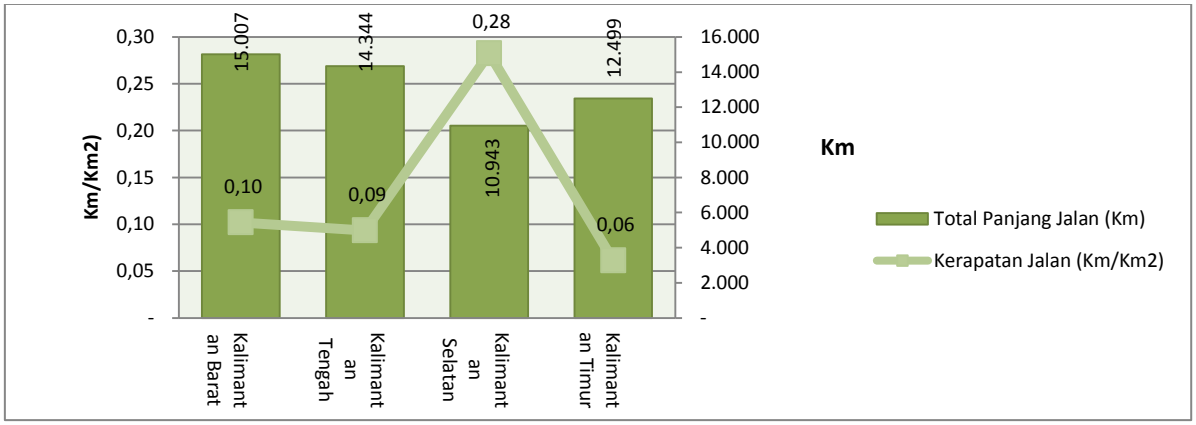

Sumber: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 4-9:

Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Kalimantan (Km)

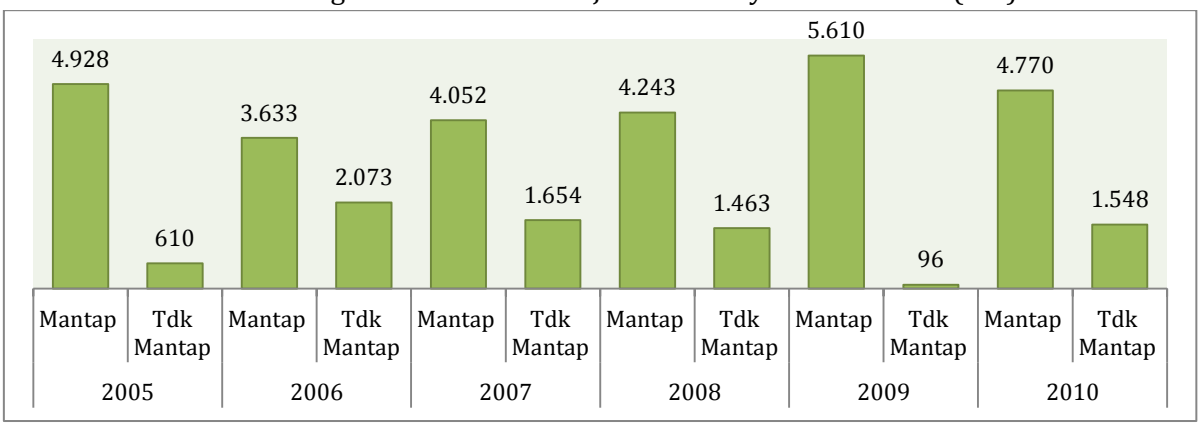

Sumber: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 4-50:

Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi,Tahun 2010.

PROVINSI	PANJANG JALAN NASIONAL (KM)	KUALITAS JALAN					
		PANJANG J ALAN MANTAP		PANJANG JALAN TIDAK MANTAP		KOMPOSISI J ALAN TIDAK MANTAP	
		(KM)	%	(KM)	%	% RUSAK RINGAN	% RUSAK BERAT
Kalimantan Barat	1.666,43	1.054,36	3,27	612,07	36,73	66,60	33,40
Kalimantan Tengah	1.666,95	1.092,98	5,57	573,97	34,43	8,44	91,56
Kalimantan Timur	2.118,17	1.782,09	84,13	336,08	15,87	75,87	24,13
Kalimantan Selatan	866,08	840,52	97,05	25,56	2,95	88,81	11,19
P. KALIMANTAN	**6.317,63**	**4.769,95**	**75,50**	**1.547,68**	**24,50**	**47,41**	**52,59**
INDONESIA	**38.189,43**	**31.522,09**	**82,54**	**6.667,34**	**17,46**	**48,28**	**51,72**

Sumber: Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010.
DirektoratJenderalBinaMarga (Status 18 Agustus 2010)

Energi Listrik. Perkembangan kondisi listrik di Wilayah Kalimantan ditunjukan dengan jumlah kapasitas terpasang, jumlah pelanngan listrik, rasio elektrifikasi, dan konsumsi listrik perkapita

- Kapasitas terpasang energy listrik PLN pada tahun 2011 di wilayah Kalimantan mencapai 982,88 Mw. Kapasitas terpasang tertinggi di wilayah Kalsel dan Kalteng sebanyak 39,16 persen, dan terrendah di PT.PLN Tarakan sebanyak 3,18 persen. Kapasitas terpasang menurut jenis pembangkit, sebagian besar bersumber dari PLTD sebesar 65,30 persen, berikutnya PLTU sebesar 13,23 persen (*Tabel 4-51*).
- Penggunaan energi untuk pelanggan rumah tangga di setiap satuan PLN/provinsi selama periode 2009-2011 tumbuh dengan kisaran tertinggi di PT.PLN Tarakan (38 persen) dan terrendah di Provinsi Kalimantan Selatan (17 persen). Rasio Elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Selatan (73,95 persen) dan terrendah di Provinsi Kalimantan Tengah (52,97 persen). Perkembangan rasio elektrifikasi dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di wilayah Kalimantan Barat (14,54 persen) dan terrendah di wilayah Kalimantan Timur (4,46 persen) (*Tabel 4-52*).
- Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di wilayah PT.PLN Tarakan sebesar 601,28 kWh/kapita, dan terrendah di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 288,91 kWh/kapita. Perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, tertinggi di wilayah Kalimantan Barat sebesar 56,37 kWh/kapita dan terrendah di wilayah PT.PLN Tarakan sebesar 16,87 kWh/kapita (*Tabel 4-52*).

Tabel 4-51:
Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Kalimantan Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI	KAPASITASTERPASANGMENURUTJENISPEMBANGKIT (MW)								
	PLTA	PLTU	PLTG	PLTGU	PLTD	PLTMG	PLT SURYA	JUM LAH	%
Wilayah Kalimantan Barat	1,6		34		194,84		0,07	230,51	3,45
Wilayah Kalsel dan Kalteng	30	130	21		203,87			384,87	39,16
-Kalimantan Selatan	30	30	21		125,82			306,82	31,22
-Kalimantan Tengah					78,05			78,05	7,94
Wilayah Kalimantan Timur			38,4	60	223,85	13,94	0,09	336,28	34,21
PT PLN Tarakan					19,22	12		31,22	3,18
KALIMANTAN (MW)	**31,6**	**130**	**93,4**	**60**	**641,78**	**25,94**	**0,16**	**982,88**	**100,00**
%	**3,22**	**13,23**	**9,50**	**6,10**	**65,30**	**2,64**	**0,02**	**100,00**	

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Tabel 4-52:
Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita

SATUAN PLN/PROVINSI	PELANGGAN RUMAH TANGGA (RT)			RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			KWH JUAL/KAPITA		
	2009	2011	LAJU (%)	2009	2011	Δ (11-09)	2009	2011	Δ (11-09)
Wilayah Kalimantan Barat	486.764	589.263	21	50,32	64,86	14,54	267,56	323,93	56,37
Wilayah Kalsel dan Kalteng	832.531	997.163	20	57,89	66,4	8,51	316,89	356,09	39,2
- Kalimantan Selatan	609.802	711.010	17	66,06	73,95	7,89	357,6	397	39,4
- Kalimantan Tengah	222.729	286.153	28	43,25	52,97	9,72	248,66	288,91	40,25
Wilayah Kalimantan Timur	408.307	494.266	21	57,02	61,48	4,46	579,12	601,28	22,16
PT PLN Tarakan	23.905	32.936	38	57,3	67,14	9,84	857,95	874,82	16,87

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Telekomunikasi. Perkembangan kondisi telekomunikasi di Wilayah Kalimantan digambarkan dengan persentase jumlah desa yang memperoleh pelayanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon seluler.

- Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi untuk kemudahan akses komunikasi diindikasikan dengan adanya *Base Transceiver Station* (BTS). Jumlah dan persentase desa yang terdapat BTS atau manara telepon seluler di wilayah Kalimantan, terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat (561 desa/kelurahan), dan menurut persentasenya sebanyak 34 persen di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara untuk kategori jumlah dan persentase terrendah adalah di Kalimantan Tengah (299 desa/kelurahan), atau sebesar 29 persen dari total desa/kelurahan (*Gambar 4-10*).

- Berdasarkan ketersediaan layanan telpon kabel, layanan telpon kabel terbanyak adalah di Kalimantan Selatan sebanyak 374 desa/kelurahan (18,7 persen). Berdasarkan desa/kelurahan yang menerima sinyal telpon seluler dengan intensitas sinyal lemah sampai kuat sudah mencapai di atas 80 persen di seluruh provinsi, namun diantaranya terdapat (2,170 desa/kelurahan) atau 31,2 persen yang masih menerima sinyal lemah, khususnya di wilayah Kalimantan tengah yang mencapai 40,9 persen (*Tabel 4-53*).

Gambar 4-10:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS MenurutProvinsi Di Wilayah Kalimantan

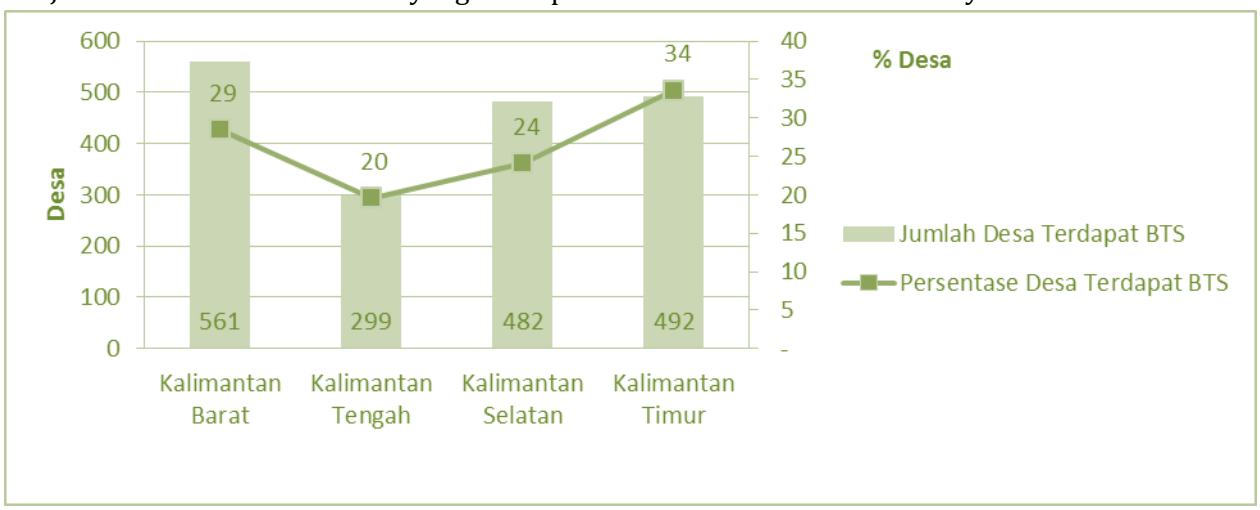

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)

Tabel 4-53:

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Seluler

PROVINSI	ADA PELANGGAN TELPON KABEL		PENERIMAAN SINYAL HP						JUMLAH DESA/KEL
			SINYAL LEMAH		SINYAL KUAT		LEMAH - KUAT		
	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	
Kalimantan Barat	188	9,6	673	34,2	928	47,2	1601	81,4	1967
Kalimantan Tengah	84	5,5	625	40,9	625	40,9	1250	81,8	1528
Kalimantan Selatan	374	18,7	423	21,2	1513	75,7	1936	96,8	2000
Kalimantan Timur	235	16,0	449	30,6	830	56,7	1279	87,3	1465
P. KALIMANTAN	**881**	**12,7**	**2.170**	**31,2**	**3.896**	**56,0**	**6.066**	**87,2**	**6.960**

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)

Air Bersih. Kondisi perkembangan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Wilayah Kalimantan ditunjukan dengan persentase jumlah desa/kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari PDAM/PAM, air sumur, sungai/danau, air hujan, dan air kemasan.

- Berdasarkan data PODES 2011, ketersediaan infrastruktur air bersih (PDAM) di wilayah Kalimantan hanya baru menjangkau 13 persen dari total desa/kelurahan. Pelayanan PAM/PDAM terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu mencapai 20 persen dari total desa/kelurahan, sementara pelayanan terrendah berada di Provinsi Kalimantan Barat yang hanya baru mencapai 5 persen (*Tabel 4-54*).
- Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sebagian besar bersumber dari pompa listrik/tangan/sumur dan sungai/danau/kolam yang mencapai sekitar 64%.

Tabel 4-54:
Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan, Tahun 2010.

PROVINSI	PAM/PDAM		POMPALISTRIK/ TANGAN/ SUMUR		MATA AIR		SUNGAI/ DANAU/ KOLAM		AIR HUJAN		AIR KEMASAN / LAINNYA		TOTAL	
	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%
Kalimantan Barat	99	5	333	17	360	18	716	36	437	22	22	1	1.967	100
Kalimantan Tengah	107	7	546	36	76	5	665	44	120	8	14	1	1.528	100
Kalimantan Selatan	406	20	911	46	55	3	556	28	58	3	14	1	2.000	100
Kalimantan Timur	262	18	290	20	199	14	463	32	191	13	60	4	1.465	100
P. KALIMANTAN	**874**	**13**	**2080**	**30**	**690**	**10**	**2400**	**34**	**806**	**12**	**110**	**2**	**6.960**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

4.5. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumberdaya Alam:

- Luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan tahun 2009 di Wilayah Kalimantan tercatat sekitar 40.969.807 hektar atau 29,98 persen dari total nasional, dengan proporsi terbesar pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi.
- Penyebaran Hutan produksi terbatas terluas di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sementara hutan produksi terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Gambar 4-11:
Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Kalimantan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009

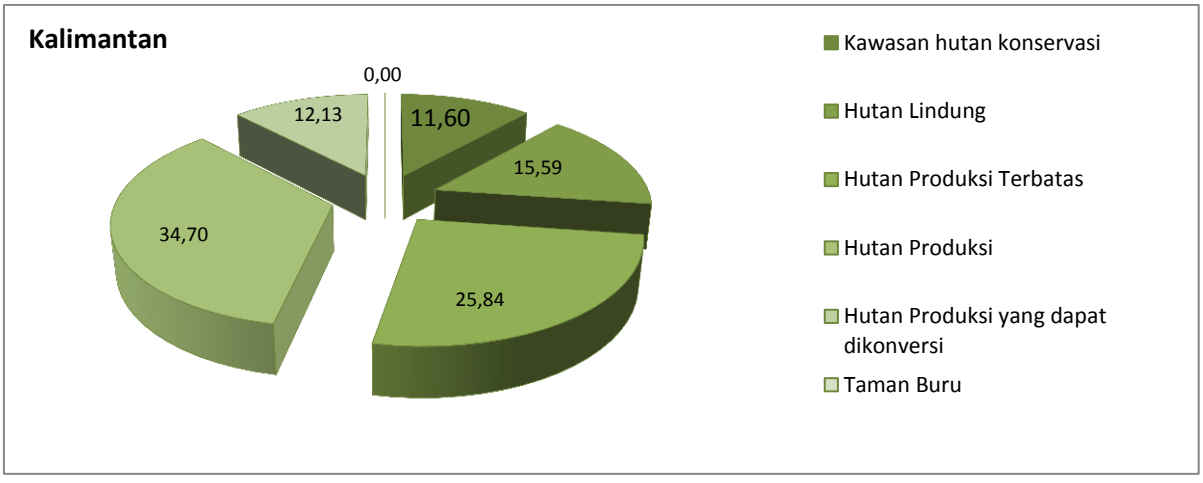

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Tahun 2009

Tabel 4-55:

Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Kalimantan.

PROVINSI	KAWASAN SUAKA ALAM + KAWASAN PELESTARIAN ALAM (HA)			HUTAN LINDUNG (HA)	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HA)	HUTAN PRODUKSI (HA)	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HA)	JUMLAH KAWASAN HUTAN (HA)	JUMLAH KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN (HA)
	PERAIRAN	KWS. HUTAN	JUMLAH						
Kalimantan Barat	77.000	1.568.580	1.645.580	2.307.045	2.445.985	2.265.800	514.350	9.101.760	9.178.760
Kalimantan Tengah	3)	729.419	729.419	800.000	3.400.000	6.068.000	4.302.581	15.300.000	15.300.000
Kalimantan Timur	500	2.164.698	2.165.198	2.751.702	4.612.965	5.121.688	-	14.651.053	14.651.553
Kalimantan Selatan	3)	3)	213.285[2)]	526.425	126.660	762.188	151.424	1.839.494	1.839.494
KALIMANTAN (HA)	**77.500**	**4.462.697**	**4.753.482**	**6.385.172**	**10.585.610**	**14.217.676**	**4.968.355**	**40.892.307**	**40.969.807**
KALIMANTAN[1)] (%)	**2,76**	**22,72**	**20,22**	**20,24**	**47,20**	**38,69**	**21,90**	**30,55**	**29,98**

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009

Keterangan:

- [1)] = Persen terhadap nasional; [2)] =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya
- [3)]= Belum ada SK Penunjukan dan data masih berdasarkan TGHK
- Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra *orthorectified* dan SRTM serta *ground check*
- Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006
- Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup digambarkan dari beberapa indikator, antara lain yaitu gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan.

- Persentase jumlah desa/kelurahan yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran air terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur., sedangkan akibat pencemaran udara dan tanah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (*Tabel 4-56*).
- Jumlah titik panas pada tahun 2011 sebanyak 10.539 titik dengan lokasi penyebaran titik panas sebagian besar terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (*Tabel 4-57*).
- Luas lahan kritis tahun 2010 mencapai 28.012.612,30 hektar atau sekitar 34,09 persen dari total luas lahan kritis di Indonesia, dengan kategori lahan sangat kritis terbesar di Kalimantan Tengah, kategori lahan kritis terbesar terdapat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan kategori agak kritis terbesar terdapat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (*Tabel 4-58*).
- Kondisi DAS di Wilayah Kalimantan dengan kondisi rusak pada tahun 2007 yaitu 39 DAS menurun dibanding tahun 1999. Sementara pada tahun 2000-2007 tingkat kerusakan DAS meningkat, dimana 5 DAS tergolong DAS super prioritas, 11 DAS prioritas, dan 23 DAS tergolong prioritas rendah (*Tabel 4-59*).
- Jumlah desa yang terkena bencana longsor di wilayah Kalimantan tahun 2008 sebanyak 198 desa yang terkena bencana longsor meningkat dibandingkan tahun 2005 (134 desa), dan provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling banyak mengalami bencana longsor (*Gambar 4-12*).

Tabel 4-56:
Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008 dan 2011.

PROVINSI	Air			Tanah			Udara		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
Kalimantan Barat	22,61	11,95	12,35	4,71	3,46	1,58	7,25	2,12	2,24
Kalimantan Tengah	18,58	7,04	11,58	1,7	0,21	0,59	8,36	3,45	1,44
Kalimantan Selatan	16,49	6,79	10,7	2,55	1,87	2,9	7,71	4,61	4,5
Kalimantan Timur	16,07	9,6	11,95	3,42	1,91	2,8	9,75	3,25	4,37
P. KALIMANTAN	**18,44**	**8,85**	**11,65**	**3,10**	**1,86**	**1,97**	**8,27**	**3,36**	**3,14**
INDONESIA	**8,3**	**5,57**	**5,4**	**1,47**	**0,77**	**0,83**	**6,24**	**3,95**	**3,78**

Sumber : BPS, Statistk Potensi Desa Tahun 2005, 2008, & 2011.

Tabel 4-57:
Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi oleh Satelit NOAA, 2008 - 2011

PROVINSI	2008	2009	2010	2011"
Kalimantan Barat	5528	10144	1785	4287
Kalimantan Tengah	1240	4640	831	3958
Kalimantan Selatan	199	1270	111	1018
Kalimantan Timur	2231	2307	974	1276
P. KALIMANTAN	**9198**	**18361**	**3701**	**10539**

Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen Kehutanan RI

Tabel 4-58:
Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Kalimantan menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

PROVINSI	TINGKAT KEKRITISAN LAHAN			JUMLAH
	AGAK KRITIS (HA)	KRITIS (HA)	SANGAT KRITIS (HA)	(HA)
Kalimantan Barat	6,162,068.10	2,844,134.80	325,356.70	9,331,559.60
Kalimantan Tengah	2,651,972.80	3,502,811.20	1,145,155.40	7,299,939.40
Kalimantan Selatan	1,348,472.60	708,101.80	78,781.30	2,135,355.70
Kalimantan Timur	8,204,464.90	1,003,402.70	37,890.00	9,245,757.60
P. KALIMANTAN	**18,366,978.40**	**8,058,450.50**	**1,587,183.40**	**28,012,612.30**
NASIONAL	**52,259,832.90**	**23,955,162.70**	**5,449,299.30**	**82,176,443.64**
% TERHADAP NASIONAL	**35.15**	**33.64**	**29.13**	**34.09**
PROPORSI LAHAN KRITIS (%)	**65.57**	**28.77**	**5.67**	**100.00**

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, 2010

Tabel 4-59:
Perkembangan Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di Kalimantan

PROVINSI	JUMLAH DAS BERDASARKAN				TINGKAT KEPRIORITASANNYA			
	TAHUN 1994/1995 - 1998/99				TAHUN 1999/2000 - 2007			
	SUPER PRIORITS	PRIORITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH	SUPER PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH
Kalimantan Barat	-	3	5	8	1	4	3	8
Kalimantan Tengah	-	4	5	9	2	2	5	9
Kalimantan Selatan	-	3	9	12	1	1	9	11
Kalimantan Timur	-	3	8	11	1	4	6	11
P. KALIMANTAN	**0**	**13**	**27**	**40**	**5**	**11**	**23**	**39**

Sumber: Data Strategis Kehutanan 2009, Departemen Kehutanan RI

Gambar 4-12:
Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2005 dan 2008

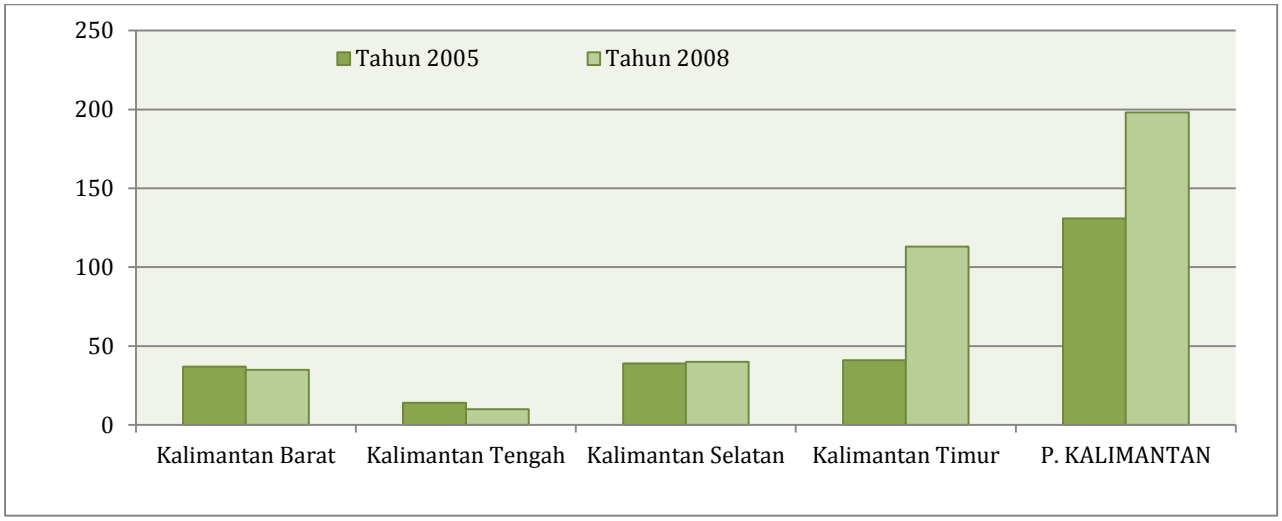

Sumber :BPS, 2018

5.1. ADMINISTRASI WILAYAH

- Wilayah Sulawesi secara administrasi terdiri dari 6 provinsi, 11 kota, 67 kabupaten, 928 kecamatan dan 9.098 kelurahan/desa, dengan luas wilayah daratan Pulau Sulawesi sekitar 188.522 Km^2.
- Wilayah Sulawesi memiliki jumlah pulau sekitar 2.500 yang terdiri dari 1.212 pulau yang sudah bernama dan 1.288 pulau yang belum bernama.
- Penyebaran pulau terbanyak adalah di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 750 pulau yang terdiri dari 170 pulau sudah bernama dan 580 pulau belum bernama, Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 669 pulau terdiri dari 311 pulau sudah bernama dan 358 pulau belum bernama dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 650 pulau terdiri dari 360 pulau sudah bernama dan 290 pulau belum bernama.

Tabel 5-1:
Administrasi Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010

PROVINSI	KOTA	KAB	KEC	DESA-KEL	LUAS (KM^2)	PENDUDUK (JIWA)
Sulawesi Utara	4	11	150	1.510	13.852	2.242.366
Sulawesi Tengah	1	10	147	1.712	61.841	2.514.912
Sulawesi Selatan	3	26	301	2.874	46.717	7.044
Sulawesi Tenggara	2	10	199	1.843	38.068	1.934.973
Gorontalo	1	5	65	595	11.257	1.060.391
Sulawesi Barat		5	66	564	16.787	1.225.173
P. SULAWESI	**11**	**67**	**928**	**9.098**	**188.522**	**8.984.859**

Sumber: Ditjen PUM Kemendagri (Mei 2010)

Tabel 5-2:
Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2009

PROVINSI	LUAS DARATAN (KM^2)	PULAU BERNAMA	PULAU BELUM BERNAMA	JUMLAH
Sulawesi Utara	13.851,64	311	358	669
Gorontalo	11.257,07	126	10	136
Sulawesi Tengah	61.841,29	170	580	750
Sulawesi Selatan	46.717,48	196	37	233
Sulawesi Barat	16.787,18	49	13	62
Sulawesi Tenggara	38.067,70	360	290	650
P. SULAWESI	**188.522,36**	**1,212**	**1,288**	**2,500**

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

5.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan. Kondisi umum kependudukan di Wilayah Sulawesi digambarakan berdasarkan angka jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, penduduk menurut jenis kelamin *(sex ratio),* angka ketergantungan *(dependency ratio),* dan komposisi penduduk menurut usia.

Kependudukan:

- Penduduk wilayah Sulawesi tahun 2010 berjumlah 17.371,8 ribu orang, meningkat sebanyak 2,49 juta dari tahun 2000 dan meliputi 7,3 persen dari penduduk Indonesia (*Tabel 5-3*).
- Luas wilayah Sulawesi sekitar 188.522,4 km^2 dengan tingkat kepadatan penduduk wilayah Sulawesi diperkirakan sebesar 92 jiwa per km^2, lebih rendah dibanding kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 jiwa/ km^2. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah terpadat dengan densitas mencapai 172 jiwa per km^2, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kepadatan yang paling rendah dengan desitas 43 jiwa per km^2 (*Tabel 5-3*).
- Laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sulawesi dalam periode 2000-2010 mencapai 1,6 persen/tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional 1,5 persen/tahun, dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,68 persen/tahun dan terrendah Sulawesi Selatan (*Tabel 5-3*).
- Di wilayah Sulawesi penduduk tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun) lebih banyak yaitu 63,40 persen (*Tabel 5-4*), dan memiliki rasio ketergantungan *(dependency ratio)* sebesar 55 persen lebih tinggi dari nasional (51,3 persen), (*Gambar 5-1*).
- Selama periode 10 tahun terakhir peningkatan angka ketergantungan *(dependency ratio)* terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, walaupun memiliki nilai terendah dibandingkan provinsi lainnya (*Gambar 5-1*).
- Penduduk laki-laki dan perempuan (s*ex ratio)* sebagian provinsi di Wilayah Sulawesi memiliki jumlah laki-laki yang lebih banyak dari perempuan. Di Sulawesi Tengah, untuk setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki. Sebaliknya di Sulawesi Selatan hanya terdapat 95 laki-laki untuk 100 orang perempuan (*Tabel 5-5*).

Tabel 5-3:
Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sulawesi menurut Provinsi.

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK (RIBU JIWA)		KEPADATAN PENDUDUK PER KM^2		LAJU PERTUMBUHAN	
	2000	2010	2000	2010	90-00	00-10
Sulawesi Utara	2.000,9	2.270,6	144	164	1,4	1,28
Sulawesi Tengah	2.176,0	2.635,0	35	43	2,52	1,95
Sulawesi Selatan	7.159,2	8.034,8	153	172	1,48	1,17
Sulawesi Tenggara	1.820,4	2.232,6	48	59	3,14	2,08
Gorontalo	833,5	1.040,2	74	92		2,26
Sulawesi Barat	891,6	1.158,6	53	69		2,68
P. SULAWESI	**14.881,6**	**17.371,8**	**79,0**	**92,0**	**1,8**	**1,6**
NASIONAL	**205.132,5**	**237.641,3**	**107,0**	**124,0**	**1,4**	**1,5**

Sumber : BPS, Sensus Penduduk

Tabel 5-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sulawesi menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA	JUMLAH (RIBU JIWA)	%
Usia Muda (< 14 tahun)	5.523,344	31,79%
%Usia Produktif (15-64 tahun)	11.013,55	63,40%
Usia Tua (>65 tahun)	834,89	4,81%
TOTAL PENDUDUK	**17.371,78**	**100,00%**
DEPENDENCY RATIO		**58**

Sumber: Sensus 2010,BPS

Gambar 5-1:

Perkembangan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2000 dan 2010

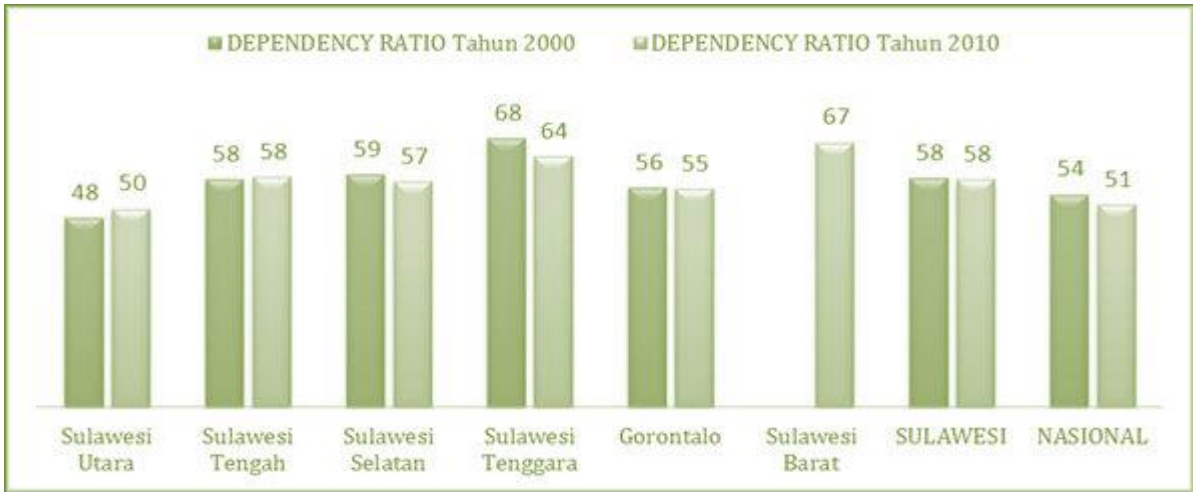

Sumber :Hasil Olahan Data Sensus Penduduk 2010, BPS

Tabel 5-5:

Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Antar Provinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2010.

PROVINSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	SEX RATIO
Sulawesi Utara	1.159.903	1.110.693	2.270.596	104,43
Sulawesi Tengah	1.350.844	1.284.165	2.635.009	105,19
Sulawesi Selatan	3.924.431	4.110.345	8.034.776	95,48
Sulawesi Tenggara	1.121.826	1.110.760	2.232.586	101,00
Gorontalo	521.914	518.250	1.040.164	100,71
Sulawesi Barat	581.526	577.125	1.158.651	100,76
P. SULAWESI	**8.660.444**	**8.711.338**	**17.371.782**	**99,42**
NASIONAL	**119.630.913**	**118.010.413**	**237.641.326**	**101,37**

Sumber :Hasil Olahan Data Sensus Penduduk 2010, BPS

***Ketenagakerjaan*.** Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Sulawesi secara umum ditunjukan dengan perkembangan indicator utama, yaitu: jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur angkatan kerja menurut lapangan usaha dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

- Dalam periode 2008-2013 jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 771 orang, dengan jumlah penduduk bekerja pada Februari 2013 sebanyak 7.752 orang. Penduduk bekerja terbesar terdapat di Sulawesi Selatan dan terrendah di Gorontalo (*Tabel 5-7*).
- Pendidikan penduduk bekerja sekitar 70 persen merupakan tamatan tamatan SD dan SMTP, sementara tamatan SMTA dan Sarjana (Diploma dan S1) sekitar 30 persen (*Tabel 5-8*).
- Rata-rata penduduk bekerja di Wilayah Sulawesi bekerja pada sektor pertanian (43,67 persen), perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (17,52 persen) dan jasa kemasyarakatan (17,37 persen), (tabel 5-9).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2013 mencapai 4,83 persen, lebih rendah dibanding dengan TPT nasional sebesar 5,92 persen, dengan TPT tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara dan terrendah di Sulawesi Barat (*Tabel 5-10*).
- Perkembangan TPT provinsi di Wilayah Sulawesi selama periode 2008-2013 rata-rata menurun, Pengurangan TPT terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,46 persen.
- Rata-rata pendidikan TPT sebagian besar tamatan SD, SMTP dan SMTA Umum/Kejuruan sekitar 85 persen (T*abel 5-12*)

Gambar 5-2:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sulawesi Periode 2008-2013 (Februari)

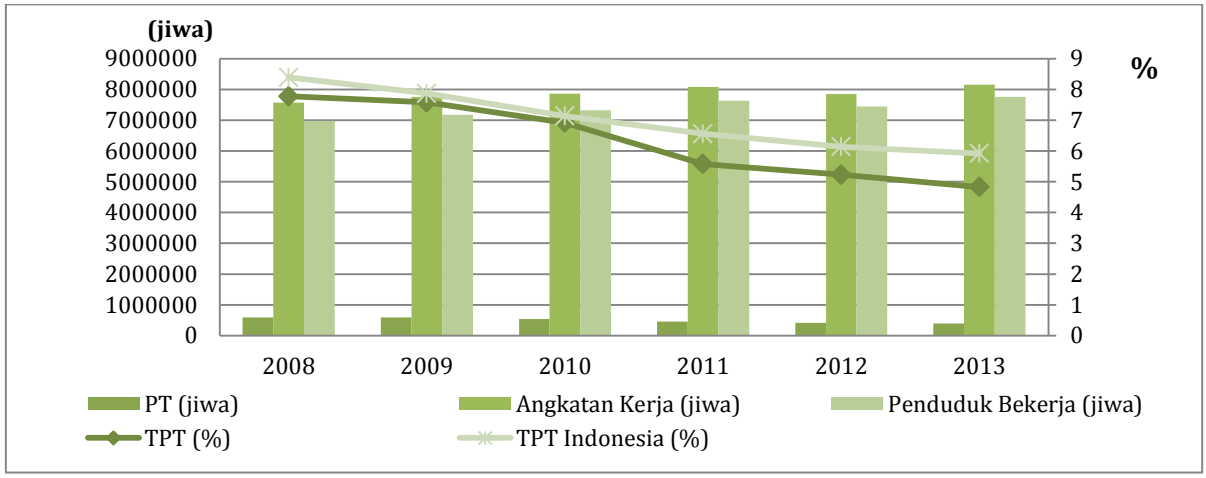

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 5-6:

Angkatan Kerja menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	2008 Agust	2013(Feb)	Δ 2008-2013	Share Pulau 2013 (%)	Share Nasional 2013 (%)
	Ribu jiwa				
Sulawesi Utara	1.020,95	1.089,11	68,16	13,37	0,92
Sulawesi Tengah	1.196,99	1.322,83	125,84	16,24	1,12
Sulawesi Selatan	3.447,88	3.619,99	172,11	44,44	3,07
Sulawesi Tenggara	979,26	1.060,34	81,08	13,02	0,90
Gorontalo	429,38	480,38	51,00	5,90	0,41
Sulawesi Barat	495,96	573,01	77,05	7,03	0,49
P. SULAWESI	**7.570,42**	**8.145,67**	**575,25**	**100,00**	**6,90**
INDONESIA	**111.947,27**	**121.191,71**	**9.244,45**		**102,66**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 5-7:

Penduduk Bekerja menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	2008 (Agustus)	2013 (Feb)	Δ 2008-2013	Share Pulau 2013 (%)	Share Nasional 2013 (%)
Sulawesi Utara	912	1.011	98,59	13,04	0,89
Sulawesi Tengah	1.132	1.288	156,05	16,61	1,13
Sulawesi Selatan	3.136	3.409	272,82	43,97	2,99
Sulawesi Tenggara	923	1.024	100,43	13,20	0,90
Gorontalo	405	460	54,56	5,93	0,40
Sulawesi Barat	473	562	88,23	7,24	0,49
P. SULAWESI	**6.982**	**7.752**	**771**	**100,00**	**6,80**
INDONESIA	**102.553**	**114.021**	**11.468,44**		**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 5-8:

Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

PROVINSI	Pendidikan (%)						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
Sulawesi Utara	36,12	24,13	22,37	9,43	2,02	5,93	100,00
Sulawesi Tengah	48,53	21,13	17,08	5,72	2,27	5,27	100,00
Sulawesi Selatan	46,85	19,55	18,28	5,68	2,09	7,55	100,00
Sulawesi Tenggara	43,45	22,07	20,77	4,69	2,76	6,25	100,00
Gorontalo	58,89	16,30	13,10	5,73	1,93	4,05	100,00
Sulawesi Barat	55,90	19,25	12,76	5,63	1,98	4,47	100,00

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 5-9:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Di Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

PROVINSI	Lapangan Usaha *)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sulawesi Utara	32,61	3,13	6,05	0,40	7,94	19,80	8,33	2,60	19,15
Sulawesi Tengah	49,88	2,63	5,34	0,27	5,41	14,53	3,36	1,64	16,94
Sulawesi Selatan	44,03	0,77	6,74	0,43	5,41	18,32	5,42	1,73	17,15
Sulawesi Tenggara	40,93	3,24	6,50	0,20	6,40	18,54	4,89	1,20	18,09
Gorontalo	37,80	4,22	8,52	0,18	6,61	15,06	7,40	1,27	18,93
Sulawesi Barat	57,27	0,70	5,01	0,00	4,19	15,13	2,91	0,77	14,02
P. SULAWESI	**43,67**	**1,89**	**6,38**	**0,32**	**5,85**	**17,52**	**5,33**	**1,66**	**17,37**
NASIONAL	**35,09**	**1,44**	**13,87**	**0,22**	**6,13**	**20,90**	**4,51**	**2,40**	**15,43**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Keterangan*):

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Tabel 5-10:

Perkembangan Pengangguran Terbuka menurut Provinsi
Di Wilayah Sulawesi Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	PT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
Sulawesi Utara	10,65	7,19	3,46	108.754	78.300	30.454
Sulawesi Tengah	5,45	2,65	2,80	65.282	35.100	30.182
Sulawesi Selatan	9,04	5,83	3,21	311.768	211.100	100.668
Sulawesi Tenggara	5,73	3,47	2,26	56.138	36.800	19.338
Gorontalo	5,65	4,31	1,34	24.258	20.700	3.558
Sulawesi Barat	4,57	2,00	2,57	22.650	11.500	11.150
P. SULAWESI	**7,78**	**4,83**	**2,95**	**588.850**	**393.500**	**195.350**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 5-11:

Distribusi Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
di Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

PROVINSI	Perkotaan		Pedesaan		Jumlah	Share terhadap Pulau (%)
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%		
Sulawesi Utara	50.464	62,43	30.372	37,57	80.836	19,68
Sulawesi Tengah	19.044	39,99	28.577	60,01	47.621	11,59
Sulawesi Selatan	93.658	44,82	115.325	55,18	208.983	50,87
Sulawesi Tenggara	20.430	49,73	20.648	50,27	41.078	10,00
Gorontalo	7.942	39,04	12.402	60,96	20.344	4,95
Sulawesi Barat	2.881	24,05	9.098	75,95	11.979	2,92
P. SULAWESI	**194.419**	**47,32**	**216.422**	**52,68**	**410.841**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 5-12:

Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkandi Wilayah Sulawesi (Februari 2012)

PROVINSI	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN					JUMLAH
	≤ SD	SMTP	SMTA UMUM/ KEJURUAN	DIPLOMA I/II/III/ AKADEMI	UNIVERSITAS	
Sulawesi Utara	21,64	22,49	44,35	4,44	7,08	100,00
Sulawesi Tengah	30,81	9,68	45,05	2,35	12,12	100,00
Sulawesi Selatan	32,80	17,52	36,08	1,67	11,94	100,00
Sulawesi Tenggara	19,93	9,28	41,65	12,08	17,07	100,00
Gorontalo	57,94	9,99	26,57	0,00	5,50	100,00
Sulawesi Barat	19,90	19,36	60,74	0,00	0,00	100,00
P. SULAWESI	**30,22**	**16,71**	**39,39**	**2,98**	**10,70**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Kesehatan. Perkembangan dari kinerja kesehatan di Wilayah Sulawesi dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama kesehatan, antara lain adalah: Umur Harapan Hidup (UHH), perkembangan Gizi Balita, persentase proses persalinan ditolong tenaga medis, dan persentase balita dengan status tinggi badan pendek (stunting).

- Berdasarkan estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) antarprovinsi di wilayah Sulawesi selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional (*Gambar 5-3*). Estimasi UHH antarprovinsi diwilayah Sulawesi tahun 2010 hanya Provinsi Sulawesi Utara yang telah berada di atas UHH nasional (70,9 tahun), dan merupakan UHH tertinggi di wilayah Sulawesi. Provinsi dengan UHH terrendah berada di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Hampir semua provinsi pada perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang di wilayah Sulawesi antara tahun 2007 dan 2010 berada di atas prevalensi nasional, dengan kinerja penurunan terbesar terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 5,2 persen (*Tabel 5-13*),
- Kondisi status tinggi badan pendek (*Stunting*)[1] , perkembangan masalah tinngi badan pendek (*Stunting*) pada balita di wilayah Sulawesi pada tahun 2010 sebagian besar masih berada di atas angka nasional (35,6 persen), kecuali Provinsi Sulawesi Utara yang sudah berada di bawah angka nasional. Masalah pendek (*Stunting*) pada balita dengan nilai tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 44,5 persen (*Gambar 5-4*).
- Proses kelahiran Balita terakhir di Sulawesi yang ditolong oleh tenaga medis sebagian besar kurang dari 80 persen (*Tabel 5-14*), kecuali di provinsi Sulawesi Utara (85,6 persen).

Gambar 5-3:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi
Tahun 2007-2010.

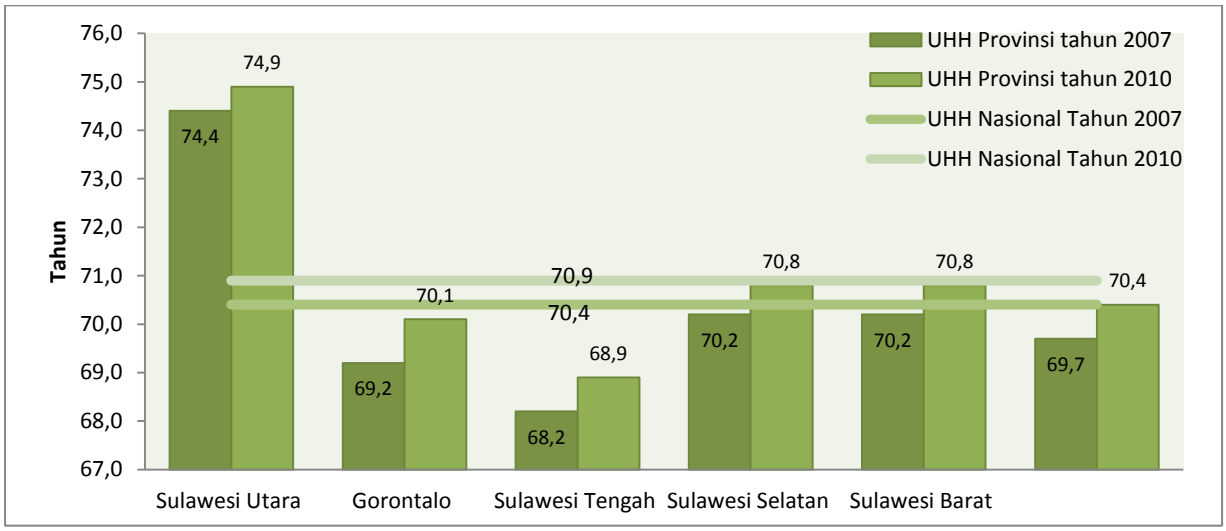

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

[1] [1] Indikator Tinggi Badan/Umur (TB/U) menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena *hygiene* dan sanitasi yang kurang baik. Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya digabung menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (*Stunting*).

Tabel 5-13:
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010.

PROVINSI	2007			2010			Δ (2007-2010)
	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	
Sulawesi Utara	4,3	11,5	15,8	3,8	6,8	10,6	5,2
Sulawesi Tengah	8,9	18,7	27,6	7,9	18,6	26,5	1,1
Sulawesi Selatan	5,1	12,5	17,6	6,4	18,6	25,0	-7,4
Sulawesi Tenggara	6,8	15,9	22,7	6,5	16,3	22,8	-0,1
Gorontalo	8,2	17,2	25,4	11,2	15,3	26,5	-1,1
Sulawesi Barat	10	15,4	25,4	7,6	12,9	20,5	4,9
INDONESIA	**5,4**	**13**	**18,4**	**4,9**	**13**	**17,9**	**0,5**

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Gambar 5-4:
Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi Pada Tahun 2007 dan 2010.

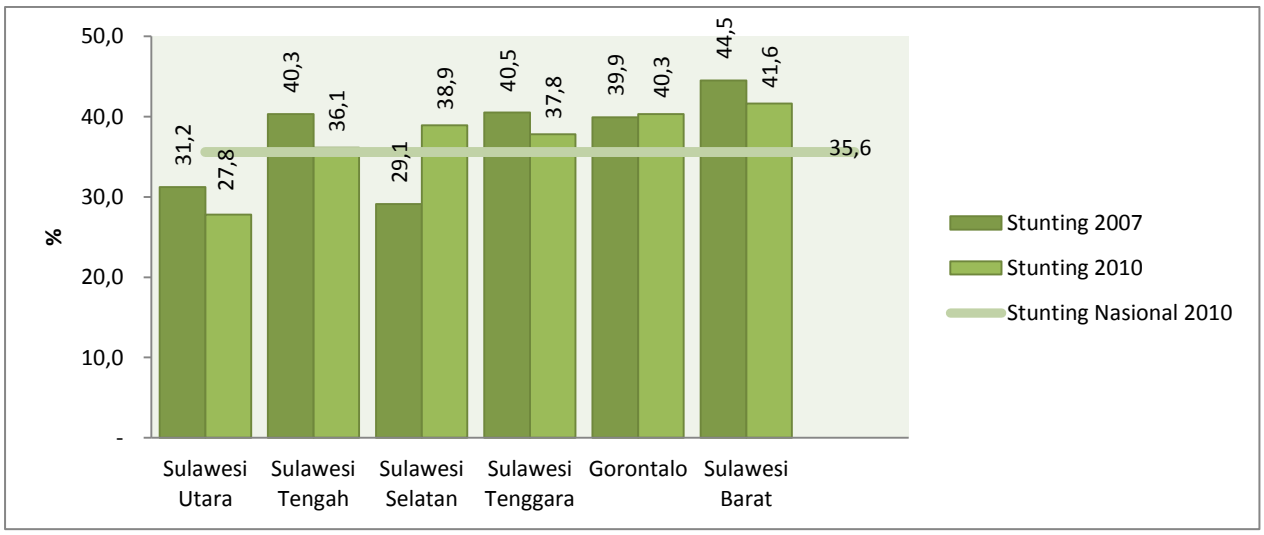

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Tabel 5-14:
Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

PROVINSI	TENAGA MEDIS				TENAGA NON MEDIS		
	DOKTER	BIDAN	TENAGA MEDIS LAINNYA	TOTAL	DUKUN	FAMILI	TOTAL
Sulawesi Utara	35,2	48,9	1,5	85,6	13,3	0,6	13,9
Sulawesi Tengah	13,3	47,8	2,1	63,2	32,0	4,5	36,5
Sulawesi Selatan	15,0	59,6	0,5	75,1	21,8	3,1	24,8
Sulawesi Tenggara	7,8	49,0	0,4	57,2	41,9	0,9	42,8
Gorontalo	12,8	46,2	1,7	60,7	38,6	0,7	39,3
Sulawesi Barat	4,9	41,8	1,1	47,8	47,3	4,9	52,2
INDONESIA	**16,9**	**63,7**	**0,7**	**81,3**	**17,3**	**1,2**	**18,6**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Pendidikan. Perkembangan dari kinerja pendidikan di Wilayah Sulawesi dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama pendidikan, antara lain adalah: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

- Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) provinsi di wilayah Sulawesi selama periode 2009-2011 menunjukkan peningkatan (*Tabel 5-15*), dengan peningkatan tertinggi dan diatas RLS nasional yaitu di provinsi Sulawesi Selatan (0,5 tahun).
- Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 2009-2012 menunjukkan hanya dua provinsi yang mengalami perubahan positif yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Pada tahun 2011 hanya 3 provinsi yang memiliki AMH di atas rata-rata nasional (92,81 persen), dengan AMH tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 99,22 persen (*Tabel 5-15*).
- Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Sumatera tahun 2008 dan 2012 untuk kelompok Usia 13-15 dan 16-18 tahun rata-rata meningkat, sedangkan untuk kelompok usia 7-12 tahun di provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi tenggara mengalami perkembangan negative (*Tabel 5-16*).

Tabel 5-15:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012.

PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)			ANGKA MELEK HURUF (%)		
	2009	2012	Δ ('12-'09)	2009	2012	Δ ('12-'09)
Sulawesi Utara	8,8	9	0,2	99,22	98,85	-0,37
Sulawesi Tengah	7,9	8,1	0,2	95,78	94,95	-0,83
Sulawesi Selatan	7,4	7,9	0,5	87,02	88,73	1,71
Sulawesi Tengggara	7,9	8,3	0,4	91,51	91,49	-0,02
Gorontalo	7,2	7,3	0,1	95,71	95,22	-0,49
Sulawesi Barat	7,1	7,3	0,2	87,59	88,79	1,2
NASIONAL	**7,7**	**8,1**	**0,4**	**92,58**	**93,25**	**0,67**

Sumber: SUSENAS 2012, BPS

Tabel 5-16:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012.

Provinsi	2008**			2012**			Δ 2008-2012**		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
Sulawesi Utara	97,87	88,46	56,84	98,22	88,63	65,47	0,35	0,17	8,63
Sulawesi Tengah	97,16	81,13	50,75	96,61	84,73	60,06	-0,55	3,60	9,31
Sulawesi Selatan	95,71	78,99	52,29	97,61	87,79	61,89	1,90	8,80	9,60
Sulawesi Tengggara	97,66	85,62	59,17	97,45	88,03	65,60	-0,21	2,41	6,43
Gorontalo	94,23	77,68	50,17	97,61	82,87	58,55	3,38	5,19	8,38
Sulawesi Barat	94,53	75,75	45,68	95,75	81,32	56,62	1,22	5,57	10,94
INDONESIA	**97,88**	**84,89**	**55,50**	**97,99**	**89,76**	**61,42**	**0,11**	**4,87**	**5,92**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Kemiskinan. Kondisi umum kemiskinan di Wilayah Sulawesi ditunjukan dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan pola distribusi atau sebaran kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan.

- Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi di wilayah Sulawesi selama periode 2008-2013 rata-rata menurun (*gambar 5-5*), jumlah penduduk miskin tahun 2013 mencapai 2.025,78 ribu jiwa berkurang sebanyak 582,72 ribu jiwa dari tahun 2008, dengan penduduk miskin terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara (*tabel 5-17*).
- Persentase penduduk miskin tahun 2013 sekitar 11,21 persen atau menurun sebesar 4,48 persen dari tahun 2008, penurunan tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah (*Tabel 5-18*).
- Penyebaran kemiskinan sebagian besar di perdesaan (tahun 2012), yakni mencapai 83,74 persen (*Tabel 5-19*), dan persentase penyebaran kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo (23,93 persen).

Gambar 5-5:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi, Tahun 2008-2013

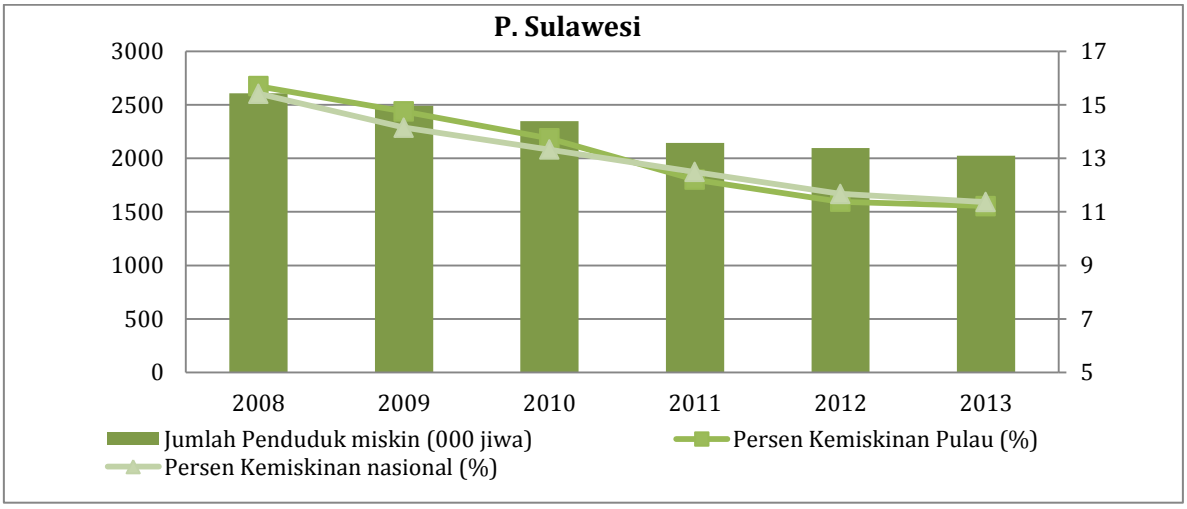

Sumber: BPS 2013

Tabel 5-17:
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2008-2013

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sulawesi Utara	10,10	9,79	9,10	8,51	7,64	7,88
Sulawesi Tengah	20,75	18,98	18,07	15,83	14,94	14,67
Sulawesi Selatan	13,34	12,31	11,60	10,29	9,82	9,54
Sulawesi Tenggara	19,53	18,93	17,05	14,56	13,06	12,83
Gorontalo	24,88	25,01	23,19	18,75	17,22	17,51
Sulawesi Barat	16,73	15,29	13,58	13,89	13,01	12,3
P. SULAWESI	**15,69**	**14,75**	**13,75**	**12,20**	**11,38**	**11,21**
NASIONAL	**15,42**	**14,15**	**13,33**	**12,49**	**11,67**	**11,37**

Sumber: BPS 2013

Tabel 5-18:
Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

PROVINSI	Jumlah (000 jiwa)			(%)		
	2008	2013	Δ 2008-2013	2008	2013	Δ 2008-2013
Sulawesi Utara	223,50	184,40	39,10	10,10	7,88	2,22
Sulawesi Tengah	524,70	405,42	119,28	20,75	14,67	6,08
Sulawesi Selatan	1.031,70	787,66	244,04	13,34	9,54	3,80
Sulawesi Tenggara	435,90	301,71	134,19	19,53	12,83	6,70
Gorontalo	221,60	192,59	29,01	24,88	17,51	7,37
Sulawesi Barat	171,10	154,00	17,10	16,73	12,30	4,43
P. SULAWESI	**2.608,50**	**2.025,78**	**582,72**	**15,69**	**11,21**	**4,48**
NASIONAL	**34.963,10**	**28.066,56**	**6.896,54**	**15,42**	**11,37**	**4,05**

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS Tahun 2013

Tabel 5-19:
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
Sulawesi Utara	74,38	114,74	189,12	7,11	9,05	8,18
Sulawesi Tengah	61,17	357,47	418,64	9,24	17,39	15,40
Sulawesi Selatan	129,20	696,60	825,79	4,31	13,46	10,11
Sulawesi Tenggara	31,56	284,77	316,33	4,99	17,00	13,71
Gorontalo	16,55	170,35	186,91	4,51	23,93	17,33
Sulawesi Barat	28,18	132,27	160,46	10,12	14,17	13,24
P. SULAWESI	**341,04**	**1.756,20**	**2.097,25**	**5,70**	**14,86**	**11,78**
NASIONAL	**10.647,25**	**18.485,20**	**29.132,43**	**8,78**	**15,12**	**11,96**

Sumber: BPS 2012

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia di Wilaya Sulawesi diukur berdasarkan indek pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan perbandingan peringkat masing-masing provinsi terhadap nasional.

- Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia, seluruh provinsi di Sulawesi memperlihatkan peningkatan di selama periode 2007—2011. Pada tahun 2011, IPM antarprovinsi di wilayah Sulawesi yang berada di atas IPM nasional adalah Provinsi Sulawesi Utara, dan merupakan IPM tertinggi di Sulawesi. IPM terrendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 70,11.
- Berdasarkan nilai ranking IPM antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2011, Provinsi Sulawesi Utara termasuk 10 besar IPM tertinggi di Indonesia (Ranking 2), sementara ranking terrendah Provinsi Sulawesi Barat (ranking 27).

Tabel 5-20:

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010

PROVINSI	IPM					Peringkat IPM (PROVINSI)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Sulawesi Utara	74,68	75,16	75,68	76,09	76,54	2	2	2	2	2
Sulawesi Tengah	69,34	70,09	70,70	71,14	71,62	22	22	22	22	22
Sulawesi Selatan	69,62	70,22	70,94	71,62	72,14	21	21	20	19	19
Sulawesi Tenggara	68,32	69,00	69,52	70,00	70,55	25	25	25	25	25
Gorontalo	68,83	69,29	69,79	70,28	70,82	24	24	24	24	24
Sulawesi Barat	67,72	68,55	69,18	69,64	70,11	28	27	27	27	27
INDONESIA	**70,59**	**71,17**	**71,76**	**72,27**	**72,77**					

Sumber: BPS, 2011

5.3. PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Daerah. Tingkat perkembangan perekonomian daerah Wilayah Kalimantan ditunjukan dengan beberapa indikator utama ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Struktur ekonomi menurut lapangan usaha dan penggunaan, perkembangan investasi PMA dan PMDN, dan perkembangan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

PDRB Menurut Lapangan Usaha:

- Perkembangan perekonomian wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2008-2012 rata meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 8,07 persen per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 8,67 persen (*Tabel 5-21*),
- Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi tumbuh positif dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, kecuali provinsi Sulawesi Barat (*tabel 5-21*).
- Seluruh sektor tumbuh positif, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata laju pertumbuhan di atas 11 persen (*Tabel 5-22*).
  - Perkembangan nilai PDRB menurut ADHB per provinsi di wilayah Sulawesi tahun 2008-2012, menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai tertinggi dibandingkan provinsi lainnya (*Tabel 5-23*).
  - Share PDRB Atas Dasar Harga Berlaku wilayah Sulawesi terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2012 sebesar 4,74 persen (*Tabel 5-24*), dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan (2,37 persen).
- Peran sektor pertanian, sektor jasa-jasa, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mendominasi dalam perkembangan perekonomian Wilayah Sulawesi. Peran sektor pertanian terbesar di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, peran sektor jasa-jasa terbesar di Provinsi Gorontalo, dan peran sektor perdagangan, hotel, dan restoran terbesar di provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (*Tabel 5-25*).
- Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah provinsi di wilayah Sulawesi kecenderungan meningkat setiap tahunnya dan rata-rata berada dibawah PDB perkapita Nasional (*Tabel 5-26*).
- Adanya gap (ketimpangan) yang cukup tinggi antara PDRB perkapita provinsi terrendah dan PDRB perkapita tertinggi (*tabel 5-26*).

Tabel 5-21:
Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas ADHK Tahun 2000 di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012, (dalam persen).

PROVINSI	Tanpa Migas						Dengan Migas					
	2008	2009	2010	2011	2012	08-12	2008	2009	2010	2011	2012	08-12
Sulawesi Utara	10,86	7,83	7,17	7,39	7,84	8,22	10,86	7,85	7,16	7,39	7,86	8,22
Sulawesi Tengah	7,44	8,00	8,72	9,20	9,45	8,56	7,78	7,71	8,74	9,15	9,27	8,53
Sulawesi Selatan	7,79	6,23	8,19	7,62	8,38	7,64	7,78	6,23	8,19	7,61	8,37	7,64
Sulawesi Tenggara	7,27	7,57	8,22	8,96	10,41	8,49	7,27	7,57	8,22	8,96	10,41	8,49
Gorontalo	7,76	7,54	7,63	7,68	7,71	7,66	7,76	7,54	7,63	7,68	7,71	7,66
Sulawesi Barat	12,07	6,03	11,89	10,32	9,01	9,86	12,07	6,03	11,89	10,32	9,01	9,86
P. SULAWESI	**8,38**	**6,96**	**8,24**	**8,11**	**8,70**	8,08	**8,43**	**6,92**	**8,25**	**8,10**	**8,67**	8,07
NASIONAL (PDB)	**6,47**	**5,00**	**6,60**	**6,98**	**6,81**	6,37	**6,01**	**4,63**	**6,22**	**6,49**	**6,23**	5,92

Sumber: BPS 2011

Tabel 5-22:
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010 (Persen)

Lapangan usaha	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	5,09	4,39	4,87	5,01
2. Pertambangan & Penggalian	0,63	-0,76	16,21	4,55
3. Industri Pengolahan	8,18	4,13	7,67	7,56
4. Listrik, Gas & Air Bersih	9,72	10,63	7,62	8,94
5. Bangunan	14,51	10,13	7,16	12,37
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	10,14	10,87	10,88	11,23
7. Pengangkutan & Komunikasi	12,03	12,72	11,63	9,90
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	11,08	9,88	13,36	12,48
9. Jasa-Jasa	7,78	7,22	5,63	7,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**7,87**	**6,92**	**8,24**	**8,09**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 5-23:
Perkembangan Nilai PDRB Menurut ADHB Per Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012. (dalam juta rupiah).

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012
Sulawesi Utara	28.697.756,23	33.033.609,80	36.808.998,47	41.831.453,71	47.198.303,51
Sulawesi Tengah	28.727.505,31	32.461.331,62	37.314.367,20	44.312.222,27	51.062.073,90
Sulawesi Selatan	85.143.191,27	99.954.589,75	117.862.210,18	137.389.811,17	159.427.096,97
Sulawesi Tenggara	22.202.848,01	25.655.940,66	28.376.580,35	32.113.037,29	36.600.745,70
Gorontalo	5.906.736,28	7.069.054,18	8.056.512,92	9.153.669,04	10.368.090,06
Sulawesi Barat	8.296.605,60	9.403.378,61	10.985.154,05	12.883.957,04	14.407.643,06
SULAWESI	**178974642,70**	**207577904,62**	**239403823,18**	**277684150,54**	**319063953,21**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 5-24:
Kontribusi Provinsi Terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Sulawesi dan PDRB ADHB Nasional (33 Provinsi), Tahun 2012.

Provinsi	PDRB (Rp. Juta)	Share Terhadap Pulau (%)	Share Terhadap Nasional (%)
Sulawesi Utara	47.198.303,51	14,79	0,70
Sulawesi Tengah	51.062.073,90	16,00	0,76
Sulawesi Selatan	159.427.096,97	49,97	2,37
Sulawesi Tenggara	36.600.745,70	11,47	0,54
Gorontalo	10.368.090,06	3,25	0,15
Sulawesi Barat	14.407.643,06	4,52	0,21
P. SULAWESI	**319063953,21**	**100,00**	**4,74**
PDB NASIONAL (33 PROVINSI)	**6.731.534.512,85**		**100,00**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 5-25:
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sulawesi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011. (dalam persen)

PROVINSI	Lapangan Usaha								
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Sulawesi Utara	19,07	3,90	7,83	0,76	17,28	16,44	11,38	6,26	17,08
Sulawesi Tengah	37,22	6,26	6,96	0,64	7,23	11,96	7,10	4,84	17,79
Sulawesi Selatan	25,32	6,07	12,22	0,91	5,65	17,64	7,90	6,92	17,37
Sulawesi Tenggara	31,71	6,08	6,93	0,93	8,56	18,62	9,21	5,93	12,03
Gorontalo	29,43	1,16	4,82	0,54	6,89	10,74	9,08	10,41	26,93
Sulawesi Barat	48,50	0,88	7,59	0,52	4,06	12,97	2,11	5,75	17,62
P. SULAWESI	**28,24**	**5,38**	**9,65**	**0,81**	**7,95**	**16,22**	**8,21**	**6,44**	**17,10**

Sumber : BPS, 2012

Keterangan:
1=Pertanian
2= Pertambangan & Penggalian
3= Industri Pengolahan
4= Listrik, Gas & Air
5= Konstruksi
6= Perdagangan, Hotel & Restoran
7= Pengangkutan & Komunikasi
8= Keuangan & Jasa Perusahaan
9= Jasa-Jasa

Tabel 5-26:
PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah)

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
Sulawesi Utara	7.147	7.626	8.062	8.595	9.176
Sulawesi Tengah	5.904	6.249	6.659	7.168	7.702
Sulawesi Selatan	5.646	5.941	6.348	6.789	7.290
Sulawesi Tenggara	4.647	4.906	5.196	5.577	6.047
Gorontalo	2.521	2.655	2.792	2.956	3.121
Sulawesi Barat	3.619	3.743	4.074	4.400	4.683
RATA-RATA P.SULAWESI	**4.914**	**5.187**	**5.522**	**5.914**	**6.336**
INDONESIA (PDB)	**8.990**	**9.281**	**9.703**	**10.225**	**10.721**

Sumber: BPS, 2012

PDRB Menurut Penggunaan:

- Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Sulawesi pada tahun 2011 didominasi oleh komponen konsumsi, yaitu mencapai 78,56 persen dari total PDB, terutama untuk konsumsi rumah tangga mencapai 51,35 persen dan konsumsi pemerintah sekitar 26 persen (*Tabel 5-27*).
- Komponen perubahan stock memiliki laju pertumbuhan tertinggi (716,46 persen) dibandingkan komponen lainnya, sementara untuk komponen Ekspor barang dan jasa hanya tumbuh sebesar 0,32 persen (Tabel 5-28).

Tabel 5-27:

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi dan Penggunaan Di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (dalam persen).

PROVINSI	RUMAH TANGGA	LEMBAGA SWASTA NIRLABA	PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
Sulawesi Utara	44.16	2.94	28.20	27.23	1.51	38.87	42.91
Sulawesi Tengah	59.63	1.62	16.72	17.40	1.33	17.35	14.06
Sulawesi Selatan	48.23	0.77	29.46	23.66	1.73	21.94	25.79
Sulawesi Tenggara	51.72	0.32	21.31	31.12	1.65	28.49	34.60
Gorontalo	69.21	1.18	28.16	21.58	26.46	8.16	54.74
Sulawesi Barat	65.61	1.18	24.08	12.12	1.33	18.94	23.26
P. SULAWESI	**51.35**	**1.21**	**26.00**	**23.45**	**2.42**	**23.91**	**28.33**

Sumber: BPS, 2011

Tabel 5-28:

Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (dalam persen)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					RATA-RATA/AVERAGE 2007-2011
	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	
Konsumsi Rumah Tangga	5.23	5.80	6.25	6.60	6.48	6.07
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10.57	7.64	20.47	(1.70)	3.78	8.15
Konsumsi Pemerintah	7.38	9.59	7.16	7.88	4.77	7.35
PMTB	14.82	16.54	12.02	10.21	11.03	12.92
Perubahan Stock	(141.52)	345.13	15.72	(61.37)	716.46	174.89
Ekspor Barang & Jasa	20.02	(1.38)	(5.03)	32.66	(0.32)	9.19
Impor Barang & Jasa	27.12	(0.36)	(4.25)	32.70	2.09	11.46

Sumber: BPS, 2011

Tabel 5-29:

Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran Per Provinsi Tahun 2011, (dalam persen)

PROVINSI	PERTUMBUHAN (%)						
	KONSUMSI RUMAH TANGGA	LSN	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN STOCK	EKSPOR BARANG DAN JASA	IMPOR BARANG DAN JASA
Sulawesi Utara	6,46	9,20	6,46	14,67	14,95	(0,38)	0,31
Sulawesi Tengah	8,09	25,47	3,96	10,55	0,50	9,54	0,38
Sulawesi Selatan	5,51	6,79	2,29	10,20	2.837,54	(3,76)	(0,73)
Sulawesi Tenggara	5,62	12,88	3,75	11,32	68,81	9,81	7,98
Gorontalo	12,98	8,87	9,20	7,35	(19,91)	(10,67)	22,38
Sulawesi Barat	6,90	55,03	15,69	9,38	(9,49)	28,47	17,82
P. SULAWESI	**6,48**	**12,96**	**4,77**	**11,03**	**716,46**	**(0,32)**	**2,09**

Sumber: BPS, 2011

Investasi PMA dan PMDN:

- Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif.
- Nilai realisasi investasi PMA di Wilayah Sulawesi tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (*Tabel 5-30*)., sementara Nilai realisasi investasi PMDN menurun dibandingkan tahun sebelumnya (*Tabel 5-31*).
- Nilai Investasi PMA terbesar tahun 2012 terdapat di Sulawesi tengah dan Sulawesi Selatan (*tabel 5-30*). Sementara nilai investasi PMDN terbesar tahun 2012 terdapat di Sulawesi Selatan (*tabel 5-31*).

Tabel 5-30:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% PULAU 2012
Sulawesi Utara	35,5	57,7	226,8	220,2	46,7	3,1
Sulawesi Tengah	1,5	3,3	138,5	370,4	806,5	53,5
Sulawesi Selatan	27,9	77,0	441,8	89,6	582,6	38,7
Sulawesi Tenggara	0,5	3,6	14	17,0	35,7	2,4
Gorontalo	-	-	0,8	12,5	35,3	2,3
Sulawesi Barat	-	-	37,3	5,6	0,2	0,0
P. SULAWESI	**65,4**	**141,6**	**859,2**	**715,3**	**1.507,0**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**0,44**	**1,31**	**5,30**	**0,44**	**0,44**	

Sumber : BKPM, 2012

Tabel 5-31:
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2012.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	% PULAU
Sulawesi Utara	42,2	49,5	95,8	331,6	678,5	13,8
Sulawesi Tengah	-	-	153,6	2.620,2	602,8	12,3
Sulawesi Selatan	1.105,2	1.137,9	3.212,3	3.986,3	2.318,9	47,3
Sulawesi Tenggara	-	-	19,2	59,0	907,3	18,5
Gorontalo	-	-	16,7	11,8	164,9	3,4
Sulawesi Barat	-	-	840,0	218,6	228,6	4,7
SULAWESI	**1.147,4**	**1.187,4**	**4.337,6**	**7.227,5**	**4.901,0**	**100,0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**5,63**	**3,14**	**0,44**	**0,44**	**0,44**	

Sumber : BKPM, 2012

Perdaggangan Ekspor dan Impor. Perkembangan perdaggangan di Wilayah Sulawesi ditunjukan dengan nilai ekspor dan nilai impor, dan neraca perdagangan antara nilai ekspor terhadap nilai impor**.**

- Perkembangan perdagangan ekspor non migas di Wilayah Sulawesi tahun 2006-2010 terlihat cukup fluktuatif, namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan dibandingkan tahu sebelumnya. Peranan Wilayah Sulawesi terhadap nilai ekspor non migas nasional sebesar 2,83 persen dan terbesar dari Provinsi Sulawesi Selatan (*Tabel 5-32*).
- Perkembangan perdagangan nilai impor non migas Wilayah Sulawesi dari tahun 2006-2010 rata-rata meningkat, kecuali pada tahun 2009 sedikit menurun. Peranan Wilayah Sulawesi terhadap nilai impor non migas nasional sebesar 0,58 persen dan terbesar dari Provinsi Sulawesi Selatan (*Tabel 5-33*).

Tabel 5-32:
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010.
(dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN. (%)	PERAN. (%)
						2010	2010
Sulawesi Utara	191,1	514,6	469	400,5	375,9	10,24	0,29
Sulawesi Tengah	202	207,2	179,3	264,3	395,8	10,78	0,31
Sulawesi Selatan	1.837	2.751,7	1.884,7	1.308,4	2.318,8	63,16	1,79
Sulawesi Tenggara	350,7	413,9	650,9	342,6	541,5	14,75	0,42
Gorontalo	14,7	21,2	20,9	10,3	15,3	0,42	0,01
Sulawesi Barat	37	19,6	7	60,4	24	0,65	0,02
P. SULAWESI	**2.632,5**	**3.928,2**	**3.211,8**	**2.386,5**	**3.671,3**	**100,00**	**2,83**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Tabel 5-33:
Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010.
(dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN.(%)	PERAN.(%)
						2010	2010
Sulawesi Utara	45,9	19,9	9,9	19,6	69,3	11,02	0,06
Sulawesi Tengah	9,3	-	1,1	13	15	2,38	0,01
Sulawesi Selatan	322,8	356,8	608,6	463,7	528,9	84,09	0,49
Sulawesi Tenggara	1,2	-	0,7	7,7	0,5	0,08	0,00
Gorontalo	-	5,1	-	-	15,3	2,43	0,01
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI	**379,2**	**381,8**	**620,3**	**504**	**629**	**100,00**	**0,58**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Komoditas Unggulan. Perkembangan komoditas unggulan di Wilayah Sulawesi ditunjukan perkembangan jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman perkebunan, jenis aktivitas peternakan, dan perikanan dan kelautan.

Tanaman Pangan

- Perkembangan produksi padi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2013 tercatat sebesar 7.566.828 ton lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan rata-rata produktivitas 48,50 ku/ha lebih rendah dibandingkan produktivitas padi nasional (*Tabel 5-34*).
- Penyebaran produksi padi terbesar di Wilayah Sulawesi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah (*Tabel 5-35*). Sementara untuk tingkat produktivitas padi tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Selatan (50,78 ku/ha) dan Gorontalo (50,36 ku/ha).

Tabel 5-34:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi
Di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2013.

Tahun	Produksi	Produktivitas
2008	6.575.317	46,70
2009	6.801.668	47,66
2010	6.960.376	48,23
2011	7.244.213	48,15
2012	7.821.789	47,15
2013	7.566.828	48,50

Sumber : BPS, 2012

Tabel 5-35:

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Sulawesi Tahun 2013.

PROVINSI	PRODUKSI(TON)	PRODUKTIVITAS(KU/HA)
Sulawesi Utara	640.599	50,14
Sulawesi Tengah	1.036.870	46,09
Sulawesi Selatan	4.595.450	52,02
Sulawesi Tenggara	582.104	42,74
Gorontalo	284.368	52,48
Sulawesi Barat	427.437	47,53

Sumber :BPS, 2013

Tanaman Palawija:

- Produksi terbesar tanaman palawija Wilayah Sulawesi adalah jagung dan ubi kayu, dengan produksi tahun 2013 masing-masing sebesar 2.705.238 ton dan 918.518 ton (*Tabel 5-36*).
- Sentra produksi jagung dan ubi kayu terbesar di provinsi Sulawesi Selatan (*tabel 5-38*).
- Dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas untuk tanaman palawija di Wilayah Sulawesi rata-rata masih lebih rendah dari produktivitas tanaman palawija nasional (*tabel 5-37*).

Tabel 5-36:

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2013. (ton)

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	2685553	30593	63198	47649	187031	939786
2009	2710098	29504	58794	67963	196103	876187
2010	2898195	31664	68930	58122	179280	969338
2011	2898195	44730	76382	56549	192832	1081634
2012	2952029	28245	52447	59995	210635	1067041
2013	2705238	29908	62662	65995	178530	918518

Sumber : Deptan, 2013

Tabel 5-37:

Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan di Wilayah Sulawesi Tahun 2008-2013. (ku/ha)

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	38,41	11,27	12,43	12,99	100,51	151,11
2009	39,93	11,37	12,47	12,98	103,03	157,98
2010	39,82	11,28	12,79	13,39	101,82	170,60
2011	39,82	11,37	12,85	13,50	101,88	170,94
2012	40,44	11,49	12,88	13,29	106,82	174,48
2013	40,86	11,48	13,96	13,80	108,69	173,53

Sumber : Deptan, 2013

Tabel 5-38:

Perkembangan Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2013, (ton).

PROVINSI	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Sulawesi Utara	443.691	2.074	8.430	3.138	40.842	61.328
Sulawesi Tengah	151.024	1.148	7.483	11.113	22.796	97.903
Sulawesi Selatan	1.188.015	24.444	39.249	40.837	67.865	460.639
Sulawesi Tenggara	77.696	1.154	5.157	3.874	27.923	243.190
Gorontalo	724.692	219	1.316	3.777	2.058	4.827
Sulawesi Barat	120.120	869	1.027	3.256	17.046	50.631
P. SULAWESI	**2.705.238**	**29.908**	**62.662**	**65.995**	**178.530**	**918.518**
NASIONAL	**18.838.529**	**257.129**	**786.868**	**847.157**	**2.594.081**	**23.627.955**

Sumber : Deptan, 2013

Tabel 5-39:
Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2013, (ku/Ha)

PROVINSI	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Sulawesi Utara	36,58	12,59	13,09	13,33	97,8	130,18
Sulawesi Tengah	38,51	8,34	16,42	15,42	106,47	201,45
Sulawesi Selatan	44,13	13,34	17,26	15,31	134,95	194,44
Sulawesi Tenggara	25,66	8,01	7,34	9,36	86,1	184,15
Gorontalo	48,78	13,04	13,04	12,88	99,42	122,51
Sulawesi Barat	51,52	13,58	16,59	16,47	127,4	208,44
P. SULAWESI	**40,86**	**11,48**	**13,96**	**13,80**	**108,69**	**173,53**
NASIONAL	**48.42**	**11,62**	**14,54**	**14,82**	**151,97**	**216,38**

Sumber : Deptan, 2013

Tanaman Perkebunan:

- Komoditas tanaman perkebunan utama di Wilayah Sulawesi meliputi kelapa dan kelapa sawit.
- Sentra produksi dan luas areal untuk kelapa terbesar berada di Sulawesi Utara. Sementara untuk produksi dan luas areal untuk kelapa sawit terbesar di Sulawesi Barat.

Tabel 5-40:
Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2011

TAHUN	KAKAO	KARET	KELAPA	KELAPA SAWIT	KOPI	TEH	TEMBAKAU	TEBU
2006	520.294	12.839	681.777	438.296	56.603	1.132	2.164	48.971
2007	495.390	13.299	727.674	588.067	61.580	1.250	1.158	70.611
2008	538.059	13.088	1.093.340	526.958	60.994	1.280	1.133	61.257
2009	538.760	11.824	709.700	500.107	56.309	1.380	2.572	58.215
2010	561.755	11.918	703.658	511.510	53.253	1.290	1.871	68.646
2011	-	13.001	704.435	487.624	52.563	1.150	1.453	-

Sumber : Deptan, 2011

Tabel 5-41:
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (Ton).

PROVINSI	KELAPA SAWIT	KARET	KELAPA	KOPI	TEMBAKAU	TEH
Sulawesi Utara	0	0	271.151	2.596	0	0
Sulawesi Tengah	161.433	3.456	198.631	7.363	0	0
Sulawesi Selatan	33.543	8.301	83.732	34.940	1.453	115
Sulawesi Tenggara	0	0	41.502	3.478	0	0
Gorontalo	0	0	63.671	695	0	0
Sulawesi Barat	292.648	1.244	45.748	3.491	0	0
SULAWESI	**487.624**	**13.001**	**704.435**	**52.563**	**1.453**	**115**

Sumber : Deptan , 2011

Tabel 5-42:
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (Ha).

PROVINSI	KELAPA SAWIT	KARET	KELAPA	KOPI	TEMBAKAU	TEH
Sulawesi Utara	0	0	274.706	9.080	0	0
Sulawesi Tengah	58.831	3.210	178.186	11.854	0	0
Sulawesi Selatan	20.667	19.405	111.376	75.108	3.351	129
Sulawesi Tenggara	27.341	0	56.818	10.819	0	0
Gorontalo	0	0	71.361	1.790	0	0
Sulawesi Barat	103.181	1.226	55.845	13.984	0	0
SULAWESI	**210.020**	**23.841**	**748.292**	**122.635**	**3.351**	**129**

Sumber : Deptan , 2011

Peternakan:

- Perkembangan Ternak besar menurut jenis ternak di Wilayah Sulawesi Tahun 2010-2013 di dominasi oleh sapi potong, kambing dan babi (*Tabel 5-43*). Penyebaran populasi untuk ternak sapi potong, kambing dan babi pada tahun 2013 terbesar terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sementara untuk populasi ternak unggas di Wilayah Sulawesi terbesar adalah jenis ayam buras. Sebaran populasi ayam buras terbesar terdapat di Provinsi Selawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (*Tabel 5-45 dan Tabel 5-45*)

Tabel 5-43:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Sulawesi Tahun 2010-2013, (ekor).

Tahun	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
2010	1326275	24095	1354937	151081	149995	1756	1752266
2011	1402,92	11237,66	1476578	110393	155927	1741	1790318
2012	1392063	7895	1600729	117933	180078	2249	2003093
2013	1445379	8087	1721106	120855	184412	2178	1962154

Sumber : Deptan, 2013

Tabel 5-44:

Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2013, (ekor)

Provinsi	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Sapi Potong
Sulawesi Utara	409.473		48.160		7.209	241	125.883
Sulawesi Tengah	223.908	7.575	634.459	3.487	3.955	8	257.303
Sulawesi Selatan	624.724	480	644.583	105.541	167.919	2.075,00	1.152.053
Sulawesi Tenggara	44.691	32	145.327	2.924	2.850		261.008
Gorontalo	4.739		76.982	14	2.670	20	203.582
Sulawesi Barat	137.844		219.755	8.889	7.018	75	88.208
P. SULAWESI	**1.445.379**	**8.087**	**1.721.106**	**120.855**	**184.412**	**2.178**	**1.962.154**

Sumber : Deptan, 2013

Tabel 5-45:

Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2013, (ekor).

Provinsi	Populasi Unggas (ekor			
	Ayam Buras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
Sulawesi Utara	2.305	2.317,31	1.197,22	143,21
Sulawesi Tengah	7.952	5.356,02	742,28	546,18
Sulawesi Selatan	24.039	22.370,68	9.725,95	4.070,64
Sulawesi Tenggara	1.286	12.684,83	186,62	527,38
Gorontalo	550	1.351,46	285,43	69,59
Sulawesi Barat	886	5.246,09	85,94	972,38
P. SULAWESI	**1.436**	**49.326,39**	**12.223,44**	**6.329,38**
NASIONAL	**1.355.288**	**290.455,06**	**147.279,35**	**46.312,53**

Sumber : Deptan, 2013

Tabel 5-46

Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010-2013, (ekor).

Tahun	Populasi (ekor)			
	Ayam Ras Pedaging	**Ayam Buras**	**Ayam Ras Petelur**	**Itik**
2010	1649,88	40752,88	8193,89	6555,6
2011	1107,6	39973,72	478537,36	5381,57
2012	1412,08	43872,44	10074,23	5950,53
2013	1435,89	49326,39	12223,44	6329,38

Sumber : Deptan , 2013

Perikanan dan Kelautan:

- Tingkat perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2011 di Wilayah Sulawesi rata-rata meningkat dari tahun sebelumnya, kecuali untuk budidaya karamba dan jaring apung (Tabel 5-47).
- Produksi perikanan tangkap terbesar di wilayah Sulawesi yaitu jenis perikanan tangkap laut dan produksi untuk perikanan budidaya terbesar yaitu budidaya laut dan tambak (*Tabel 5-47*).
- Produksi perikanan tangkap laut tahun 2011 terbesar terdapat Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, perikanan budidaya laut dan budidaya tambak di Sulawesi Selatan (*Tabel 5-48*).

Tabel 5-47:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Sulawesi
Tahun 2005 dan 2011, (dalam ton)

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
	Laut	**Perairan Umum**	**Budidaya Laut**	**Tambak**	**Kolam**	**Karamba**	**Jaring Apung**	**Sawah**
2005	850.970	26.301	351.670	161.650	13.283	1.561	9.471	3.296
2006	863.852	28.332	616.776	140.789	9.410	2.089	2.153	3.140
2007	910.326	26.507	692.320	331.554	11.252	1.643	9.523	4.144
2008	934.781	14.423	892.442	321.835	12.002	439	10.221	3.767
2009	937.293	15.420	1.591.562	294.963	16.678	815	7.593	4.053
2010	942.599	15.773	2.011.538	625.337	20.964	4.402	10.776	10.123
2011	970.616	26.692	2.561.977	718.787	49.508	3.668	9.524	10.990

Sumber : Statistik DKP, 2011

Tabel 5-48:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011, (dalam ton).

PROVINSI	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya					
	Perikanan Laut	**Perairan Umum**	**Budidaya Laut**	**Tambak**	**Kolam**	**Karamba**	**Jaring Apung**	**Sawah**
Sulawesi Utara	230.523	1.128	103.544	428	33.039	3.112	2.943	8.484
Sulawesi Tengah	145.784	43	734.635	42.057	4.394	273	-	19
Sulawesi Selatan	218.819	18.989	1.024.310	600.241	6.273	194	-	2.255
Sulawesi Tenggara	227.356	5.838	588.745	54.921	4.169	-	-	-
Gorontalo	75.680	44	89.190	3.212	1.025	89	6.577	11
Sulawesi Barat	72.454	-	21.553	17.928	608	-	4	221
P. SULAWESI	**970.616**	**26.692**	**2.561.977**	**718.787**	**49.508**	**3.668**	**9.524**	**10.990**

Sumber : Statistik DKP, 2011

5.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH

Infrastruktur Jalan. Perkembangan kondisi jalan di Wilayah Sulawesi ditunjukan dengan panjang jalan berdasarkan status pembinaannya, rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), dan kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU), dengan kriteria tidak mantap dan mantap.

- Perkembangan panjang jalan menurut status kewenangan di Wilayah Sulawesi dalam periode 2008 dan 2010 mengalami peningkatan baik untuk jalan kab/kota, provinsi, dan jalan nasional. Pada tahun 2010 total panjang jalan meningkat sepanjang 5.252 Km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari jalan kabupaten yaitu sepanjang 3.247 Km (*Tabel 5-49*).
- Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*) pada tahun 2010 di wilayah Sulawesi lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 Km/Km^2 (Gambar 5-6).
- Kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI *(International Roughness Index*, Departemen PU, Agustus 2010), kualitas jalan Nasional Tidak Mantap di wilayah Sulawesi cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 7.426,84 Km sebanyak 1.445 Km kondisinya Tidak Mantap (19,46 persen). Jalan Tidak Mantap tersebut sebesar 39,32 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 60,68 persen Rusak Berat (*Gambar 5-7*).
- Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sementara kondisi jalan Nasional Tidak Mantap terendah terdapat di Provinsi Gorontalo (*Tabel 5-50*).

Tabel 5-49:

Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Sulawesi

PROVINSI	PANJANG JALAN (KM)							
	JALAN NASIONAL		JALAN PROVINSI		JALAN KAB/KOTA		TOTAL	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
Sulawesi Utara	1.267	1.319	741	941	3.952	4.935	5.960	7.195
Sulawesi Tengah	1.807	2.182	1.977	2.037	11.974	14.110	15.758	18.329
Sulawesi Selatan	1.578	1.723	816	1.260	31.053	29.698	33.447	32.681
Sulawesi Tenggara	1.294	1.397	489	1.187	6.409	8.247	8.192	10.831
Gorontalo	616	607	284	408	4.077	3.449	4.977	4.464
Sulawesi Barat	530	572	670	441	6.137	6.410	7.337	7.423
P. SULAWESI	**7.092**	**7.800**	**4.977**	**6.274**	**63.602**	**66.849**	**75.671**	**80.923**

Sumber Data: Ditjen BinaMarga, Kementerian PU

Gambar 5-6:

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Road Density*) AntarProviinsi Di Wilayah Sulawesi

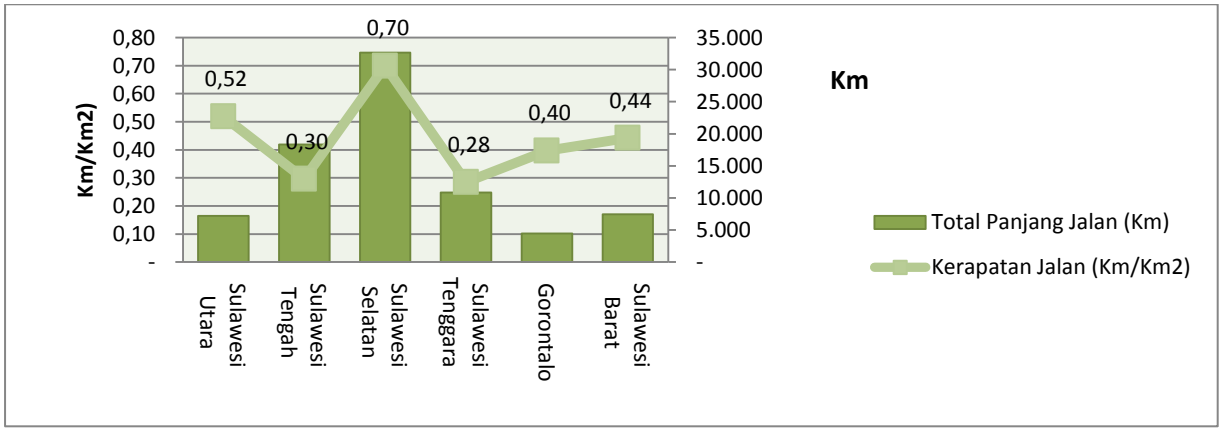

Sumber Data: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 5-7:
Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Sulawesi

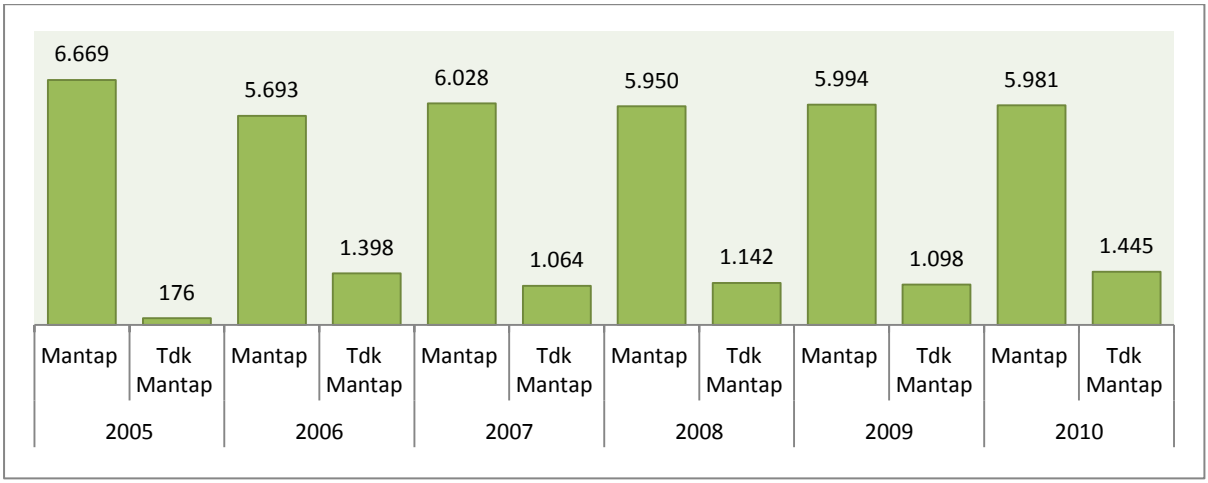

Sumber Data: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 5-50:
Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi,Tahun 2010

PROVINSI	PANJANG JALAN NASIONAL (KM)	KUALITAS JALAN					
		PANJANG JALAN MANTAP		PANJANG JALAN TIDAK MANTAP		KOMPOSISI JALAN TIDAK MANTAP	
		(KM)	%	(KM)	%	% RUSAK RINGAN	% RUSAK BERAT
Sulawesi Utara	2.160,97	1.913,82	88,56	247,15	11,44	47,05	52,95
Gorontalo	571,99	547,60	95,74	24,39	4,26	60,68	39,32
Sulawesi Tengah	1.718,34	1.487,84	86,59	230,50	13,41	61,28	38,72
Sulawesi Barat	1.397,00	876,86	62,77	520,14	37,23	43,43	56,57
Sulawesi Selatan	1.066,65	676,44	63,42	390,21	36,58	13,86	86,14
Sulawesi Tenggara	511,89	478,89	93,55	33,00	6,45	48,48	51,52
P. SULAWESI	**7.426,84**	**5.981,45**	**80,54**	**1.445,39**	**19,46**	**39,32**	**60,68**
INDONESIA	**38.189,43**	**31.522,09**	**82,54**	**6.667,34**	**17,46**	**48,28**	**51,72**

Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness Tahun Anggaran 2010. Direktorat Jenderal Bina Marga (Status 18 Agustus 2010)

Energi Listrik. Perkembangan kondisi listrik di Wilayah Sulawesi ditunjukan dengan jumlah kapasitas terpasang, jumlah pelanngan listrik, rasio elektrifikasi, dan konsumsi listrik perkapita.

- Kapasitas terpasang energy listrik PLN pada tahun 2011 di wilayah Sulawesi mencapai 837,74 Mw. Kapasitas terpasang tertinggi di wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar, dan wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo. Kapasitas terpasang terrendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Kapasitas terpasang menurut jenis pembangkit, sebagian besar bersumber dari PLTD dan PLTA (*tabel 5-51*).
- Penggunaan energi untuk pelanggan rumah tangga di setiap satuan PLN/provinsi selama periode 2009-2011 bertumbuh dengan kisaran tertinggi sebesar 30 persen di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan terrendah di Provinsi Sulawesi Selatan (*Tabel 5-52*).
- Rasio Elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Utara, dan terrendah di Provinsi Sulawesi Barat. Perkembangan rasio elektrifikasi dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di wilayah Gorontal, dan terrendah di wilayah Sulawesi Barat (*Tabel 5-52*).
- Berdasarkan konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011 dan perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011, Provinsi Sulawesi Utara menduduki peringkat tertinggi, dan terrendah di Provinsi Sulawesi Barat (*tabel 5-52*).

Tabel 5-51:

Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sulawesi Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI	KAPASITAS TERPASANG MENURUT JENIS PEMBANGKIT (MW)								
	PLTA	PLTU	PLTG	PLTP	PLTD	PLT Surya	PLT Bayu	Jumlah	%
Wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo	65,43	40		60	215,14	0,34	0,08	380,99	45,48
Sulawesi Utara	55,38	10		60	73,26	0,34	0,08	199,06	23,76
Gorontalo	1,5				31,7			33,2	3,96
Sulawesi Tengah	8,55	30			110,18			148,73	17,75
Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar	152,65	12,5	122,72		168,88			456,75	54,52
Sulawesi Selatan	151,05	12,5	122,72		72,69			358,96	42,85
Sulawesi Tenggara	1,6				89,7			91,3	10,90
Sulawesi Barat					6,49			6,49	0,77
P. SULAWESI	**218,08**	**52,5**	**122,72**	**60**	**384,02**	**0,34**	**0,08**	**837,74**	**100,00**
%	**26,03**	**6,27**	**14,65**	**7,16**	**45,84**	**0,04**	**0,01**	**100,00**	

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012

Tabel 5-52:

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita Tahun 2009 dan 2011.

SATUAN PLN/PROVINSI	PELANGGAN RUMAH TANGGA (RT)			RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			KWH JUAL/KAPITA		
	2009	2011	Laju (%)	2009	2011	Δ (11-09)	2009	2011	Δ (11-09)
Wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo	735.828	879.626	20	51,43	69,66	18,23	249,45	297,45	48
- Sulawesi Utara	361.559	424.321	17	61,22	77,99	16,77	360,34	429,59	69,25
- Gorontalo	100.356	119.934	20	40,09	67,38	27,29	191,7	222,53	30,83
- Sulawesi Tengah	273.913	335.371	22	46,45	62,03	15,58	172,7	214,07	41,37
Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar	1.401.300	1.630.546	16	55,88	63,59	7,71	286,01	331,41	45,4
- Sulawesi Selatan	1.131.868	1.289.257	14	62,97	71,97	9	342,69	400,02	57,33
- Sulawesi Tenggara	183.727	238.932	30	38,91	51,08	12,17	164,47	193,55	29,08
- Sulawesi Barat	85.705	102.357	19	35,99	33,56	-2,43	103,85	127,4	23,55

Sumber: Hasil Pengolahan data PT. PLN 2012.

Telekomunikasi. Perkembangan kondisi telekomunikasi di Wilayah Nusa Tenggara digambarkan dengan persentase jumlah desa yang memperoleh pelayanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon seluler**.**

- Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi untuk kemudahan akses komunikasi diindikasikan dengan adanya *Base Transceiver Station* (BTS). Jumlah dan persentase desa yang terdapat BTS atau manara telepon seluler di wilayah Sulawesi, terbanyak di provinsi Sulawesi Selatan, dan jumlah yang terendah di Sulawesi Barat, sedangkan untuk persentase yang terendah di Sulawesi Tenggara (*Gambar 5-8*).
- Keberadaan telepon kabel di Wilayah Sulawesi kurang dari 20 persen dari total desa, dengan persentase tertinggi di Sulawesi Utara dan terendah di Sulawesi Barat. Penerimaan sinyal HP di Wilayah Sulawesi dari total desa adalah 29,4 persen sinyal lemah, 58,9 persen sinyal kuat, dan 88,3 persen sinyal lemah-kuat. Provinsi Sulawesi Utara tertinggi pada penerimaan sinyal kuat dan terendah pada penerimaan sinyal lemah, sedangkan Sulawesi Barat sebaliknya. Sinyal lemah-kuat tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan hamper 95 persen dan terendah di Sulawesi Tengah (Tabel 5-53).

Gambar 5-8:
Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di Wilayah Sulawesi

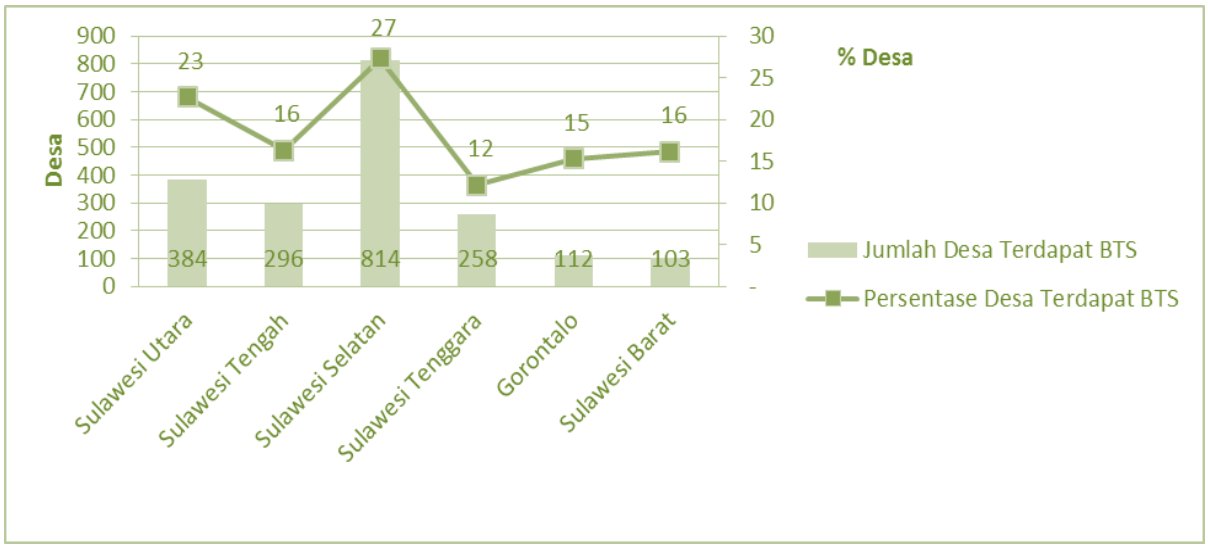

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)

Tabel 5-53:
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Seluler

PROVINSI	ADA PELANGGAN TELPON KABEL		PENERIMAAN SINYAL HP						JUMLAH DESA/KEL
			SINYAL LEMAH		SINYAL KUAT		LEMAH - KUAT		
	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	
Sulawesi Utara	595	35,1	415	24,5	1149	67,9	1564	92,4	1693
Sulawesi Tengah	162	8,9	484	26,7	938	51,7	1422	78,3	1815
Sulawesi Selatan	853	28,6	891	29,9	1934	64,9	2825	94,7	2982
Sulawesi Tenggara	138	6,5	683	32,2	1130	53,3	1813	85,5	2121
Gorontalo	171	23,4	229	31,3	445	60,9	674	92,2	731
Sulawesi Barat	47	7,4	236	37,0	283	44,4	519	81,3	638
P. SULAWESI	**1.966**	**19,7**	**2.938**	**29,4**	**5.879**	**58,9**	**8.817**	**88,3**	**9.980**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS).

Air Bersih. Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Kondisi perkembangan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Wilayah Sulawesi ditunjukan dengan persentase jumlah desa/kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari PDAM/PAM, air sumur, sungai/danau, air hujan, dan air kemasan.

- Ketersediaan infrastruktur air bersih di wilayah Sulawesi hanya baru menjangkau 13 persen dari total desa/kelurahan, terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara dan terrendah di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk memperoleh air bersih sebagian besar masyarakat (49 persen) di wilayah Sulawesi menggunakan pompa listrik/tangan atau sumur. Sedangkan kurang dari 10 persen jumlah desa yang bersumber dari sungai/danau/kolam, air hujan, dan air kemasan/lainnya.

Tabel 5-54:

Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2010.

PROVINSI	PAM/PDAM		POMPALISTRIK/ TANGAN/ SUMUR		MATA AIR		SUNGAI/ DANAU/ KOLAM		AIR HUJAN		AIR KEMASAN / LAINNYA		TOTAL	
	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%	Σ DESA	%
Sulawesi Utara	304	18	734	43	542	32	11	1	43	3	59	3	1.693	100
Sulawesi Tengah	227	13	720	40	624	34	189	10	27	1	28	2	1.815	100
Sulawesi Selatan	440	15	1611	54	746	25	101	3	29	1	55	2	2.982	100
Sulawesi Tenggara	224	11	1063	50	692	33	61	3	61	3	20	1	2.121	100
Gorontalo	104	14	494	68	92	13	28	4	0	-	13	2	731	100
Sulawesi Barat	26	4	247	39	294	46	63	10	5	1	3	0	638	100
SULAWESI	**1.325**	**13**	**4869**	**49**	**2990**	**30**	**453**	**5**	**165**	**2**	**178**	**2**	**9.980**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

5.5. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumberdaya Alam:

- Proporsi terbesar dari luas kawasan hutan di Wilayah Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 yaitu pada hutan lindung, sedangkan yang terkecil pada taman buru.
- Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Sulawesi tercatat sekitar 12.606.800 hektar atau 9,23 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan lindung, dan hutan produksi terbatas terutama di Sulawesi Tengah.

Gambar 5-9:

Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009.

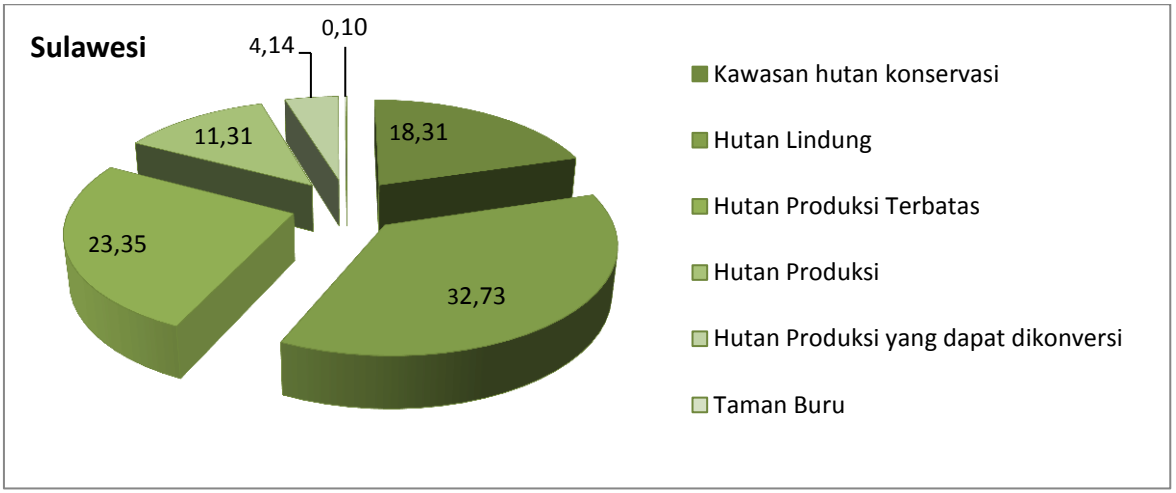

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009

Tabel 5-55:

Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Sulawesi.

PROVINSI	KAWASAN SUAKA ALAM + KAWASAN PELESTARIAN ALAM (HA)			HUTAN LINDUNG (HA)	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HA)	HUTAN PRODUKSI (HA)	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HA)	TAMAN BURU (HA)	JUMLAH KAWASAN HUTAN (HA)	JUMLAH KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN (HA)
	PERAIRAN	KWS. HUTAN	JUMLAH							
Sulawesi Utara	89.065	429.065	518.130	341.447	552.573	168.108	34.812	-	1.779.982	1.779.982
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Sulawesi Tengah	-	671.248	671.248	1.489.923	1.476.316	500.589	251.856	5.000	4.394.932	4.394.932
Sulawesi Tenggara	81.800	184.269	266.069	1.061.270	419.244	633.431	212.123	8.000	2.518.337	2.600.137
Sulawesi Selatan	3)	3)	851.267	1.232.683	494.846	124.024	22.976	0	2.725.796	2.725.796
Sulawesi Barat	3)	3)	1.283	678	362	65	80	-	743	1.105.953
SULAWESI (HA)	**170.865**	**1.284.582**	**2.307.997**	**4.126.001**	**2.943.341**	**1.426.217**	**521.847**	**13.000**	**11.419.790**	**12.606.800**
SULAWESI 1) (%)	**6,09**	**6,54**	**9,82**	**13,08**	**13,12**	**3,88**	**2,30**	**7,76**	**8,53**	**9,23**

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2009

Keterangan:

- 1) = Persen terhadap nasional; 2) =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya
- 3)= Belum ada SK Penunjukan dan data masih berdasarkan TGHK
- Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra *orthorectified* dan SRTM serta *ground check*
- Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006
- Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup digambarkan dari beberapa indikator, antara lain yaitu gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan.

- Persentase desa/kelurahan yang memiliki gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah) pada tahun 2011 di wilayah Sulawesi masih lebih rendah dari nasional. Sulawesi Utara memiliki persentase jumlah desa/kelurahan terbesar yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran udara, dan tanah. Sedangkan yang mengalami gangguan lingkungan akibat pencemaran air terbesar di Gorontalo dan Sulawesi Utara (*Tabel 5-56*).
- Luas lahan kritis di wilayah Sulawesi tahun 2010 mencapai 9,26 persen dari luas lahan kritis nasional, dimana Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang terluas pada lahan agak kritis, kritis, maupun sangat kritis (*Tabel 5-57*).
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Sulawesi dengan kondisi rusak pada tahun 1999-2007 sebanyak 88 DAS, dengan jumlah prioritas dan prioritas rendah yang terbanyak yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah, sementara untuk super prioritas terbanyak di Sulawesi Selatan (*Tabel 5-58*).
- Jumlah desa yang terkena bencana longsor menurut Provinsi di wilayah Sulawesi tahun 2008 sebanyak 1.113 desa meningkat dibandingkan tahun 2005 (716 desa). Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan dua provinsi yang paling banyak mengalami bencana longsor (523 desa) pada tahun 2008 (*gambar 5-10*).

Tabel 5-56:
Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008, dan 2011.

PROVINSI	AIR			TANAH			UDARA		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
Sulawesi Utara	7,57	7,56	6,62	0,32	1,07	1,18	2,84	4,15	3,54
Sulawesi Tengah	8,37	3,97	4,02	0,98	0,42	0,88	1,5	1,48	1,76
Sulawesi Selatan	6,7	3,84	2,75	1,16	0,37	0,3	3,26	3,53	2,62
Sulawesi Tenggara	2,85	1,73	1,84	0,71	0,69	0,19	1,42	0,94	1,04
Gorontalo	10,44	6,16	6,84	0,44	0,17	0,41	2,22	1,37	2,33
Sulawesi Barat	-	3,54	1,88	-	0,19	-	-	1,49	1,88
P. SULAWESI	**7,19**	**4,47**	**3,99**	**0,72**	**0,49**	**0,59**	**2,25**	**2,16**	**2,20**
INDONESIA	**8,3**	**5,57**	**5,4**	**1,47**	**0,77**	**0,83**	**6,24**	**3,95**	**3,78**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa Tahun 2005, 2008, dan 2011.

Tabel 5-57:
Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sulawesi menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

PROVINSI	TINGKAT KEKRITISAN LAHAN			JUMLAH
	AGAK KRITIS (HA)	KRITIS (HA)	SANGAT KRITIS (HA)	(HA)
Sulawesi Utara	415,810.90	242,996.60	33,702.40	692,509.90
Sulawesi Tengah	707,408.10	267,240.20	25,289.10	999,937.40
Sulawesi Selatan	1,322,098.40	809,375.70	107,279.20	2,238,753.30
Sulawesi Tenggara	1,377,089.20	879,452.00	346,159.30	2,602,700.50
Gorontalo	338,759.00	181,314.80	71,364.70	591,438.50
Sulawesi Barat	371,510.90	105,549.80	8,414.20	485,474.90
P. SULAWESI	**4,532,676.50**	**2,485,929.10**	**592,208.90**	**7,610,814.50**
NASIONAL	**52,259,832.90**	**23,955,162.70**	**5,449,299.30**	**82,176,443.64**
% Terhadap Nasional	**8.67**	**10.38**	**10.87**	**9.26**
Proporsi Lahan Kritis (%)	**59.56**	**32.66**	**7.78**	**100.00**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa Tahun 2005, 2008, dan 2011.

Tabel 5-58:
Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penanganannya di Sulawesi

PROVINSI	JUMLAH DAS BERDASARKAN				TINGKAT KEPRIORITASANNYA			
	TAHUN 1994/95 - 1998/99				TAHUN 1999/2000 - 2007			
	SUPER PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH	SUPER PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH
Sulawesi Selatan	4	10	12	26	4	12	5	21
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	5	9	14	2	7	7	16
Sulawesi Utara	2	6	8	16	3	9	9	21
Sulawesi Tengah	-	5	27	32	3	13	14	30
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
P. SULAWESI	**6**	**26**	**56**	**88**	**12**	**41**	**35**	**88**

Sumber: Statistik Kehutanan 2009

Gambar 5-10:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2005 dan 2008.

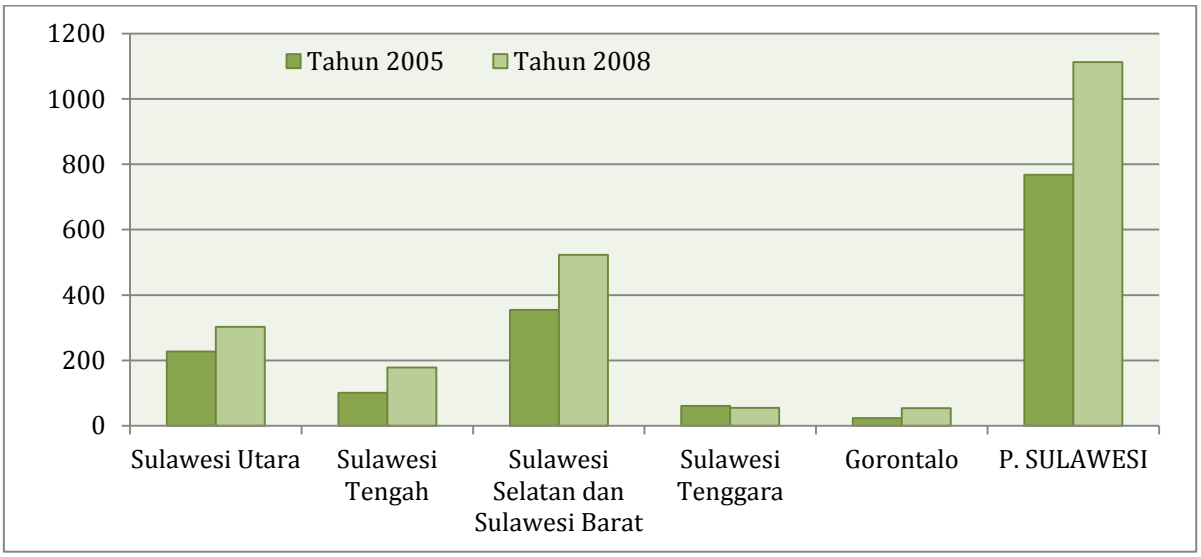

Sumber :BPS, 2011

6.1. ADMINISTRASI WILAYAH

- Wilayah Maluku secara administrasi terdiri dari 2 provinsi, 4 kota, 16 kabupaten, 85 kecamatan dan 1.939 kelurahan/desa *(Tabel 6-1)*, dengan luas wilayah daratan Kepulauan Maluku sekitar 78.897 Km^2.
- Wilayah Maluku merupakan daerah kepulauan yang memiliki jumlah gugus pulau kecil dan besar cukup banyak, dengan jumlah jumlah pulau sekitar 2.924 pulau yang terdiri dari 1.396 pulau yang sudah bernama dan 1.528 pulau yang belum bernama *(Tabel 6-2)*.

Tabel 6-1:
Administrasi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2010

PROVINSI	KOTA	KAB	KEC	DESA-KEL	LUAS WILAYAH (KM^2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
Maluku	2	9	76	898	46.914	1.499.981
Maluku Utara	2	7	109	1.041	31.983	996.003
MALUKU	**4**	**16**	**185**	**1.939**	**78.897**	**2.495.984**

Sumber: Ditjen PUM Kemendagri (Mei 2010)

Tabel 6-2:
Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2009

PROVINSI	PULAU BERNAMA	PULAU BELUM BERNAMA	JUMLAH
Maluku	768	631	1.399
Maluku Utara	628	897	1.525
MALUKU	**1.396**	**1.528**	**2.924**

Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

6.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan. Kondisi umum kependudukan di Wilayah Maluku digambarakan berdasarkan angka jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, penduduk menurut jenis kelamin *(sex ratio),* angka ketergantungan *(dependency ratio),* dan komposisi penduduk menurut usia.

Kependudukan:

- Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk wilayah Maluku adalah sebesar 2,57 juta orang atau 1,1 persen dari penduduk Indonesia *(Tabel 6-3)*, dengan tingkat kepadatan penduduk cukup rendah yaitu 32,6 jiwa per km^2.
- Perkembangan penduduk Wilayah Maluku dalam 10 tahun terakhir (2000-2010) mencapai 2,64 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,5 persen.
- Struktur penduduk menurut kelompok usia, lebih dari separuh (60,50 persen) penduduk Maluku tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun)*(Tabel 6-4)*, Kelompok usia terbesar berikutnya adalah penduduk usia 0-14 tahun sebesar 35,93 persen, dan sisanya sebanyak 3,57 persen adalah penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun).
- Angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di wilayah Maluku (65 persen) lebih tinggi dari nasional (51,3 persen), yang berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 65 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun) *(Gambar 6-1)*.

- Sementara itu dari sisi perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (*sex ratio), kedua provinsi memiliki sex rasio lebih tinggi dari nasional, dan sex ratio* Provinsi Maluku Utara lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Maluku *(Tabel 6-5)*.

Tabel 6-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Maluku menurut Provinsi.

PROVINSI/ WILAYAH	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk per km2		Laju Pertumbuhan	
	2000	2010	2000	2010	90-00	00-10
Maluku	1.166,3	1.533,5	24,9	32,7	0,67	2,8
Maluku Utara	815,1	1.038,1	25,5	32,5		2,47
MALUKU	**1.981,4**	**2.571,6**	**25,1**	**32,6**	**0,67**	**2,64**
NASIONAL	**205.132,5**	**237.641,3**	**107,0**	**124,0**	**1,40**	**1,49**

Sumber : BPS, Sensus Penduduk

Tabel 6-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Maluku menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA	JUMLAH (RIBU JIWA)	%
• **Usia Muda (< 14 tahun)**	923.951	35,93
• **Usia Produktif (15-64 tahun)**	1.555.933	60,50
• **Usia Tua (>65 tahun)**	91.709	3,57
Total Penduduk	**2.571.593**	**100,00**
Dependency Ratio		**65**

Sumber: Sensus 2010, BPS

Gambar 6-1:

Perkembangan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Antarprovinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2000 dan 2010

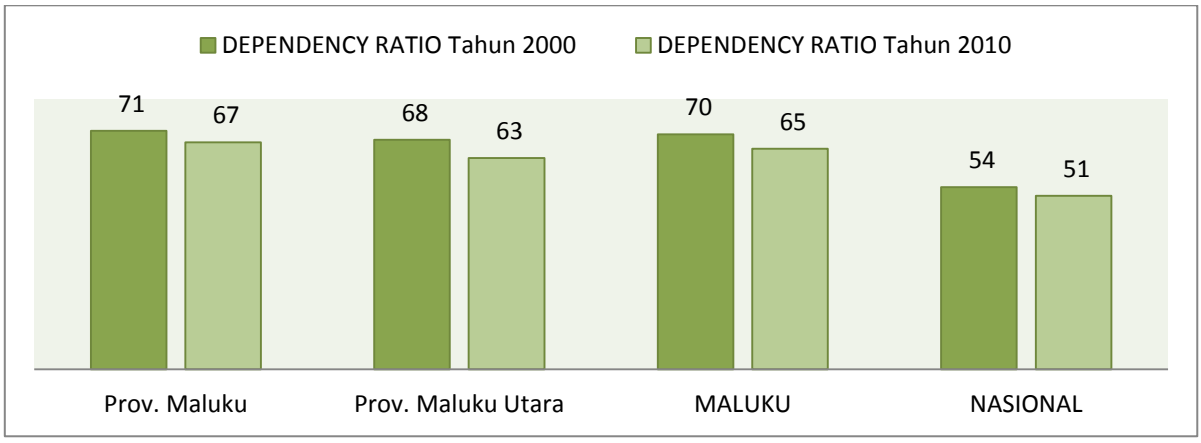

Sumber: Sensus 2010, BPS

Tabel 6-5:

Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Antar Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2010.

PROVINSI/ WILAYAH	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (JIWA)	SEX RATIO
Maluku	775.477	758.029	1.533.506	102,30
Maluku Utara	531.393	506.694	1.038.087	104,87
MALUKU	**1.306.870**	**1.264.723**	**2.571.593**	**103,33**
NASIONAL	**119.630.913**	**118.010.413**	**237.641.326**	**101,37**

Sumber: Sensus 2010,BPS.

Ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Maluku secara umum ditunjukan dengan perkembangan indicator utama, yaitu: jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur angkatan kerja menurut lapangan usaha dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

- Perkembangan jumlah angkatan kerja Wilayah Maluku selama periode 2008-2013 bertambah sebesar 215 ribu jiwa, dengan persebaran angkatan kerja terbesar di perdesaan. Pola ini seiring dengan tahapan pengembangan wilayah di sebagian besar provinsi yang masih merupakan wilayah agraris di mana peran sektor pertanian masih dominan dalam penyediaan lapangan kerja *(Tabel 6-6)*.
- Penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan pendidikan dasar dan menengah. Sementara menurut lapangan usaha, lebih dari separuh penduduk bekerja di sektor pertanian *(Tabel 6-9).*
- Komposisi lapangan usaha antarprovinsi, penduduk bekerja di Provinsi Maluku lebih tinggi di usaha non pertanian di bandingkan Maluku Utara *(Tabel 6-9)*.
- Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Maluku dalam lima tahun terakhir menurun, TPT Wilayah Maluku tahun 2013 (februari) sebesar 6,24 persen atau menurun sebesar 2,63 persen dari tahun 2008 *(Tabel 6-10)*.
- Pengangguran terbuka di Provinsi Maluku sebagian besar berada di perkotaan, sementara di Provinsi Maluku Utara sebagian besar berada di Perdesaan *(Tabel 6-11)*.
- Kondisi pendidikan Tingkat Pengangguran Terbuka relatif cukup baik dan hal ini modal utama untuk pembangunan di Maluku, dimana 52,90 persen tamatan SMTA, dan sarjana sebesar 15,59 persen *(Tabel 6-12)*.

Gambar 6-2:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sulawesi Periode 2008-2013 (Februari).

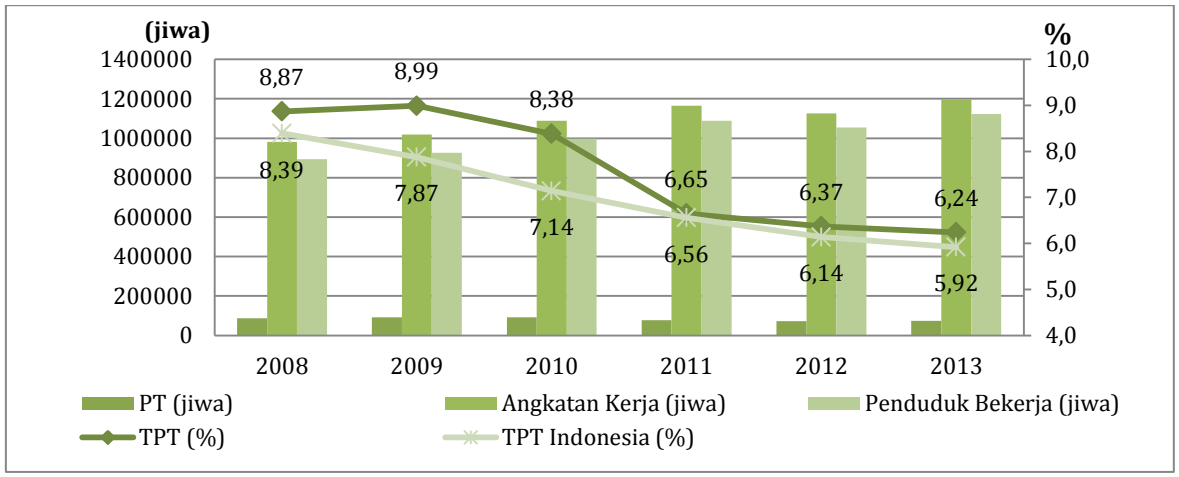

Sumber: Sakernas (Februari),BPS 2012

.

Tabel 6-6:

Perkembangan Angkatan Kerja menurut Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2008 dan 2013 (Februari).

PROVINSI	2008 Agust	2013(Feb)	Δ 2008-2013	Share Pulau 2013 %	Share Nasional 2013 %
	Ribu jiwa				
Maluku	559,24	714,34	155,10	59,70	0,61
Maluku Utara	421,88	482,27	60,39	40,30	0,41
MALUKU	**981,12**	**1.196,60**	**215,49**	**100,00**	**1,01**
INDONESIA	**111.947,27**	**121.191,71**	**9.244,45**		**102,66**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 6-7:

Perkembangan Penduduk Bekerja menurut Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	2008 Agustus	2013 (Feb)	Δ 2008-2013	Share Pulau 2013 %	Share Nasional 2013 %
	Ribu jiwa				
Maluku	500	666	166,72	59,39	0,58
Maluku Utara	395	456	61,12	40,61	0,40
MALUKU	**894**	**1.122**	**228**	**100,00**	**0,98**
INDONESIA	**102.553**	**114.021**	**11.468,44**		**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013.

Tabel 6-8:

Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Maluku (Februari 2012)

PROVINSI	Pendidikan (%)						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
Maluku	38,51	23,38	23,83	5,52	3,13	5,63	100,00
Maluku Utara	43,41	24,40	21,06	3,95	2,73	4,45	100,00

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 6-9:

Distribusi Persentase Penduduk Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha
Di Wilayah Maluku (Februari 2012)

PROVINSI	Lapangan Usaha *)									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maluku	48,99	1,74	6,12	0,57	3,16	15,36	5,89	0,98	17,19	100,00
Maluku Utara	55,00	2,46	3,35	0,21	3,92	11,65	5,87	0,89	16,66	100,00
MALUKU	**51,52**	**2,04**	**4,96**	**0,42**	**3,48**	**13,80**	**5,88**	**0,94**	**16,97**	**100,00**
NASIONAL	**35,09**	**1,44**	**13,87**	**0,22**	**6,13**	**20,90**	**4,51**	**2,40**	**15,43**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS, 2012

Keterangan*):

1. *Pertaninan,*
2. *Pertambangan dan penggalian*
3. *Industri pengolahan*
4. *Listrik, gas dan air*
5. *Bangunan*
6. *Perdagangan, hotel*
7. *Angkutan, pergudangan dan komunikasi*
8. *Keuangan, dan jasa perusahaan*
9. *Jasa kemasyarakatan*

Tabel 6-10:

Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Di Wilayah Maluku Tahun 2008 dan 2013 (Februari).

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	PT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
Maluku	10,67	6,73	3,94	59.684	48.100	11.584
Maluku Utara	6,48	5,51	0,97	27.323	26.600	723
MALUKU	**8,87**	**6,24**	**2,63**	**87.007**	**74.700**	**12.307**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS, 2013

Tabel 6-11:

Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Maluku (Februari 2012)

PROVINSI	Perkotaan		Pedesaan		Jumlah	Share terhadap Pulau (%)
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%		
Maluku	19.690	39,70	29.901	60,30	49.591	69,11
Maluku Utara	7.913	35,70	14.251	64,30	22.164	30,89
MALUKU	**27.603**	**38,47**	**44.152**	**61,53**	**71.755**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 6-12:

Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Wilayah Maluku (Februari 2012)

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
Maluku	10,88	11,24	44,46	9,05	6,45	17,92	100,00
Maluku Utara	28,46	15,67	35,36	9,07	3,07	8,38	100,00
MALUKU	**16,31**	**12,61**	**41,65**	**9,05**	**5,40**	**14,98**	**100,00**
NASIONAL	**28,09**	**23,48**	**25,29**	**14,37**	**2,72**	**6,05**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Kesehatan. Perkembangan dari kinerja kesehatan di Wilayah Maluku dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama kesehatan, antara lain adalah: Umur Harapan Hidup (UHH), perkembangan Gizi Balita, persentase proses persalinan ditolong tenaga medis, dan persentase balita dengan status tinggi badan pendek (stunting).

- Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Maluku selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan. Namun, perbaikan kondisi kesehatan antarprovinsi tersebut masih belum merata, sehingga diperlukan upaya khusus dalam mengurangi kesenjangan kesehatan masyarakat.
- Berdasarkan estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) antarprovinsi di wilayah Maluku selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional *(Gambar 6-3)*.
- Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di wilayah Maluku antar tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan berbeda, yaitu diProvinsi Maluku Utara terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan kurang *(Tabel 6-13)*, sementara di Provinsi Maluku menunjukkan penurunan.
- Kondisi status tinggi badan pendek (*Stunting*)[1] *(Gambar 6-4)*, Permasalahan status tinggi badan pendek pada balita secara nasional pada tahun 2010 masih serius yaitu sebesar 35,6 persen. Pada lingkup antarprovinsi di wilayah Maluku, di Provinsi Maluku sebesar 37,5 persen masih berada di atas angka nasional, walaupun menunjukkan tren penurunan.
- Kondisi proses persalinan bayi dengan tenaga medis antarprovinsi di wilayah Maluku masih berada di bawah angka nasional (81,3 persen) *(Tabel 6-14)*, persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga medis di Provinsi Maluku sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku Utara

[1] Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya digabung menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (*Stunting*). Indikator muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena *hygiene* dan sanitasi yang kurang baik.

Gambar 6-3:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2007-2010

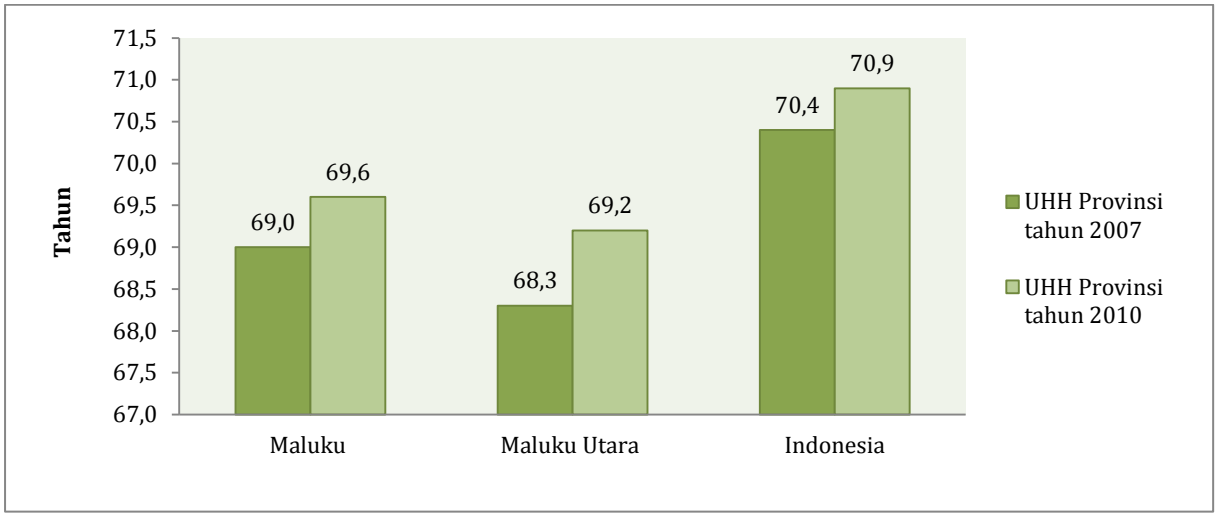

Sumber: SurveiSosialEkonomiNasional, BPS

Tabel 6-13:
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010.

PROVINSI	2007			2010			Δ (2007-2010)
	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	
Maluku	9,3	18,5	27,8	8,4	17,8	26,2	1,6
Maluku Utara	6,7	16,1	22,8	5,7	17,9	23,6	-0,8
INDONESIA	**5,4**	**13**	**18,4**	**4,9**	**13**	**17,9**	**0,5**

Sumber: BPS, 2011

Gambar 6-4:
Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada Tahun 2007 dan 2010.

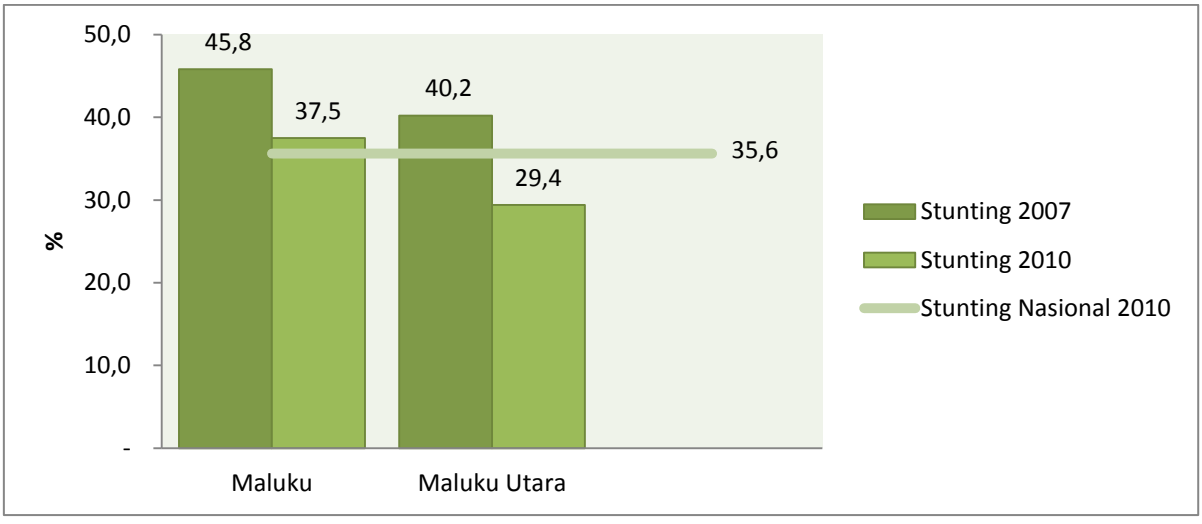

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Tabel 6-14:
Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

PROVINSI	TENAGA MEDIS				TENAGA NON MEDIS		
	DOKTER	BIDAN	TENAGA MEDIS LAINNYA	TOTAL	DUKUN	FAMILI	TOTAL
Maluku	7,8	41,8	1,2	50,8	46,3	2,7	49,1
Maluku Utara	9,3	40,8	0,3	50,4	45,8	3,8	49,6
INDONESIA	**16,9**	**63,7**	**0,7**	**81,3**	**17,3**	**1,2**	**18,6**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Pendidikan. Perkembangan dari kinerja pendidikan di Wilayah Maluku dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama pendidikan, antara lain adalah: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

- Perkembangan kondisi pendidikan di Wilayah Maluku selama periode 2009-2012 menunjukan perbaikan, dimana berdasarkan tiga indikator (RLS, AMH, dan APS) rata-rata berada di atas angka nasional. Namun perbaikan kondisi pendidikan antarprovinsi tersebut masih belum merata, sehingga diperlukan upaya khusus dalam mengurangi kesenjangan pendidikan masyarakat.
- Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antarprovinsi di wilayah Maluku dalam tahun 2008-2012 *(Tabel 6-16)*, perkembangan negatif terjadi pada kelompok Usia 16-18 tahun, khususnya di Provinsi Maluku.

Tabel 6-15:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012.

PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)			ANGKA MELEK HURUF (%)		
	2009	2.012	Δ ('12-'09)	2009	2012	Δ ('12-'09)
Maluku	8,6	9,1	0,5	97,42	97,08	-0,34
Maluku Utara	8,6	8,5	-0,1	95,74	96,43	0,69
NASIONAL	**7,7**	**8,1**	**0,4**	**92,58**	**93,25**	**0,67**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Tabel 6-16:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012.

Provinsi	2008**			2012**			Δ 2008-2012**		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
MALUKU	97,52	91,20	71,95	98,32	94,78	68,58	0,80	3,58	-3,37
MALUKU UTARA	96,80	89,20	63,39	98,25	90,52	68,15	1,45	1,32	4,76
INDONESIA	**97,88**	**84,89**	**55,50**	**97,99**	**89,76**	**61,42**	**0,11**	**4,87**	**5,92**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Kemiskinan. Kondisi umum kemiskinan di Wilayah Maluku ditunjukan dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan pola distribusi atau sebaran kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan

Kemiskinan:

- Kondisi kemiskinan di Wilayah Maluku dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional, namun kondisi kemiskinan di Maluku masih tegolong tinggi, khususnya di Provinsi Maluku.
- Penurunan tingkat kemiskinan mencapai 7,39% dari tahun 2008-2013, lebih tinggi dari penurunan tingkat kemiskinan nasional *(Gambar 6-5)*, dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan Maluku Utara.
- Persebaran kemiskinan di wilayah Maluku sebagian besar berada di perdesaan, yakni mencapai 85,06 persen dari total penduduk miskin *(Tabel 6-19)*, atau dengan tingkat kemiskinan sebesar 20,01 persen.

Gambar 6-5:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku, Tahun 2008-2013

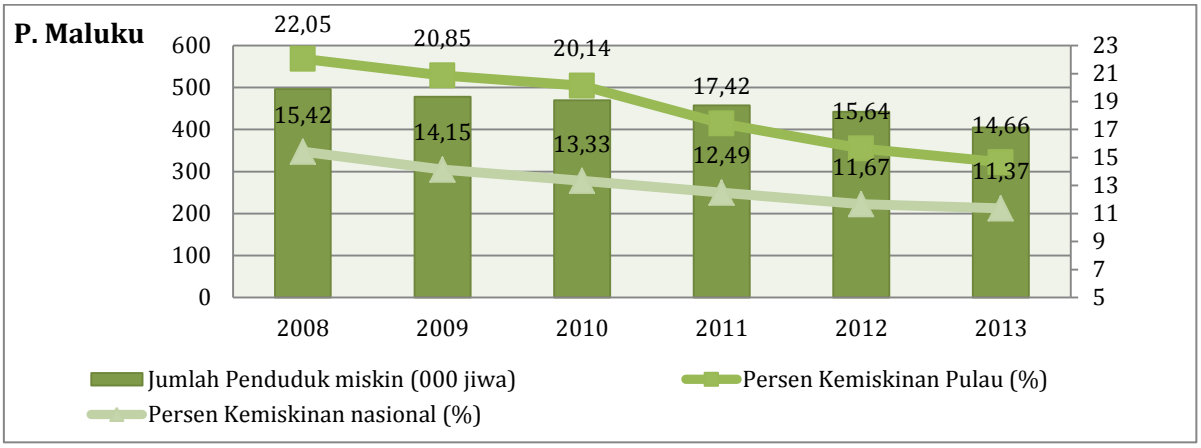

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS, 2013

Tabel 6-17:
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2008-2013

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Maluku	29,66	28,23	27,74	23,00	20,76	19,49
Maluku Utara	11,28	10,36	9,42	9,18	8,06	7,5
MALUKU	**22,05**	**20,85**	**20,14**	**17,42**	**15,64**	**14,66**
NASIONAL	**15,42**	**14,15**	**13,33**	**12,49**	**11,67**	**11,37**

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS, 2013

Tabel 6-18:
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008 dan 2013.

PROVINSI	Jumlah (ribu jiwa)			(%)		
	2008	2013	Δ 2008-2013	2008	2013	Δ 2008-2013
Maluku	391,30	321,84	69,46	29,66	19,49	10,17
Maluku Utara	105,10	83,44	21,66	11,28	7,50	3,78
MALUKU	**496,40**	**405,28**	**91,12**	**22,05**	**14,66**	**7,39**
NASIONAL	**34.963,10**	**28.066,56**	**6.896,54**	**15,42**	**11,37**	**4,05**

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS, 2013

Tabel 6-19:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)			PERSERTASE PENDUDUK MISKIN (%)		
	KOTA	DESA	KOTA + DESA	KOTA	DESA	KOTA + DESA
Maluku	58,47	291,76	350,23	9,78	28,88	21,78
Maluku Utara	7,56	84,23	91,79	2,55	10,69	8,47
MALUKU	**66,03**	**375,99**	**442,02**	**7,38**	**20,91**	**16,42**
NASIONAL	**10.647,25**	**18.485,20**	**29.132,43**	**8,78**	**15,12**	**11,96**

Sumber: BPS, 2012

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia di Wilaya Maluku diukur berdasarkan indek pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan perbandingan peringkat masing-masing provinsi terhadap nasional.

- Kualitas hidup manusia di seluruh provinsi di Maluku memperlihatkan peningkatan selama periode 2007-2011*(Tabel 6-20)*. Namun, perkembangan kualitas sumberdaya manusia pada kedua provinsi relatif lambat, dan hingga saat ini masih IPM kedua provinsi tersebut masih dibawah rata-rata IPM nasional.

Tabel 6-20:

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2007-2011

Provinsi	IPM					Peringkat IPM (PROVINSI)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
MALUKU	69,96	70,38	70,96	71,42	71,87	18	19	19	20	21
MALUKU UTARA	67,82	68,18	68,63	69,03	69,47	27	28	29	30	30
INDONESIA	**70,59**	**71,17**	**71,76**	**72,27**	**72,77**					

Sumber: BPS 2011

6.2. PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Daerah. Tingkat perkembangan perekonomian daerah Wilayah Maluku ditunjukan dengan beberapa indikator utama ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Struktur ekonomi menurut lapangan usaha dan penggunaan, perkembangan investasi PMA dan PMDN, dan perkembangan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

- Perekonomian wilayah Maluku pada tahun 2012 mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan kondisi tahun 2011 *(Tabel 6-21)*. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tumbuh positif dan untuk migas memiliki laju pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
- Seluruh sektor tumbuh positif dengan laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali sektor industri pengolahan, keuangan dan jasa perusahaan dan sektor jasa *(Tabel 6-22)*.
- Sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sekaligus pendorong kinerja perekonomian Maluku adalah sektor bangunan, sektor jasa, dan sektor perdagangan *(Tabel 6-23)*.

Tabel 6-21:
Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Tanpa Migas ADHK 2000 Per Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012, (Persen).

Provinsi	Tanpa Migas						Dengan Migas					
	2008	2009	2010	2011	2012	08-12	2008	2009	2010	2011	2012	08-12
Maluku	4,23	5,44	6,47	6,07	7,81	6,00	4,23	5,44	6,47	6,06	7,81	6,00
Maluku Utara	5,99	6,07	7,95	6,40	6,67	6,62	5,99	6,07	7,95	6,40	6,67	6,62
MALUKU	**4,95**	**5,70**	**7,08**	**6,21**	**7,34**	**6,26**	**4,95**	**5,70**	**7,08**	**6,21**	**7,33**	**6,25**
NASIONAL (PDB)	**6,47**	**5,00**	**6,60**	**6,98**	**6,81**	**6,37**	**6,01**	**4,63**	**6,22**	**6,49**	**6,23**	**5,92**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 6-22:
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011. (Persen)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	5,64	4,33	5,50	3,84
2. Pertambangan & Penggalian	3,33	-5,52	8,02	3,64
3. Industri Pengolahan	-4,17	5,01	3,62	4,66
4. Listrik, Gas & Air Bersih	2,00	-9,43	12,33	7,48
5. Bangunan	9,73	7,33	27,50	11,20
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,35	7,53	8,83	8,32
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,43	7,81	6,95	5,58
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	6,10	6,11	4,11	5,11
9. Jasa-Jasa	4,50	6,75	8,14	8,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**4,95**	**5,70**	**7,08**	**6,18**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 6-23:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2011 (Persen).

Lapangan Usaha	Maluku	Maluku Utara
1. Pertanian	3,56	4,21
2. Pertambangan & Penggalian	8,14	2,54
3. Industri Pengolahan	7,22	3,27
4. Listrik, Gas & Air Bersih	7,14	7,99
5. Bangunan	11,18	11,23
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,81	10,33
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,47	5,79
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	3,48	8,46
9. Jasa-Jasa	9,14	7,99

Sumber: BPS, 2011

Struktur:

- Perkembangan nilai PDRB dengan migas menurut ADHB pada tahun 2012 mencapai 18.387.130,31 juta rupiah meningkat dari tahun sebelumnya *(Tabel 6-24)*.
- Kontribusi wilayah Maluku terhadap pembentukan PDRB nasional (PDRB 33 provinsi) relatif rendah, hanya mencapai 0,27 persen *(Tabel 6-25)*, dengan kontribusi terbesar dari Provinsi Maluku.
- Sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa berperan besar dalam perekonomian wilayah Maluku, dengan kontribusi lebih dari 50 persen. Selain ketiga sektor tersebut, sektor pertambangan dan sektor pengangkutan dan komunikasi berperan cukup besar terhadap perekonomian.

Tabel 6-24:
Perkembangan Nilai PDRB berdasarkan ADHB dengn Migas Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012. (Rp. Juta)

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
Maluku	6.269.957,84	7.069.642,15	8.084.807,44	9.599.092,79	11.468.769,26
Maluku Utara	3.862.243,13	4.691.161,48	5.389.831,57	6.038.673,74	6.918.361,05
MALUKU	**10.132.200,98**	**11.760.803,63**	**13.474.639,00**	**15.637.766,53**	**18.387.130,31**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 6-25:
Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Maluku dan Nasional Tahun 2012, (dalam persen)

Provinsi	PDRB (Rp. Juta)	Share Terhadap Pulau (%)	Share Terhadap Nasional (%)
Maluku	11.468.769,26	62,37	0,17
Maluku Utara	6.918.361,05	37,63	0,10
MALUKU	**18387130,31**	**100,00**	**0,27**
PDB NASIONAL (33 Provinsi)	**6.731.534.512,85**		**100,00**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 6-26
Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2012, (dalam persen).

PROVINSI	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Maluku	28,63	0,76	4,53	0,50	1,94	28,71	10,01	4,00	20,92
Maluku Utara	34,91	4,65	12,50	0,56	3,36	25,56	7,65	3,81	7,00
MALUKU	**30,99**	**2,22**	**7,53**	**0,52**	**2,47**	**27,52**	**9,12**	**3,93**	**15,68**
NASIONAL	**14,20**	**8,89**	**23,34**	**1,16**	**6,68**	**20,11**	**7,42**	**8,19**	**10,01**

Sumber: BPS, 2011

PDRB Perkapita:

- Perkembangan PDRB per kapita wilayah Maluku rata-rata meningkat. Namun, PDRB perkapita provinsi wilayah Maluku masih jauh dibawah perkapita Nasional *(Tabel 6-27)*. Jika diperbandingkan antarprovinsi, PDRB perkapita Maluku lebih tinggi dibandingkan PDRB perkapita Maluku Utara.

Tabel 6-27:

PDRB Per Kapita dengan Migas Menurut ADHK Tahun 2000 Per Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah).

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
Maluku	2.596	2.667	2.758	2.861	3.008
Maluku Utara	2.667	2.766	2.910	3.038	3.171
RATA-RATA MALUKU	**2.632**	**2.716**	**2.834**	**2.950**	**3.089**
INDONESIA (PDB)	**8.990**	**9.281**	**9.703**	**10.225**	**10.721**

Sumber: BPS, 2012

PDRB Menurut Penggunaan:

- Dari sisi penggunaan, perekonomian wilayah Maluku pada tahun 2011 didominasi oleh komponen konsumsi, yaitu sebesar 68,5 persen merupakan konsumsi rumah tangga dan 33,12% *(Tabel 6-28)*.
- Komponen konsumsi rumah tangga, PMTB, dan impor memiliki pertumbuhan tertinggi dan meningkat dibandingkan kondisi tahun 2010 *(Tabel 6-29)*, sementara pertumbuhan konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba dan ekspor sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
- PMTB memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Maluku dibandingkan terhadap komponen lainnya. Sementara komponen perubahan persediaan, PMTB *(Tabel 6-30)*, dan konsumsi pemerintah memiliki laju pertumbuhan tertinggi dan kinerja cukup baik untuk perekonomian di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 6-28:

Distribusi Persentase PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan Di Wilayah Maluku Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
MALUKU	69.28	1.87	33.99	6.51	0.39	5.62	37.68
MALUKU UTARA	67.64	0.74	31.74	9.79	(12.53)	6.87	24.24
MALUKU	**68.65**	**1.43**	**33.12**	**7.78**	**(4.61)**	**6.11**	**2.48**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 6-29:

Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan Wilayah Maluku Tahun 2007-2011, (persen).

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					RATA-RATA 2007-2011
	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	
Konsumsi Rumah Tangga	7,56	5,20	8,69	6,78	8,11	7,27
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	4,17	3,85	3,32	5,06	5,00	4,28
Konsumsi Pemerintah	8,23	5,76	13,71	8,24	10,52	9,29
PMTB	13,38	17,77	15,24	10,16	13,38	13,99
Perubahan Stock	(16,45)	0,44	(13,11)	25,48	(43,42)	(9,41)
Ekspor Barang & Jasa	9,88	0,55	(5,36)	9,34	3,35	3,55
Impor Barang & Jasa	7,68	8,26	6,99	9,53	10,32	8,55

Sumber: BPS, 2012

Tabel 6-30:

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 menurut Provinsi dan Penggunaan Di Wilayah Maluku Tahun 2011, (dalam persen).

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
Maluku	8.27	4.21	11.21	14.52	(99.40)	5.14	13.91
Maluku Utara	7.96	5.80	9.84	12.24	12.55	1.56	6.72

Sumber: BPS, 2012

Investasi PMA dan PMDN:

- Nilai investasi PMA di Wilayah Maluku dalam tiga tahun terakhir menurun, nilai PMA tahun 2012 tercatat sebesar 98,8 juta US$ atau sekitar 0,40 persen dari total nilai PMA nasional *(Tabel 6-31)*, dengan PMA terbesar di Provinsi Maluku Utara.
- Sementara untuk nilai investasi PMDN terjadi peningkatan, nilai PMDN tahun 2012 tercatat sebesar 323,9 juta rupiah atau sekitar 0,35 persen dari total investasi PMDN nasional *(Tabel 6-32)*, dengan PMDN terbesar di Maluku Utara

Tabel 6-31:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012.

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	% Pulau
Maluku	-	-	**2,9**	11,7	8,5	8,62
Maluku Utara	-	5,9	246	129,8	90,3	91,38
MALUKU	**0,0**	**5,9**	**248,9**	**141,5**	**98,8**	**100,00**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**0,000**	**0,05**	**1,54**	**0,727**	**0,40**	

Sumber: BKPM, 2012

Tabel 6-32:

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2008-2012.

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	% Pulau 2012
Maluku	-	-	-	0,1	3,4	1,04
Maluku Utara	-	-	-	13,5	320,5	98,96
MALUKU	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,6**	**323,9**	**100,00**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,02**	**0,35**	

Sumber: BKPM, 2012

Perdaggangan Ekspor dan Impor. Perkembangan perdaggangan di Wilayah Maluku ditunjukan dengan nilai ekspor dan nilai impor, dan neraca perdagangan antara nilai ekspor terhadap nilai impor

- Perkembangan perdagangan ekspor non migas provinsi di Wilayah Maluku tahun 2006-2010 menunjukan kecenderungan meningkat setiap tahunnya *(Tabel 6-33)*, baik di untuk ekspor non migas di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara. Kontribusi wilayah Maluku terhadap ekspor non migas sangat rendah, yaitu hanya 0,28 persen, dengan nilai ekspor non migas terbesar berasal dari Provinsi Maluku Utara (79,93 persen).
- Perkembangan perdagangan nilai impor non migas provinsi di Wilayah Maluku tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peranan impor non migas terhadap nasional sangat rendah hanya sekitar 0,11 persen *(Tabel 6-34)*, dengan dengan nilai impor terbesar berasal dari Provinsi Maluku (88,05 persen). Sementara nilai impor dari Provinsi Maluku Utara hanya sekitar 11,95 persen.

Tabel 6-33:
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2006-2010. (dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN. (%)	PERAN. (%)
						2010	2010
Maluku	49,5	25,9	42,2	46,4	73,7	20,07	0,06
Maluku Utara	197,4	493,3	222,7	197,8	293,5	79,93	0,23
MALUKU	**246,9**	**519,2**	**264,9**	**244,2**	**367,2**	**100,00**	**0,28**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Tabel 6-34:
Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku
Tahun 2006-2010. (dalam persen)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN.(%)	PERAN.(%)
						2010	2010
Maluku	14	7,4	11,4	32,1	104,6	88,05	0,10
Maluku Utara	1,7	4,1	-	-	14,2	11,95	0,01
MALUKU	**15,7**	**11,5**	**11,4**	**32,1**	**118,8**	**100,00**	**0,11**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Komoditas Unggulan. Perkembangan komoditas unggulan di Wilayah Maluku ditunjukan perkembangan jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman perkebunan, jenis aktivitas peternakan, dan perikanan dan kelautan.

Tanaman Pangan

- Perkembangan produksi dan produktivitas padi dari tahun 2008-2013 terus meningkat. Pada tahun 2013 produksi padi mencapai 168.276 ton atau hanya 0,24 persen dari total produksi nasional *(Tabel 6-35)*.
- Dari sisi produktivitas, produktivitas padi di Wilayah Maluku jauh berada dibawah rata-rata produktivitas padi nasional *(Tabel 6-36)*.

Tabel 6-35:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi
Di Wilayah Maluku Tahun Tahun 2008-2013

Tahun	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/Ha)
2008	127.425	37,20
2009	136.128	38,01
2010	138.510	37,78
2011	134.576	38,99
2012	149.957	39,02
2013	168.276	40,37

Sumber: BPS, 2013

Tabel 6-36:
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi
di Wilayah Maluku Tahun 2013

PROVINSI	PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (KU/HA)
Maluku	101.265	43,57
Maluku Utara	67.011	37,16

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Palawija:

- Perkembangan produksi seluruh tanaman palawija di Wilayah Maluku cenderung meningkat, namun tingkat produktivitas masih dibawah nasional *(Tabel 6-37)*.
- Produksi terbesar tanaman palawija terdiri dari ubi kayu, ubi jalar, dan jagung, dengan produksi terbesar ketiga komoditas tersebut terdapat di Provinsi Maluku Utara *(Tabel 6-39)*.

Tabel 6-37:
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Maluku Tahun 2008-2013, (dalam ton).

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	30417	1021	8028	2841	56872	224052
2009	34088	1071	6314	2231	52719	230885
2010	40235	1611	6889	2127	48417	253493
2011	40235	1358	6627	1996	49784	227639
2012	43818	949	7678	1651	54004	234566
2013	43553	1063	7746	1634	50797	222975

Sumber: BPS, 2013

Tabel 6-38:
Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan di Wilayah Maluku Tahun 2008-2013, (dalam kw/Ha).

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	20,17	10,78	11,73	12,15	86,39	124,29
2009	20,05	10,77	11,74	12,04	86,26	131,03
2010	22,44	10,78	11,76	11,98	86,24	138,76
2011	22,44	10,84	11,62	12,11	86,29	135,26
2012	30,71	10,76	12,00	12,57	94,15	157,64
2013	29,68	10,84	12,86	12,79	93,50	154,34

Sumber: BPS, 2013

Tabel 6-39:
Perkembangan Produksi Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013, (dalam ton).

Provinsi	Produksi (2013)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Maluku	16.932	740	1.863	207	16.078	106.306
Maluku Utara	26.621	323	5.883	1.427	34.719	116.669
MALUKU	**43.553**	**1.063**	**7.746**	**1.634**	**50.797**	**222.975**
NASIONAL	**18.838.529**	**257.129**	**786.868**	**847.157**	**2.594.081**	**23.627.955**

Sumber: BPS, 2013

Tabel 6-40:
Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013, (dalam kw/ha).

Provinsi	Produksi (2013)					
	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Maluku	35,53	10,57	12,8	12,55	95,48	184,05
Maluku Utara	23,83	11,1	12,91	13,02	91,51	124,62
MALUKU	**29,68**	**10,84**	**12,86**	**12,79**	**93,50**	**154,34**
NASIONAL	**48.42**	**11,62**	**14,54**	**14,82**	**151,97**	**216,38**

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Perkebunan

- Komoditas perkebunan terbesar Wilayah Maluku adalah jenis komoditas Kakao, kelapa, dan kopi. Perkembangan produksi ketiga komoditas tersebut *(Tabel 6-42)*, produksi terbesar kelapa berasal dari Provinsi Maluku Utara, sementara untuk kopi berasal dari Provinsi Maluku.

Tabel 6-41:
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Wilayah Maluku Tahun 2007-2011. (ton)

TAHUN	KAKAO	KELAPA	KOPI
2007	17.086	267.489	1.755
2008	19.462	315.947	1.254
2009	8.544*	75.127*	670*
2010	9.688*	87.752*	676*
2011	-	333.138	1.138

Sumber: BPS, 2011
*Keterangan: * produksi hanya Provinsi Maluku, Maluku Utara tidak tersedia Data*
*Keterangan: * Luas areal hanya Provinsi Maluku, Maluku Utara tidak tersedia Data*

Tabel 6-42:
Perkembangan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Wilayah Maluku Tahun 2007-2011. (Ha)

TAHUN	KAKAO	KELAPA	KOPI
2007	58.171	300.684	11.092
2008	51.518	314.998	7.503
2009	24.221*	91.491*	3.648*
2010	25.050*	91.553*	3.648*
2011	-	321.654	7.289

Sumber: BPS, 2011
*Keterangan: * produksi hanya Provinsi Maluku, Maluku Utara tidak tersedia Data*
*Keterangan: * Luas areal hanya Provinsi Maluku, Maluku Utara tidak tersedia Data*

Peternakan:

- Perkembangan populasi jenis ternak besar dari tahun 2010-2011 terus terjadi peningkatan, dengan populasi terbesar adalah babi *(Tabel 6-44)*, kambing, dan sapi potong, dengan jumlah populasi terbesar di Provinsi Maluku.
- Sementara untuk jenis ternak unggas, populasi terbesar adalah jenis ayam buras dan ayam ras pedaging *(Tabel 6-46)*, populasi terbesar untuk ternak unggas terkonsentrasi di Provinsi Maluku.

Tabel 6-43:

Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2010-2013

Tahun	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Potong
2010	214668	20116	228814	29211	12573	83943
2011	247,98	21554	246319	17568	13109	73976
2012	347476	23095	355216	20390	14345	148002
2013	387947	24747	386280	23422	15613	163831

Sumber : BPS, 2013

Tabel 6-44:

Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2013

Provinsi	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Potong
Maluku	330.929	24.747	285.448	23.116	15.557	95.156
Maluku Utara	57.018		100.832	306	56	68.675
MALUKU	**387.947**	**24.747**	**386.280**	**23.422**	**15.613**	**163.831**

Sumber : BPS, 2013

Tabel 6-45:

Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku Tahun 2010-2013

Tahun	Populasi (ekor)			
	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
2010	1089,07	3719,71	27,44	411,99
2011	225,13	3953	65,82	448,47
2012	381,67	4340,69	53,01	506,12
2013	566,84	4848,49	73,97	537,13

Sumber : BPS, 2013

Tabel 6-46:

Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2013

Provinsi	Populasi Unggas (ekor			
	Ayam Buras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
Maluku	139	4.272,87	38,06	484,29
Maluku Utara	428	575,62	35,91	52,84
MALUKU	**567**	**4.848,49**	**73,97**	**537,13**
NASIONAL	**1.355.288**	**290.455,06**	**147.279,35**	**46.312,53**

Sumber : BPS, 2013

Perikanan dan Kelautan:

- Wilayah Maluku merupakan wilayah kepulaian memiliki sumberdaya perikanan yang berlimpah. Produksi perikanan dan kelautan terbesar berasal dari perikanan tangkap laut dan budidaya laut, dan tingkat produksi dari perikanan tersebut mengkat setiap tahun. Sementara produksi perikanan budiya tambak dan kolam memiliki produksi cukup besar meningkat terdiri dai perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- Produksi perikanan tangkap laut dan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi Maluku *(Tabel 6-48)*, sementara untuk budidaya kolam di Maluku Utara.

Tabel 6-47:
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Maluku Tahun 2005 dan 2011, (dalam ton)

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
	Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
2005	588.848	210	1.099	842	290	0	13	0
2006	601.727	89	4.066	158	264	0	12	0
2007	623.603	124	18.613	166	335	17	252	0
2008	458.573	109	38.546	203	357	0	181	0
2009	487.321	37	54.628	698	571	0	163	0
2010	707.028	49	325.071	654	1.385	0	334	0
2011	718.185	10	675.805	1.826	1.982	0	478	0

Sumber: BPS, 2011

Tabel 6-48:
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011, (dalam ton)

Provinsi	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya					
	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
Maluku	567.953	43	610.712	1.741	52	-	-	-
Maluku Utara	150.232	-	65.093	85	1.930	-	478	-
MALUKU	**718.185**	**10**	**675.805**	**1.826**	**1.982**	**-**	**478**	**-**

Sumber: BPS, 2011

6.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH

Infrastruktur Jalan. Perkembangan kondisi jalan di Wilayah Maluku ditunjukan dengan panjang jalan berdasarkan status pembinaannya, rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), dan kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU), dengan kriteria tidak mantap dan mantap.

Infrastruktur Jalan:

- Perkembangan total panjang jalan dalam periode 2008-2010 meningkat sepanjang 2.331 Km, dengan peningkatan tertinggi berasal dari jalan Provinsi yaitu sepanjang 1.894 Km *(Tabel 6-49)*.
- Tingkat kerapatan jalan di wilayah Maluku sebesar 0,16 Km/Km^2, lebih rendah dari kerapatan jalan nasional sebesar 0,25 Km/Km^2. Sementara untuk kerapatan jalan antarprovinsi Provinsi Maluku Utara memiliki tingkat kerapatan jalan lebih tinggi dibanding dengan terhadap Provinsi Maluku *(Gambar 6-6)*.
- Dari sisi kualitas jalan, sebagian besar kondisi kualitas jalan tergolong mantap *(Gambar 6-7)*. Sementara dengan kondisi tidak mantap sebanyak 282 Km yang terdiri dari 69,54 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 30,46 persen Rusak Berat.

Tabel 6-49:
Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Maluku

PROVINSI	PANJANGJALAN (KM)							
	JALAN NASIONAL		JALAN PROVINSI		JALAN KABUPATEN/ KOTA		TOTAL	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
Maluku	985	1.067	998	1.612	4.274	4.537	6.257	7.216
Maluku Utara	458	512	587	1.867	3.281	3.319	4.326	5.698
MALUKU	**1.443**	**1.579**	**1.585**	**3.479**	**7.555**	**7.856**	**10.583**	**12.914**

Sumber: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 6-6:
Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (*Road Density*) AntarProviinsi Di Wilayah Maluku

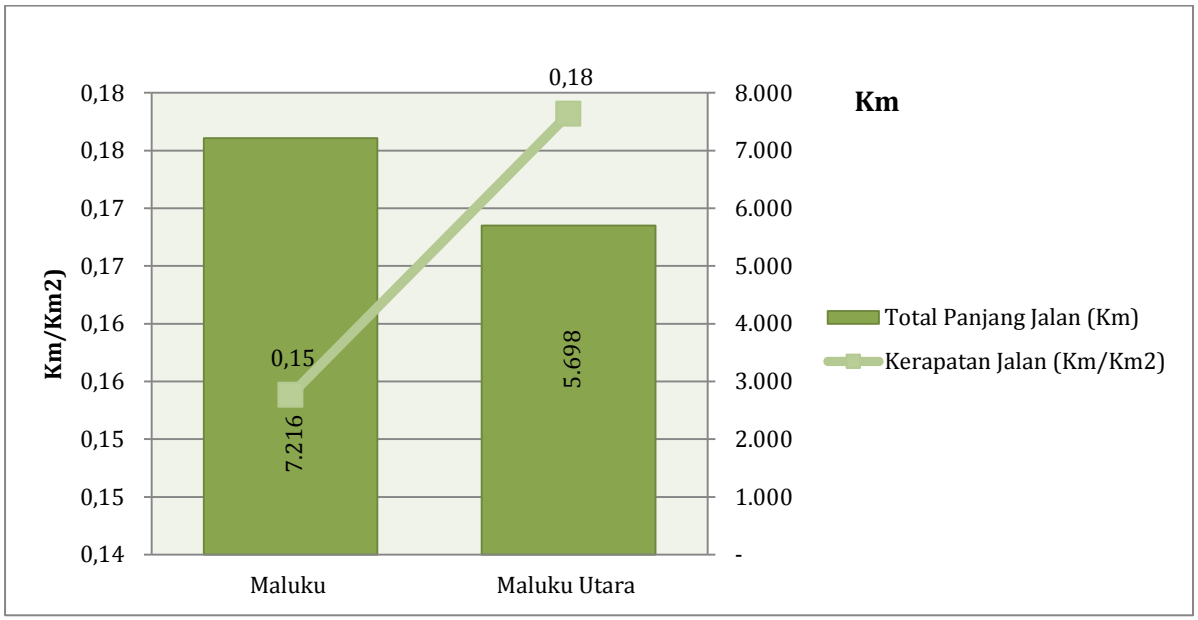

Sumber: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 6-7:
Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Maluku

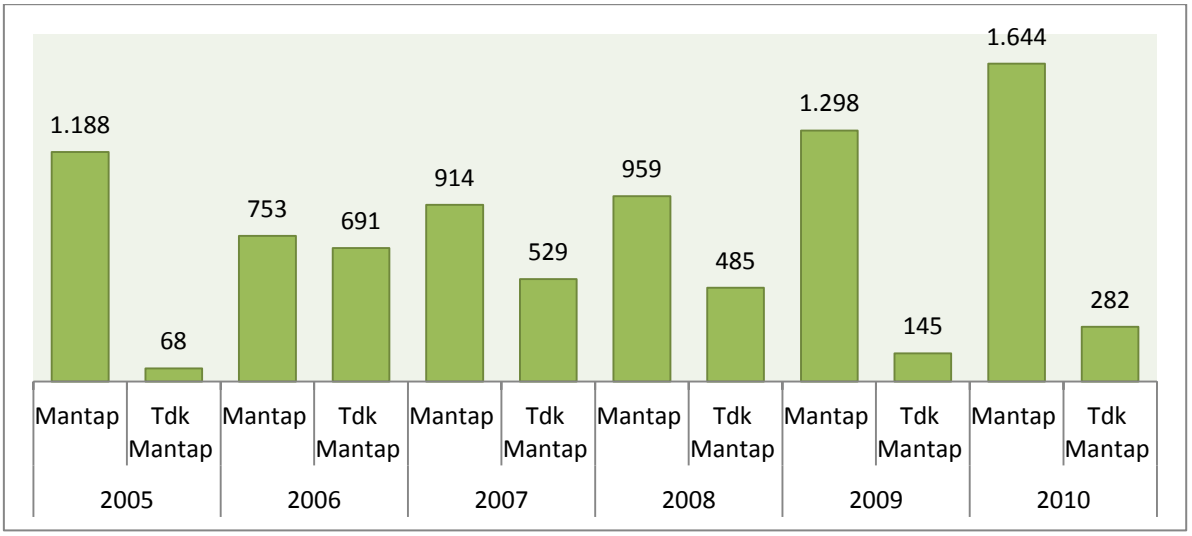

Sumber: DitjenBinaMarga, Kementerian PU

Tabel 6-50:
Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010

PROVINSI	PANJANG JALAN NASIONAL (KM)	KUALITAS JALAN					
		PANJAN JALAN MANTAP		PANJANG JALAN TIDAK MANTAP		KOMPOSISI JALAN TIDAK MANTAP	
		(Km)	%	(Km)	%	% RUSAK RINGAN	% RUSAK BERAT
Maluku	1.319,23	1.098,60	83,28	220,63	16,72	74,60	25,40
Maluku Utara	606,69	545,10	89,85	61,59	10,15	51,42	48,58
MALUKU	**1.925,92**	**1.643,70**	**85,35**	**282,22**	**14,65**	**69,54**	**30,46**
INDONESIA	**38.189,43**	**31.522,09**	**82,54**	**6.667,34**	**17,46**	**48,28**	**51,72**

Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010. DirektoratJenderalBinaMarga (Status 18 Agustus 2010).

Energi Listrik. Perkembangan kondisi listrik di Wilayah Maluku ditunjukan dengan jumlah kapasitas terpasang, jumlah pelanngan listrik, rasio elektrifikasi, dan konsumsi listrik perkapita.

- Kapasitas terpasang energi listrik PLN pada tahun 2011 di wilayah Maluku mencapai 196,69 Mw. Kapasitas terpasang di Provinsi Maluku sebanyak 68,46 persen, dan sisanya di wilayah Maluku Utara. Kedua pembangkit besar tersebut sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) *(Tabel 6-51)*, yakni mencapai 99,95 persen.
- Penggunaan energi untuk pelanggan rumah tangga di setiap satuan PLN/provinsi selama periode 2009-2011 tumbuh sebesar 18 persen di Maluku dan 14 persen di Maluku Utara *(Tabel 6-52)*.
- Perkembangan rasio elektrifikasi dalam periode 2009-2011, peningkatan tertinggi di wilayah Maluku Utara sebesar 7,03 persen, dengan rasio elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Maluku sebesar 61,8 persen *(Tabel 6-52)*.
- Perkembangan konsumsi listrik perkapita di Wilayah Maluku selama periode 2009-2011 meningkat sebesar 32,74 KWh/kapita, dengan konsumsi energi listrik perkapita tertinggi di Provinsi Maluku sebesar*(Tabel 6-52)*.

Tabel 6-51:
Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Maluku Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI	KAPASITAS TERPASANG MENURUT JENIS PEMBANGKIT (MW)					
	PLTD	PLTMG	PLT Surya	PLT Bayu	Jumlah	%
Wilayah Maluku dan Maluku Utara	196,59		0,1		196,69	100,00
Maluku	134,55		0,1		134,65	68,46
Maluku Utara	62,04				62,04	31,54
MALUKU	**196,59**	**0**	**0,1**	**0**	**196,69**	**100,00**
%	**99,95**	**-**	**0,05**	**-**	**100,00**	

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Tabel 6-52:
Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita**.**

SATUAN PLN/ PROVINSI	PELANGGAN RUMAH TANGGA (RT)			RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			KWH JUAL/KAPITA		
	2009	2011	Laju (%)	2009	2011	Δ (11-09)	2009	2011	Δ (11-09)
Maluku dan Maluku Utara	**279.407**	**329.053**	**18**	**56,29**	**58,45**	**2,16**	**182,74**	**205**	**22,26**
MALUKU	182.849	207.846	14	63,37	61,8	-1,57	199,52	213,49	13,97
MALUKU UTARA	96.558	121.207	26	46,45	53,48	7,03	159,69	192,43	32,74

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Telekomunikasi. Perkembangan kondisi telekomunikasi di Wilayah Maluku digambarkan dengan persentase jumlah desa yang memperoleh pelayanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon seluler**.**

- Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting dalam mendukung interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, disamping penggunaan Telpon Kabel juga telah marak digunakan Telepon Seluler hingga sampai di perdesaan. Namun demikian, distribusi infrastruktur telekomunikasi tersebut masih belum merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan Telpon Kabel, atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler.
- Ketersediaan layanan komunikasi untuk telpon kabel dan kemampuan menerima sinyal telpon Seluler antar provinsi masih relatif rendah, layanan telpon kabel baru mencangkau 8,4 persen dari total desa/kelurahan dan 64,7 persen terlayani telpon seluler dengan sinyal lemah-kuat *(Tabel 6-53)*.

Gambar 6-8:
Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS MenurutProvinsi Di Wilayah Maluku

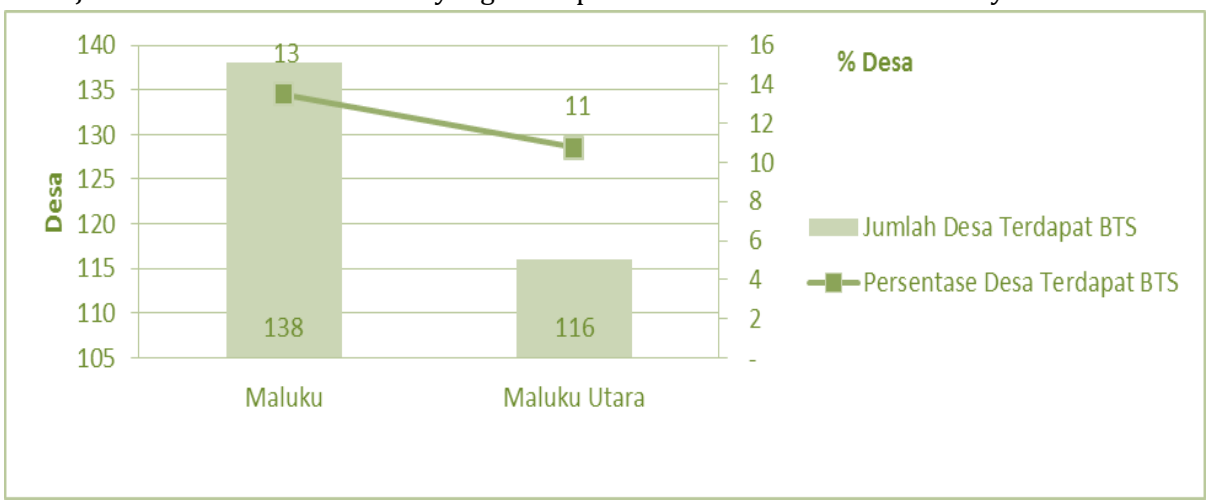

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

Tabel 6-53:
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telepon Seluler

PROVINSI	ADA PELANGGAN TELPON KABEL		PENERIMAAN SINYAL HP						JUMLAH DESA/KEL
			SINYAL LEMAH		SINYAL KUAT		LEMAH - KUAT		
	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	
Maluku	82	8,0	245	23,9	387	37,8	632	61,7	1024
Maluku Utara	95	8,8	322	29,8	406	37,6	728	67,5	1079
MALUKU	**177**	**8,4**	**567**	**27,0**	**793**	**37,7**	**1.360**	**64,7**	**2.103**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS).

Air Bersih. Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Kondisi perkembangan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Wilayah Maluku ditunjukan dengan persentase jumlah desa/kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari PDAM/PAM, air sumur, sungai/danau, air hujan, dan air kemasan.

- Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Perusahaan Air Minum (PAM)/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan lembaga pengolahan air minum hingga saat ini masih sangat terbatas pelayanannya.
- Berdasarkan data PODES 2011, kebutuhan air bersih sebagian besar desa/kelurahan masih mengandalkan air hujan dan sumber dari mata air *(Tabel 6-54)*, pelayanan PAM/PDAM baru baru menjangkau 8 persen dari total desa/kelurahan.
- Tingkat pelayanan penyediaan air bersih antarprovinsi, Provinsi Maluku Utara sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Maluku.

Tabel 6-54:
Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2010.

PROVINSI	PAM/PDAM		POMPALISTRIK/ TANGAN/ SUMUR		MATA AIR		SUNGAI/ DANAU/ KOLAM		AIR HUJAN		AIR KEMASAN / LAINNYA		TOTAL	
	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%	Σ Desa	%
Maluku	51	5	526	51	367	36	32	3	42	4	6	1	1.024	100
Maluku Utara	122	11	650	60	176	16	73	7	52	5	6	1	1.079	100
MALUKU	**173**	**8**	**1176**	**56**	**543**	**26**	**105**	**5**	**94**	**4**	**12**	**1**	**2.103**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan data PODES 2011 (BPS)

6.5. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumberdaya Alam:

- Luas Kawasan Hutan dan perairan di Wilayah Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan 2009 sekitar 7.264.707 hektar atau 5,32 persen dari total luas kawasan hutan dan perairan nasional *(Gambar 6-9)*, dengan proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah Hutan Produksi yang dapat dikonversi (31,73 %) dan hutan lindung (24,91 %).
- Sumberdaya alam lainnya adalah pertambangan dan energi, diantaranya batu bara, gas bumi dan minyak bumi yang cukup berlimpah. Potensi batu bara di wilayah Maluku sekitar 2,13 juta ton, untuk potensi gas bumi, wilayah maluku memiliki potensi gas bumi sebesar 15,22 TSCF *(Trillion Square Cubic Feet)* atau sebesar 14,93 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional.
- Sementara untuk minyak bumi, cadangan minyak bumi di wilayah Maluku mencapai sekitar 37,92 MMSTB (*Million Stock Tank Barrels*/Cadangan Minyak Bumi) atau sebesar 0,51 persen dari cadangan minyak bumi nasional.

Gambar 6-9:
Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Maluku Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009

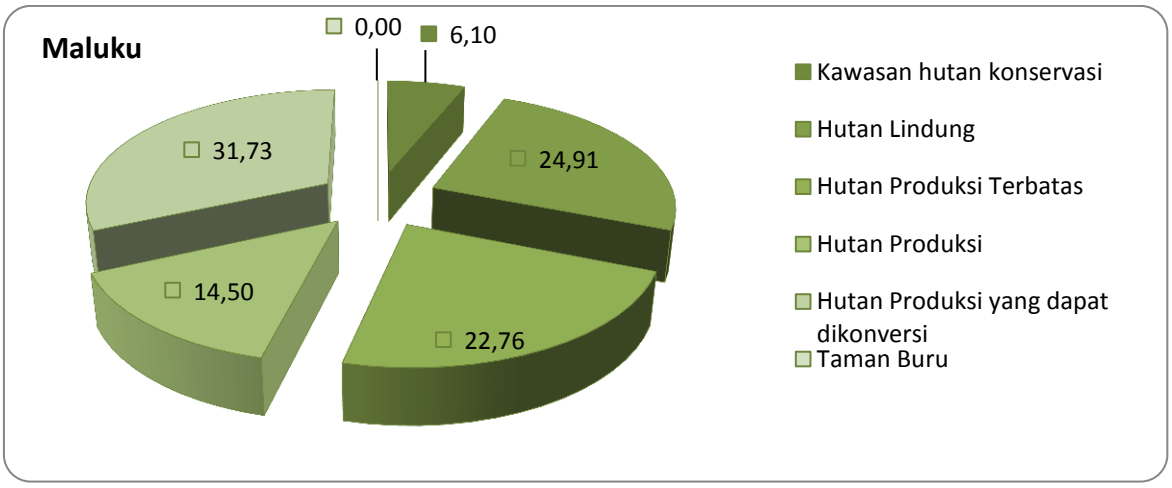

Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Tahun 2009

Tabel 6-55:

Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Maluku

PENGGUNAAN LAHAN HUTAN	MALUKU	MALUKU UTARA	P. MALUKU (HA)
Kawasan Perairan	118.,598	-	118.598
Kawasan Hutan	324.747	-	324.747
Kawasan Suaka Alam + Kawasan Pelestarian Alam (ha)	443.345	-	443.345
Hutan Lindung (ha)	1.809.634	-	1.809.634
Hutan Produksi Terbatas (ha)	1.653.625	-	1.653.625
Hutan Produksi (ha)	1.053.,171	-	1.053.171
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha)	2.304.932	-	2.304.932
Taman Buru (ha)	-	-	-
Jumlah Kawasan Hutan (ha)	7.146.109	-	7.146.109
Jumlah Kawasan Hutan dan Perairan (ha)	7.264.707	-	7.264.707

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan, Tahun 2009

Keterangan:

- *Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006*
- *Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK*

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup digambarkan dari beberapa indikator, antara lain yaitu gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan tingkat kekritisan lahan.

Lingkungan Hidup:

- Gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air, udara, dan tanah di Wilayah Maluku dari tahun 2008-2011 cenderung menurun, dan rata-rata berada di bawah rata-rata nasional.
- Ketersediaan lahan kritis di wilayah Maluku tahun 2010 mencapai 4.425.870,90 hektar atau sekitar 5,39 persen dari total luas lahan kritis di Indonesia, sebagian besar lahan kritis paling luas terdapat di Provinsi Maluku. Kondisi lahan kritis sebagian besar termasuk dalam kategori agak kritis seluas 3.052.440,70 hektar *(Tabel 6-57)*.
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Maluku dengan kondisi rusak pada tahun 1999 sebanyak 35 DAS berkurang menjadi 26 DAS pada tahun 2007, yang sebagian besar tergolong dalam kategori priotitas rendah *(Tabel 6-58)*.
- Provinsi Maluku merupakan provinsi yang paling banyak mengalami bencana longsor. Bencana longsor, tercatat jumlah desa yang mengalami kerusakan akibat bencana longsor sebanyak 82 desa meningkat dibandingkan tahun 2005 (41 desa) *(Gambar 6-10)*.

Tabel 6-56:

Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008, dan 2011.

Provinsi	Air			Tanah			Udara		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
Maluku	3,55	4,08	2,15	0,46	0,11	0,88	1,15	1,1	1,17
Maluku Utara	9,35	4,05	6,12	3,59	1,06	1,02	2,69	1,74	1,11
MALUKU	**6,45**	**4,07**	**4,14**	**2,03**	**0,59**	**0,95**	**1,92**	**1,42**	**1,14**
INDONESIA	**8,3**	**5,57**	**5,4**	**1,47**	**0,77**	**0,83**	**6,24**	**3,95**	**3,78**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistk Potensi Desa Tahun 2005, 2008, dan 2011.

Tabel 6-57:

Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Maluku Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar)

PROVINSI	TINGKAT KEKRITISAN LAHAN			JUMLAH
	AGAK KRITIS	KRITIS	SANGAT KRITIS	
Maluku	1,720,250.50	490,521.30	271,802.60	2,482,574.40
Maluku Utara	1,332,190.20	447,668.70	163,437.60	1,943,296.50
MALUKU	**3,052,440.70**	**938,190.00**	**435,240.20**	**4,425,870.90**
NASIONAL	**52,259,832.90**	**23,955,162.70**	**5,449,299.30**	**82,176,443.64**
% TERHADAP NASIONAL	**5.84**	**3.92**	**7.99**	**5.39**
PROPORSI LAHAN KRITIS (%)	**68.97**	**21.20**	**9.83**	**100.00**

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial 2010

Tabel 6-58:

Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penanganannya di Maluku

PROVINSI	JUMLAH DAS BERDASARKAN				TINGKAT KEPRIORITASANNYA			
	TAHUN 1994/95 - 1998/99				TAHUN 1999/2000 – 2007			
	SUPER PRIORITAS	PRIO-RITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH	SUPER PRIORITAS	PRIO-RITAS	PRIORITAS RENDAH	JUMLAH
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	4	31	35	2	9	15	26
Maluku	**0**	**4**	**31**	**35**	**2**	**9**	**15**	**26**

Sumber: Statistik Kehutanan 2009

Gambar 6-10:

Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2005 dan 2008

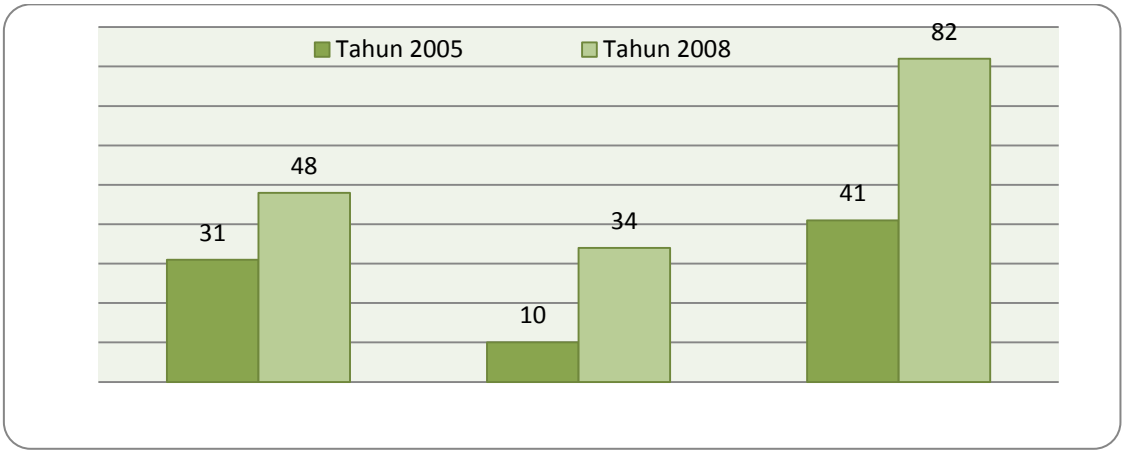

Sumber: BPS, 2011

7.1. ADMINISTRASI WILAYAH

- Secara administrasi Wilayah Papua terdiri dari 2 provinsi, 2 kota, 38 kabupaten, 479 kecamatan dan 4.874 kelurahan/desa, dengan luas wilayah darat sekitar 416.060 Km^2 *(Tabel 7-1).*
- Wilayah Papua memiliki jumlah pulau sekitar 2.515 yang terdiri dari 1.229 pulau yang sudah bernama dan 1.286 pulau yang belum bernama *(Tabel 7-2)*. Penyebaran pulau terbanyak adalah di Provinsi Papua Barat sebanyak 1917 pulau yang terdiri dari 928 pulau sudah bernama dan 989 pulau belum bernama.

Tabel 7-1:

Administrasi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010

PROVINSI	KOTA	KAB	KEC	DESA-KEL	LUAS (KM^2)	PENDUDUK (JIWA)
Papua Barat	1	10	149	1.291	97.024	773.479
Papua	1	28	330	3.583	319.036	2.515.848
JUMLAH	**2**	**38**	**479**	**4.874**	**416.060**	**3.289.327**

Sumber: Ditjen PUM Kemendagri 2010

Tabel 7-2:

Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2009

PROVINSI	LUAS DARATAN *(KM^2)*	PULAU BERNAMA	PULAU BELUM BERNAMA	JUMLAH
Papua Barat	97.024,27	928	989	1917
Papua	319.036,05	301	297	598
PAPUA	**416.060,32**	**1.229,00**	**1.286**	**2.515**

Sumber: DKP, 2009

7.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan. Kondisi umum kependudukan di Wilayah Papua digambarakan berdasarkan angka jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, penduduk menurut jenis kelamin *(sex ratio),* angka ketergantungan *(dependency ratio),* dan komposisi penduduk menurut usia.

- Jumlah penduduk wilayah Papua sebanyak 3,59 juta orang (SP 2010) atau sekitar 1,5 persen dari penduduk Indonesia meningkat sebanyak 1,38 juta dari tahun 2000 *(Tabel 7-3)*, dengan laju pertumbuhan penduduk wilayah Papua dalam 10 tahun terakhir (2000-2010) adalah sebesar 4,6 persen, lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,5 persen.
- Kepadatan penduduk di Wilayah Papua hanya 8,6 jiwa per km^2, dengan kepadatan Papua lebih tingi dibandingkan Papua Barat *(Tabel 7-3)*.
- Hampir 64 persen penduduk Wilayah Papua tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun), dan hanya 1,1 persen adalah penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun) *(Tabel 7-4)*.
- Wilayah Papua memiliki rasio ketergantungan *(dependency ratio*) sebesar 56 persen lebih tinggi di dibandingkan nasional (51,3 persen). Sementara *Sex Ratio* wilayah Papua sebesar 113,22 yang artinya jumlah penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. *Sex Ratio* di Provinsi Papua lebih tinggi dibanding *sex ratio* di Papua Barat *(Gambar 7-1)*.

Tabel 7-3:

Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Papua menurut Provinsi.

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK (RIBU JIWA)		KEPADATAN PENDUDUK (JIWA PER KM2)		LAJU PERTUMBUHAN (%)	
	2000	2010	2000	2010	90-00	00-10
Prov. Papua Barat	529,7	760,4	5,5	7,8		3,71
Prov. Papua	1.684,1	2.833,4	5,3	8,9	3,1	5,39
PAPUA	**2.213,8**	**3.593,8**	**5,3**	**8,6**	**3,1**	**4,6**
NASIONAL	**205.132,5**	**237.641,3**	**107,0**	**124,0**	**1,4**	**1,5**

Sumber: BPS, (Sensus) 2010

Tabel 7-4:

Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Papua menurut Kelompok Usia, Tahun 2010

KELOMPOK USIA	JUMLAH (JIWA)	%
Usia Muda (< 14 tahun)	1.253.778	34,89
Usia Produktif (15-64 tahun)	2.299.677	63,99
Usia Tua (>65 tahun)	40.348	1,12
TOTAL PENDUDUK	**3.593.803**	**100,00**
DEPENDENCY RATIO		**56**

Sumber: BPS, (Sensus) 2010

Gambar 7-1:

Perkembangan Angka Ketergantungan *(Dependency Ratio)* Antarprovinsi di Wilayah Papua, Tahun 2000 dan 2010

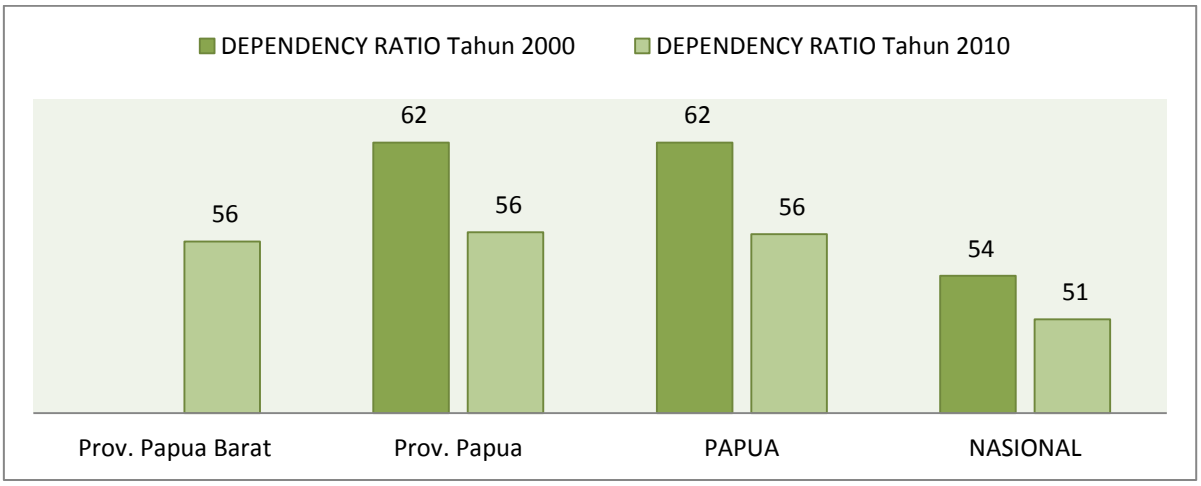

Sumber: Hasil Olahan Data Sensus Penduduk 2010, BPS

Tabel 7-5:

Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Antar Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2010.

PROVINSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	SEX RATIO
Papua Barat	402.398	358.024	760.422	112,39
Papua	1.505.883	1.327.498	2.833.381	113,44
PAPUA	**1.908.281**	**1.685.522**	**3.593.803**	**113,22**
INDONESIA	**119.630.913**	**118.010.413**	**237.641.326**	**101,37**

Sumber: Hasil Olahan Data Sensus Penduduk 2010, BPS

Ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Wilayah Papua secara umum ditunjukan dengan perkembangan indicator utama, yaitu: jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Penduduk Bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan struktur angkatan kerja menurut lapangan usaha dan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.

- Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Wilayah Papua selama periode 2008-2013 menurun *(Tabel 7-10)*, TPT 2013 (februari) sebesar 3,11 persen lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya dan dibawah TPT nasional (5,92 persen).
- Tingkat pendidikan TPT sebagian besar tamatan SD, SMTP dan SMTA Umum/Kejuruan sekitar 90 persen *(Tabel 7-12)*.
- Jumlah penduduk bekerja selama periode 2008-2013 bertambah sebanyak 660 ribu orang, dengan jumlah penduduk bekerja pada 2013 (Februari) sebanyak 2.004 ribu orang, dan lebih dari separuh pencaharian utama tergantung pada sektor pertanian *(Tabel 7-7)*.
- Tingkat pendidikan penduduk bekerja lebih separuhnya merupakan tamatan tamatan SD dan SMTP, sementara tamatan SMTA dan Sarjana (Diploma dan S1) sekitar 30 persen *(Tabel 7-8)*.

Gambar 7-2:

Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Papua Periode 2008-2013

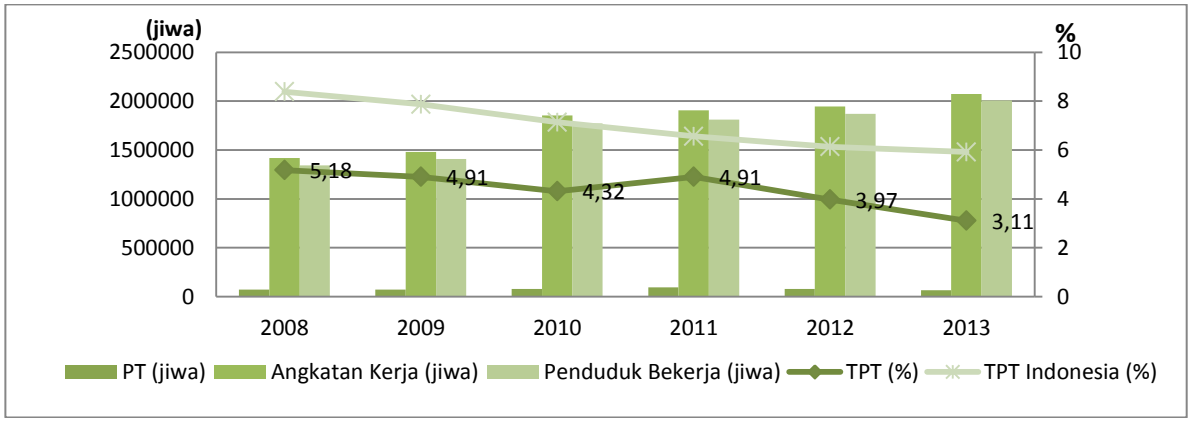

Sumber: Sakernas, Februari 2013, BPS 2013

Tabel 7-6:

Perkembangan Angkatan Kerja menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2008 dan 2013 (Februari).

PROVINSI	2008	2013	Δ 2008-2013	Share Pulau 2013	Share Nasional 2013
	Agust	(Feb)			
Papua Barat	342,38	375,19	32,81	18,13	0,32
Papua	1.075,21	1.693,69	618,48	81,87	1,43
PAPUA	**1.417,60**	**2.068,88**	**651,29**	**100,00**	**1,75**
INDONESIA	**111.947,27**	**121.191,71**	**9.244,45**		**102,66**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013

Tabel 7-7:

Perkembangan Penduduk Bekerja menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2008 dan 2013 (Februari)

PROVINSI	2008	2013	Δ 2008-2013	Share Pulau 2013	Share Nasional 2013
	Agustus	(Feb)			
Papua Barat	316	358	42,24	17,88	0,31
Papua	1.028	1.646	618,02	82,12	1,44
PAPUA	**1.344**	**2.004**	**660**	**100,00**	**1,76**
INDONESIA	**102.553**	**114.021**	**11.468,44**		**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013

Tabel 7-8:

Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2012. (dalam persen)

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/ Akademi	Universitas	
Papua Barat	39,65	21,72	20,86	9,45	2,44	5,88	100,00
Papua	58,57	15,56	15,00	5,18	1,77	3,92	100,00

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Gambar 7-3.

Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Papua menurut Lapangan Usaha, Tahun2012

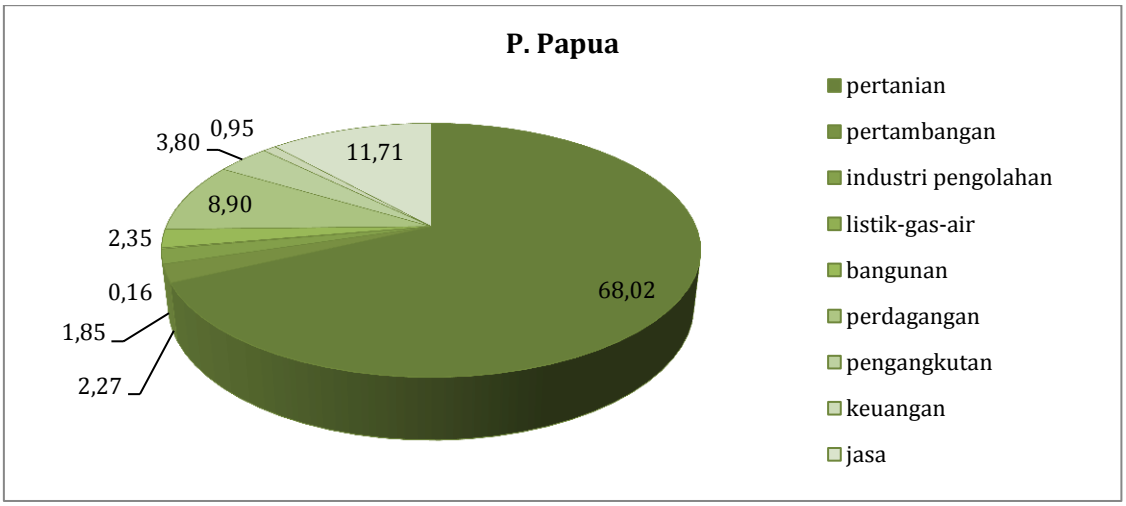

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 7-9:

Distribusi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012

PROVINSI	Lapangan Usaha *)									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Papua Barat	46,52	3,03	5,17	0,26	4,74	15,18	5,73	1,65	17,74	100,00
Papua	72,83	2,10	1,11	0,14	1,81	7,49	3,37	0,79	10,35	100,00
PAPUA	**68,02**	**2,27**	**1,85**	**0,16**	**2,35**	**8,90**	**3,80**	**0,95**	**11,71**	**100,00**
NASIONAL	**35,09**	**1,44**	**13,87**	**0,22**	**6,13**	**20,90**	**4,51**	**2,40**	**15,43**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Keterangan*):

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Tabel 7-10:
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2008 dan 2013 (Februari).

PROVINSI	TPT (%)		Δ 2008-2013	PT (jiwa)		Δ 2008-2013
	2008	2013		2008	2013	
Papua Barat	7,65	4,47	3,18	26.189	16.800	9.389
Papua	4,39	2,81	1,58	47.191	47.700	(509)
PAPUA	**5,18**	**3,11**	**2,07**	**73.380**	**64.500**	**8.880**
INDONESIA	**8,39**	**5,92**	**2,47**	**9.394.515**	**7.170.500**	**2.224.015**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 7-11:
Distribusi Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2013.

PROVINSI	Perkotaan		Pedesaan		Jumlah	Share terhadap Pulau (%)
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%		
Papua Barat	10.709	53,93	9.147	46,07	19.856	25,67
Papua	34.416	59,85	23.085	40,15	57.501	74,33
PAPUA	**45.125**	**58,33**	**32.232**	**41,67**	**77.357**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Tabel 7-12:
Komposisi Persentase Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Antarprovinsi, Februari 2012.

PROVINSI	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/ Akademi	Universitas	
Papua Barat	18,95	12,67	34,48	20,59	2,48	10,84	100,00
Papua	18,77	10,40	36,35	16,95	4,01	13,52	100,00
PAPUA	**18,81**	**10,98**	**35,87**	**17,89**	**3,62**	**12,83**	**100,00**
NASIONAL	**28,09**	**23,48**	**25,29**	**14,37**	**2,72**	**6,05**	**100,00**

Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.

Kesehatan. Perkembangan dari kinerja kesehatan di Wilayah Papua dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama kesehatan, antara lain adalah: Umur Harapan Hidup (UHH), perkembangan Gizi Balita, persentase proses persalinan ditolong tenaga medis, dan persentase balita dengan status tinggi badan pendek (stunting).

- Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) antarprovinsi di wilayah Papua selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan *(Tabel 7-13)*, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional, namun estimasi UHH antarprovinsi d iwilayah Papua masih berada di bawah UHH nasional.
- Perkembangan prevalensi Gizi Buruk dan Kurang antarprovinsi di wilayah Papua antara tahun 2007 dan 2010 menunjukkan perkembangan di Provinsi Papua lebih baik dibanding Papua Barat *(Tabel 7-14)*.
- Kondisi status tinggi badan pendek (*Stunting*)[1], permasalahan status tinggi badan pendek (pendek (*Stunting*) pada balita tahun 2010, menunjukkan perkembangan di Provinsi Papua (28,3%) lebih baik dan berada di bawah stunting nasional (35,6%) *(Gambar 7-4)*, namun sebaliknya pada tahun 2010 Papua Barat telah terjadi peningkatan stunting dibanding tahun 2007.

[1] Indikator Status tinggi badan pendek dan sangat pendek biasanya digabung menjadi satu kategori dan disebut masalah pendek (*Stunting*), muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena *hygiene* dan sanitasi yang kurang baik

Tabel 7-13:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Provinsi di Wilayah Papua
Tahun 2007-2010.

PROVINSI/WILAYAH	2007	2010	Δ (2007-2010)
Papua Barat	69,0	69,8	0,8
Papua	69,3	70,0	0,7
NASIONAL	**70,4**	**70,9**	**0,5**

Sumber: SurveiSosialEkonomiNasional, BPS

Tabel 7-14:
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010.

PROVINSI	2007			2010			Δ (2007-2010)
	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	GIZI BURUK (%)	GIZI KURANG (%)	GIZI BURUK/ KURANG (%)	
Papua Barat	6,8	16,4	23,2	9,1	17,4	26,5	-3,3
Papua	6,6	14,6	21,2	6,3	10	16,3	4,9
INDONESIA	**5,4**	**13**	**18,4**	**4,9**	**13**	**17,9**	**0,5**

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Gambar 7-4:

Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Papua Pada Tahun 2007 dan 2010.

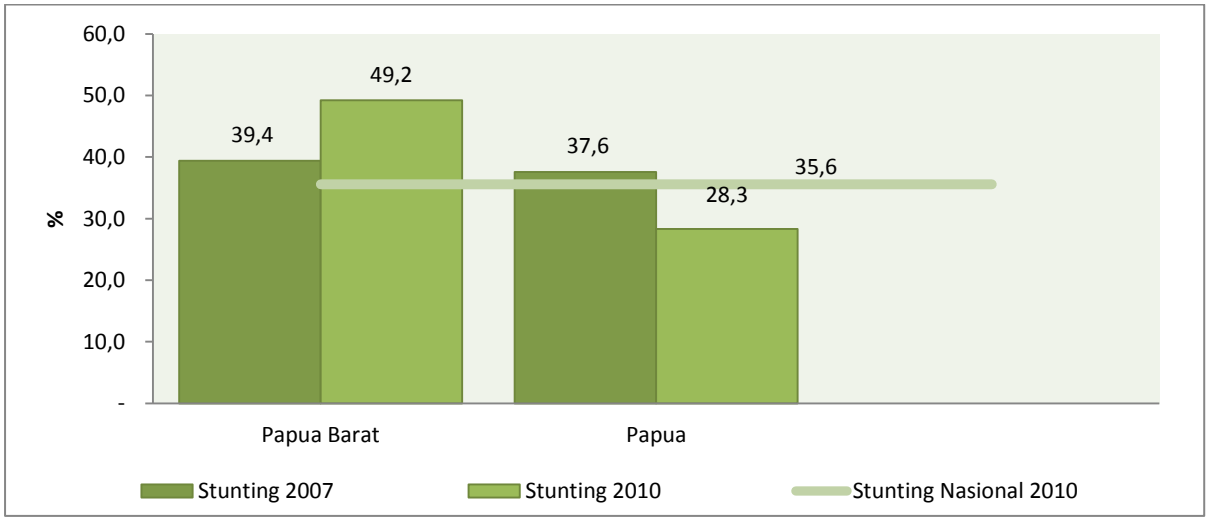

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2010

Tabel 7-15:
Persentase Kelahiran Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun 2011.

PROVINSI	TENAGA MEDIS				TENAGA NON MEDIS		
	DOKTER	BIDAN	TENAGA MEDIS LAINNYA	TOTAL	DUKUN	FAMILI	TOTAL
Papua	11,75	37,74	3,29	52,78	11,76	32,59	44,35
Papua Barat	15,0	48,2	4,2	67,3	22,8	9,1	31,9
INDONESIA	**16,9**	**63,7**	**0,7**	**81,3**	**17,3**	**1,2**	**18,6**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Pendidikan. Perkembangan dari kinerja pendidikan di Wilayah Papua dapat ditunjukan dengan beberapa indikator utama pendidikan, antara lain adalah: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan.

- Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 2009-2012 di Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan dan berada di atas RLS dan AMS Nasional *(Tabel 7-16)*, sementara di Provinsi Papua menunjukkan penurunan pada RLS maupun AMH.
- Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2008-2012, Provinsi Papua Barat menunjukkan perkembangan positif dan pada kelompok usia 16-18 berada di aatas APS nasional sedangkan PROVINSI Papua menunjukkan perkembangan negatif pada semua kelompok Usia. Pada tahun 2012 *(Tabel 7-17)*, Provinsi Papua Barat menunjukkan APS lebih tinggi dibanding Papua diseluruh kelompok usia, dan sudah berada di atas rata-rata nasional pada APS kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Tabel 7-16:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2012.

PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)			ANGKA MELEK HURUF (%)		
	2009	2.012	Δ ('12-'09)	2009	2012	Δ ('12-'09)
Papua Barat	8	9,2	1,2	92,94	94,74	1,8
Papua	6,6	6,1	-0,5	70,29	65,69	-4,6
NASIONAL	**7,7**	**8,1**	**0,4**	**92,58**	**93,25**	**0,67**

Sumber: SUSENAS 2012, BPS

Tabel 7-17:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun 2008 dan 2012.

Provinsi	2008**			2012**			Δ 2008-2012**		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
PAPUA	83,38	78,22	54,13	75,39	69,14	50,60	-7,99	-9,08	-3,53
PAPUA BARAT	93,38	88,55	58,15	95,67	91,98	66,63	2,29	3,43	8,48
INDONESIA	**97,88**	**84,89**	**55,50**	**97,99**	**89,76**	**61,42**	**0,11**	**4,87**	**5,92**

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Kemiskinan. Kondisi umum kemiskinan di Wilayah Papua ditunjukan dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan pola distribusi atau sebaran kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan.

- Kondisi kemiskinan wilayah Papua masih tergolong tinggi dan tertinggi di indonesia, pada tahun 2013 (februari) tercatat penduduk miskin 30,22% di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional (11,37%). Perkembangan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua (31,11%), sementara di Provinsi Papua Barat (28,20% *(Gambar 7-5)*).
- Perkembangan jumlah penduduk miskin di wilayah Papua selama periode 2008-2013 rata-rata meningkat sebesar 262,03 ribu jiwa atau 6,35% lebih tinggi dari persentase nasional (4,05%), dengan sumbangan terbesar berasal dari Provinsi Papua *(Tabel 7-19)*.
- Penyebaran kemiskinan sebagian besar di perdesaan (tahun 2012) *(Tabel 7-20)*, yakni mencapai 95,96 persen, persentase kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua (40,56%)

Gambar 7-5:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua, Tahun 2008-2013.

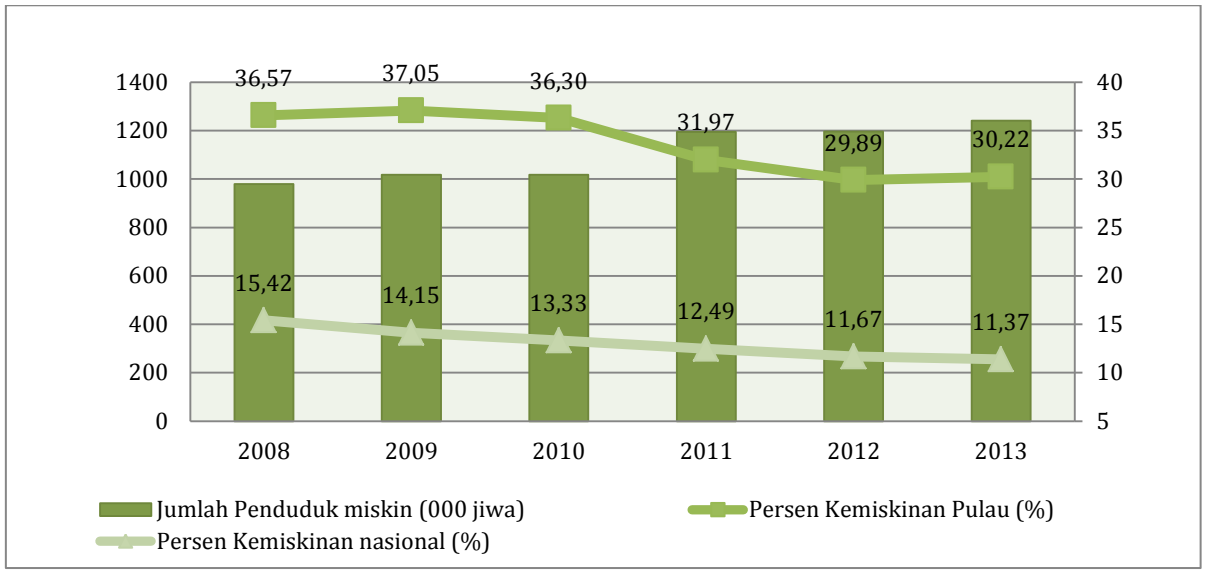

Sumber: BPS, 2013

Tabel 7-18:
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Papua, Tahun 2008-2013.

PROVINSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Papua Barat	35,12	35,71	34,88	31,92	27,04	26,67
Papua	37,08	37,53	36,80	31,98	30,66	31,13
PAPUA	**36,57**	**37,05**	**36,30**	**31,97**	**29,89**	**30,22**
NASIONAL	**15,42**	**14,15**	**13,33**	**12,49**	**11,67**	**11,37**

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Tabel 7-19:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008-2013.

PROVINSI	Jumlah (000 jiwa)			(%)		
	2008	2013	Δ 2008-2013	2008	2013	Δ 2008-2013
Papua Barat	246,50	224,27	22,23	35,12	26,67	8,45
Papua	733,10	1.017,36	-284,26	37,08	31,13	5,95
PAPUA	**979,60**	**1.241,63**	**-262,03**	**36,57**	**30,22**	**6,35**
NASIONAL	**34.963,10**	**28.066,56**	**6.896,54**	**15,42**	**11,37**	**4,05**

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Tabel 7-20:
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)		
	KOTA	DESA	KOTA + DESA	KOTA	DESA	KOTA + DESA
Papua Barat	13,99	216,00	229,99	5,76	37,73	28,20
Papua	34,31	932,28	966,59	4,24	40,56	31,11
PAPUA	**48,30**	**1.148,28**	**1.196,58**	**4,59**	**40,00**	**30,50**
NASIONAL	**10.647,25**	**18.485,20**	**29.132,43**	**8,78**	**15,12**	**11,96**

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia di Wilaya Papua diukur berdasarkan indek pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan perbandingan peringkat masing-masing provinsi terhadap nasional.

- Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia, kedua provinsi di Papua memperlihatkan peningkatan IPM selama periode 2007-2011 walaupun masih lebih rendah dari IPM nasional.
- IPM tahun 2011 di wilayah Papua terutama Provinsi Papua merupakan IPM terendah secara nasional yaitu peringkat ke 33 *(Tabel 7-21)*.

Tabel 7-21:
Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2011.

Provinsi	IPM					Peringkat IPM (PROVINSI)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
PAPUA BARAT	67.28	67.95	68.58	69.15	69.65	30	30	30	29	29
PAPUA	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36	33	33	33	33	33
INDONESIA	**70.59**	**71.17**	**71.76**	**72.27**	**72.77**					

Sumber: BPS 2011

7.3. PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Daerah. Tingkat perkembangan perekonomian daerah Wilayah Papua ditunjukan dengan beberapa indikator utama ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, Struktur ekonomi menurut lapangan usaha dan penggunaan, perkembangan investasi PMA dan PMDN, dan perkembangan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan dan kelautan).

- Pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua tahun 2008-2012 secara umum masih tumbuh positif (6,35%) dan lebih tinggi dari nasional (5,92%), dengan sumbangan terbesar berasal dari Papua Barat (18,62%). Secara sektoral, seluruh sektor tumbuh positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian memiliki laju negative, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa dan sektor bangunan.
- Sektor yang memiliki kontribusi dan peranan besar terhadap perbaikan kinerja perekonomian Provinsi Papua Barat tahun 2011 adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Sementara di Provinsi Papua ditopang oleh sektor bangunan. Sementara untuk kinerja sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Papua menunjukan kinerja yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 7-22:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2012 (Persen)

Provinsi	Tanpa Migas						Dengan Migas					
	2008	2009	2010	2011	2012	08-12	2008	2009	2010	2011	2012	08-12
Papua Barat	9.25	9.18	8.52	10.21	7.41	8.91	7.84	13.87	28.47	27.08	15.84	18.62
Papua	-1.40	22.22	-3.19	-5.32	1.08	2.68	-1.40	22.22	-3.19	-5.32	1.08	2.68
PAPUA	**4.20**	**5.53**	**5.56**	**6.08**	**5.77**	5.43	**6.80**	**7.09**	**6.25**	**5.07**	**6.53**	6.35
NASIONAL	**6.47**	**5.00**	**6.60**	**6.98**	**6.81**	6.37	**6.01**	**4.63**	**6.22**	**6.49**	**6.23**	5.92

Sumber: BPS, 2012

Tabel 7-23:
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2008-2011. (Persen)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	5.45	4.09	4.79	2.91
2. Pertambangan & Penggalian	-11.97	30.18	-16.12	-21.96
3. Industri Pengolahan	5.47	38.43	89.45	55.73
4. Listrik, Gas & Air Bersih	5.53	7.05	6.51	6.55
5. Bangunan	18.48	14.33	18.82	15.40
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	10.24	9.89	8.41	10.47
7. Pengangkutan & Komunikasi	12.90	14.84	12.98	10.26
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	18.90	39.82	6.43	8.86
9. Jasa-Jasa	16.70	16.67	16.62	13.03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**0.78**	**20.11**	**4.43**	**4.03**

Sumber: BPS, 2011

Tabel 7-24:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2011. (Persen).

Lapangan Usaha	Papua Barat	Papua
1. Pertanian	1.56	3.64
2. Pertambangan & Penggalian	6.05	-25.18
3. Industri Pengolahan	64.66	7.64
4. Listrik, Gas & Air Bersih	8.85	5.02
5. Bangunan	12.24	16.52
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	12.11	9.74
7. Pengangkutan & Komunikasi	12.97	9.31
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	11.23	8.27
9. Jasa-Jasa	23.60	8.79

Sumber: BPS, 2011

Struktur Ekonomi:

- Peran sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan masih mendominasi dalam perkembangan perekonomian Wilayah Papua. Peran sektor pertambangan dan penggalian terbesar di Provinsi Papua, sedangkan peran sektor industri pengolahan terbesar di Provinsi Papua Barat *(Tabel 7-27)*.
- Share PDRB Atas Dasar Harga Berlaku wilayah Papua terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2012 sebesar 1,79%, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Papua (1,16%) *(Tabel 7-26)*.

Tabel 7-25:
Perkembangan Nilai PDRB dengan Migas ADHB Per Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012, (juta rupiah).

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
Papua Barat	13,975,126	18,144,493	26,873,087	36,178,780	42,759,938
Papua	61,516,238	76,886,679	87,733,417	76,559,101	77,765,022
PAPUA	**75,491,365**	**95,031,172**	**114,606,504**	**112,737,881**	**120,524,960**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 7-26:
Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Papua dan Nasional Tahun 2012, (dalam persen)

Provinsi	PDRB (Rp. Juta)	Share Terhadap Pulau (%)	Share Terhadap Nasional (%)
Papua Barat	42,759,938.25	35.48	0.64
Papua	77,765,021.92	64.52	1.16
PAPUA	**120524960.17**	**100.00**	**1.79**
PDB NASIONAL (33 PROVINSI)	**6,731,534,512.85**		**100.00**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 7-27:
Struktur Ekonomi PDRB ADHB dengan Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2012, (persen).

PROVINSI	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Papua Barat	12,17	6,48	53,99	0,30	7,33	6,61	4,66	1,90	6,56
Papua	12,58	46,52	1,92	0,18	12,99	6,79	6,47	3,01	9,54
P. PAPUA	**12,43**	**32,31**	**20,39**	**0,22**	**10,98**	**6,73**	**5,83**	**2,62**	**8,48**
NASIONAL	**14,20**	**8,89**	**23,34**	**1,16**	**6,68**	**20,11**	**7,42**	**8,19**	**10,01**

Sumber: BPS, 2012
Keterangan:
1=Pertanian
2= Pertambangan & Penggalian
3= Industri Pengolahan
4= Listrik, Gas & Air
5= Konstruksi
6= Perdagangan, Hotel & Restoran
7= Pengangkutan & Komunikasi
8= Keuangan & Jasa Perusahaan
9= Jasa-Jasa

PDRB Perkapita:

- Secara umum, perkembangan PDRB perkapita provinsi di Wilayah Papua Barat dalam kurun waktu 2008-2012 meningkat *(Tabel 7-28)*, dan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua bahkan berada di atas PDB perkapita nasional.

Tabel 7-28:
PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012, (dalam Ribu Rupiah)

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
Papua Barat	9,009	9,899	12,239	15,077	16,883
Papua	7,397	8,573	7,849	7,090	6,817
33 PROVINSI	**8,540**	**8,827**	**9,220**	**9,702**	**10,177**
INDONESIA (PDB)	**8,990**	**9,281**	**9,703**	**10,225**	**10,721**

*Sumber: BPS, 2012 Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat sementara*

PDRB Menurut Penggunaan

- Dari sisi penggunaan, komponen konsumsi mendominasi dalam pembentukan PDRB di wilayah Papua, juga pada masing-masing provinsi. Selanjutnya disusul oleh komponen PMTB.
- Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua periode tahun 2007-2011 *(Tabel 7-30)*, ditunjukkan dengan rata-rata tertinggi pada perubahan stock yaitu 35,35% dan terendah pada impor barang dan jasa (0,93%).
- Laju pertumbuhan PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah Papua Tahun 2011, ditunjukkan oleh Papua Barat dengan laju pertumbuhan tertinggi pada Ekspor *(Tabel 7-31)*, sedangkan yang terendah pada Ekspor di Papua.

Tabel 7-29:
Distribusi Persentase PDRB menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
Papua Barat	36.33	0.36	15.61	21.92	4.51	51.55	30.29
Papua	54.86	1.56	27.03	36.38	(12.43)	61.66	9.06
PAPUA	**53.33**	**1.55**	**22.67**	**26.24**	**(3.20)**	**44.04**	**44.64**

Sumber: BPS, 2012

Tabel 7-30:
Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan Wilayah Papua
Tahun 2007-2011, (persen)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					RATA-RATA 2007-2011
	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	
Konsumsi Rumah Tangga	10,04	11,73	9,27	7,43	8,25	9,34
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10,89	8,88	23,10	9,74	10,68	12,66
Konsumsi Pemerintah	25,39	12,59	11,63	15,49	5,80	14,18
PMTB	12,83	8,07	7,90	8,75	9,39	9,39
Perubahan Stock	51,80	(3,59)	8,27	119,72	0,55	35,35
Ekspor Barang & Jasa	(4,95)	(7,63)	3,01	1,57	29,59	4,32
Impor Barang & Jasa	(2,70)	6,48	(10,84)	7,92	3,77	0,93

Sumber: BPS, 2011

Tabel 7-31:
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

PROVINSI	KONSUMSI RUMAH TANGGA	KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	KONSUMSI PEMERINTAH	PMTB	PERUBAHAN PERSEDIAAN	EKSPOR	IMPOR
Papua Barat	9.95	7.40	2.39	10.85	7.68	89.28	8.89
Papua	6.55	13.95	9.21	7.92	(6.58)	(30.11)	(1.36)

Sumber: BPS, 2012

Investasi PMA dan PMDN

- Perkembangan investasi PMDN dan PMA Wilayah Papua pada tahun 2012 meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan share terhadap nasional sebesar 0,13%. Sebagian besar nilai realisasi Investasi PMDN dan PMA terbesar di Provinsi Papua.

Tabel 7-32:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012.

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	% Pulau 2012
Papua	17.8	1.8	329.6	1,312.0	1,202.4	97.4
Papua Barat	0.9	1.0	17.2	33.1	32.0	2.6
PAPUA	**18.7**	**2.8**	**346.8**	**1,345.1**	**1,234.5**	**100.0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**0.13**	**0.03**	**2.14**	**0.13**	**0.13**	

Sumber : BKPM, 2012

Tabel 7-33:
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2008-2012.

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	% Pulau 2012
Papua	294.7	41.0	178.0	1,377.9	54.7	54.4
Papua Barat	-	-	51.3	47.2	45.8	45.6
PAPUA	**294.7**	**41.0**	**229.3**	**1,425.0**	**100.5**	**100.0**
SHARE TERHADAP NASIONAL	**1.45**	**0.11**	**0.13**	**0.13**	**0.13**	

Sumber : BKPM, tahun 2011

Perdaggangan Ekspor dan Impor. Perkembangan perdaggangan di Wilayah Papua ditunjukan dengan nilai ekspor dan nilai impor, dan neraca perdagangan antara nilai ekspor terhadap nilai impor.

- Perkembangan Nilai ekspor non migas provinsi di Wilayah Papua dari tahun 2006-2010 terlihat menurun pada tahun 2008 kemudian meningkat hingga akhir 2010. Peranan wilayah Papua terhadap nilai ekspor non migas nasional yakni 4,75 persen *(Tabel 7-34)*, dengan nilai ekspor terbesar berasal dari Provinsi Papua.
- Perkembangan nilai impor non migas Wilayah Papua pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 *(Tabel 7-35)*. Peranan wilayah Papua terhadap impor nasional sangat rendah, yakni sekitar 0,68 persen, dengan nilai impor terbesar berasal dari Provinsi Papua.
- Perkembangan neraca perdagangan luar negeri wilayah Papua tahun 2010 meningkat dibanding tahun sebelumnya dan merupakan neraca perdagangan yang tertinggi selama periode tahun 2006-2010 *(Tabel 7-36)*.

Tabel 7-34:
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010.

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN.(%) 2010	PERAN.(%) 2010
Papua Barat	308,4	382,4	574,7	898,6	1.083,6	17,58	0,84
Papua	3.518,5	3.112,7	2.216	3.857,5	5.081,3	82,42	3,92
PAPUA	**3.826,9**	**3.495,1**	**2.790,7**	**4.756,1**	**6.164,9**	**100,00**	**4,75**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Tabel 7-35:

Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010.

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	PERAN.(%) 2010	PERAN.(%) 2010
Papua Barat	14	8,9	0,4	32	48,8	6,63	0,05
Papua	650	623,3	799,6	566,3	687,6	93,37	0,64
PAPUA	**664**	**632,2**	**800**	**598,3**	**736,4**	**100,00**	**0,68**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan (2011)

Tabel 7-36:

Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2006-2010

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010
Papua Barat	294.4	373.5	574.3	866.6	1.034.8
Papua	2.868.5	2.489.4	1.416.4	3.291.2	4.393.7
PAPUA	**3.162.9**	**2.862.9**	**1.990.7**	**4.157.8**	**5.428.5**

Sumber: BPS, 2010.

Komoditas Unggulan. Perkembangan komoditas unggulan di Wilayah Papua ditunjukan perkembangan jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman perkebunan, jenis aktivitas peternakan, dan perikanan dan kelautan.

Tanaman Pangan :

- Perkembangan produksi dan produktivitas tanaman padi di wilayah Papua tahun 2008-2013 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, dengan produksi 176.057 ton dan produktivitas 39,43 ku/ha pada tahun 2013. Sumbangan produksi yang terbesar yaitu dari Provinsi papua sebesar 147.498 ton *(Tabel 7-37)*.

Tabel 7-37:

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi
Di Wilayah Papua Tahun 2008-2013

Tahun	Produksi	Produktivitas
2008	125.236	34,76
2009	135.496	36,34
2010	136.864	37,32
2011	149.402	37,60
2012	168.277	38,10
2013	176.057	39,43

Sumber: BPS, 2012, Data Tahun 2013 adalah Angka Sementara

Tabel 7-38:

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi menurut Provinsi
di Wilayah Papua Tahun 2013

PROVINSI	PRODUKSI(TON)	PRODUKTIVITAS(KU/HA)
Papua Barat	28.559	40,39
Papua	147.498	38,47

Sumber: BPS, 2013, Data Tahun 2013 adalah Angka Sementara

Tanaman Palawija:

- Perkembangan produksi tanaman palawija di wilayah Papua menunjukkan pada tahun 2013 semua komoditas mengalami penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya, dengan produksi tertinggi pada ubi jalar dan ubi kayu. Sedangkan untuk produktivitas sebagian besar komoditas mengalami peningkatan kecuali pada kacang tanah dan ubi kayu *(Tabel 7-39)*.
- Produksi tanaman palawija terbesar pada tahun 2013 terkonsentrasi di Provinsi Papua, sedangkan tingkat produktivitas untuk tanaman palawija di Wilayah Papua rata-rata masih lebih rendah dari produktivitas tanaman palawija nasional *(Tabel 7-41)*.

Tabel 7-39:

Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Wilayah Papua Tahun 2008-2013, (ton).

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	8866	1526	3829	5723	352436	58172
2009	8372	936	3215	5206	353924	48728
2010	8720	1045	3109	4752	359691	60644
2011	8720	1125	3042	4695	384536	63436
2012	8442	1037	2581	4806	355742	46426
2013	6418	901	2316	3646	314923	40739

Sumber: BPS, 2013

Tabel 7-40:

Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija di Wilayah Papua Tahun 2008-2013, (ku/ha).

Tahun	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
2008	16,70	10,06	10,205	10,80	99,86	114,11
2009	16,79	10,18	10,265	10,77	99,77	115,25
2010	17,12	10,43	10,475	10,77	101,16	112,46
2011	17,12	10,24	10,455	10,84	101,61	115,38
2012	17,54	10,72	10,770	10,92	103,91	118,47
2013	17,91	10,85	10,740	10,94	112,37	116,19

Sumber: BPS, 2013

Tabel 7-41:

Perkembangan Produksi Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013, (ton).

Provinsi	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Papua Barat	1.282	152	365	558	10.474	13.233
Papua	5.136	749	1.951	3.088	304.449	27.506
Papua	**6.418**	**901**	**2.316**	**3.646**	**314.923**	**40.739**
NASIONAL	**18.838.529**	**257.129**	**786.868**	**847.157**	**2.594.081**	**23.627.955**

Sumber: BPS, 2013

Tabel 7-42:

Perkembangan Produktivitas Tanaman Palawija menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013, (ku/ha).

Provinsi	Jagung	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kedelai	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Papua Barat	17,21	11,18	10,83	10,59	108,88	110,18
Papua	18,6	10,51	10,65	11,29	115,85	122,19
PAPUA	**17,91**	**10,85**	**10,74**	**10,94**	**112,37**	**116,19**
NASIONAL	**48.42**	**11,62**	**14,54**	**14,82**	**151,97**	**216,38**

Sumber: BPS, 2013

Tanaman Perkebunan

- Komoditas tanaman perkebunan utama di Wilayah Papua meliputi kelapa sawit dan kelapa. Sentra produksi dan luas areal untuk kelapa sawit terbesar di Provinsi Papua. Sementara untuk produksi kelapa terbesar di Papua Barat, dan luas areal terbesar di Papua *(Tabel 7-43)*.

Tabel 7-43:
Produksi (Ton) dan Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011

PRODUKSI (TON)				
PROVINSI	**KELAPA SAWIT**	**KARET**	**KELAPA**	**KOPI**
Papua Barat	51752	12	17710	258
Papua	86254	1558	12531	1639
PAPUA	**138006**	**1570**	**30241**	**1897**
LUAS AREAL (HA)				
PROVINSI	**KELAPA SAWIT**	**KARET**	**KELAPA**	**KOPI**
Papua Barat	22896	34	18051	1140
Papua	37318	4797	32090	8993
PAPUA	**60214**	**4831**	**50141**	**10133**

Sumber : Deptan, 2011

Peternakan:

- Perkembangan Ternak besar menurut jenis ternak di Wilayah PapuaTahun 2010-2013 di dominasi oleh sapi potong, babi dan kambing *(Tabel 7-44)*.
- Penyebaran populasi untuk ternak sapi potong, babi dan kambing pada tahun 2013 terbesar terdapat di Provinsi Papua *(Tabel 7-45)*.
- Sementara untuk populasi ternak unggas di Wilayah Papua terbesar adalah jenis ayam buras dan ayam ras pedaging. Sebaran populasi ayam buras dan ayam ras pedaging terbesar terdapat di Provinsi Papua *(Tabel 7-47)*.

Tabel 7-44:
Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Papua Tahun 2010-2013

Tahun	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Potong
2010	214668	20116	228814	29211	12573	83943
2011	247,98	21554	246319	17568	13109	73976
2012	347476	23095	355216	20390	14345	148002
2013	387947	24747	386280	23422	15613	163831

Sumber : BPS, 2013

Tabel 7-45:
Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010-2013

Provinsi	Babi	Domba	Kambing	Kerbau	Kuda	Sapi Potong
Papua Barat	97.583,00		23.892,00	1	6	62.683,00
Papua	588.086,00	18	34.631,00	1.577,00	1.460,00	92.837,00
P. PAPUA	**685.669,00**	**18**	**58.523**	**1.578**	**1.466**	**155.520**

Sumber: BPS, 2013

Tabel 7-46:

Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Papua Tahun 2010-2013

Tahun	Populasi (ekor)			
	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
2010	3319,38	2666,76	179,87	102,2
2011	2896,68	2752872	154,03	101,39
2012	3118,71	3057,33	152,74	108,12
2013	3226,74	3374,38	166,61	119,83

Sumber : BPS, 2011

Tabel 7-47:

Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2013

Provinsi	Populasi Unggas (ekor			
	Ayam Buras Pedaging	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik
Papua Barat	646	1.411	52,49	32,22
Papua	2.581	1.963	114,12	87,61
Papua	**3.227**	**3.374**	**166,61**	**120**
Nasional	**1.355.288**	**290.455,06**	**147.279,35**	**46.312,53**

Sumber : BPS, tahun 2013

Perikanan dan Kelautan

- Tingkat perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2011 di Wilayah Papua rata-rata meningkat, kecuali untuk budidaya sawah dan jaring apung *(Tabel 7-48)*.
- Produksi perikanan tangkap terbesar di wilayah Papua yaitu jenis perikanan tangkap laut dan produksi untuk perikanan budidaya terbesar yaitu budidaya laut *(Tabel 7-49)*.
- Produksi perikanan tangkap laut tahun 2011 terbesar terdapat Provinsi Papua dan perikanan budidaya laut di Papua Barat *(Tabel 7-49)*.

Tabel 7-48:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Papua
Tahun 2005 dan 2011, (dalam ton)

Tahun	Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
	Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
2005	315.360	6.725	3.467	380	1.240	251	0	0
2006	318.901	6.876	77	2.921	4.325	510	0	0
2007	325.602	6.927	801	574	1.284	349	0	0
2008	325.007	7.312	5.519	881	1.916	266	0	21
2009	334.254	7.516	13.014	993	2.351	131	0	0
2010	380.121	7.771	20.837	817	2.059	235	11	128
2011	386.312	7.871	26.456	2.114	5.133	447	0	5

Sumber: BPS, 2011

Tabel 7-49:
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Papua
Tahun 2011, (dalam ton)

Provinsi	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya					
	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Sawah
Papua Barat	117.053	43	26.280	1.164	2.335	234	-	5
Papua	269.259	7.625	176	950	2.798	213	-	-
P. PAPUA	**386.312**	**7.871**	**26.456**	**2.114**	**5.133**	**447**	**-**	**5**

Sumber: BPS, 2011

7.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH

Infrastruktur Jalan. Perkembangan kondisi jalan di Wilayah Papua ditunjukan dengan panjang jalan berdasarkan status pembinaannya, rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*), dan kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*, Departemen PU), dengan kriteria tidak mantap dan mantap.

- Panjang jalan berdasarkan status pembinaannya pada tahun 2010 di wilayah Papua, meliputi jalan Nasional 3.074 km, Jalan Provinsi 3.179 km, dan Jalan Kabupaten/kota 17.583 km. Jalan terpanjang di Provinsi Papua yang meliputi 69 persen. Perkembangan total panjang jalan dalam periode 2008-2010 meningkat 10.542 Km, dengan peningkatan tertinggi di jalan Provinsi yaitu 8.465 Km *(Tabel 7-50)*.
- Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*) pada tahun 2010, kerapatan jalan di wilayah Papua (0,06 Km/Km^2) lebih rendah dari nasional (0,25 Km/Km^2). Kerapatan jalan tertinggi di Provinsi Papua Barat dan terrendah di provinsi Papua *(Gambar 7-6)*.
- Kondisi kualitas jalan tidak mantap menurut kriteria IRI *(International Roughness Index*, Departemen PU, Agustus 2010) di wilayah Papua cenderung tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 2.920,30 Km sebanyak 1.394 Km kondisinya Tidak Mantap. Jalan Tidak Mantap tersebut sebesar 37,75 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 62,25 persen Rusak Berat *(Tabel 7-51)*.
- Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, jalan Tidak Mantap tertinggi untuk persentase rusak berat di Provinsi Papua Barat, sementara jalan Tidak Mantap tertinggi untuk persentase rusak ringan di Provinsi Papua.

Tabel 7-50:
Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah Papua

PROVINSI	PANJANG JALAN (KM)							
	JALAN NASIONAL		JALAN PROVINSI		JALAN KABUPATEN/ KOTA		TOTAL	
	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
Papua Barat	508	963	754	1.306	3.521	5.032	4.783	7.301
Papua	1.795	2.111	1.119	1.873	5.597	12.551	8.511	16.535
PAPUA	**2.303**	**3.074**	**1.873**	**3.179**	**9.118**	**17.583**	**13.294**	**23.836**

Sumber: DitjenBinaMarga, Kementerian PU

Gambar 7-6:

Total Panjang Jalan dan kerapatan Jalan (*Road Density*) AntarProviinsi Di Wilayah Papua

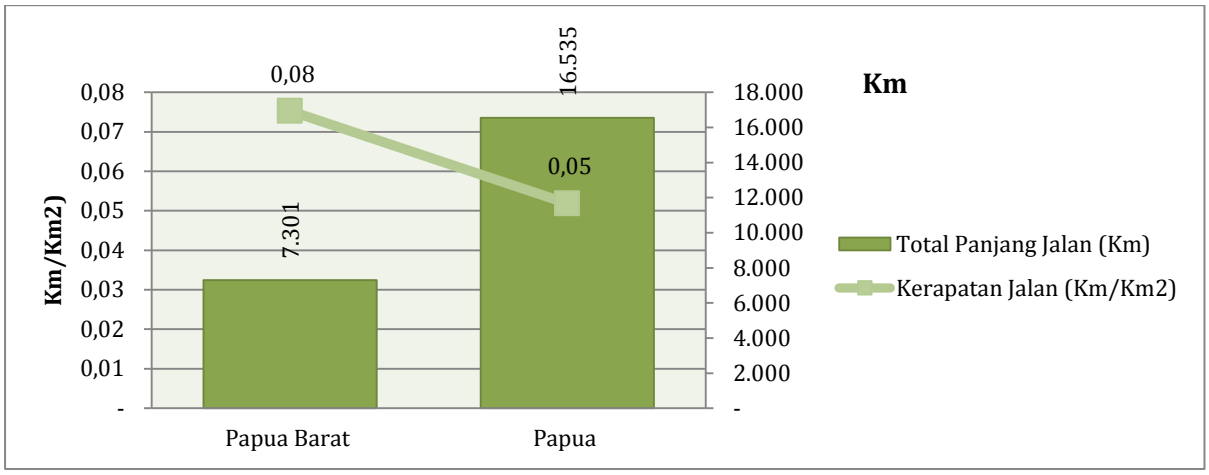

Sumber: Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Gambar 7-7:

Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Papua

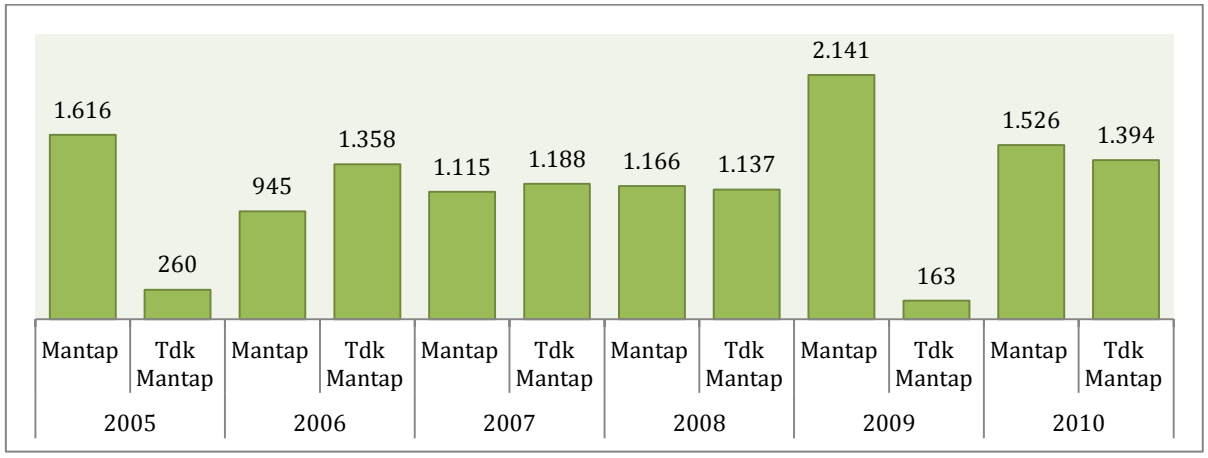

Sumber: DitjenBinaMarga, Kementerian PU

Tabel 7-51:

Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010

PROVINSI	PANJANG JALAN NASIONAL (KM)	KUALITAS JALAN					
		PANJANG JALAN MANTAP		PANJANG JALAN TIDAK MANTAP		KOMPOSISI JALAN TIDAK MANTAP	
		(KM)	%	(KM)	%	% RUSAK RINGAN	% RUSA KBERAT
Papua	1.957,07	991,58	50,67	965,49	49,33	47,57	52,43
Papua Barat	963,23	534,55	55,50	428,68	44,50	15,64	84,37
PAPUA	**2.920,30**	**1.526,13**	**52,26**	**1.394,17**	**47,74**	**37,75**	**62,25**
INDONESIA	**38.189,43**	**31.522,09**	**82,54**	**6.667,34**	**17,46**	**48,28**	**51,72**

Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness TahunAnggaran 2010. DirektoratJenderalBinaMarga (Status 18 Agustus 2010)

Energi Listrik. Perkembangan kondisi listrik di Wilayah Papua ditunjukan dengan jumlah kapasitas terpasang, jumlah pelanngan listrik, rasio elektrifikasi, dan konsumsi listrik perkapita.

- Kapasitas terpasang energy listrik PLN pada tahun 2011 di wilayah Papua mencapai 147,31 Mw, sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 97,26 persen, dan kapasitas terpasang tertinggi terdapat di Provinsi Papua *(Tabel 7-52)*.
- Penggunaan jumlah pelanggan rumah tangga periode 2009-2011 meningkat sebesar 27 persen. Rasio elektrifikasi tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Papua Barat. Perkembangan rasio elektrifikasi di wilayah Papua dalam periode 2009-2011, meningkat sebesar 8,89 persen *(Tabel 7-53)*.
- Konsumsi energi listrik perkapita pada tahun 2011, tertinggi di Papua Barat dan perkembangan konsumsi listrik selama periode 2009-2011 di wilayah Papua, menurun sebesar 14,32 kWh/kapita *(Tabel 7-53)*.

Tabel 7-52:
Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Papua Tahun 2011

SATUAN PLN/PROVINSI	KAPASITAS TERPASANG MENURUT JENIS PEMBANGKIT (MW)			
	PLTA	PLTD	Jumlah	%
Wilayah Papua	4,04	143,27	147,31	100,00
Papua	2,04	89,6	91,64	62,21
Papua Barat	2	53,67	55,67	37,79
PAPUA	**4,04**	**143,27**	**147,31**	**100,00**
%	**2,74**	**97,26**	**100,00**	

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN 2012

Tabel 7-53:
Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita.

SATUAN PLN/PROVINSI	PELANGGAN RUMAH TANGGA (RT)			RASIO ELEKTRIFIKASI (%)			KWH JUAL/KAPITA		
	2009	2011	LAJU (%)	2009	2011	Δ (11-09)	2009	2011	Δ (11-09)
Wilayah Papua	187.598	238.473	27	27,9	36,79	8,89	232,79	218,47	-14,32
- Papua		148.631			30,79			174,25	
- Papua Barat		89.842			54,29			386,54	

Sumber: HasilPengolahan data PT. PLN, 2012.

Telekomunikasi. Perkembangan kondisi telekomunikasi di Wilayah Papua digambarkan dengan persentase jumlah desa yang memperoleh pelayanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon seluler**.**

- Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi untuk kemudahan akses komunikasi diindikasikan dengan adanya *Base Transceiver Station* (BTS). Jumlah desa yang terdapat BTS atau manara telepon seluler terbanyak di provinsi Papua, sedangkan persentase terbanyak di Papua Barat *(Gambar 7-8)*.
- Keberadaan telepon kabel di Wilayah Papua kurang dari 3% dari total desa, dengan persentase tertinggi di Papua Barat. Penerimaan sinyal HP di Wilayah Papua dari total desa adalah 10,2% sinyal lemah, 18,8% sinyal kuat *(Tabel 7-54)*, dan 29,0% sinyal lemah-kuat, dengan penerimaan sinyal HP tertinggi yaitu di Provinsi Papua Barat.

Gambar 7-8:

Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS MenurutProvinsi Di Wilayah Papua

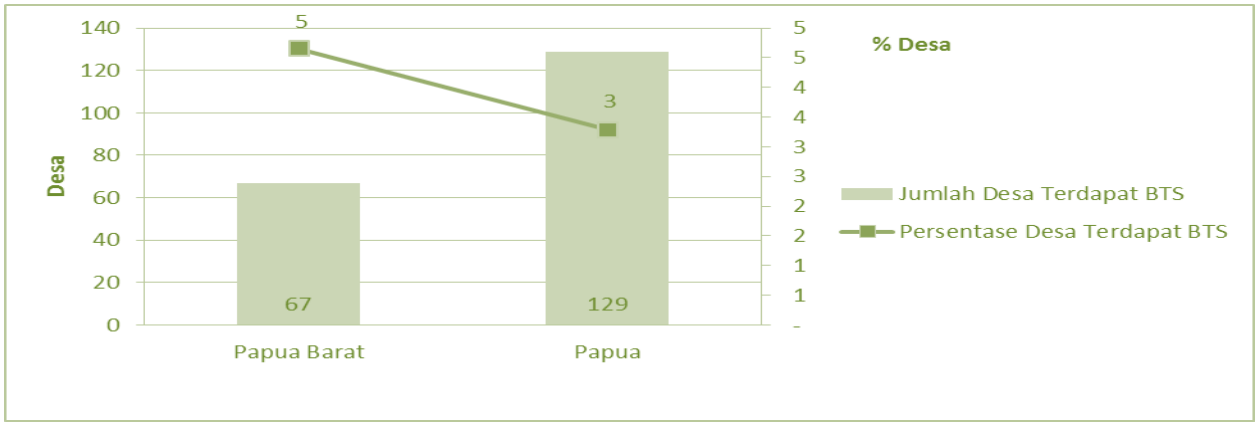

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)

Tabel 7-54:

Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon Kabel dan Penerimaan Sinyal Telpon Seluler

PROVINSI	ADA PELANGGAN TELPON KABEL		PENERIMAAN SINYAL HP						JUMLAH DESA/KEL
			SINYAL LEMAH		SINYAL KUAT		LEMAH - KUAT		
	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	
Papua Barat	60	4,2	206	14,3	301	20,9	507	35,2	1439
Papua	88	2,2	342	8,7	705	18,0	1047	26,7	3924
PAPUA	**148**	**2,8**	**548**	**10,2**	**1.006**	**18,8**	**1.554**	**29,0**	**5.363**
INDONESIA	**21.488**	**27,3**	**17.272**	**22,0**	**53.338**	**67,9**	**70.637**	**89,9**	**78.609**

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS).

Air Bersih. Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Kondisi perkembangan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Wilayah Papua ditunjukan dengan persentase jumlah desa/kelurahan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari PDAM/PAM, air sumur, sungai/danau, air hujan, dan air kemasan.

- Ketersediaan infrastruktur air bersih yang bersumber dari PAM/PDAM di wilayah Papua hanya baru menjangkau 3 persen dari total desa/kelurahan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Sebagian besar masyarakat (51%) di wilayah Papua tergantung pada mata air. Kondisi yang paling memprihatinkan dalam memperoleh air bersih adalah bagi masyarakat yang tergantung terhadap air hujan yang lebih banyak terdapat di Provinsi Papua Barat (15%) *(Tabel 7-55)*.

Tabel 7-55:

Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2010.

PROVINSI	PAM/PDAM		POMPALISTRIK/ TANGAN/ SUMUR		MATA AIR		SUNGAI/ DANAU/ KOLAM		AIR HUJAN		AIR KEMASAN / LAINNYA		TOTAL	
	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%	∑ DESA	%
Papua Barat	38	3	356	25	420	29	392	27	210	15	23	2	1.439	100
Papua	101	3	564	14	2289	58	475	12	452	12	43	1	3.924	100
PAPUA	**139**	**3**	**920**	**17**	**2709**	**51**	**867**	**16**	**662**	**12**	**66**	**1**	**5.363**	**100**

Sumber: HasilPengolahan data PODES 2011 (BPS)

7.5. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumberdaya Alam:

- Proporsi terbesar dari luas kawasan hutan di Wilayah Papua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 yaitu pada hutan lindung, sedangkan yang terkecil pada taman buru (0%) *(Gambar 7-9)*.
- Luas kawasan hutan dan perairan di Wilayah Papua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan tahun 2009 sekitar 42.224.840 hektar atau 30,90 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan lindung (26,75 %) dan Hutan Produksi (25,22%), dengan penyebaran luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi Papua *(Tabel 7-56)*.

Gambar 7-9:

Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Papua Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009.

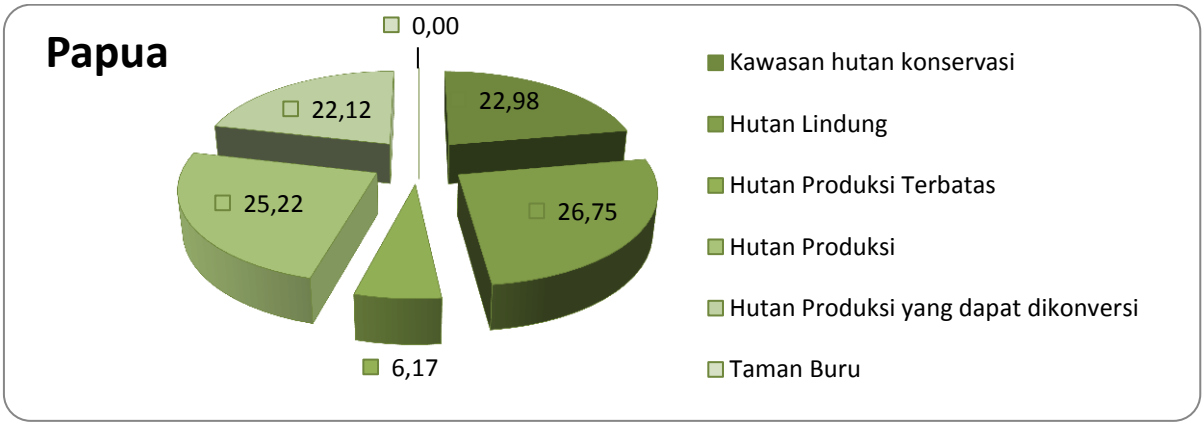

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan 2009

Tabel 7-56:

Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Papua.

PROVINSI	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA (HA)	PAPUA [1] (%)
Kawasan Perairan	1.678.480	-	1.678.480	59,87
Kawasan Hutan	8.025.820	-	8.025.820	40,86
Kawasan Suaka Alam + Kawasan Pelestarian Alam (ha)	9.704.300	-	9.704.300	41,27
Hutan Lindung (ha)	11.296.306,5	-	11.296.306,5	35,80
Hutan Produksi Terbatas (ha)	2.605.675,71	-	2.605.675,71	11,62
Hutan Produksi (ha)	10.650.145,5	-	10.650.145,5	28,98
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha)	9.341.784,99	-	9.341.784,99	41,19
Taman Buru (ha)	-	-	-	-
Jumlah Kawasan Hutan (ha)	40.546.360	-	40.546.360	30,29
Jumlah Kawasan Hutan dan Perairan (ha)	42.224.840	-	42.224.840	30,90

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan 2009

Keterangan:

- [1]= Persen terhadap nasional; [2] =Luas Kawasan alam +Pelestarian Alam tidak diketahui perinciannya
- [3]= Belum ada SK Penunjukan dan data masih berdasarkan TGHK
- Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra *orthorectified* dan SRTM serta *ground check*
- Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006
- Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK

Lingkungan Hidup. Kondisi lingkungan hidup digambarkan dari beberapa indikator, antara lain yaitu gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran (air, udara, dan tanah), tingkat kerusakan hutan dan lahan, pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan, dan tingkat kekritisan lahan.

- Persentase desa/kelurahan yang mengalami gangguan lingkungan hidup akibat pencemaran air, tanah, dan udara terbesar terdapat di Provinsi Papua Barat *(Tabel 7-57)*.
- Luas lahan kritis di wilayah Papua tahun 2010 mencapai 8.342.936,20 hektar atau sekitar 10,15 persen dari luas lahan kritis nasional, dengan kategori sangat kritis sebagian besar di Provinsi Papua Barat, untuk kategori kritis dan agak kritis dengan sebaran paling luas di Provinsi Papua *(Tabel 7-58)*.

Tabel 7-57:
Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005, 2008, dan 2011.

Provinsi	Air			Tanah			Udara		
	2005	2008	2011	2005	2008	2011	2005	2008	2011
Papua Barat	-	1,91	1,32	-	0,58	0,14	-	0,66	0,35
Papua	2,4	1,45	1,45	0,42	0,15	0,36	0,36	0,27	0,41
PAPUA	**2,40**	**1,68**	**1,39**	**0,42**	**0,37**	**0,25**	**0,36**	**0,47**	**0,38**
INDONESIA	**8,3**	**5,57**	**5,4**	**1,47**	**0,77**	**0,83**	**6,24**	**3,95**	**3,78**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa Tahun 2005 & 2008

Tabel 7-58:
Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Papua Menurut Provinsi Tahun 2010. (dalam hektar).

PROVINSI	TINGKAT KEKRITISAN LAHAN			JUMLAH
	AGAK KRITIS(HA)	KRITIS(HA)	SANGAT KRITIS(HA)	(ha)
Papua Barat	2,698,576.20	500,611.90	203,551.70	3,402,739.80
Papua	3,869,434.60	968,389.10	102,372.70	4,940,196.40
PAPUA	**6,568,010.80**	**1,469,001.00**	**305,924.40**	**8,342,936.20**
NASIONAL	**52,259,832.90**	**23,955,162.70**	**5,449,299.30**	**82,176,443.64**
% TERHADAP NASIONAL	**12.57**	**6.13**	**5.61**	**10.15**
PROPORSI LAHAN KRITIS (%)	**78.73**	**17.61**	**3.67**	**100.00**

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial 2010